

Pertumbuhan Ekonomi AS Q2-2026 Melambat 1,5%, Konsumsi Tetap Kuat

Jumat, 31 Juli 2026 06:50 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116786/pertumbuhan-ekonomi-as-q2-2026-melambat-1-5-konsumsi-tetap-kuat/2>

Bloomberg, Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) melambat pada kuartal kedua, meski meningkatkan belanja konsumen serta investasi bisnis yang solid menandakan adanya kekuatan fundamental di bawahnya.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan inflasi tumbuh 1,5% secara tahunan (annualized) pada periode tiga bulan hingga Juni, menurut estimasi awal yang dirilis Biro Analisis Ekonomi (BEA) pada hari Kamis (30/7). Angka ini menandai perlambatan dibandingkan awal tahun, yang sebagian dipicu oleh lonjakan nilai impor.

Belanja konsumen, yang menyumbang sekitar dua pertiga dari total aktivitas ekonomi, naik 3,2%—lebih kuat dari perkiraan. Sementara itu, investasi bisnis terus melesat di tengah maraknya investasi pada teknologi kecerdasan buatan (AI).

Indikator permintaan mendasar yang lebih spesifik, yakni penjualan akhir ke pembeli domestik swasta, melonjak 3,9% pada kuartal kedua—lebih dari dua kali lipat kecepatan kuartal pertama sekaligus mencatatkan laju terkuat sejak awal 2023. Indikator ini mengabaikan ekspor bersih, persediaan barang (inventories), dan pengeluaran pemerintah.

Data-data tersebut menyoroti ketahanan ekonomi AS yang sejauh ini mampu bertahan dari kejatuhan akibat perang Iran. Meskipun konflik telah mendorong kenaikan harga dan menekan sentimen pasar, penurunan harga bensin di akhir kuartal bersamaan dengan pengembalian pajak (tax refund) yang lebih tinggi dari biasanya serta maraknya promosi penjualan berhasil menopang belanja rumah tangga.

Data terpisah yang dirilis Kamis menunjukkan belanja konsumen yang disesuaikan dengan inflasi naik secara solid sebesar 0,4% pada bulan Juni, menyamai capaian terkuat sejak Juli 2025. Indikator inflasi favorit Federal Reserve—yakni indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE)—turun 0,1% bulan lalu. Di luar sektor pangan dan energi, indikator inti tersebut naik lebih rendah dari yang diproyeksikan.

Investasi bisnis tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan pada kuartal kedua. Gelombang investasi AI skala besar terus memainkan peran krusial, berdampingan dengan kuatnya permintaan akan peralatan industri dan transportasi.

Setelah The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada hari Rabu, Gubernur Kevin Warsh menggambarkan ketahanan ekonomi saat ini sebagai sesuatu yang "mengesankan", namun mencatat bahwa aspek yang "paling menonjol" adalah kekuatan pada investasi bisnis.

Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa termasuk Meta Platforms Inc dan Microsoft Corp secara agresif terus membangun pusat data (data center) serta berinvestasi pada AI, terlepas dari kekhawatiran para investor mengenai apakah investasi besar tersebut akan membuahkan hasil.

Detail mendasar dari laporan ini "jauh lebih kuat dari perkiraan," kata Stephen Stanley, Chief US Economist di Santander US Capital Markets LLC. "Saya tidak akan mengatakan ekonomi melaju di seluruh lini, tetapi pertumbuhan ini jelas didorong oleh lebih dari sekadar demam AI."

Ekspor bersih mengikis satu poin persentase dari kalkulasi PDB pada kuartal kedua. Hal tersebut kemungkinan mencerminkan kombinasi dari berbagai faktor, termasuk upaya mempercepat masuknya barang ke dalam negeri sebelum gelombang tarif baru diberlakukan, serta pesatnya laju investasi modal.

Penurunan persediaan barang (inventories) turut mengikis 0,67 poin persentase tambahan dari PDB, mengindikasikan bahwa banyak pelaku usaha yang memilih menghabiskan stok barang mereka selama perang berlangsung.

Kekuatan Konsumen

Kekuatan dalam pengeluaran rumah tangga didorong oleh belanja barang tahan lama seperti perabotan dan kendaraan bermotor. Di sektor jasa, konsumen meningkatkan pengeluaran pada kategori diskresioner seperti rekreasi, layanan makanan, serta akomodasi. Pada bulan Juni, pengeluaran untuk olahraga tontonan melonjak 23,4%, yang kemungkinan mencerminkan besarnya permintaan untuk Piala Dunia FIFA.

Laporan BEA menunjukkan investasi tetap non-residensial naik pada tingkat 8,4%. Investasi dalam peralatan industri melonjak paling tinggi sejak 2011, sementara pengeluaran untuk peralatan transportasi mencatatkan kenaikan tertinggi dalam dua tahun. Pengeluaran untuk perangkat lunak dan peralatan pemrosesan informasi juga tumbuh kuat, meski dengan laju yang sedikit melambat.

Pengeluaran pemerintah federal mengalami penurunan, yang mencerminkan penjualan minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis (SPR), menurut laporan tersebut. Namun, karena penjualan minyak tersebut tercatat dalam komponen PDB lainnya, "tidak ada dampak langsung" terhadap PDB secara keseluruhan. Kendati demikian, pengeluaran untuk pertahanan nasional tetap meningkat di tengah perang dengan Iran.

Investasi sektor perumahan memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan—meski relatif tipis—untuk pertama kalinya sejak akhir 2024. Suku bunga KPR yang tinggi secara umum telah menahan permintaan pembeli dan membatasi aktivitas konstruksi dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat ke depan, eskalasi terbaru di Timur Tengah serta kebijakan tarif baru dari Presiden Donald Trump makin menegaskan ketidakpastian prospek ekonomi. Walaupun bank sentral AS memilih menahan suku bunga pada hari Rabu, tiga pengambil kebijakan memilih untuk menaikkan biaya pinjaman di tengah inflasi yang masih berada di atas target.

Namun dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terbatas, para ekonom secara umum memperkirakan belanja konsumen akan stabil pada paruh kedua tahun ini. Para eksekutif di perusahaan seperti JPMorgan Chase & Co dan Levi Strauss & Co telah menggarisbawahi ketahanan para pembeli, meskipun beberapa perusahaan seperti PepsiCo Inc dan General Mills Inc mencatat bahwa warga Amerika kini mulai lebih selektif dalam berbelanja.

Harga bensin kembali merangkak naik pada bulan Juli, yang kembali menekan anggaran rumah tangga. Data terbaru juga menunjukkan tingkat tabungan pada bulan Juni merosot ke level terendah sejak 2022.

Para konsumen "mengabaikan tekanan harga dan terus melaju—pertanyaannya adalah berapa lama lagi mereka mampu melakukannya," ujar Pooja Sriram, Senior US Economist di Barclays. "Pengembalian pajak telah habis dan kenaikan pendapatan melambat, sehingga bantalan ekonomi yang kita andalkan tersebut akan makin mengecil pada kuartal berikutnya."

Warsh Isyaratkan Ubah Indikator Inflasi, The Fed Buat Pasar Cemas

Jumat, 31 Juli 2026 08:00 WIB

Enda Curran dan Greg Ritchie

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116790/warsh-isyaratkan-ubah-indikator-inflasi-the-fed-buat-pasar-cemas/2>

Bloomberg, Terselip di tengah konferensi pers penuh dinamika Gubernur Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh pada hari Rabu (29/7), muncul sebuah sinyal bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut dapat mengubah pendekatannya dalam menilai inflasi—sebuah pernyataan yang kini memicu kecemasan di kalangan investor.

Meskipun fokus utama dalam pengarahannya adalah pandangannya—atau ketiadakjelasannya—mengenai apakah akan menaikkan suku bunga acuan, para investor dan ekonom kini juga memperdebatkan implikasi dari potensi evaluasi ulang terhadap cara para pembuat kebijakan mengukur inflasi.

“Kami akan memastikan inflasi berada di level 2% dan tidak lebih dari itu,” kata Warsh. “Namun untuk mencapai hal tersebut, saya melihat seperangkat data inflasi yang lebih luas dibandingkan sekadar PCE.”

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) telah lama menjadi indikator inflasi favorit The Fed, dan digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam proyeksi mereka. Indikator tersebut naik 3,7% pada bulan Juni dari tahun sebelumnya, menurut data resmi yang dirilis Kamis (30/7). “Kami tetap menggunakannya,” ujar Warsh, seraya menambahkan, “Siapa yang tahu, setelah Januari mendatang, kami mungkin akan berbicara mengenai strategi yang berbeda.”

Warsh merujuk pada satgas-satgas yang didirikannya untuk, antara lain, mengkaji kerangka kerja inflasi The Fed serta data ekonomi yang dipantaunya.

“Komentar-komentar ini seolah mengonfirmasi dugaan bahwa satgas tersebut hanyalah kedok untuk meredefinisikan tantangan inflasi,” tulis Michael Feroli, Chief US Economist di JPMorgan Chase & Co., dalam sebuah catatan kepada kliennya.

Para investor di pasar obligasi pemerintah AS (Treasury) senilai US\$2 triliun yang terkait dengan inflasi langsung mengambil tindakan. Tingkat breakeven 30-tahun—sebuah indikator pasar untuk inflasi yang diharapkan yang diturunkan dari selisih antara surat berharga nominal dan yang terkait inflasi—melonjak paling tinggi sejak 2024, yang sebagian dipicu oleh komentar Warsh mengenai PCE, ungkap para pelaku pasar.

Para ahli strategi JPMorgan merekomendasikan klien mereka untuk bertaruh pada kenaikan ekspektasi inflasi—melalui harga five-year forward untuk five-year inflation swaps.

Mantan Gubernur Federal Reserve Bank of Richmond, Jeffrey Lacker, memperingatkan bahwa Warsh perlu berhati-hati terhadap metrik apa yang akhirnya menjadi fokus utamanya.

“Sangat tidak jelas ke mana mereka akan beralih, dan yang lebih penting, kriteria apa yang akan memandu pilihan mereka,” kata Lacker, yang dikenal sebagai sosok berpandangan hawkish terhadap inflasi selama masa jabatannya pada 2004–2017. “Anda harus memilih indeks yang andal dan berdasar luas. Hanya ada dua: indeks harga PCE dan IHK. Itu saja.”

Indeks Harga Konsumen (IHK), yang naik 3,5% pada bulan Juni, merupakan indikator yang digunakan untuk Obligasi AS Dilindungi Inflasi (TIPS) dan penyesuaian biaya hidup Jaminan Sosial (Social Security).

Perspektif yang 'Lebih Luas'

“Rata-rata—dalam jangka waktu yang panjang—keduanya tidak jauh berbeda,” kata Lacker mengenai dua indikator utama tersebut.

Warsh pada hari Rabu menegaskan, “Ya, saya peduli dengan berapa angka rilis PCE, saya peduli dengan kontribusi dari IHK dan hal lainnya, tetapi lensa pengamatan saya lebih luas dari itu.”

Orang nomor satu di The Fed tersebut menolak untuk merinci apa lagi indikator lain yang dimaksud.

“Mendefinisikan ukuran inflasi apa yang akan dipantau oleh Warsh dan The Fed adalah hal yang sangat krusial,” tegas Kathy Bostjancic, Chief Economist di Nationwide

Beberapa pengamat The Fed mengantisipasi bahwa, seiring segala hal menjadi lebih jelas, indikator pilihan Warsh akan menunjukkan laju kenaikan harga yang lebih melandai.

“Selama beberapa bulan ke depan, akan makin terlihat jelas bahwa kumpulan metrik inflasi yang lebih luas yang dipantau Warsh tidak menunjukkan akselerasi inflasi yang mengkhawatirkan,” tulis ekonom Citigroup Inc., Andrew Hollenhorst dan Veronica Clark, dalam sebuah catatan pada hari Kamis.

Tim strategi Citi memperingatkan bahwa sikap Warsh dapat mengarahkan rentang perdagangan baru untuk apa yang disebut five-year, five-year inflation forward, “yang sebelum hari ini telah dibatasi di kisaran 2,5% dalam beberapa tahun terakhir.”

Pihak lainnya melihat risiko dampak yang lebih luas pada pasar Treasury senilai US\$31 triliun, termasuk kenaikan lebih lanjut pada apa yang disebut term premium—imbal hasil ekstra yang dituntut investor untuk menempatkan uang dalam surat berharga jangka panjang daripada sekadar memperpanjang surat berharga jangka pendek.

“Ketika ada ketidakpastian yang meningkat atau berkurangnya keyakinan terhadap komitmen perlawanan inflasi oleh The Fed, hal itu akan tercermin pada term premium yang lebih tinggi dan premi risiko inflasi yang lebih tinggi,” ungkap Jon Hill, Head of US Inflation Strategy di Barclays Plc.

Inflasi Tokyo Naik 2 Bulan Beruntun, Sinyal Kenaikan Bunga BOJ

Jumat, 31 Juli 2026 08:50 WIB

Yoshiaki Nohara

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116797/inflasi-tokyo-naik-2-bulan-beruntun-sinyal-kenaikan-bunga-boj/2>

Bloomberg, Laju inflasi di Tokyo kembali mengalami percepatan selama dua bulan berturut-turut. Perkembangan ini menjaga Bank of Japan (BOJ) tetap berada di jalurnya untuk menaikkan suku bunga acuan dalam beberapa bulan mendatang, meski jajaran dewan bank sentral diperkirakan secara luas akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan hari Jumat (31/7).

Indeks harga konsumen (IHK) yang tidak memperhitungkan bahan makanan segar naik 1,9% pada bulan Juli dari tahun sebelumnya di wilayah ibu kota, demikian dilaporkan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi pada hari Jumat. Hasil tersebut sedikit lebih tinggi dari proyeksi kenaikan 1,8% oleh para ekonom yang disurvei oleh Bloomberg.

Indikator yang tidak memperhitungkan bahan makanan segar maupun energi—yang dipantau ketat oleh BOJ sebagai tolok ukur inflasi inti—naik 2%, sementara harga konsumen secara keseluruhan juga tumbuh 2%. Data IHK Tokyo sendiri dianggap sebagai indikator awal bagi tren harga secara nasional di Jepang.

Perlambatan penurunan biaya listrik dan gas alam bersamaan dengan kenaikan harga makanan olahan yang stabil turut mendorong indeks inflasi melambung. Sementara itu, penurunan harga bensin justru makin cepat berkat berbagai langkah intervensi yang diambil pemerintah.

“Dengan situasi di Timur Tengah yang terus berlarut-larut, saya yakin harga-harga—terutama barang-barang terkait energi—akan terus naik, dan kita akan melihat kenaikan lebih lanjut pada biaya pangan serta barang lainnya,” ujar Takeshi Minami, Chief Economist di Norinchukin Research Institute. “Jadi, inflasi kemungkinan besar akan tetap berada di atas 2% mulai musim gugur ini.”

Laporan terpisah menunjukkan bahwa perekonomian Jepang relatif tangguh pada bulan Juni, meskipun perang di Iran terus menimbulkan tantangan terhadap pengadaan energi dan rantai pasokan. Produksi industri naik 1,3% pada bulan Juni dari bulan sebelumnya, menurut kementerian industri pada hari Jumat. Output industri tersebut melonjak 4,2% dari tahun sebelumnya. Adapun penjualan eceran (retail sales) merangkak naik 0,5% dari tahun sebelumnya, namun terkoreksi 4,1% dari bulan sebelumnya, demikian kementerian melaporkan.

Secara keseluruhan, rangkaian data yang dirilis beberapa jam sebelum bank sentral mengambil keputusan kebijakan ini akan memperkuat alasan bagi otoritas moneter untuk tetap berada di jalur kenaikan suku bunga lanjutan. Pertanyaan utamanya kini berpusat pada seberapa cepat laju kenaikan tersebut akan dilakukan. BOJ diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan hari ini, setelah dewan Gubernur menaikkannya bulan lalu ke kisaran 1%—level tertinggi sejak tahun 1995.

Pelemahan mata uang yen turut menjadi faktor yang menjaga inflasi tetap tinggi melalui membengkaknya biaya impor pangan dan energi. Otoritas Jepang dilaporkan telah melakukan intervensi di pasar pada sesi perdagangan New York hari Kamis untuk memperkuat mata uang domestik, menurut seorang pelaku pasar yang mengetahui masalah tersebut. Intervensi ini sempat mendorong yen melonjak hingga 3,3% terhadap dolar AS, sebelum diperdagangkan di kisaran 160,15 per dolar pada Jumat pagi di Tokyo.

“Dampak dari biaya energi sangat signifikan, dan tampaknya kenaikan harga minyak mentah yang dipicu oleh situasi di Timur Tengah akhirnya mulai merembet ke perekonomian yang lebih luas,” ungkap Kohei Okazaki, Chief Market Economist di Nomura Securities. “Harga-harga melonjak cukup tinggi, tidak hanya untuk minyak mentah dan produk kimia, tetapi juga untuk barang-barang konsumsi rumah tangga.”

Harga makanan terus merangkak naik secara stabil, dengan biaya makanan olahan mencatatkan kenaikan 3,9% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, harga beras yang turun 8,4% dari tahun sebelumnya, setelah sempat melonjak lebih dari 100% pada musim semi 2025. Perdana Menteri Sanae Takaichi pada hari Kamis menyatakan akan melanjutkan rencana penurunan pajak penjualan untuk makanan dan minuman ringan menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027.

Di antara komponen lainnya, konsumsi rumah tangga melonjak 5,3% secara tahunan, dan pertumbuhan harga sektor jasa—indikator kunci dari inflasi yang didorong oleh permintaan—mengalami percepatan tipis menjadi 1,2%.

Tingkat pengangguran bertahan stabil di angka 2,5% pada bulan Juni, menurut Kementerian Urusan Dalam Negeri. Rasio lowongan kerja terhadap pelamar merangkak naik menjadi 1,18 pada bulan Juni dari 1,17 di bulan sebelumnya, yang berarti terdapat 118 lowongan pekerjaan yang tersedia untuk setiap 100 pelamar kerja, demikian dilaporkan Kementerian Tenaga Kerja.

BOJ Tahan Suku Bunga di 1% dan Naikkan Prospek Ekonomi Jepang

Jumat, 31 Juli 2026 14:10 WIB

Toru Fujioka

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116844/boj-tahan-suku-bunga-di-1-dan-naikkan-prospek-ekonomi-jepang/2>

Bloomberg, Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) mempertahankan kebijakan moneternya tanpa perubahan, namun memberikan sinyal yang lebih optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Hal itu menunjukkan keyakinan bahwa perekonomian Jepang masih berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan normalisasi kebijakan, setelah bulan lalu menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi sejak 1995.

BOJ mempertahankan suku bunga kebijakan di level 1%, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resminya pada Jumat (31/7). Keputusan tersebut sesuai dengan perkiraan seluruh 52 ekonom yang disurvei Bloomberg. Hasil pemungutan suara di dewan gubernur adalah 8 berbanding 1, dengan Hajime Takata menjadi satu-satunya anggota yang mengusulkan kenaikan suku bunga dua kali berturut-turut.

Keputusan itu diambil setelah otoritas Jepang memasuki pasar valuta asing semalam untuk menopang nilai tukar yen, menurut seorang pelaku pasar yang mengetahui langkah tersebut. Pelemahan yen menjadi salah satu faktor yang dinilai BOJ mendorong inflasi. Setelah pengumuman kebijakan, yen kembali melemah tipis.

Bank sentral juga tetap menyoroti risiko inflasi inti melampaui target 2% dan menegaskan komitmennya untuk terus menaikkan biaya pinjaman sejalan dengan perkembangan ekonomi dan inflasi. BOJ menyatakan kenaikan harga konsumen diperkirakan akan berada jauh di atas target pada paruh kedua tahun fiskal ini, sehingga penting untuk menstabilkan inflasi kembali di sekitar level sasaran.

"Mengingat kini sudah hampir pasti inflasi akan terus meningkat, saya rasa mulai pertemuan September nanti, setiap rapat BOJ akan menjadi pertemuan yang benar-benar terbuka terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga kapan saja," kata Kepala Ekonom Meiji Yasuda Research Institute, Yuichi Kodama.

BOJ juga mengubah penilaiannya terhadap keseimbangan risiko pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya risiko dinilai cenderung mengarah ke pelemahan, kini bank sentral menyebut risikonya lebih seimbang. Hal tersebut mengindikasikan dampak negatif konflik di Timur Tengah tidak sebesar yang semula dikhawatirkan, sementara meningkatnya permintaan global terhadap teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membantu menopang perekonomian.

Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan dewan pimpinan Gubernur Kazuo Ueda menunjukkan bahwa BOJ masih berada di jalur untuk kembali menaikkan suku bunga, mengingat pelemahan yen yang berkepanjangan berpotensi memperbesar tekanan inflasi. Investor yang semakin banyak memperkirakan perubahan kebijakan pada Oktober akan mencermati petunjuk lebih lanjut dari konferensi pers Ueda yang dijadwalkan dimulai pukul 15.30 waktu Tokyo.

Dalam proyeksi ekonomi kuartalan terbaru, dewan BOJ mempertahankan estimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun ini dan tahun depan, dengan pertumbuhan ekonomi tahun fiskal ini diperkirakan mencapai 0,6%. Sementara itu, proyeksi inflasi utama direvisi turun menjadi 2,5% dari sebelumnya 2,8%, dengan alasan adanya dampak subsidi pemerintah. Proyeksi tersebut secara umum sejalan dengan ekspektasi para ekonom yang disurvei Bloomberg.

Yen melemah ke kisaran 160,88 per dolar AS sesaat setelah keputusan BOJ diumumkan. Sehari sebelumnya, otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar valuta asing saat perdagangan di New York, yang sempat mendorong yen menguat hingga 3,3% terhadap dolar AS.

Pemerintah Jepang belum mengonfirmasi secara resmi adanya intervensi tersebut. Namun, pejabat tertinggi urusan mata uang Jepang, Atsushi Mimura, pada Jumat mengatakan bahwa Jepang tidak hanya memperoleh dukungan moral dari Amerika Serikat.

"Jika dampak intervensi tidak bertahan lama dan yen kembali melemah melewati level 160 per dolar AS, pandangan bahwa kini giliran BOJ untuk bertindak kemungkinan akan semakin memicu spekulasi kenaikan suku bunga," ujar Kodama dari Meiji Yasuda.

Pelaku pasar valuta asing kini menanti apakah pernyataan Ueda akan mengecewakan investor apabila terdengar terlalu dovish saat menjelaskan alasan BOJ mempertahankan kebijakan moneternya.

Perekonomian Jepang sejauh ini menunjukkan ketahanan setelah pecahnya perang di Iran, berkat tingginya permintaan global terhadap teknologi AI serta kemajuan dalam memperoleh sumber bahan baku alternatif. Sentimen produsen besar bahkan secara tak terduga meningkat bulan lalu ke level tertinggi sejak 2018.

Keputusan BOJ diumumkan setelah pemerintah Perdana Menteri Sanae Takaichi merilis pedoman ekonomi tahunan. Dokumen pertama di era pemerintahan Takaichi, yang dikenal sebagai pendukung kebijakan moneter longgar, menekankan pentingnya kebijakan moneter dalam memperkuat perekonomian. Banyak ekonom menafsirkan pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa Takaichi menginginkan proses normalisasi kebijakan berjalan secara bertahap.

Mayoritas pengamat BOJ memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan sekitar sekali setiap enam bulan. Sekitar 60% responden dalam survei Bloomberg menyebut Takaichi sebagai salah satu faktor utama yang dapat menghambat kenaikan suku bunga lebih lanjut. Sementara itu, pasar memperkirakan peluang sekitar 80% bahwa kenaikan suku bunga berikutnya akan terjadi pada Oktober, berdasarkan harga di pasar overnight swaps hingga Jumat.

Melonjak 62%, Bank Sentral Global Borong Emas 289 Ton pada Kuartal II – 2026

Jumat, 31 Juli 2026 09:48 WIB

Reporter: Vandy Yhulia Susanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://investasi.kontan.co.id/news/melonjak-62-bank-sentral-global-borong-emas-289-ton-pada-kuartal-ii-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. World Gold Council (WGC) mencatat, bank sentral dan institusi lainnya menambah cadangan emas bersih sebesar 289 ton pada kuartal II – 2026. Angka ini meningkat 62% secara tahunan alias year on year (yoy) seiring meningkatnya pembelian di berbagai negara.

Meskipun pembelian menguat pada kuartal II – 2026, Shaokai Fan, Head of Asia-Pacific (ex-China) dan Global Head of Central Banks di World Gold Council mengatakan bahwa permintaan sepanjang semester I – 2026 masih berada di bawah tingginya permintaan dalam beberapa tahun terakhir akibat melemahnya pembelian pada kuartal pertama.

“Survei Cadangan Emas Bank Sentral dari WGC menunjukkan bahwa 45% responden berencana meningkatkan cadangan emas mereka dalam 12 bulan ke depan, menegaskan bahwa emas tetap

memegang peran penting dalam cadangan institusi resmi,” ujar Shaokai dalam keterangan resmi, Jumat (31/7/2026).

WGC mencatat pembelian emas oleh bank sentral pada kuartal II – 2026. Antara lain Bank Nasional Polandia (The National Bank of Poland) adalah pembeli terbesar, menambahkan 51 ton selama kuartal tersebut dan meningkatkan cadangan emasnya menjadi 632 ton pada akhir Juni.

Hal ini meningkatkan pembelian Polandia pada semester pertama menjadi 82 ton, memperkuat posisinya sebagai pembeli dominan sejauh ini pada tahun ini dan mendekatkannya ke target 700 ton.

Kemudian, The People’s Bank of China menambahkan 33 ton lagi pada kuartal kedua, penambahan triwulanan terbesar sejak kuartal keempat tahun 2023 (44 ton). Peningkatan 40 ton pada semester pertama menjadikan kepemilikan PBoC yang dilaporkan menjadi 2.346 ton. Meskipun penambahan bulanan Tiongkok tetap moderat dibandingkan dengan fase akumulasi sebelumnya, pembelian yang berkelanjutan menggarisbawahi sifat strategis dari program emasnya.

WGC juga mencatat bahwa Bank Sentral Uzbekistan menambah 16 ton, Bank Nasional Kazakhstan (membeli 15 ton), Bank Sentral Yordania (6 ton) dan Bank Nasional Ceko (6 ton) juga merupakan pembeli penting selama kuartal kedua. Sementara tambahan pembelian emas yang lebih kecil juga dilakukan Bank Ghana, Otoritas Moneter Singapura, Bank Sentral UEA, dan Bank Nasional Kirgistan.

Selain itu, WGC mencatat penjualan emas oleh bank sentral melambat drastis pada kuartal kedua. Bank Sentral Turki melaporkan penjualan kuartal kedua yang moderat sebesar 4 ton dan pengurangan swap yang beredar dari maksimum lebih dari 80 ton menjadi sekitar 60 ton pada akhir Juni. Bank Sentral Rusia adalah penjual terbesar pada kuartal kedua, mengurangi kepemilikan sebesar 22 ton. Lalu, penurunan yang dilaporkan Jerman sebesar 1 ton.

WGC melihat bank sentral tetap berada di jalur yang tepat untuk tahun yang kuat lainnya dalam pembelian emas. Argumen struktural untuk emas sebagai diversifikasi, kinerja krisis, dan perlindungan terhadap risiko geopolitik dan keuangan tetap mapan. Pemulihan pembelian emas pada kuartal kedua lebih konsisten dengan niat positif yang tercakup dalam survei Cadangan Emas Bank Sentral WGC.

Karena pemulihan kuartal kedua tidak sepenuhnya membalikkan kelemahan permintaan kuartal pertama yang direvisi, WGC memperkirakan permintaan emas secara tahunan pada 2026 akan berakhir di bawah total tahun 2025. Penjualan taktis yang terkait dengan kebutuhan likuiditas atau manajemen nilai tukar tetap dimungkinkan. Akan tetapi hal ini harus dilihat dalam konteks tren strategis yang berkelanjutan. Para pengelola cadangan terus melihat emas sebagai diversifikasi jangka panjang daripada perdagangan jangka pendek.

Mata Uang Asia Bergerak Beragam Jumat (31/7), Won Korea Selatan Melemah Paling Dalam

Jumat, 31 Juli 2026 09:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-bergerak-beragam-jumat-31-7-won-korea-selatan-melemah-paling-dalam>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung beragam pada perdagangan Jumat (31/7/2026).

Won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam, sementara rupiah berhasil menguat tipis.

Mengutip Reuters, hingga pukul 02.12 GMT, won Korea Selatan melemah 0,87% menjadi 1.435,20 won per dolar AS, menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan pada hari itu.

Yen Jepang juga tertekan setelah sempat menguat tajam sehari sebelumnya akibat dugaan intervensi pemerintah Jepang. Mata uang Jepang tersebut melemah 0,66% ke level 160,57 yen per dolar AS.

Dolar Singapura turun 0,21%, ringgit Malaysia melemah 0,24%, sedangkan baht Thailand terkoreksi tipis 0,03%.

Di sisi lain, rupiah menguat sekitar 0,14% ke level Rp 18.050 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp 18.075 per dolar AS. Y

uan China juga menguat tipis 0,06% ke level 6,749 per dolar AS, sementara peso Filipina naik 0,20%. Adapun rupee India bergerak relatif stabil.

Kinerja Mata Uang Asia Sepanjang 2026

Secara tahun berjalan (year-to-date), mayoritas mata uang Asia masih mencatat pelemahan terhadap dolar AS.

Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan depresiasi terdalam, yakni sekitar 7,65% dibandingkan posisi akhir 2025.

Baht Thailand melemah sekitar 5,87%, rupee India turun 6,07%, peso Filipina terkoreksi 4,14%, yen Jepang melemah 2,44%, dolar Taiwan turun 3,16%, dan ringgit Malaysia terkoreksi 0,71%.

Sebaliknya, yuan China menjadi salah satu mata uang yang masih mencatat penguatan terhadap dolar AS sepanjang tahun ini, yakni sekitar 3,54%, sementara dolar Singapura menguat tipis 0,16%. Won Korea Selatan juga masih membukukan kenaikan sekitar 0,30% secara year-to-date.

PBOC Kembali Tekan Yuan, Kurs Tengah Dipatok Jauh di Bawah Estimasi Pasar

Jumat, 31 Juli 2026 09:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pboc-kembali-tekan-yuan-kurs-tengah-dipatok-jauh-di-bawah-estimasi-pasar>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China menetapkan kurs tengah (midpoint) yuan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) lebih lemah dari perkiraan pasar pada Jumat (31/7/2026).

Selisih antara kurs acuan dan estimasi pasar menjadi yang terbesar dalam lima bulan terakhir, meski dolar AS sedang mengalami pelemahan secara global.

Mengutip Reuters, People's Bank of China (PBOC) menetapkan kurs tengah yuan di level 6,7894 per dolar AS, atau 581 pips lebih lemah dibandingkan estimasi Reuters di level 6,7313 per dolar AS. Ini merupakan deviasi ke arah pelemahan terbesar sejak 27 Februari.

Dalam sistem nilai tukar China, yuan di pasar spot diperbolehkan bergerak hingga 2% di atas atau di bawah kurs tengah yang ditetapkan PBOC setiap hari.

Sejak November 2025, PBOC secara konsisten menetapkan kurs tengah yuan lebih lemah dibandingkan perkiraan pasar.

Menurut para analis dan pelaku pasar, kebijakan tersebut mencerminkan upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas pasar valuta asing sekaligus mencegah penguatan yuan yang dinilai terlalu cepat atau berlebihan.

Strategi tersebut juga menunjukkan bahwa otoritas moneter China masih mengutamakan stabilitas nilai tukar di tengah dinamika pasar global, meskipun dolar AS tengah berada dalam tren pelemahan.

Yen Melemah Lagi Usai Intervensi Jepang, Pasar Menanti Keputusan Suku Bunga BOJ

Jumat, 31 Juli 2026 08:34 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-melemah-lagi-usai-intervensi-jepang-pasar-menanti-keputusan-suku-bunga-boj>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang kembali melemah pada perdagangan Jumat (31/7/2026), sehari setelah melonjak tajam akibat intervensi pemerintah Jepang di pasar valuta asing. Pelaku pasar kini menantikan hasil rapat kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ).

Mengutip Reuters, dolar AS sempat menguat hingga 0,45% ke level 160,175 yen pada awal perdagangan Asia. Sehari sebelumnya, dolar anjlok 2,4% terhadap yen, penurunan harian terbesar sejak Januari 2023.

Sumber Reuters mengatakan pemerintah Jepang melakukan intervensi dengan membeli yen dan menjual dolar pada sesi perdagangan New York. Langkah tersebut berhasil mengangkat yen dari posisi terendahnya dalam sekitar 40 tahun.

Pasar secara luas memperkirakan BOJ akan mempertahankan suku bunga jangka pendek di level 1% setelah baru menaikkannya pada Juni lalu.

Namun, bank sentral diperkirakan akan memberikan sinyal kebijakan yang lebih hawkish seiring meningkatnya tekanan inflasi.

Keputusan BOJ tersebut menyusul langkah Federal Reserve (The Fed) yang mempertahankan suku bunga acuan.

Sikap The Fed membuat dolar AS tertekan karena pelaku pasar mempertanyakan seberapa serius bank sentral AS dalam mengendalikan inflasi.

Lambatnya kenaikan suku bunga di Jepang selama ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama melemahnya yen hingga menyentuh level terendah dalam empat dekade.

Mayoritas analis yang disurvei Reuters memperkirakan BOJ masih akan menaikkan suku bunga menjadi 1,25% sebelum akhir tahun.

Analisis strategi valuta asing National Australia Bank Rodrigo Catril mengatakan, kondisi saat ini menjadi waktu yang tepat bagi otoritas Jepang untuk melakukan intervensi.

"Jika ingin melakukan intervensi, ini mungkin waktu yang cukup tepat," ujar Catril.

Menurut dia, pelemahan dolar AS akibat turunnya imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka pendek serta membaiknya sentimen risiko global mendukung efektivitas intervensi tersebut.

Namun, ia mengingatkan yen berpotensi kembali tertekan apabila BOJ gagal memberikan sinyal kebijakan yang cukup hawkish dalam pertemuan kali ini.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia bergerak relatif stabil di level 100,6 setelah merosot 0,7% pada perdagangan sebelumnya.

Secara mingguan, indeks dolar diperkirakan turun sekitar 1,5% dan melemah 1,2% sepanjang Juli.

Di pasar mata uang lainnya, euro berada di level US\$ 1,1523 setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam enam pekan. Pound sterling diperdagangkan stabil di US\$ 1,34605.

Adapun dolar Australia dan dolar Selandia Baru masing-masing melemah sekitar 0,1% menjadi US\$ 0,70245 dan US\$ 0,5875.

Bloomberg: Ekonomi RI Diramal Tumbuh Sekitar 5% Sampai 2028

Jumat, 31 Juli 2026 16:01 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/116834/bloomberg-ekonomi-ri-diramal-tumbuh-sekitar-5-sampai-2028/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap berada di kisaran 5% hingga 2028 berdasarkan Bloomberg Economic Survey edisi Juli 2026.

Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi secara umum masih berada di kisaran 5%, sejumlah indikator lain menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan diperkirakan masih akan menghadapi tantangan lebih besar, dibandingkan hasil survei bulan sebelumnya.

Survei Bloomberg merevisi tipis rata-rata pertumbuhan 2026 menjadi 5,1%. Dengan perkiraan ekonomi akan melambat pada akhir tahun, sebab pertumbuhan kuartal IV-2026 hanya sekitar 4,58%, sebelum menyentuh 4,5% pada kuartal I-2027.

Perlambatan itu sejalan dengan proyeksi inflasi yang lebih tinggi dari hasil survei sebelumnya. Inflasi rata-rata 2026 kini diperkirakan mencapai 3,4%, mencerminkan tekanan harga yang masih bertahan, baik akibat kenaikan harga energi maupun pelemahan nilai tukar.

Situasi ini berpotensi mempersempit ruang Bank Indonesia (BI) untuk melonggarkan kebijakan moneter. Konsensus Bloomberg bahkan memperkirakan, suku bunga acuan tetap berada di 6% hingga akhir 2026, baru turun pada awal 2027 menjadi 5,75% pada kuartal pertama dan kedua 2027, sebelum akhirnya naik kembali menjadi 6% pada kuartal ketiga 2027.

Sementara dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diproyeksikan semakin melebar menjadi 1,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026, dan menjadi 1,22% pada 2027. Angka ini lebih besar daripada estimasi sebelumnya.

Konsekuensi yang bisa timbul adalah, rupiah semakin sensitif terhadap perubahan sentimen global. Jika dolar AS menguat, yield obligasi AS terkerek naik, atau ketegangan geopolitik kembali meningkat, tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkat. Seperti yang terjadi belakangan ini.

Fiskal

Dari sisi fiskal, konsensus Bloomberg menilai posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih relatif terjaga. Defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,92% terhadap PDB pada 2026, sebelum sedikit menyempit menjadi 2,89% pada 2027.

Angka tersebut masih berada di bawah batas legal 3% dari PDB, dan mengindikasikan adanya keyakinan pasar bahwa pemerintah bisa tetap menjaga disiplin fiskal, meski sedang menghadapi tekanan belanja yang meningkat.

Namun, ruang fiskal diperkirakan tidak akan terlalu longgar. Pemerintah tetap dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan program prioritas, dan perlu mengantisipasi perlambatan penerimaan negara lantaran ada normalisasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, khususnya dari mitra dagang utama seperti China.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa menjaga disiplin fiskal saja tak cukup untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas. Mengingat Purchasing Managers' Index (PMI) yang menjadi acuan sektor manufaktur berada di zona kontraksi di 46,9.

PMI Manufaktur Indonesia akan kembali dirilis pekan depan bersamaan dengan data dan indikator ekonomi penting lainnya, seperti inflasi dan ekspor-impor.

Akhiri Perdagangan Juni, Rupiah Menguat 0,47% ke Rp18.000/US\$

Jumat, 31 Juli 2026 16:13 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116897/akhiri-perdagangan-juni-rupiah-menguat-0-47-ke-rp18-000-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan akhir bulan ini dengan menguat 0,47% ke Rp18.000/US\$, Jumat (31/7/2026). Memutus tren pelemahan yang terjadi hampir sepanjang pekan sejak pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Terpangkasnya harga minyak mentah brent 1,59% ke US\$87,61/barel meredakan tekanan terhadap sebagian mata uang Asia, meski indeks dolar Amerika Serikat (AS) masih tinggi di 100,61.

Mayoritas mata uang kawasan hari ini berada di zona hijau. Baht Thailand masih memimpin penguatan 0,63%, disusul peso Filipina, dolar Taiwan, rupiah, rupee India, ringgit Malaysia, dan yuan China, serta yuan offshore, dan dolar Hong Kong dengan penguatan relatif terbatas.

Sebaliknya, yen Jepang melemah bersama won Korea Selatan dengan pelemahan masing-masing 0,42% dan 47%.

Penguatan rupiah pada penghujung pekan dan bulan ini menjadi sinyal bahwa pasar sepertinya mulai memberi respons terhadap meredanya sebagian tekanan eksternal, terutama setelah harga minyak terkoreksi.

Jika ditarik pada satu bulan ke belakang, pelemahan rupiah sejatinya relatif terbatas 0,29%, lebih baik dari dolar Taiwan yang melemah 1,3%.

Penurunan harga energi mengurangi kekhawatiran pelaku pasar terhadap membengkaknya tagihan impor migas Indonesia, yang selama beberapa bulan terakhir jadi faktor yang membebani prospek nilai tukar.

Terlebih, berdasarkan konsensus Bloomberg, meski ekspor diperkirakan membaik dari kontraksi 5,73% menjadi 0,4%, tetapi impor tetap tumbuh tinggi sebesar 22,3%. Dengan proyeksi impor yang diperkirakan tetap tinggi, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut.

Sehingga, penguatan sore ini sepertinya belum bisa dikatakan perubahan arah dan penguatan rupiah yang lebih berkelanjutan. Sebab, rupiah sore ini juga masih berada di kisaran angka psikologisnya Rp18.000/US\$, dan masih mencerminkan tingginya premi risiko yang diminta investor terhadap aset domestik.

Selain itu, risiko inflasi global juga masih menjadi perhatian. Bloomberg Economics memperkirakan inflasi Indonesia pada Juli relatif stabil di kisaran 3,31%, secara tahunan. Angka ini sedikit lebih rendah daripada inflasi yang terjadi pada Juni di 3,34%.

Stabilnya angka inflasi ini lebih banyak ditopang oleh efek basis harga pangan, sementara tekanan dari sisi energi diperkirakan masih akan membayangi laju inflasi.

Bloomberg memperkirakan, kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi akan merambat ke harga barang dan jasa dalam beberapa bulan mendatang, ditambah adanya potensi kenaikan pangan akibat fenomena El-Nino.

Prospek ini diperkirakan berpotensi membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) menjadi kian terbatas. Bahkan jika inflasi Juli masih berada dalam kisaran target, tekanan harga diperkirakan akan kembali meningkat pada paruh kedua tahun ini.

Dengan begitu, penguatan rupiah pada perdagangan terakhir Juli lebih menggambarkan adanya perbaikan sentimen eksternal dengan meredanya harga minyak, daripada perubahan fundamental domestik.

Purbaya Respons Putusan MK Terkait Pemisahan Anggaran MBG

Jumat, 31 Juli 2026 15:20 WIB

Muhammad Fikri

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116866/purbaya-respons-putusan-mk-terkait-pemisahan-anggaran-mbg/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib anggaran pendidikan.

Namun, ia menegaskan implementasi putusan tersebut mengacu pada tenggat waktu yang ditetapkan MK, yakni paling lambat pada APBN 2028.

"Kita ikutin putusan MK. 2028 kan?" ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Saat ditanya apakah pemisahan anggaran tersebut baru akan berlaku pada APBN 2028, Purbaya kembali menegaskan pemerintah masih berpedoman pada amar putusan MK.

Menurut Purbaya, APBN tahun berjalan maupun rancangan anggaran yang telah dibahas sebaiknya tidak diubah agar proses penyusunan anggaran tidak kembali diulang.

"Kalau ini kan udah dibahas. Nanti kusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pemisahan anggaran akan diterapkan pada APBN 2028, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan mempelajari putusan tersebut.

"Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah," kata dia.

Mengenai dampak fiskal dari putusan MK tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melakukan penghitungan lebih lanjut. Purbaya juga mengungkapkan isu tersebut belum dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan belum ada rencana dalam waktu dekat untuk membahas secara khusus putusan MK bersama kepala negara.

Sementara itu, terkait evaluasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya mengaku belum bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

"Belum. Dia masih konsolidasi. Setelah konsolidasi selesai baru saya ketemu. Kayaknya minggu depan saya ketemu beliau," kata Purbaya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi pada Kamis (30/7/2026) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Dalam putusannya, MK menyatakan anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan, dengan masa transisi hingga APBN 2028. Mahkamah juga memberikan ruang bagi pemerintah apabila ingin menerapkan pemisahan tersebut lebih cepat melalui APBN 2027.

Proyek Pemerintah-Permintaan Domestik Kerek IKI Sentuh 53,10

Jumat, 31 Juli 2026 13:16 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116845/proyek-pemerintah-permintaan-domestik-kerek-iki-sentuh-53-10/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) naik menjadi 53,10 dari 52,90 pada Juni 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur masih berada di fase ekspansi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan peningkatan IKI mencerminkan ketahanan sektor manufaktur di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.

"Hal ini mencerminkan ketahanan sektor industri di tengah berbagai tantangan global sekaligus menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional," kata Febri dalam rilis IKI Juli 2026, dikutip Jumat (30/7/2026).

Detailnya, hingga Juli 2026, sebanyak 22 dari 23 subsektor industri pengolahan berada pada fase ekspansi dengan kontribusi mencapai 98,6% terhadap PDB industri nonmigas.

Di samping itu, kenaikan IKI ditopang oleh meningkatnya komponen permintaan baru yang naik menjadi 53,80 serta aktivitas produksi yang meningkat menjadi 54,55.

Menurut Febri, permintaan domestik menjadi pendorong utama, didukung pelaksanaan berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, implementasi biodiesel B50, hingga program pembangunan tiga juta rumah subsidi.

"Kenaikan aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terutama ditopang oleh kenaikan dari sisi permintaan domestik, terutama mulai jalannya program pemerintah seperti MBG, kelanjutan pembangunan koperasi merah putih, B50, kampung nelayan, serta program tiga juta rumah subsidi," jelasnya.

Selain itu, permintaan juga didorong oleh konsumsi rumah tangga menjelang tahun ajaran baru, investasi industri baru, serta peningkatan pesanan ekspor. Kemenperin juga mencatat terdapat 152 industri baru yang mulai beroperasi sepanjang semester I-2026 dengan nilai investasi mencapai Rp157,6 triliun. Investasi tersebut menyerap 56.347 tenaga kerja baru di sektor produksi.

Di sisi lain, variabel persediaan masih berada pada fase kontraksi karena sebagian pelaku industri memilih menahan stok barang sambil menunggu perkembangan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah sebelum mendistribusikan produk ke pasar.

Dari sisi subsektor, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer serta industri minuman menjadi sektor dengan kinerja terbaik pada Juli. Sementara itu, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki masih mengalami kontraksi akibat lemahnya permintaan ekspor dan tingginya biaya logistik internasional.

Meski demikian, ia menilai prospek industri manufaktur tetap positif. Hasil survei menunjukkan 77,9% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya membaik atau stabil, sementara tingkat pesimisme terhadap enam bulan ke depan turun menjadi 7%.

"Ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki keyakinan terhadap prospek industri nasional, namun tetap mencermati berbagai perkembangan ekonomi global secara hati-hati," tegasnya.

Ke depan, Kemenperin menyatakan akan terus memperkuat daya saing industri melalui percepatan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penguatan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengendalian impor, percepatan hilirisasi, serta peningkatan investasi manufaktur berteknologi tinggi.

Terkoreksi 0,32% Dalam Sepekan, Rupiah Menyentuh Rp 18.022 per Dolar AS

Jumat, 31 Juli 2026 19:30 WIB

Reporter: Vendy Yhulia Susanto, Editor: Tri Sulistiowati

<https://investasi.kontan.co.id/news/terkoreksi-032-dalam-sepekan-rupiah-menyentuh-rp-18022-per-dolar-as>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tren pelemahan dalam sepekan terakhir. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,49% secara harian ke Rp 18.022 per dolar AS. Namun dalam sepekan, rupiah melemah 0,32% dari posisinya di level Rp 17.963 per dolar AS pada Jumat (24/7).

Berdasarkan rupiah Jisdor, rupiah menguat 0,11% secara harian ke Rp 18.058 per dolar AS. Namun dalam sepekan, rupiah melemah 0,47% dari posisinya di level Rp 17.973 per dolar AS pada Jumat (24/7).

Analisis Mata Uang & Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan rupiah dalam sepekan terakhir dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Para pelaku pasar terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah setelah Iran meluncurkan sejumlah rudal balistik yang menasar pasukan AS di kawasan tersebut.

“Meskipun Komando Pusat AS menyatakan bahwa seluruh rudal berhasil dicegat, serangan ini menandai eskalasi baru setelah beberapa hari situasi relatif tenang, sekaligus memperkuat kekhawatiran bahwa jeda diplomatik yang sempat terjadi bisa segera buyar,” ujar Ibrahim, Jumat (31/7/2026).

Kemudian, gerak rupiah juga dipengaruhi oleh The Fed yang mempertahankan Suku Bunga Dana Federal dalam kisaran target saat ini antara 3,50% dan 3,75%. Namun, dengan suara terpecah 9-3, karena tiga anggota FOMC memilih untuk menaikkan suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin. Yang menentang keputusan kebijakan moneter tersebut adalah Beth Hammack dari Cleveland Fed, Neel Kashkari dari Minneapolis Fed, dan Lorie Logan dari Dallas Fed, yang lebih memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Sementara Ketua Fed Kevin Warsh mengatakan bahwa pengetatan di pasar telah banyak membantu para pembuat kebijakan. Ia menambahkan bahwa komite akan segera bertindak jika tekanan inflasi meningkat. Kemudian, paska pengunduran Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia, BI terus berkomitmen menjaga stabilitas yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat, sehingga konsisten mendukung pencapaian sasaran inflasi dan mendorong kegiatan ekonomi.

“Pasar juga fokus terhadap ketidakpastian mengenai suksesi pimpinan bank sentral setelah Perry Warjito mengundurkan diri, tekanan fiskal daerah, dan hambatan ekspor mineral,” terang Ibrahim.

Ibrahim memperkirakan rupiah dalam perdagangan sepekan kedepan di rentang Rp 17.920 – Rp 18.300 per dolar AS.

Muhammad Amru Syifa, Research and Development ICDX memproyeksikan pergerakan rupiah sepekan ke depan masih akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong volatilitas harga minyak dunia dan memperkuat permintaan terhadap dolar AS sebagai aset safe haven.

“Di sisi lain, komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi diharapkan dapat membantu meredam tekanan terhadap rupiah sehingga volatilitas tetap terkendali,” ujar Amru.

Dari sisi domestik, pelaku pasar akan mencermati langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi di tengah tingginya ketidakpastian global.

Bank Indonesia menegaskan fokus kebijakan tetap diarahkan pada stabilitas rupiah, didukung dengan mempertahankan BI-Rate di level 5,75%. Selain itu, keberlanjutan arus masuk modal asing ke instrumen domestik juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar.

Dari sisi global, perhatian utama masih tertuju pada eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi meningkatkan volatilitas harga minyak dunia. Di samping itu, pasar juga mencermati prospek suku bunga Amerika Serikat yang diperkirakan akan tetap tinggi dalam jangka waktu lebih lama, seiring tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

“Kombinasi faktor-faktor tersebut berpotensi memperkuat dolar AS, mendorong aliran dana ke aset berbasis dolar, dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah,” jelas Amru. Amru memproyeksikan rupiah sepekan ke depan bergerak dalam kisaran Rp 18.000 – Rp 18.150 per dolar AS.

Impor Masih Melaju, Neraca Perdagangan Juni 2026 Diperkirakan Defisit US\$ 1 Miliar

Jumat, 31 Juli 2026 11:19 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/impor-masih-melaju-neraca-perdagangan-juni-2026-diperkirakan-defisit-us-1-miliar>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja neraca perdagangan diperkrikan kembali mencatatkan defisit pada Juni 2026.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman memproyeksikan neraca perdagangan Indonesia akan mencatat defisit US\$ 1,00 miliar pada Juni 2026, menyempit dari defisit US\$ 1,61 miliar pada Mei 2026, didukung oleh permintaan eksternal yang tangguh dan harga minyak global yang lebih rendah.

Adapun neraca perdagangan mencatatkan defisit imbas kinerja impor lebih besar daripada ekspor. Ia memperkirakan kinerja ekspor Indonesia akan tumbuh sebesar 1,86% year on year (yoy) pada Juni 2026, setelah kontraksi 5,73% yoy pada Mei 2026.

“Meskipun harga komoditas ekspor utama, termasuk batubara dan crude palm oil (CPO), telah normal, permintaan eksternal tetap relatif tangguh. PMI manufaktur di seluruh mitra dagang utama Indonesia pada Juni 2026 terus menunjukkan ekspansi, yang mengindikasikan permintaan eksternal yang sehat,” tutur Faisal dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Sementara itu, kinerja impor diperkirakan akan terus meningkat pada Juni 2026 di tengah permintaan domestik yang kuat.

Faisal memproyeksikan impor Indonesia akan tumbuh sebesar 28,66% yoy pada Juni 2026, meningkat dari 22,16% yoy pada Mei 2026. Meskipun harga minyak global yang lebih rendah, didukung oleh optimisme atas potensi kesepakatan damai AS-Iran, seharusnya mengurangi nilai impor minyak, impor secara keseluruhan diperkirakan akan tetap kuat, didukung oleh kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan dan permintaan domestik yang tangguh.

“Selain itu, data perdagangan Tiongkok menunjukkan bahwa ekspornya ke Indonesia meningkat secara signifikan pada Juni 2026, menunjukkan permintaan impor yang berkelanjutan dari Indonesia,” ungkapnya.

Faisal memperkirakan risiko penurunan neraca perdagangan Indonesia, terutama didorong oleh kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan, yang seharusnya menjaga permintaan domestik tetap tangguh dan mendukung pertumbuhan impor yang lebih kuat.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan kembali normal setelah pengiriman yang dilakukan lebih awal tahun lalu menjelang pemberlakuan tarif timbal balik, di samping melemahnya permintaan global, khususnya dari Tiongkok, dan ketidakpastian yang terus berlanjut seputar ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan perang dagang, yang semuanya kemungkinan akan membebani kinerja ekspor Indonesia.

“Meskipun perdagangan semikonduktor dan chip terkait AI global terus berkembang, mendukung perdagangan global secara keseluruhan, integrasi Indonesia yang terbatas ke dalam rantai pasokan bernilai tinggi ini menunjukkan hanya sedikit manfaat langsung bagi ekspornya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia akan melebar pada tahun 2026, didorong oleh impor yang lebih tinggi di bawah agenda pro-

pertumbuhan pemerintah dan ekspor yang lebih lemah di tengah permintaan global yang lebih lemah di tengah ketidakpastian geopolitik dan perang dagang yang sedang berlangsung.

Hitungannya, CAD akan melebar menjadi 1,0%–2,0% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026, dari 0,11% PDB pada 2025. Sejalan dengan itu, cadangan devisa diproyeksikan turun menjadi US\$ 143 miliar hingga US\$ 147 miliar pada akhir 2026, dari US\$ 156,47 miliar pada akhir 2025.

“Dengan latar belakang ini, kami memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan terus mempertahankan kebijakan moneter saat ini, dengan fokus berkelanjutan pada pelestarian stabilitas makroekonomi dan eksternal,” tandasnya.

Desentralisasi Indonesia Terbesar di Dunia, Beban Kepala Daerah Berat dan Kompleks

Jumat, 31 Juli 2026 15:17 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/desentralisasi-indonesia-terbesar-di-dunia-beban-kepala-daerah-berat-dan-kompleks>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki skala desentralisasi yang sangat besar dibandingkan negara-negara kesatuan lainnya di dunia.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah membuat beban kerja kepala daerah juga semakin berat, terlebih di tengah persoalan domestik yang semakin kompleks dan dinamika global yang terus berubah.

Tito mengatakan, tingkat desentralisasi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia apabila dibandingkan dengan negara yang menerapkan sistem pemerintahan kesatuan, bukan negara federal.

"Kalau dibandingkan dengan negara kesatuan, desentralisasi Indonesia itu salah satu yang paling banyak. Saya tidak membandingkan dengan negara federal," ujar Tito dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/7/2026).

Menurut Tito, sejumlah kajian internasional juga menunjukkan bahwa program desentralisasi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar dan tercepat di dunia. Bahkan, ia mengutip pandangan World Bank yang menyebut program desentralisasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

"Indonesia's decentralization program is the largest decentralization program in the world," kata Tito mengutip pandangan World Bank.

Ia menjelaskan, proses desentralisasi Indonesia dilakukan secara besar-besaran atau dikenal dengan istilah big bang decentralization. Kebijakan tersebut membuat banyak kewenangan pemerintahan dialihkan kepada daerah sejak era reformasi.

"James Maynard dari University of London menyebut desentralisasi Indonesia was a big bang decentralization. Jadi big bang, suatu langkah besar yang katakanlah mengejutkan," ujar Tito.

Menurut Tito, besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah membuat tanggung jawab kepala daerah semakin besar. Kepala daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga kondisi sosial dan ekonomi daerah.

"Desentralisasi ini semula dibebankan ke tingkat bawah, setelah itu tarik-menarik ke tingkat satu, tarik-menarik lagi ke tingkat pusat. Penduduk makin bertambah, otomatis masalahnya makin kompleks," katanya.

Tito mengatakan, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 290 juta jiwa dengan karakter wilayah sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi tersebut membuat persoalan yang dihadapi pemerintah daerah semakin beragam.

Menurut Tito, tantangan kepala daerah tidak hanya berasal dari persoalan dalam negeri, tetapi juga dari perkembangan situasi global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah.

"Kita bukan berada dalam ruang vakum, kita bagian dari sistem politik global. Ada implikasi perang keamanan, politik, ekonomi, perang tarif, dan lain-lain. Ini secara langsung maupun tidak langsung membuat beban kerja para kepala daerah juga terdampak," ujar Tito.

Ia mencontohkan, tekanan ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga dinamika perdagangan internasional dapat memengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk sektor usaha, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan beban kerja yang semakin besar, Tito menilai, penguatan kapasitas kepala daerah menjadi hal penting. Menurut dia, sistem pemilihan kepala daerah langsung membuat latar belakang dan kemampuan manajerial kepala daerah menjadi beragam.

"Yang terpilih bisa perorangan, bisa kandidat partai politik. Sepanjang dia populer, elektabilitasnya tinggi, bisa terpilih. Tapi ketika sudah terpilih, dia menjadi seorang manajer, pimpinan eksekutif tertinggi di daerahnya," kata Tito.

Karena itu, Tito mendorong adanya penguatan kapasitas kepala daerah melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Ia menyebut pemerintah siap membantu melalui lembaga seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun lembaga pelatihan pemerintah lainnya.

Menurut Tito, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar kewenangan besar dalam sistem desentralisasi dapat dijalankan secara efektif.

"Instrumen itu perlu diberikan agar mereka mampu melaksanakan semua beban kerja, baik karena undang-undang ataupun karena situasi lapangan di daerah masing-masing yang berbeda-beda," kata Tito.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2026 Diproyeksi Tetap di Atas 5%, Ini Penopangnya

Jumat, 31 Juli 2026 18:06 WIB

Reporter: Anna Suci Perwitasari, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2026-diproyeksi-tetap-di-atas-5-ini-penopangnya>

KONTAN.CO.ID - PARAPAT. Belanja pemerintah diproyeksi tetap jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026.

Ekonom Bank Danamon pun memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tetap berada di atas 5% walau melambat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026.

“Kami proyeksi, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2026 bisa berada di kisaran 5,18%,” kata ekonom Bank Danamon Hosianna E. Situmorang dalam Editor Briefing, Jumat (31/7/2026).

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi ini datang karena pemerintah terus menggenjot belanja. Di mana sejumlah proyek strategis terus digeber untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Walau dampaknya sudah lebih berkurang dari periode Januari-Maret 2026.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tetap tinggi di periode April-Juni 2026 walau tidak sekuat konsumsi di kuartal I-2026. Terlebih tidak adanya dorongan hari-hari besar seperti yang terjadi di kuartal pertama.

Belum lagi, ekspor yang diperkirakan melambat di kuartal II-2026 turut membuat pertumbuhan ekonomi tergelincir di periode ini.

Di sisi lain, realisasi investasi di kuartal II-2026 yang mencapai Rp 511,8 triliun atau naik 7,1% secara tahunan, menambah amunisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode April - Juni 2026.

Apalagi, realisasi investasi tersebut lebih ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) yang melonjak 27,5% YoY di kuartal II-2026.

Hal tersebut jadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global. Di mana membuktikan investor asing masih optimistis terhadap prospek jangka panjang Indonesia.

Lebih lanjut Hosianna bilang, dampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang berlangsung di bulan Mei dan Juni 2026 belum terlihat di kuartal II-2026.

Total SAL Pemerintah Susut Jadi Rp 438 T, Likuiditas Kas Negara Juga Susut pada 2025

Jumat, 31 Juli 2026 18:18 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/total-sal-pemerintah-susut-jadi-rp-438-t-likuiditas-kas-negara-juga-susut-pada-2025>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bantalan fiskal pemerintah mulai menyusut seiring penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menambal defisit APBN 2025. Posisi SAL pemerintah pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp 438,26 triliun, turun dari posisi awal tahun yang mencapai Rp457,54 triliun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penurunan tersebut terjadi setelah pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp 93,15 triliun sebagai bagian dari pembiayaan anggaran.

"Pembiayaan lainnya mencapai Rp 93,94 triliun. Realisasi pembiayaan lainnya tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL)," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (31/7/2026).

Adapun total pembiayaan APBN 2025 tercatat mencapai Rp 742,73 triliun atau 120,54% dari target. Namun yang terealisasi sebesar Rp 670,34 triliun, sehingga pemerintah mencatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp72,40 triliun.

Namun, meski pemerintah masih memiliki SAL di atas Rp400 triliun, kondisi likuiditas pemerintah menunjukkan penyusutan. Hal ini terlihat dari penurunan posisi kas dan setara kas pemerintah pusat pada akhir 2025.

Berdasarkan LKPP 2025, kas dan setara kas pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 227,63 triliun, turun Rp 202,04 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp 429,67 triliun.

Penurunan terbesar berasal dari kas pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) dan bank umum. Jika pada 2024 nilainya mencapai sekitar Rp 350 triliun, posisi tersebut turun menjadi Rp 150,54 triliun pada 2025.

Secara rinci, kas pemerintah di BI dan bank umum terdiri dari kas dalam rupiah sebesar Rp 123,17 triliun dan kas dalam valuta asing sebesar Rp 27,38 triliun.

SAL dan kas pemerintah memiliki fungsi yang berbeda. SAL merupakan akumulasi sisa anggaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN, sementara kas dan setara kas mencerminkan dana yang tersedia secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pembayaran jangka pendek pemerintah.

Dengan demikian, meski posisi SAL masih cukup besar, ruang likuiditas pemerintah tetap dilihat dari kemampuan kas yang tersedia.

Di sisi lain, pengelolaan kas pemerintah kembali menjadi sorotan setelah muncul proyeksi kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada 2026.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memperkirakan SiLPA pemerintah hingga akhir 2026 dapat mencapai Rp 255,5 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi SiLPA 2025 yang sebesar Rp 72,40 triliun.

Menurut Said, tingginya SiLPA perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan strategi pembiayaan pemerintah.

"Ini akan menjadi beban pemerintah di kemudian hari. Tingginya SiLPA sekaligus menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi yang perlu disempurnakan," kata Said di Senayan belum lama ini.

Ia menilai pembiayaan melalui utang memiliki konsekuensi biaya yang perlu diperhitungkan pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan penerbitan utang dan penggunaan dana perlu dilakukan secara lebih optimal.

Menanggapi proyeksi tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa potensi SiLPA yang besar bukan disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran, melainkan bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah (cash management).

Menurut Purbaya, pemerintah sengaja melakukan penerbitan surat utang lebih awal (front loading) ketika posisi kas mendekati batas minimum yang ditetapkan.

"Itu berhubungan dengan cash management kita. Pada waktu satu titik saya lihat cash-nya terlalu rendah, di bawah level tertentu. Jadi saya minta kita tidak boleh cash-nya di bawah level tertentu. Kita terbitkan surat utang di waktu-waktu yang lebih cepat dari biasanya," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, penerbitan surat utang lebih awal membuat posisi kas pemerintah meningkat, sementara realisasi belanja dilakukan secara bertahap. Kondisi tersebut kemudian tercatat sebagai SiLPA dalam laporan keuangan pemerintah.

"Supaya buffer kita cukup. Jangan sampai panik karena tidak punya duit. Dampaknya secara matematis karena belanjanya tidak semuanya secepat itu, ada SiLPA-nya," katanya.

Meski demikian, Purbaya memastikan nilai SiLPA akan menurun hingga akhir tahun karena APBN 2026 tetap berada dalam posisi defisit.

"Tapi sampai akhir tahun pasti sedikit SiLPA-nya. Kenapa? Karena anggaran kita defisit. Jadi pasti habis," ujarnya.

Selain menjaga likuiditas negara, Purbaya juga akan menempatkan dana SAL secara bertahap sebesar Rp 381 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan sekaligus mendukung penyaluran kredit ke sektor riil.

"Sebagian juga dipakai untuk membangun ekonomi. Saya tahu di perbankan sebagian, supaya banknya bisa memberikan kredit. Perbaikan ekonomi yang terjadi selama ini antara lain juga karena adanya uang pemerintah di perbankan," jelasnya.

Inflasi Tahunan pada Juli 2026 Diproyeksi Naik Jadi 3,54%

Jumat, 31 Juli 2026 19:49 WIB

Reporter: Anna Suci Perwitasari, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-tahunan-pada-juli-2026-diproyeksi-naik-jadi-354>

KONTAN.CO.ID - PARAPAT. Bank Danamon memproyeksi inflasi tahunan di Juli 2026 merangkak naik menjadi 3,54%. Sekedar mengingatkan, inflasi tahunan di Juni 2026 sudah mencapai 3,34%.

Jika inflasi di Juli 2026 tembus 2026, maka target inflasi dari Bank Indonesia terlampaui. Di mana, BI masih mempertahankan target inflasi di posisi 2,5% plus minus 1%.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna E. Situmorang menjelaskan, kenaikan inflasi ini terdorong oleh tiga faktor utama. Pertama, administered price masih memberikan dampak lanjutan dari penyesuaian harga negeri dan tarif transportasi pada bulan sebelumnya.

“Kedua, inflasi inti diperkirakan meningkat bertahap seiring masih berlangsungnya pass-through pelemahan rupiah dan kenaikan biaya input ke harga barang dan jasa,” tambah Hosianna dalam Editor Briefing, Jumat (31/7/2026).

Ketiga, meskipun volatile food mulai menunjukkan perbaikan berkat membaiknya pasokan beberapa komoditas pangan, tekanan harga akibat musim kering masih membuat inflasi pangan tetap perlu diwaspadai.

Ke depan, kami melihat inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia pada akhir tahun dengan respon kebijakan yang memadai, namun semakin mendekati batas atas.

Inflasi Juli 2026 Diprediksi Melambat, Tapi Biaya Pendidikan Jadi Faktor Penekan

Jumat, 31 Juli 2026 06:00 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-juli-2026-diprediksi-melambat-tapi-biaya-pendidikan-jadi-faktor-penekan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inflasi pada Juli 2026 secara bulanan diperkirakan akan mencapai 0,03%, melambat dari inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,44% month to month (mtm).

Sementara itu, secara tahunan, inflasi diproyeksikan mencapai 3,06% year on year (yoy) lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,34% yoy.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, perlambatan inflasi bulanan terutama didorong oleh penurunan pada komponen harga bergejolak (volatile food) dan melambatnya inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices). Kedua faktor tersebut diperkirakan mampu mengimbangi kenaikan inflasi inti.

Ia memperkirakan komponen volatile food akan mengalami deflasi sebesar 1,12% mtm, berbalik dari inflasi 0,14% mtm pada Juni 2026. Penurunan tersebut terutama dipicu oleh turunnya harga cabai merah dan bawang bombai setelah memasuki puncak musim panen.

Di sisi lain, inflasi pada komponen harga diatur pemerintah diproyeksikan sebesar 0,10% mtm, jauh lebih rendah dibandingkan 1,41% mtm pada bulan sebelumnya.

“(Perlambatan ini) menyusul normalisasi tekanan harga setelah penyesuaian harga bensin non-subsidi pada bulan sebelumnya,” tutur Andry kepada Kontan, Kamis (30/7/2026).

Meski demikian, tekanan inflasi inti diperkirakan meningkat. Andry memperkirakan inflasi inti naik menjadi 0,29% mtm pada Juli 2026 dari 0,23% mtm pada Juni.

Menurutnya, kenaikan tersebut terutama didorong oleh faktor musiman pada awal tahun ajaran baru, khususnya pembayaran biaya pendidikan.

"Pengeluaran pendidikan musiman di awal tahun ajaran baru diperkirakan menyumbang sekitar 0,06 poin persentase terhadap inflasi bulanan," jelas Andry.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data resmi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 pada 3 Agustus 2026.

Pemkot Magelang Terapkan Pemungutan Pajak Otomatis melalui Platform Toko Daring

Jumat, 31 Juli 2026

Penulis: Prokompim Kota Magelang, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-magelang-terapkan-pemungutan-pajak-otomatis-melalui-platform-toko-daring/>

KOTA MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan sistem pemungutan pajak daerah secara otomatis melalui integrasi dengan platform toko daring Tisera. Inovasi ini memungkinkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas transaksi makanan dan minuman, khususnya jasa boga atau catering, langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Penerapan sistem tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri di Ruang Rapat Wali Kota Magelang, Kamis (30/7/2026).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, setelah melalui kajian regulasi, pembahasan lintas instansi, serta uji coba teknis yang dinyatakan berhasil, mekanisme pemungutan PBJT atas transaksi jasa boga melalui platform Tisera dinilai siap diterapkan secara resmi.

“Fokusnya adalah transaksi makanan dan minuman, khususnya jasa boga atau katering yang dilakukan melalui toko daring,” ujarnya.

Catur menjelaskan, mekanisme tersebut juga melibatkan Bank Jateng sebagai pengelola RKUD Kota Magelang. Nota kesepakatan menjadi landasan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang untuk menyusun perjanjian kerja sama operasional.

Melalui sistem baru tersebut, proses pemungutan pajak diharapkan berlangsung secara otomatis, sehingga administrasi dan pelaporan transaksi menjadi lebih mudah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Direktur PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Mas Admuawan, mengatakan integrasi sistem memungkinkan setiap transaksi yang menjadi objek PBJT tercatat secara digital dan pajaknya langsung disalurkan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Administrasi dan rekonsiliasi menjadi lebih mudah, sementara potensi kehilangan penerimaan pajak daerah dapat diminimalkan. Kami berharap ini dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Ke depan, Tisera juga akan mengembangkan integrasi serupa untuk transaksi luring melalui sistem point of sale (POS), sehingga pelaku usaha yang menggunakan berbagai platform pembayaran tetap dapat memungut dan menyetorkan pajak secara otomatis.

Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan, digitalisasi pengelolaan pajak bukan semata-mata bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Menurutnya, sistem digital akan menghasilkan data transaksi yang lebih akurat, mempercepat penyetoran pajak, serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan daerah.

“Karena kalau tidak akuntabel, tentunya pertanggungjawabannya jadi tidak karuan. Itu menjadi hal yang utama dan pastinya linier dengan kepercayaan publik yang kita harapkan,” imbuh Damar.

Ia berharap nota kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui integrasi sistem, penyusunan perjanjian kerja sama, pendampingan kepada perangkat daerah, serta evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan implementasinya berjalan optimal.

Di Tengah Ancaman PHK, 213 Ribu Tenaga Kerja di Jateng Terserap Berkat Investasi Rp48 Triliun

Jumat, 31 Juli 2026 20:40 WIB

Penulis: iwan Arifianto, Editor: rika irawati

<https://banyumas.tribunnews.com/bisnis/94602/di-tengah-ancaman-phk-213-ribu-tenaga-kerja-di-jateng-terserap-berkat-investasi-rp48-triliun>

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah (Jateng) mengejar angka investasi sebesar Rp50,55 triliun pada semester II tahun 2026.

Angka tersebut untuk memenuhi target nilai investasi yang mencapai Rp99,09 triliun.

Sementara, pada semester I 2026, capaian investasi di Jateng mencapai Rp48,54 triliun.

"Ya, kami terus berupaya menggaet investor untuk mencapai target investasi 2026 sebesar Rp99,09 triliun," ujar Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasari, Jumat (31/7/2026).

Sakina mengungkapkan, sejumlah langkah yang sudah dilakukan dalam mencapai target investasi itu di antaranya promosi investasi melalui Central Java Investment Business Forum.

Ada juga program dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang dilakukan tiga kali dalam setahun.

Sakina juga melakukan bisnis meeting, menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga riset energi terbarukan, dalam mendukung green industry.

"Kami telah menyusun 17 IPRO (proposal proyek investasi) di tahun ini dan nantinya ada tambahan empat IPRO," jelasnya.

Dari upaya itu, hasilnya, ada sejumlah kesepakatan kerjasama investasi yang akan dijajaki.

Sakina mengatakan, gubernur Jateng akan menerima investor baterai dari Australia dengan nilai investasi Rp6,4 triliun pada 3 Agustus mendatang.

Pada bulan yang sama, ada calon investor dari Uni Emirat Arab yang akan melakukan investasi di Jawa Tengah.

Nilai investasi dari negara teluk tersebut belum terkonfirmasi karena masih dalam tahap penjajakan.

"Potensi lain, tentu datang dari Singapura yang tertarik melakukan pengembangan kawasan industri lagi di Jawa Tengah selepas berhasil dengan KIK Kendal," ungkapanya.

Serap 213 Ribu Tenaga Kerja

Sakina mengatakan, nilai investasi Jateng yang mencapai Rp48,54 triliun terdiri dari modal asing sebesar Rp25,92 (53,6 persen) triliun dan modal dalam negeri Rp22,62 triliun (46,6 persen).

Dari angka Rp48,54 triliun, terdiri dari 55.989 proyek dengan serapan tenaga kerja sebanyak 213.217 orang.

Nilai investasi itu tersebar di lima besar daerah meliputi Kota Semarang Rp 6,57 Triliun, Kabupaten Kendal Rp6,56 Triliun, Kabupaten Batang Rp6,11 Triliun, Kabupaten Temanggung Rp4,58 Triliun, Kabupaten Demak Rp,34 Triliun.

Sektor investasi didominasi oleh industri barang dari kulit dan alas kaki dengan nilai Rp5,85 triliun, industri karet dan plastik Rp5,1 triliun, industri kayu Rp4,73 triliun.

Berikutnya, Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, sebesar Rp4,21 triliun. Dan, Industri Tekstil Rp. 3,92 Triliun.

"Industri padat karya seperti barang dari kulit dan alas kaki, masih mendominasi investasi Jateng," jelasnya. (*)

KEK Kendal Ekspansi Perluasan Wilayah 1,2 Hektar, Pemkab Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen

Jumat, 31 Juli 2026 16:42 WIB

Penulis: Agus Salim Irsyadullah, Editor: raka f pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/kendal-handal/1261618/kek-kendal-ekspansi-perluasan-wilayah-12-hektar-pemkab-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tembus-8-persen>

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal bersiap melakukan ekspansi perluasan kawasan tahap kedua dengan luas sekitar 1,2 hektare.

Langkah itu dilakukan karena kapling lahan tahap pertama seluas 1.000 hektare sudah hampir habis terisi oleh berbagai perusahaan.

Selain itu, minat investor baru dari luar negeri maupun dalam negeri yang ingin membangun pabrik dan berinvestasi di Kawasan Industri Kendal cukup tinggi.

Sehingga perluasan area industri menjadi opsi untuk memperkuat struktur ekonomi, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan target pertumbuhan ekonomi daerah.

Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum mengatakan ekspansi perluasan KEK Kendal dilakukan untuk membangun ekosistem industri yang saling terintegrasi.

Saat ini, terdapat 143 perusahaan yang telah bergabung di KEK. Rinciannya, 62 perusahaan telah beroperasi dan 31 lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Kami menargetkan 80 perusahaan beroperasi hingga akhir 2026 di kawasan industri. Jadi sebenarnya bukan hanya jumlah perusahaannya, tetapi yang kami lihat adalah kesinambungan ekosistem industrinya, katanya," Jumat (31/7/2026).

Dia menambahkan, proses serah terima lahan untuk perluasan KEK tahap kedua telah selesai dilakukan beberapa waktu lalu. Di sisi lain, dia juga mengungkapkan ada pabrik baru yang akan segera beroperasi di KEK.

Pabrik tersebut di antaranya ialah perusahaan produsen pakaian olahraga terbesar di dunia yang sebelumnya dikenal banyak berinvestasi di Vietnam.

Selain itu, sejumlah perusahaan di sektor otomotif juga dijadwalkan mulai membangun fasilitas produksinya pada Agustus hingga September 2026.

"Di sektor kemasan (packaging), investor yang sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama juga telah memasuki tahap konstruksi," sambungnya.

Sejalan dengan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal kini tengah memasang target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen di tahun 2026.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kendal, Wiwit Andariyono tak menampik jika pertumbuhan ekonomi di Kendal masih terkonsentrasi di KIK.

Dia mengatakan, sejak KIK berkembang pesat, pertumbuhan ekonomi di Kendal juga ikut melesat hingga 7,9 persen di tahun 2025.

"Ini melampaui Jateng di angka 5,37 persen dan nasional di angka 5,11 persen. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini masih berpusat di KIK, nah ini tentu menjadi PR bagi kami tentunya agar merata," katanya.

Wiwit menambahkan, capaian ini harus diimbangi dengan langkah strategis agar mampu mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen di tahun 2026.

"Pertumbuhan ekonomi di Kendal ini harus memberikan dampak nyata ke masyarakat. Makanya diperlukan sinergi kuat untuk mencapai target itu," ungkapnya.

Adapun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kendal, Izzudin Latif mengatakan pihaknya telah membentuk tim percepatan ekonomi lintas sektoral sesuai arahan Mendagri untuk mengejar target pertumbuhan 8 persen pada 2026.

"Ini jadi tantangan. Dan pada evaluasi triwulan I ini, kita ingin kejar target 8 persen. Apakah berat? Tentu yang dibutuhkan sekarang adalah kerja-kerja kolaboratif untuk mencapai target itu," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal, Ade Sandi Parwoto menilai investasi menjadi modal penting untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini, struktur ekonomi Kendal masih didominasi industri manufaktur sebesar 42,03 persen, disusul sektor pertanian 17,27 persen, perdagangan 12,04 persen, dan konstruksi 7,60 persen.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 56,49 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,18 persen.

"Tingginya PMTB menunjukkan aktivitas investasi dan pembangunan fisik di Kabupaten Kendal terus meningkat secara signifikan," tuturnya.

Baca juga: Produsen Saus Bangun Pabrik di KEK Kendal, Bakal Serap 150 Tenaga Kerja

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, lanjut Ade, Pemkab Kendal perlu strategi yang matang dan adaptif.

Ade optimis target itu akan tercapai dengan melihat iklim investasi yang kini semakin tumbuh subur di Kendal.

"Termasuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia," tandasnya. (ags)

Wisatawan Datang Lalu Pulang, Ekonom BI Soroti Tantangan Pariwisata Jawa Tengah

Kamis, 30 Juli 2026 13:50 WIB

Penulis: Rezanda Akbar D, Editor: muh radlis

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1261488/wisatawan-datang-lalu-pulang-ekonom-bi-soroti-tantangan-pariwisata-jawa-tengah>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pariwisata Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Namun, berdasarkan kajian ekonom, tantangan utama bukan hanya mendatangkan wisatawan, melainkan meningkatkan lama tinggal dan nilai belanja wisatawan selama berada di daerah tujuan.

Ekonom Senior Bank Indonesia Jawa Tengah, Agni Alam Awirya, mengatakan sektor akomodasi, makanan, dan minuman (akmamin) menjadi salah satu sektor yang potensial karena memiliki pertumbuhan tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja.

Dalam analisis struktur ekonomi Jawa Tengah, sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi fondasi utama perekonomian.

Sementara akmamin masuk dalam sektor dengan pertumbuhan tinggi yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru.

“Akmamin ini relevan karena selain pertumbuhannya tinggi, penyerapan tenaganya juga cukup besar. Ini menjadi salah satu sektor yang potensial untuk didorong,” ujar Agni, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, dampak ekonomi pariwisata sangat bergantung pada aktivitas wisatawan.

Wisatawan yang hanya datang sebentar atau melakukan perjalanan sehari dinilai belum memberikan dampak maksimal dibanding wisatawan yang menginap.

Ia menjelaskan, dalam konsep pariwisata terdapat perbedaan antara visitor dan tourist.

Pengunjung yang datang tanpa menginap masih masuk kategori pelancong, sedangkan wisatawan adalah mereka yang tinggal minimal satu malam di daerah tujuan.

“Pariwisata itu pada intinya bagaimana mengubah visitor menjadi turis. Orang yang datang diupayakan bisa menginap,” kata Agni.

Ia mencontohkan fenomena perjalanan satu hari setelah adanya akses jalan tol.

Wisatawan bisa datang ke suatu daerah untuk menikmati kuliner, kemudian kembali tanpa bermalam.

“Kalau datang ke Tegal makan kuliner kemudian pulang lagi lewat tol, itu masih pelancong. Dampaknya tentu berbeda dengan wisatawan yang menginap,” ujarnya.

Sport Tourism Dorong Lama Tinggal

Dalam kajiannya, Agni melihat kegiatan wisata berbasis pengalaman dapat meningkatkan kemungkinan wisatawan untuk menginap. Salah satunya melalui kegiatan olahraga atau sport tourism.

Menurutnya, acara olahraga yang digelar di suatu daerah dapat membuat peserta membutuhkan tempat tinggal sementara karena jadwal kegiatan yang berlangsung pagi atau lebih dari satu hari.

“Kalau lomba lari dimulai jam 5 pagi, peserta biasanya akan tidur di sekitar lokasi. Ini bisa mendorong pelancong menjadi wisatawan,” jelasnya.

Selain itu, wisatawan saat ini juga semakin mencari pengalaman dibanding sekadar mengunjungi lokasi.

Agni menyebut konsep tersebut sebagai value of money, yakni wisatawan bersedia mengeluarkan biaya lebih selama mendapatkan pengalaman yang dianggap bernilai

“Orang mau membayar untuk pengalaman. Misalnya naik jeep, memakai pakaian adat untuk foto, atau menikmati atraksi tambahan,” katanya.

Namun, menurutnya, pengembangan atraksi wisata perlu melihat kebutuhan wisatawan terlebih dahulu.

Tidak semua konsep yang berhasil di satu daerah bisa langsung diterapkan di tempat lain.

“Perlu diketahui dulu wisatawan yang datang mau atau tidak dengan atraksi tambahan tersebut,” ujarnya.

Potensi Wisata Religi dan Budaya

Agni menyebut Jawa Tengah memiliki kekuatan pada wisata sejarah, budaya, alam, hingga religi.

Untuk wisatawan mancanegara, destinasi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Lawang Sewu, serta kawasan budaya menjadi daya tarik utama.

Sementara untuk wisatawan nusantara, wisata religi menjadi salah satu daya tarik besar, seperti Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kudus, dan Makam Sunan Kalijaga.

“Wisata religi menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki basis pasar yang kuat. Ini didukung dengan masyarakat muslim dan jumlah pondok pesantren yang besar,” katanya.

Ia juga melihat pengembangan destinasi perlu memperhatikan hubungan antara wisata utama dan destinasi pendukung di sekitarnya.

Menurutnya, destinasi yang sudah dikenal luas dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan kawasan wisata lain di sekitarnya.

“Ketika destinasi inti ramai, kawasan di sekitarnya bisa mendapatkan limpahan wisatawan,” ujarnya.

Selain sektor pariwisata, Agni juga memaparkan kondisi ekonomi Jawa Tengah yang masih menunjukkan kinerja positif.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sekitar 5,89 persen. Konsumsi pemerintah menjadi salah satu faktor pendorong, disusul investasi yang tumbuh tinggi.

Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi serta akomodasi dan makanan minuman menjadi sektor yang menunjukkan kinerja baik.

Sementara itu, inflasi Jawa Tengah masih berada dalam kondisi terkendali dengan angka sekitar 2,92 persen.

“Pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan inflasi juga terjaga,” kata Agni.

Ia menambahkan, ke depan pengembangan pariwisata perlu melihat kualitas kunjungan, bukan hanya jumlah wisatawan.

Sebab, semakin lama wisatawan tinggal dan semakin besar pengeluaran mereka, maka semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar destinasi. (Rad)

Pemkab Demak sosialisasikan program "KURMA PEKAT" tekan pengangguran

Jumat, 31 Juli 2026 18:57 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640397/pemkab-demak-sosialisasikan-program-kurma-pekatekan-pengangguran>

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mensosialisasikan program KURMA PEKAT (Kursus Maju, Perekonomian Masyarakat Meningkatkan) untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong perekonomian daerah guna menekan angka pengangguran.

"Program KURMA PEKAT ini bukan sekadar slogan, melainkan gerakan bersama untuk memastikan warga Demak memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan layak, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Bupati Demak Eisti'anah saat sosialisasi program "Kurma Pekat" di Pendopo Kabupaten Demak, Jumat.

Mengusung semboyan "Baiknya Kursus, Baiknya Masa Depan" serta "Vokasi Kuat, Menguatkan Indonesia", gerakan KURMA PEKAT diharapkan dapat secara signifikan menekan angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah menuju Demak yang Bermartabat, Maju, dan Sejahtera.

Ia menegaskan jalur pendidikan nonformal memiliki peran strategis sebagai pengganti, penambah, maupun pelengkap pendidikan formal. Sehingga pendidikan nonformal, khususnya melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mampu menjawab kebutuhan pasar kerja secara lebih fleksibel, cepat, dan adaptif.

"Setiap tahun ribuan lulusan sekolah lahir di Demak, namun tidak semuanya berkesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi. Persoalan utama yang kita hadapi bukan hanya terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga adanya kesenjangan (gap) antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)," ujarnya.

Bupati menekankan bahwa keberadaan LKP sangat vital bagi generasi muda usia produktif (18-25 tahun) agar memiliki kompetensi terapan sehingga siap kerja maupun berwirausaha secara mandiri.

Lebih lanjut, Bupati Demak meminta agar peran Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) dapat dimaksimalkan. Keberhasilan revitalisasi vokasi ini memerlukan sinergi erat antara pemerintah, DUDIKA, KADIN, serta pelaku UMKM.

Ia berharap pihak DUDIKA tidak hanya membagikan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja dan tren teknologi, tetapi juga terlibat aktif dalam penyediaan instruktur praktisi, program magang, hingga dukungan sarana praktik.

"Program KURMA PEKAT ini bukan sekadar slogan, melainkan gerakan bersama untuk memastikan warga Demak memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan layak, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," tegas Bupati.

Mengusung semboyan "Baiknya Kursus, Baiknya Masa Depan" serta "Vokasi Kuat, Menguatkan Indonesia", gerakan KURMA PEKAT diharapkan dapat secara signifikan menekan angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah menuju Demak yang Bermartabat, Maju, dan Sejahtera.

Pemprov Jateng menyebutkan bahan baku dan penolong industri dominasi impor

Jumat, 31 Juli 2026 08:13 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640340/pemprov-jateng-menyebutkan-bahan-baku-dan-penolong-industri-dominasi-impor>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa bahan baku dan bahan penolong industri selama ini mendominasi komoditas impor, yakni 84,39 persen.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Jateng Suci Baskoro Wati di Semarang, Kamis, mengatakan selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada ekspor.

Padahal, kata dia, keberhasilan ekspor tidak dapat dipisahkan dari sistem impor yang sehat dan produktif.

Dia mengatakan hal tersebut, saat "Regular Update Session" yang digelar KSO SCISI untuk mempertemukan pemerintah, surveyor, dan pelaku usaha atau importir.

Komoditas impor kedua terbanyak di Jateng, yakni barang modal 10,75 persen, sedangkan barang konsumsi 4,86 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas barang yang masuk ke Jateng dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas produksi, bukan untuk konsumsi langsung.

Impor bukan sekadar memasukkan barang dari luar negeri, melainkan menjadi bagian penting dari rantai pasok industri melalui penyediaan bahan baku, bahan penolong, dan barang modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan komoditas impor yang paling banyak dibutuhkan meliputi mesin, peralatan mekanis, elektrik, dan bagiannya sebesar 26,07 persen, tekstil dan produk tekstil 14,57 persen, serta plastik dan karet 11,22 persen.

Berbagai komoditas tersebut menjadi penopang utama bagi industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, elektronik, serta sektor manufaktur unggulan lainnya di Jateng.

Pimpinan KSO SCISI Feruz Robby Nugraha mengatakan perubahan kebijakan yang cepat mengharuskan importir memahami setiap ketentuan agar proses impor dapat berjalan sesuai regulasi.

KSO SCISI adalah bentuk kerja sama operasi antara dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia yang ditunjuk Kementerian Perdagangan untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI).

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen KSO SCISI dalam mendampingi pelaku usaha menghadapi perkembangan tata niaga impor nasional.

"Dinamika regulasi impor berkembang sangat cepat. Pelaku usaha dituntut untuk semakin adaptif dan siap dalam memenuhi berbagai ketentuan, termasuk dalam proses VPTI maupun sertifikasi SNI yang kini menjadi perhatian penting dalam tata niaga impor nasional," katanya.

Ia menjelaskan KSO SCISI secara konsisten menghadirkan forum "Regular Update Session" sebagai wadah berbagi informasi, diskusi, sekaligus menyampaikan perkembangan regulasi terbaru yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Melalui forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan impor, mulai dari pemenuhan persyaratan VPTI hingga implementasi SNI, sehingga kegiatan impor dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan layanan VPTI yang berkualitas, profesional, dan terpercaya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pelanggan melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi impor yang terus berkembang," katanya.

Pilgub Jateng 2029 Butuh Rp1 Triliun, Pemprov Mulai Siapkan Dana Cadangan

Jumat, 31 Juli 2026 20:17 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/pilgub-jateng-2029-butuh-rp1-triliun-pemprov-mulai-siapkan-dana-cadangan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2029 sejak tahun 2027. Hampir Rp1 triliun akan dialokasikan secara bertahap agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak membebani APBD dan pembangunan tetap berjalan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dengan membentuk dana cadangan untuk membiayai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2029. Kebijakan ini ditempuh karena kebutuhan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi diperkirakan mendekati Rp1 triliun.

Komitmen tersebut mengemuka setelah DPRD Jawa Tengah menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah dalam menyisihkan anggaran secara bertahap.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pembentukan dana cadangan merupakan mekanisme penganggaran yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dana cadangan berbeda dengan belanja daerah biasa karena masuk dalam pos pengeluaran pembiayaan sehingga wajib memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah.

"Kalau dana cadangan ini sebenarnya sistem penganggaran biasa saja. Yang membedakan, dana cadangan masuk dalam pengeluaran pembiayaan sehingga harus ada perda yang mengaturnya," kata Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Sumarno, pengalaman penyelenggaraan Pilkada 2024 menjadi alasan kuat bagi Pemprov Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan lebih awal. Saat itu, kebutuhan anggaran Pilkada di Jawa Tengah hampir mencapai Rp1 triliun sehingga memberikan tekanan besar terhadap kemampuan fiskal daerah.

Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan anggaran tersebut dibebankan hanya dalam satu tahun pelaksanaan Pilkada, ruang fiskal pemerintah daerah akan menyempit. Kondisi itu berpotensi mengganggu pembiayaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan.

"Kalau itu dibebankan hanya pada satu tahun anggaran tentu sangat mengganggu kapasitas fiskal. Karena itu regulasi memperbolehkan kita menyisihkan anggaran setiap tahun, sehingga saat Pilkada dilaksanakan beban APBD tidak terlalu berat," ujarnya.

Pemprov Jawa Tengah berencana mulai mengalokasikan dana cadangan pada tahun anggaran 2027. Sumber pembiayaannya berasal dari APBD, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan besaran yang disesuaikan kemampuan fiskal daerah hingga kebutuhan anggaran Pilgub 2029 dapat terpenuhi secara bertahap.

Selain untuk tingkat provinsi, Pemprov Jawa Tengah juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota menerapkan mekanisme serupa. Menurut Sumarno, masih ada sejumlah daerah yang tidak membentuk dana cadangan pada Pilkada 2024 sehingga mengalami kesulitan saat harus menyediakan anggaran besar dalam waktu bersamaan.

"Banyak teman-teman pemerintah daerah yang mengabaikan dana cadangan. Saat pelaksanaan Pilkada kemarin mereka cukup kerepotan karena harus mengeluarkan anggaran besar sekaligus. Jangan sampai pengalaman itu terulang lagi," tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwanto, menilai pembentukan dana cadangan merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan anggaran Pilgub 2029 sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Menurutnya, penghimpunan anggaran secara bertahap akan memberikan kepastian pembiayaan penyelenggaraan Pilgub tanpa mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Persetujuan DPRD terhadap Raperda Dana Cadangan menjadi langkah awal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat, terencana, dan berkelanjutan menjelang Pilgub Jawa Tengah 2029.

Ekspor Korsel Terus Menguat Seiring Berlanjutnya Booming Cip

Sabtu, 1 Agustus 2026 16:11 WIB

Heesu Lee and Jaehyun Eom

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116954/ekspor-korsel-terus-menguat-seiring-berlanjutnya-booming-cip/2>

Bloomberg, Ekspor Korea Selatan melanjutkan pertumbuhan yang kuat pada Juli 2026, memperkuat tanda-tanda bahwa permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan terus menopang perekonomian dan memperkuat alasan untuk pengetatan moneter lebih lanjut.

Ekspor yang disesuaikan dengan perbedaan hari kerja naik 69,6% bulan lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada Sabtu (1/8/2026).

Impor meningkat 26,5%, menghasilkan surplus perdagangan sebesar US\$30,3 miliar. Secara tidak disesuaikan, pengiriman naik 62,8%, dibandingkan dengan kenaikan revisi 70,7% untuk Juni penuh.

Semikonduktor kembali mendorong kenaikan, didukung oleh investasi berkelanjutan dalam AI dan pusat data. Ekspor cip melonjak 178,8% dari tahun sebelumnya, sementara pengiriman produk terkait komputer meningkat 404%.

Data tersebut menunjukkan permintaan eksternal tetap tangguh meskipun harga energi yang lebih tinggi dan ketegangan geopolitik terus membebani industri lain.

Hal itu memberikan dukungan baru untuk pandangan Bank Sentral Korea bahwa momentum ekonomi cukup kuat untuk menahan peningkatan biaya pinjaman.

Angka-angka tersebut juga mendukung keputusan Bank Sentral Korea (BOK) bulan lalu untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 2,75%, kenaikan pertama sejak awal tahun 2023.

Survei terbaru terhadap para ekonom menunjukkan mereka memperkirakan kenaikan lebih lanjut pada bulan Oktober, dengan sebagian kecil memperkirakan hal itu dapat terjadi pada rapat dewan direksi pada 27 Agustus.

Gubernur Shin Hyun Song kemudian mengatakan para pembuat kebijakan masih melihat perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut, meskipun waktu dan kecepatannya akan bergantung pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan.

Inflasi konsumen meningkat 3,2% bulan lalu dibandingkan tahun sebelumnya, sementara inflasi inti tetap di 2,5%, menunjukkan tekanan harga yang mendasarinya tetap ada

Sementara itu, ekonomi tumbuh 0,6% pada kuartal kedua dibandingkan tiga bulan sebelumnya, melampaui ekspektasi para ekonom.

Pemerintah Korsel memperkirakan ekonomi akan tumbuh 3% tahun ini, melampaui perkiraan BOK dan Dana Moneter Internasional karena investasi terkait AI terus meningkatkan ekspor dan permintaan domestik.

Shin mengatakan proyeksi pertumbuhan 2,6% tahun ini yang dibuat bank pada bulan Mei sekarang tampak terlalu rendah dan akan direvisi naik "secara substansial" pada Agustus, dengan alasan ekspor, investasi, dan konsumsi yang lebih kuat dari perkiraan.

Ekspor ke China meningkat 96,2%, sementara pengiriman ke AS naik 68,7%, dan pengiriman ke Uni Eropa dan kawasan ASEAN tetap kuat, mencerminkan permintaan yang berkelanjutan untuk semikonduktor dan produk terkait AI lainnya.

Warsh Wacanakan Pengurangan Frekuensi Rapat Suku Bunga The Fed

Sabtu, 1 Agustus 2026 10:00 WIB

Enda Curran

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/116930/warsh-wacanakan-pengurangan-frekuensi-rapat-suku-bunga-the-fed/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh tengah mempertimbangkan untuk mengurangi frekuensi rapat kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS), demikian dilaporkan The New York Times pada Jumat (31/7).

Menurut laporan tersebut, Warsh mengemukakan usulan untuk mengubah frekuensi rapat dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) pekan ini. Juru bicara The Fed menolak memberikan komentar.

Saat ini, para pembuat kebijakan The Fed menggelar rapat sebanyak delapan kali dalam setahun. Setiap pertemuan berlangsung selama dua hari dan diakhiri dengan pengumuman keputusan kebijakan moneter. Jika direalisasikan, pengurangan jumlah rapat akan menjadi perubahan besar bagi bank sentral AS, di tengah kritik investor terhadap upaya Warsh yang dinilai mengurangi panduan kepada pasar mengenai arah suku bunga, sekaligus meningkatnya tekanan agar The Fed mengambil langkah lebih tegas dalam mengendalikan inflasi.

Pada Rabu, para pembuat kebijakan The Fed memutuskan dengan suara 9:3 untuk mempertahankan suku bunga acuan. Keputusan tersebut memang telah diperkirakan secara luas, namun investor kecewa setelah Warsh tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik keputusan itu maupun menyatakan apakah ia akan mendukung kenaikan suku bunga jika inflasi gagal melambat.

Warsh, yang mulai menjabat sebagai Gubernur The Fed pada Mei lalu, sebelumnya telah mengisyaratkan sejumlah perubahan lain, termasuk kemungkinan mengurangi jumlah konferensi pers yang digelar setelah pengumuman keputusan kebijakan. Ia juga mengumumkan pembentukan lima gugus tugas untuk mengkaji berbagai kemungkinan perubahan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, mulai dari strategi komunikasi, penggunaan data, hingga pengelolaan neraca The Fed.

Dalam sidang konfirmasi di Senat pada April lalu, Warsh sempat ditanya apakah ia berkomitmen menggelar rapat FOMC setidaknya sekali setiap delapan pekan.

"Saya percaya undang-undang mensyaratkan minimal empat pertemuan, tetapi empat kali tidaklah cukup," kata Warsh saat itu. "Karena itu, mengadakan lebih banyak pertemuan merupakan hal yang tepat. Namun saya bahkan belum mulai meninjau jadwal rapat untuk tahun 2027 dan seterusnya."

The Fed sendiri telah menetapkan jadwal rapat hingga sisa tahun 2026, yakni pada September, Oktober, dan Desember, serta menjadwalkan seluruh pertemuan sepanjang 2027. Dalam situs resminya, The Fed mencantumkan keterangan bahwa "setiap tanggal rapat bersifat tentatif hingga dikonfirmasi pada pertemuan sebelumnya," sebuah ketentuan yang sebenarnya sudah berlaku sebelum Warsh menjabat sebagai gubernur.

Berdasarkan aturan prosedur FOMC, komite tersebut wajib menggelar setidaknya empat rapat setiap tahun di Washington, meski dapat mengadakan lebih banyak pertemuan bila diperlukan.

"Pertemuan diadakan atas panggilan Ketua Dewan Gubernur atau atas permintaan setidaknya tiga anggota komite," demikian bunyi aturan prosedur tersebut.

Selain rapat terjadwal, The Fed juga beberapa kali mengadakan pertemuan darurat ketika terjadi gejolak ekonomi maupun pasar keuangan, seperti pada awal pandemi Covid-19 pada 2020.

Komite penentu suku bunga The Fed terdiri dari 12 anggota, yakni tujuh pejabat Dewan Gubernur The Fed di Washington, termasuk Warsh, Gubernur Federal Reserve Bank New York yang menjabat sebagai wakil ketua FOMC, serta empat dari 12 presiden bank sentral regional yang memperoleh hak suara secara bergiliran setiap tahun.

AS Menambah Daftar Larangan Impor dari 43 Perusahaan China Karena Dugaan Kerja Paksa

Sabtu, 1 Agustus 2026 21:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-menambah-daftar-larangan-impor-dari-43-perusahaan-china-karena-dugaan-kerja-paksa>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat menambah lagi daftar larangan impor dari 43 perusahaan China karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur dan kelompok minoritas lainnya, menargetkan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan mulai dari elektronik hingga makanan dan logam, menurut pemberitahuan pemerintah.

Mengutip Reuters, Sabtu (1/8/2026), perusahaan-perusahaan tersebut ditambahkan ke Daftar Entitas Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian dibuat oleh entitas yang terdaftar dibuat dengan kerja paksa dan tidak dapat masuk ke Amerika Serikat kecuali importir dapat membuktikan sebaliknya.

Beijing secara teratur menolak tuduhan kerja paksa dan pelanggaran lainnya terhadap Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menandai pertama kalinya perusahaan ditambahkan ke daftar tersebut di bawah pemerintahan Trump.

Ini meningkatkan jumlah entitas yang disebutkan menjadi 187 dari 144. Perluasan terbesar sejak undang-undang yang menciptakan daftar tersebut disahkan pada tahun 2021.

China Akan Mengambil Langkah-Langkah yang Diperlukan

Kementerian Perdagangan China pada hari Sabtu mengutuk tindakan AS sebagai sanksi sepihak yang tidak berdasar, yang menurut mereka terjadi hanya sehari setelah pejabat perdagangan dari kedua negara melakukan apa yang mereka sebut sebagai panggilan video yang konstruktif.

China akan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk melindungi perusahaan-perusahaannya, tambah kementerian tersebut tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Empat perusahaan dimasukkan dalam daftar pemerintah AS karena sebagai kerja sama mereka dengan otoritas Xinjiang untuk merekrut, mentransfer, atau menerima warga Uyghur dan kelompok-kelompok yang dianiaya lainnya.

Pemberitahuan Federal Register mengatakan 41 perusahaan lainnya ditambahkan karena mereka memasok bahan dari Xinjiang atau dari entitas yang terkait dengan program tenaga kerja pemerintah di sana.

"Tindakan pemerintahan Trump hari ini memperkuat ekonomi Amerika terhadap produk-produk yang dibuat dengan kerja paksa," kata Perwakilan John Moolenaar, ketua Komite Pilihan DPR untuk China, dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan Besar China di Washington menyebut tuduhan tersebut sebagai "kebohongan" pada hari Jumat dan mengatakan hukum China melarang kerja paksa dan bahwa pekerja di Xinjiang bebas memilih pekerjaan mereka.

Termasuk Perusahaan dengan Keterkaitan Penjualan di AS

Daftar tersebut mencakup pemasok bahan yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi.

Reuters menghubungi 10 perusahaan yang baru terdaftar untuk meminta komentar, tetapi tidak ada yang menanggapi di luar jam kerja normal.

Termasuk SDIC Xinjiang Lithium Industry, yang memproduksi lithium karbonat, dan perusahaan induknya, SDIC Xinjiang Luobupo Potash, yang terdaftar karena sumber lithium dan kalium mereka dari air garam di Danau Garam Lop Nur Xinjiang.

Xinjiang Tianhongji Technology, yang memproduksi bahan untuk baterai lithium-ion dan natrium-ion, juga ditambahkan. Pemberitahuan AS menyebutkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan kokas minyak bumi, antrasit, dan aspal dari Xinjiang untuk membuat bahan baterai.

Hunan Aihua Group, produsen kapasitor elektrolit aluminium asal Tiongkok yang digunakan dalam elektronik konsumen, peralatan industri, kendaraan, dan sistem energi terbarukan, tercantum dalam daftar karena pemerintah AS mengatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan bahan-bahan termasuk foil kimia dari basis produksi di Xinjiang.

Aihua menjual kapasitor dengan merek AiSHi dan memiliki kantor penjualan Amerika Utara di Glen Allen, Virginia, menurut situs webnya. Produk-produknya juga dijual oleh distributor elektronik AS, DigiKey.

Chacha Food, produsen makanan ringan, juga ditambahkan. Pemberitahuan AS menyebutkan bahwa Chacha mengekspor produk termasuk kacang-kacangan dan biji-bijian panggang ke hampir 50 negara dan wilayah serta mendapatkan produk pertanian dari Xinjiang.

Chacha Food sebelumnya telah mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai pasar luar negeri terbesarnya. Dalam laporan tahun 2019, surat kabar milik negara China Daily mengatakan perusahaan tersebut telah meluncurkan produk di toko-toko Walmart dan Costco, terutama di New York dan Los Angeles. Reuters tidak dapat segera memastikan apakah pengaturan ritel tersebut masih berlaku.

Perusahaan-perusahaan yang dihubungi Reuters untuk diminta komentar tidak segera menanggapi di akun media sosial mereka terkait pencatatan di AS atau detail di dalamnya.

Di antara yang terbesar adalah TBEA Co, yang memproduksi transformator dan peralatan transmisi lainnya, produk aluminium, dan polisilikon kemurnian tinggi, material yang digunakan dalam panel surya.

Pemberitahuan AS tersebut menyatakan TBEA memasok aluminium dan produk paduan aluminium dari Xinjiang. TBEA juga mencantumkan anak perusahaan Xinjiang Tianchi Energy, dengan menyatakan bahwa unit tersebut memasok batubara dari wilayah tersebut.

Tindakan ini juga mencakup Tianshan Aluminum Group dan tujuh afiliasinya. Tianshan menyatakan memiliki kapasitas produksi aluminium elektrolitik tahunan sebesar 1,4 juta ton dan lini produksi alumina sebesar 2,5 juta ton.

Shandong Gold Mining, yang memiliki aset atau proyek di Tiongkok, Argentina, Ghana, dan Namibia, juga tercantum bersama dengan unit-unit termasuk Shandong Gold Smelting.

Pemberitahuan AS menyatakan bahwa grup tersebut memasok emas dari Xinjiang, dan salah satu anak perusahaannya memiliki dan mengoperasikan tambang emas tunggal terbesar di wilayah tersebut.

Departemen Keuangan AS Lakukan Intervensi untuk Menopang Yen yang Terpuruk

Sabtu, 1 Agustus 2026 15:31 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/departemen-keuangan-as-lakukan-intervensi-untuk-menopang-yen-yang-terpuruk>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Keuangan AS membeli yen pada hari Jumat untuk mendukung mata uang Jepang yang terpuruk, menurut laporan Financial Times yang dikutip Reuters, Sabtu (1/8/2026).

Hal ini menandai intervensi pembelian yen pertama Washington dengan Tokyo dalam lebih dari satu dekade karena nilainya merosot di dekat level terendah 40 tahun.

Bank Federal Reserve New York menjual euro untuk yen atas nama Departemen Keuangan melalui Goldman Sachs dan Morgan Stanley, kata FT, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Laporan tersebut tidak menyebutkan jumlah yen yang dibeli.

Sebelumnya pada hari Jumat, Departemen Keuangan memberi tahu sejumlah bank bahwa mereka mungkin akan melakukan intervensi di pasar yen dan bahwa mereka harus "bersiap untuk tindakan di masa mendatang," kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Foto Reuters yang menunjukkan buku catatan Menteri Keuangan Scott Bessent selama rapat kabinet di Camp David, Maryland, menunjukkan kata-kata "Yang Harus Dilakukan," diikuti oleh "Beli Yen Jepang (JPY) US\$ 5 miliar-US\$ 10 miliar."

Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai laporan FT dan foto buku catatan Bessent.

Bank Sentral AS (New York Fed) dan Morgan Stanley juga tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja reguler. Goldman Sachs menolak berkomentar.

AS terakhir kali secara langsung mendukung yen pada tahun 2011, berkoordinasi dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya untuk menstabilkan pasar setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang.

Kabar tentang potensi intervensi oleh Departemen Keuangan membantu meningkatkan nilai yen, dengan lonjakan yang signifikan selama perdagangan sore hari.

Dolar AS turun menjadi sekitar 157,6 yen tepat sebelum pukul 17.00 EDT (2100 GMT) dari sekitar 158,9 yen sekitar pukul 16.14, menurut data LSEG.

Mata uang AS telah menguat dalam beberapa pekan terakhir hingga hampir mencapai 164 yen, level tertinggi sejak 1986.

Jepang mungkin telah mengeluarkan US\$ 58,97 miliar untuk membeli yen pada hari Kamis, menurut data bank sentral pada hari Jumat, yang menandakan upaya berulang Jepang untuk membendung pelemahan yen.

Tokyo kembali melakukan intervensi pada jam perdagangan New York pada hari Jumat, menurut laporan Nikkei pada hari Sabtu.

Para pejabat Kementerian Keuangan tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar di luar jam kerja, tetapi kementerian tersebut, dalam upaya nyata untuk meredakan kekhawatiran pasar tentang keterbatasan kekuatan Jepang untuk intervensi skala besar, memposting di X bahwa otoritas moneter Jepang memiliki "berbagai macam alat untuk mengatasi kebutuhan likuiditas pasar."

"Kami tetap siap menggunakan instrumen yang tersedia jika diperlukan untuk mendukung fungsi pasar yang tertib," termasuk potensi akses ke Fasilitas Repo Otoritas Moneter Asing dan Internasional (FIMA) yang dimiliki Federal Reserve," kata kementerian tersebut.

Fasilitas repo FIMA, yang diperkenalkan pada tahun 2020 untuk menstabilkan pasar selama pandemi Covid-19, memungkinkan Jepang untuk meningkatkan likuiditas dolar tanpa penjualan langsung obligasi pemerintah AS, yang berpotensi mengurangi tekanan pendanaan pada Tokyo untuk melakukan intervensi.

Survei Bloomberg: Juni, Neraca Dagang RI Diramal Defisit Lagi

Sabtu, 1 Agustus 2026 09:19 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116926/survei-bloomberg-juni-neraca-dagang-ri-diramal-defisit-lagi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data perdagangan pada Senin (3/8/2026). Konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026), memperkirakan impor Indonesia pada Juni 2026 tumbuh 22,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), nyaris tidak berubah dari realisasi Mei sebesar 22,16%.

Sebaliknya, ekspor diperkirakan masih berkontraksi 0,4%, meski membaik dibanding kontraksi Mei sebesar 5,73%.

Jika terealisasi, perbaikan yang terjadi pada impor bisa dibaca sebagai tanda bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergairah. Namun, data ekspor yang masih berkontraksi menggambarkan bahwa mesin

penghasil devisa sepertinya belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan domestik yang tergambar dari impor.

Kombinasi ini dapat menciptakan tantangan, khususnya bagi stabilitas rupiah.

Selain impor barang modal, mesin, dan bahan baku, yang mencerminkan perusahaan sedang meningkatkan kapasitas produksinya, Indonesia juga masih punya ketergantungan tinggi terhadap komponen elektronik, hingga energi seperti minyak mentah dan LPG.

Jika nilai impor meningkat di tengah pelemahan rupiah, kebutuhan dolar AS untuk membiayai transaksi tersebut ikut melonjak. Biaya produksi berpotensi menjadi lebih mahal, risiko imported inflation meningkat, dan tekanan terhadap nilai tukar semakin besar.

Sementara, sinyal dari sektor ekspor terlihat belum sepenuhnya pulih dan menunjukkan bahwa permintaan global terhadap produk Indonesia belum kembali kuat.

Artinya, arus dolar yang masuk dari ekspor masih terbatas, sementara arus dolar yang keluar untuk membayar impor tetap besar. Ketidakseimbangan inilah yang jadi salah satu faktor fundamental di balik kerentanan rupiah dalam beberapa bulan terakhir.

Kondisi tersebut mengingatkan bahwa yang menentukan stabilitas nilai tukar bukan cuma seberapa cepat ekonomi tumbuh, tapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut dibiayai.

Kala ekspansi ekonomi lebih banyak bergantung pada impor dibandingkan kemampuan menghasilkan devisa melalui ekspor, tekanan terhadap neraca eksternal yang meningkat tak terhindarkan.

Sebagai catatan, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit sebesar US\$1,61 miliar pada Mei 2026. Ini merupakan defisit pertama sejak April 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada awal bulan lalu, penyebab defisit terbesar adalah defisit komoditas migas sebesar US\$3,76 miliar yang berasal dari komoditas minyak dan minyak mentah.

Untuk Juni, konsensus Bloomberg menghasilkan median proyeksi neraca perdagangan Indonesia defisit US\$756 juta. Masih minus, tetapi ada perbaikan ketimbang bulan sebelumnya.

Harga minyak mentah yang tetap tinggi meningkatkan nilai impor energi Indonesia, sementara penguatan dolar AS membuat rupiah semakin rentan terhadap arus keluar modal.

Meski begitu, inflasi domestik diperkirakan masih relatif terkendali. Konsensus Bloomberg menghasilkan median proyeksi inflasi Juli di 3,16% secara bulanan (month-to-month/mtm), melambat dari inflasi sebelumnya 3,34% mtm.

Dalam kondisi seperti ini, prioritas Bank Indonesia (BI) kemungkinan tetap berfokus pada menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan mempertahankan kebijakan moneter yang relatif ketat.

Meski demikian, belum semua sinyal bersifat negatif. Perbaikan ekspor dari kontraksi 5,73% menuju hampir nol menunjukkan bahwa permintaan eksternal mulai membaik.

Jika tren ini berlanjut pada semester kedua, sementara impor tetap didominasi oleh barang modal dan bahan baku produktif, maka ekspansi impor saat ini dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas produksi dan ekspor pada periode berikutnya.

Namun, hingga skenario tersebut benar-benar terwujud, rupiah sepertinya masih akan menghadapi tantangan berat.

Purbaya: Kenaikan Tukin Kemhan & TNI Tak Perlebar Defisit APBN

Sabtu, 1 Agustus 2026 14:45 WIB

Dovana Hasiana

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116953/purbaya-kenaikan-tukin-kemhan-tni-tak-perlebar-defisit-apbn/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menurut Bendahara Negara, hal ini terjadi karena pemerintah sudah melakukan perhitungan mengenai kenaikan tukin tersebut.

Terlebih, kebijakan kenaikan tukin bagi pegawai Kemenhan dan prajurit TNI sebenarnya sudah diputuskan sejak 2025, tetapi baru dilaksanakan tahun ini.

“Itu kan sudah lama, itu kan kebijakannya diputuskan tahun lalu kalau tidak salah tetapi eksekusinya tahun ini. Jadi sudah, sudah ada hitungannya. Tidak [memperlebar defisit APBN 2026],” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2026).

Untuk diketahui, pemerintah mematok defisit pada level 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada APBN 2026.

Per Juni 2026, realisasi defisit adalah 0,76% terhadap PDB, sedikit sedikit melebar dari angka 0,7% pada 31 Mei 2026.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai kenaikan tukin bagi pegawai Kemenhan dan prajurit TNI.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan penyesuaian dilakukan melalui peningkatan indeks tunjangan kinerja dari sebelumnya sekitar 70% menjadi 90% dari nilai tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan.

Sebelumnya, pembayaran tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemenhan menggunakan indeks 70% dari nilai tukin nasional sesuai kelas jabatan.

Sementara itu, melalui perpres terbaru, tukin dinaikkan menjadi 90%. Dengan demikian, nominal tukin yang diterima juga meningkat sesuai kelas jabatan masing-masing.

Namun, kata dia, ini bukan berarti kenaikan nominal sebesar 20%, melainkan hanya kenaikan indeks pembayaran dari 70% menjadi 90%, sedangkan nominal pastinya berbeda pada setiap kelas jabatan.

"Benar, Presiden [Prabowo Subianto] telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kemenhan juga telah menerima salinan Peraturan Presiden tersebut dan saat ini sedang menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar dia saat dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (29/7/2026).

Rico belum mengelaborasi mengenai nominal kenaikan tukin tersebut. Namun, menyitir Peraturan Presiden No. 102/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia,

besaran tunjangan yang diberikan kepada prajurit TNI adalah pada rentang Rp1,96 juta hingga Rp37,81 juta pada 2018.

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden No. 104/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, besaran tunjangan yang diberikan kepada pegawai Kemenhan adalah pada rentang Rp1,96 juta hingga Rp29,08 juta pada 2018.

Ekonomi Kuartal II-2026 Diproyeksi Tumbuh di Atas 5%, Ditopang Belanja Pemerintah

Sabtu, 1 Agustus 2026 21:10 WIB

Reporter: Anna Suci Perwitasari, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-kuartal-ii-2026-diproyeksi-tumbuh-di-atas-5-ditopang-belanja-pemerintah>

KONTAN.CO.ID - PARAPAT. Bank Danamon memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2026 tetap berada di atas 5%.

Kenaikan belanja pemerintah yang mencapai 20% diproyeksi jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026.

“Kami proyeksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 bisa berada di kisaran 5,2%-5,3%,” kata ekonom Bank Danamon Hosianna E. Situmorang dalam Editor Briefing, Jumat (31/7/2026).

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi ini datang karena pemerintah makin menggenjot belanja. Di mana sejumlah proyek strategis terus digeber untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tetap tinggi di periode April-Juni 2026. Apalagi porsi konsumsi rumah tangga di pertumbuhan ekonomi cukup besar.

Di sisi lain, realisasi investasi di kuartal II-2026 yang mencapai Rp 511,8 triliun atau naik 7,1% secara tahunan, menambah amunisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode April - Juni 2026.

Apalagi, realisasi investasi tersebut lebih ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) yang melonjak 27,5% YoY di kuartal II-2026.

Hal tersebut jadi sinyal positif di tengah ketidakpastian global. Di mana membuktikan investor asing masih optimistis terhadap prospek jangka panjang Indonesia.

Lebih lanjut Hosianna bilang, dampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang berlangsung di bulan Mei dan Juni 2026 belum terlihat di kuartal II-2026.

Inflasi Tahunan Juli 2026 Diproyeksi Naik Jadi 3,54%, Berikut Pendorongnya

Sabtu, 1 Agustus 2026 16:45 WIB

Reporter: Anna Suci Perwitasari, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-tahunan-juli-2026-diproyeksi-naik-jadi-354-berikut-pendorongnya>

KONTAN.CO.ID - PARAPAT. Inflasi tahunan di Juli 2026 diproyeksi naik dibanding inflasi tahunan Juni 2026 yang sudah mencapai 3,34%.

Ekonom Bank Danamon Hosianna E. Situmorang memperkirakan, inflasi Juli 2026 secara tahunan akan ada di kisaran 3,54%.

Jika proyeksi inflasi di Juli 2026 tembus, maka target inflasi dari Bank Indonesia terlampaui.

Asal tahu saja, BI masih mempertahankan target inflasi di posisi 2,5% plus minus 1%.

Hosianna menjelaskan, kenaikan inflasi ini didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, administered price masih memberikan dampak lanjutan dari penyesuaian harga energi dan tarif transportasi pada bulan sebelumnya.

"Kedua, inflasi inti diperkirakan meningkat bertahap seiring masih berlangsungnya pass-through pelemahan rupiah dan kenaikan biaya input ke harga barang dan jasa," tambah Hosianna dalam Editor Briefing, Jumat (31/7/2026).

Ketiga, meskipun volatile food mulai menunjukkan perbaikan berkat membaiknya pasokan beberapa komoditas pangan, tekanan harga akibat musim kering masih membuat inflasi pangan tetap perlu diwaspadai.

"Ke depan, kami melihat inflasi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia pada akhir tahun dengan respons kebijakan yang memadai, namun semakin mendekati batas atas," katanya.

Perluas Basis Pajak, Bank Dunia Dorong Ambang Pengusaha Kena Pajak Rp 500 Juta

Sabtu, 1 Agustus 2026 13:53 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/perluas-basis-pajak-bank-dunia-dorong-ambang-pengusaha-kena-pajak-rp-500-juta>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia menurunkan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta.

Lembaga tersebut menilai batas PKP yang berlaku saat ini terlalu tinggi sehingga mempersempit basis pajak, mendorong praktik penghindaran pajak, serta mengganggu efektivitas sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jika dibarengi dengan reformasi kebijakan PPN lainnya, langkah ini diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga sekitar 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses Tax Potential for Growth yang dirilis pada Juli 2026.

Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut ambang batas PKP Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, yakni setara hampir 70 kali PDB per kapita nasional.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan ambang batas yang diterapkan sejumlah negara ASEAN seperti Kamboja, Filipina, dan Thailand, maupun negara-negara anggota OECD berpendapatan menengah.

Bank Dunia menilai tingginya ambang batas tersebut memunculkan sejumlah persoalan struktural dalam sistem perpajakan.

"Ambang batas yang terlalu tinggi mendorong pelaku usaha melaporkan omzet lebih rendah atau memecah usahanya agar tetap berada di bawah batas PKP," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Laporan itu mengungkapkan, pelaku usaha memiliki insentif untuk menahan pertumbuhan usahanya atau membagi kegiatan bisnis menjadi beberapa entitas agar tidak wajib memungut PPN.

Temuan tersebut didukung analisis data administratif periode 2014–2017 yang menunjukkan adanya konsentrasi jumlah perusahaan tepat di bawah ambang batas PKP.

Fenomena ini paling banyak ditemukan pada sektor perdagangan grosir dan eceran yang masih didominasi transaksi tunai serta penggunaan faktur non-digital.

Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut tidak hanya mempersempit basis penerimaan pajak, tetapi juga mengurangi efisiensi sistem PPN.

Lembaga itu menjelaskan, pembebasan PPN bagi perusahaan di tengah rantai produksi dapat memicu efek berjenjang (cascading effect).

Perusahaan yang membeli barang atau jasa dari pemasok non-PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan, sehingga biaya produksi meningkat dan harga menjadi terdistorsi di sepanjang rantai pasok.

Karena itu, Bank Dunia mengusulkan ambang batas PKP diturunkan menjadi Rp 500 juta per tahun.

Usulan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, besaran itu dinilai mendekati ambang batas Rp 600 juta yang pernah berlaku di Indonesia sebelum pemerintah menaikkannya menjadi Rp 4,8 miliar pada 2014.

Kedua, berdasarkan data World Bank Enterprise Survey (WBES) 2023, sekitar 66,4% perusahaan formal di Indonesia memiliki omzet tahunan di bawah Rp 1 miliar. Dari jumlah tersebut, 46,9% bahkan mencatatkan omzet di bawah Rp 500 juta.

Dengan demikian, penurunan ambang batas menjadi Rp 500 juta dinilai dapat memperluas basis wajib pajak secara signifikan, namun tetap tidak membebani sebagian besar pelaku usaha mikro dengan skala omzet paling kecil.

Bank Dunia juga menilai dampak reformasi akan lebih besar apabila penurunan ambang batas PKP disertai penghapusan pembebasan PPN di sejumlah sektor, seperti industri ekstraktif, impor mesin, serta layanan kesehatan dan pendidikan swasta.

Melalui kombinasi kebijakan tersebut, Bank Dunia memperkirakan Indonesia berpotensi memperoleh tambahan penerimaan pajak sekitar 0,5% dari PDB dalam jangka menengah sekaligus meningkatkan efisiensi sistem PPN dan memperkuat kepatuhan perpajakan.

SAL Pemerintah Menyusut, Bantalan Fiskal dan Likuiditas APBN Mulai Tertekan

Sabtu, 1 Agustus 2026 12:16 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/sal-pemerintah-menyusut-bantalan-fiskal-dan-likuiditas-apbn-mulai-tertekan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bantalan fiskal pemerintah mulai menyusut setelah sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Di saat yang sama, posisi kas pemerintah juga mengalami penurunan tajam, mencerminkan ruang likuiditas yang semakin terbatas meski saldo cadangan anggaran masih tergolong besar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), posisi SAL pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp 438,26 triliun, turun dari Rp 457,54 triliun pada awal tahun.

Penurunan tersebut terjadi setelah pemerintah memanfaatkan sekitar Rp 93,15 triliun SAL sebagai bagian dari pembiayaan APBN.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, realisasi pembiayaan lainnya mencapai Rp 93,94 triliun, yang hampir seluruhnya berasal dari pemanfaatan SAL.

Secara keseluruhan, pembiayaan APBN 2025 mencapai Rp 742,73 triliun atau 120,54% dari target. Namun, realisasinya hanya sebesar Rp 670,34 triliun, sehingga pemerintah masih mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 72,40 triliun.

Di sisi lain, tekanan terhadap likuiditas pemerintah terlihat dari menyusutnya posisi kas dan setara kas pemerintah pusat.

Hingga akhir 2025, kas pemerintah tercatat sebesar Rp 227,63 triliun, turun Rp 202,04 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp 429,67 triliun.

Penurunan terbesar berasal dari dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia dan bank umum. Nilainya merosot dari sekitar Rp 350 triliun pada 2024 menjadi Rp 150,54 triliun pada akhir 2025, yang terdiri atas kas rupiah sebesar Rp 123,17 triliun dan kas valuta asing Rp 27,38 triliun.

Meski sama-sama menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara, SAL dan kas pemerintah memiliki fungsi berbeda.

SAL merupakan akumulasi sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN, sedangkan kas dan setara kas menunjukkan dana yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pemerintah dalam jangka pendek.

Karena itu, besarnya SAL tidak serta-merta mencerminkan longgarnya likuiditas pemerintah.

Pengelolaan kas pemerintah kembali menjadi perhatian setelah muncul proyeksi kenaikan SiLPA pada 2026.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memperkirakan SiLPA tahun ini dapat mencapai Rp 255,5 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 72,40 triliun.

Ia menilai tingginya SiLPA menunjukkan perlunya penyempurnaan strategi pembiayaan pemerintah, terutama dalam perencanaan penerbitan utang dan penempatan dana agar biaya pembiayaan dapat lebih efisien.

"Tingginya SiLPA menandakan perencanaan pembiayaan utang dan investasi perlu disempurnakan," ucapnya kemarin

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa potensi SiLPA yang besar bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran, melainkan merupakan bagian dari strategi cash management pemerintah.

Menurutnya, pemerintah sengaja melakukan front loading atau penerbitan surat utang lebih awal ketika posisi kas mendekati batas minimum yang ditetapkan.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan dana sehingga pemerintah memiliki bantalan likuiditas yang memadai selama tahun anggaran berjalan.

Penerbitan utang lebih awal membuat posisi kas meningkat, sementara realisasi belanja dilakukan secara bertahap. Selisih tersebut kemudian tercatat sebagai SiLPA dalam laporan keuangan.

Meski demikian, pemerintah memastikan SiLPA akan menyusut menjelang akhir tahun karena APBN 2026 tetap dirancang dalam kondisi defisit.

Selain menjaga likuiditas negara, pemerintah juga akan menempatkan dana SAL secara bertahap sebesar Rp 381 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil guna mendukung aktivitas ekonomi.

Transmigrasi Kini Fokus Ciptakan Lapangan Kerja, Bukan Kejar Kuota

Sabtu, 1 Agustus 2026 10:50 WIB

Reporter: Dina Mirayanti Hutaaruk, Editor: Dina Hutaaruk

<https://nasional.kontan.co.id/news/transmigrasi-kini-fokus-ciptakan-lapangan-kerja-bukan-kejar-kuota>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Transmigrasi mengubah paradigma pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan keberhasilan pada penciptaan lapangan kerja, masuknya investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada jumlah penduduk yang dipindahkan.

Melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026, Kementerian Transmigrasi berupaya mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mendorong kolaborasi untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Sebanyak 1.476 peserta TEP 2026 telah dilepas pada 29 Juli 2026 yang akan bertugas di berbagai kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi daerah, memperkuat kapasitas masyarakat, dan membuka peluang investasi berbasis potensi lokal.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, keberhasilan transmigrasi kini tidak lagi diukur dari jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan dari penciptaan lapangan kerja, masuknya investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan transmigrasi diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal,” kata Ifitah dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (1/8/2026).

Untuk itu, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 ditugaskan memetakan potensi kawasan sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Model ini mulai menunjukkan hasil. Di Kawasan Transmigrasi Toriawang, Halmahera Utara, investasi industri pengolahan kelapa telah menciptakan ribuan lapangan kerja dan diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Skema pengembangan berbasis investasi dan hilirisasi ini akan direplikasi ke kawasan transmigrasi lain.

Di Papua, Kementerian Transmigrasi menempatkan sekitar 1.200 personel TEP di 10 kawasan transmigrasi. Mereka akan mendukung peningkatan kualitas SDM, penguatan kapasitas masyarakat, dan percepatan pengembangan ekonomi sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kementerian UMKM Tegaskan KUR hingga Rp 100 Juta Tak Perlu Agunan Tambahan

Sabtu, 1 Agustus 2026 07:17 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-umkm-tegaskan-kur-hingga-rp-100-juta-tak-perlu-agunan-tambahan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp 100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan.

Pemerintah meminta masyarakat melapor apabila masih menemukan penyalur yang meminta jaminan tambahan maupun pungutan biaya dalam proses pengajuan KUR.

Deputi Bidang Kewirausahaan sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, ketentuan tersebut telah tercantum dalam pedoman pelaksanaan KUR.

"Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp 100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian," kata Riza dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan setelah Kementerian UMKM masih menerima aspirasi masyarakat mengenai dugaan permintaan agunan tambahan kepada pemohon KUR skema mikro.

Pemerintah juga menerima laporan terkait permintaan biaya jasa atau fee dalam proses memperoleh pembiayaan tersebut.

Riza menegaskan masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara maupun membayar biaya untuk mendapatkan akses KUR.

Merujuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif dan layak yang belum memiliki akses terhadap kredit komersial.

"KUR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan," ujarnya.

Dalam ketentuan KUR terdapat dua jenis agunan, yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai melalui KUR beserta kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman.

Sementara agunan tambahan dapat berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), maupun aset pribadi lainnya.

Kementerian UMKM menegaskan lembaga penyalur tidak diperkenankan meminta agunan tambahan kepada debitur dengan plafon KUR hingga Rp 100 juta.

Dengan demikian, calon penerima pada kelompok tersebut cukup menggunakan usaha yang dibiayai melalui KUR sebagai agunan pokok.

"Calon penerima KUR hingga Rp 100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR," jelas Riza.

Berbeda dengan KUR hingga Rp 100 juta, agunan tambahan dapat diberlakukan untuk pinjaman dengan plafon di atas Rp 100 juta.

Namun terdapat pengecualian bagi petani tebu rakyat serta penerima KUR khusus sektor pertanian yang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.

Pemerintah pun meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program KUR. Apabila menemukan permintaan agunan tambahan untuk KUR hingga Rp 100 juta, pungutan biaya yang tidak sesuai ketentuan maupun praktik percaloan, masyarakat diminta segera melaporkannya.

Laporan dapat disampaikan melalui kanal SPAN-LAPOR! maupun surat elektronik KUR yang disediakan pemerintah. Kementerian UMKM menyatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

Pemerintah Siapkan Pelunasan DBH Rp 70 Triliun untuk Ringankan Fiskal Daerah

Sabtu, 1 Agustus 2026 06:59 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-pelunasan-dbh-rp-70-triliun-untuk-ringankan-fiskal-daerah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mempercepat upaya memperkuat kondisi fiskal pemerintah daerah dengan menyiapkan penyelesaian tunggakan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 70 triliun.

Langkah ini dinilai penting untuk membantu ratusan daerah yang tengah menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk memenuhi belanja pegawai dan menjaga pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan data hingga 2024, total kurang bayar DBH mencapai sekitar Rp 83 triliun. Nilai tersebut terdiri dari kurang bayar DBH pajak sebesar Rp 43 triliun dan DBH sumber daya alam (SDA) sekitar Rp 40 triliun.

Namun, setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran DBH di sejumlah daerah, kewajiban pemerintah pusat yang masih harus diselesaikan menjadi sekitar Rp 70 triliun.

Permasalahan tersebut berdampak luas. Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 31 pemerintah provinsi, 317 pemerintah kabupaten, dan 83 pemerintah kota yang masih memiliki persoalan kurang bayar DBH.

Tito menjelaskan, pelunasan tunggakan DBH akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama bagi pemerintah daerah yang mulai mengalami tekanan dalam membiayai belanja pegawai.

"Penyelesaian DBH akan memperkuat kemampuan fiskal daerah, terutama yang mengalami tekanan belanja pegawai," ujar Tito, Kamis (30/7/2026).

Kemendagri mencatat sedikitnya 79 daerah berpotensi mengalami kesulitan memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bagi daerah yang tidak memiliki piutang DBH namun tetap menghadapi tekanan fiskal, pemerintah menyiapkan skema lain berupa penambahan dana alokasi umum (DAU).

Tito mengatakan pemerintah telah memiliki data daerah-daerah yang membutuhkan dukungan tersebut. Menurut dia, penambahan DAU menjadi solusi bagi daerah yang tidak memiliki hak atas pembayaran DBH yang tertunda.

Skema tersebut telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sisi lain, Tito menegaskan pemerintah tidak akan menjadikan pengurangan jumlah PPPK sebagai solusi mengatasi tekanan fiskal daerah. Pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan PPPK meski sejumlah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi menilai pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat.

Di satu sisi, daerah dituntut mempercepat pembangunan, mendukung proyek strategis nasional, dan menjalankan berbagai program pemerintah. Di sisi lain, ruang fiskal terus menyempit akibat pemotongan anggaran dan kebijakan efisiensi.

Karena itu, APKASI berharap pemerintah tidak lagi melakukan pemangkasan anggaran pada 2027 agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah memetakan kondisi keuangan seluruh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pembayaran gaji pegawai dan penyelenggaraan pelayanan publik minimal.

Ia juga membuka peluang pemberian tambahan anggaran kepada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Namun, mekanisme maupun besaran tambahan dana tersebut masih menunggu arahan Presiden.

Menurut Purbaya, tambahan dukungan anggaran berpotensi menjangkau hingga sekitar 490 pemerintah daerah, bergantung pada keputusan Presiden mengenai skema dan alokasi yang akan diberikan.

Dua Pabrik Garmen di Jateng Tutup, DPMPTSP Sebut Ada Pergeseran Investasi

Sabtu, 1 Agustus 2026 21:20 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1261739/dua-pabrik-garmen-di-jateng-tutup-dpmptsp-sebut-ada-persegeran-investasi>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari menyebut tutupnya dua pabrik garmen di Jepara dan Semarang terjadi karena adanya pergeseran investasi.

Dampaknya, sektor garmen nilai investasinya turun yang sebelumnya menduduki tiga besar sektor realisasi investasinya kini masuk ke peringkat lima.

"Yang pasti ada pengaruhnya, tekstil dan garmen itu bergeser yang tadinya selalu tiga besar menjadi peringkat kelima," kata Sakina saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026).

Sebelumnya, dua pabrik garmen di Jateng meliputi PT Samwon Busana Indonesia Jepara dan PT Victory Apparel Semarang menyatakan bakal menutup pabriknya.

Mereka beralasan perusahaan merugi akibat dampak krisis ekonomi global sehingga bakal melakukan PHK secara massal yang menyasar ribuan buruh.

Menurut Sakina, pergeseran investasi juga terjadi pada jenis industri yang awalnya ke padat karya menjadi ke padat modal.

Hal itu sudah terlihat dalam investasi yang masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), yang didominasi padat modal.

Artinya, Kabupaten Batang secara besaran nilai investasi masuk tiga besar dengan angka investasi mencapai Rp6,11 triliun.

Angka itu berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerjanya yang menduduki posisi 11 dengan serapan hanya 6.584 orang.

Berbeda dengan Kendal, dengan nilai investasi yang tak jauh berbeda yakni di angka Rp6,56 triliun bisa menyerap sebanyak 19.386 tenaga kerja.

"Dari kondisi itu, kami berkoordinasi dengan BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas), agar memberikan pelatihan sesuai kebutuhan industri," paparnya.

Kendati demikian, Sakina mengaku, industri garmen masih menjadi tulang punggung industri di Jateng.

Secara terperinci, ia tidak bisa menyebutkan jumlah pabrik garmen di Jateng. Ia hanya bisa memperkirakan jumlah pabrik garmen di kawasan tersebut mencapai ratusan pabrik.

"Garmen, rajut dan non rajut masih menjadi andalan di Jateng yang 47,5 persen produknya diekspor ke Amerika," terangnya.

Ia menambahkan, industri padat karya masih diharapkan masuk ke Jateng sebagai salah satu solusi penyerapan tenaga kerja.

Meskipun di sisi lain, pihaknya juga terbuka pada sektor industri padat modal seperti dari sektor energi terbarukan.

Industri padat karya di Jateng juga masih menjadi andalan terutama dari industri barang dari kulit dan alas kaki yang nilai investasinya mencapai Rp5,85 triliun (semester I, 2026) yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 51.288 orang.

Industri Karet dan plastik nilai investasi sebesar Rp5,1 triliun menyerap sebanyak 11.534 orang. Industri kayu investasi Rp4,73 triliun menyerap 6.287 orang,

Sementara industri tekstil yang investasinya mencapai Rp3,92 triliun sebanyak 44.460 orang.

"Jawa Tengah masih membutuhkan industri padat karya agar mengurangi angka pengangguran," tambahnya.

Sementara, Pemprov Jateng memiliki target nilai investasi sebesar Rp99,09 triliun.

Capaian sementara investasi di Jateng di angka Rp48,54 triliun pada semester I 2026. Nilai investasi Jateng yang mencapai Rp48,54 triliun terdiri dari modal asing sebesar Rp25,92 (53,6 persen) triliun dan modal dalam negeri Rp22,62 triliun (46,6 persen).

Dari angka Rp48,54 triliun terdiri dari 55.989 proyek dengan serapan tenaga kerja sebanyak 213.217 orang.

Nilai investasi itu tersebar di lima besar daerah meliputi Kota Semarang Rp 6,57 Triliun, Kabupaten Kendal Rp6,56 Triliun, Kabupaten Batang Rp6,11 Triliun, Kabupaten Temanggung Rp4,58 Triliun, Kabupaten Demak Rp,34 Triliun.

Sektor investasi didominasi oleh industri barang dari kulit dan alas kaki dengan nilai Rp5,85 triliun, industri karet dan plastik Rp5,1 triliun, industri kayu Rp4,73 triliun.

Berikutnya Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, sebesar Rp4,21 triliun. Dan, Industri Tekstil Rp. 3,92 Triliun. (Iwn)

Bupati dan Wali Kota Keluhkan Pemotongan Anggaran ke Gubernur Jateng

Sabtu, 1 Agustus 2026 19:54 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Rival Al Manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1261733/bupati-dan-wali-kota-keluhkan-pemotongan-anggaran-ke-gubernur-jateng>

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG -Seluruh bupati dan wali kota mengeluhkan kondisi fiskal mereka ke Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Mereka gelagapan mengelola keuangan daerah dalam semester I tahun 2026 ini.

Kondisi itu terjadi karena adanya pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD), yang secara rata-rata setiap kabupaten/kota di Jateng telah disunat sekitar 30 persen.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Dwianto Priyonugroho mengatakan, keluhan dari para kepala daerah tersebut sudah muncul sejak awal tahun 2026.

Keluhan itu muncul karena setiap kabupaten/kota mengalami potongan dana TKD rata-rata di angka Rp300 miliar hingga Rp500 miliar.

Besaran pemotongan TKD tergantung kondisi kearifan lokal Dana Bagi Hasil (DBH) tiap daerah.

Secara total, pemotongan dana TKD di lingkungan Pemprov Jateng mencapai sekitar Rp12 triliun terbagi Pemprov Jateng sebesar Rp1,5 triliun, sisanya Rp10,5 Triliun terbagi di 35 Kabupaten/kota.

Dari potongan itu, keluhan semakin menguat selepas para wali kota dan bupati melakukan penganggaran pada semester I tahun anggaran 2026.

"Dari anggaran yang ada, para kepala daerah harus melakukan penyesuaian, ternyata ketika dibagi, membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit," ujar Dwi saat dihubungi Tribun, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Dwi, keluhan dari para kepala daerah itu sudah ditampung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno.

Keluhan itu juga sudah ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan ke Kementerian Keuangan.

"Kami dalam surat keluhan ke pemerintah pusat itu menjelaskan dampak penyesuaian TKD seperti apa, dan harapannya TKD tahun 2027, dapat diterima secara proporsional kepada seluruh Pemerintah daerah di Jateng termasuk Pemerintah Provinsi," jelasnya.

Menurut Dwi, keluhan para kepala daerah tersebut sepatutnya ditanggapi dengan serius oleh pemerintah pusat.

Sebab, para kepala daerah saat ini kesulitan memploting anggaran terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan.

Pemda harus memperhatikan skala prioritas dalam melakukan pembangunan agar tidak ada keluhan dari masyarakat.

"Penyesuaian TKD tentu berdampak sehingga Pemda harus mencari solusi, yakni melakukan perbaikan atau pembangunan dengan kemampuan yang ada berdasarkan skala prioritas," terangnya.

Sembari menunggu kebijakan itu, Dwi menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran yang ada dengan teknik peningkatan kualitas belanja.

Menurutnya, Pemda saat ini harus pintar-pintar mengelola APBD mereka dengan menyisir belanja yang efisien dan efektif tanpa mengurangi sebuah program.

"Jadi metode pelaksanaan kegiatan harus diubah polanya, tujuannya tetap tercapai dengan metode lebih efektif dan efisien," paparnya. (Iwn)

6 Kabupaten di Jateng Siap Dibangun Kawasan Industri Baru, 13 Tak Lolos Verifikasi

Sabtu, 1 Agustus 2026 09:32 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Muslimah

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1261667/6-kabupaten-di-jateng-siap-dibangun-kawasan-industri-baru-13-tak-lolos-verifikasi>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari mengungkapkan, ada enam kabupaten di Jateng yang telah menyatakan kesiapannya untuk membangun kawasan industri baru.

Enam daerah itu meliputi Kendal, Pemalang, Demak, Sukoharjo, Grobogan, dan Rembang.

"Kami mau bentuk 12 kawasan industri baru, hasil pemetaan, hanya 22 kabupaten/kota yang layak, nah dari 22 itu, enam kabupaten akan menjadi kawasan industri dan sudah ada kepeminatan," ujar Sakina kepada Tribun, Jumat (31/7/2026).

Menurut Sakina, enam daerah itu lolos karena telah memenuhi salah satu syarat utama yakni memiliki lahan hamparan dengan luasan minimal 50 hektare.

Lahan itu juga masuk sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam regulasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Pihaknya, kini melakukan pengawalan agar kawasan industri ini bisa terwujud.

"Paling tidak butuh waktu sampai dua tahun agar lahan itu benar-benar siap ditempati tenan dalam kawasan tersebut," ujarnya.

Sakina mengungkapkan, keinginan dari Gubernur Jateng sendiri adalah sebanyak 12 kawasan industri baru.

Untuk itu, kekurangan enam daerah lainnya juga sudah disiapkan.

Ia mengatakan, ada sejumlah daerah lainnya yang memenuhi untuk dijangkau sebagai kawasan industri baru mulai dari Brebes, kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.

"Kalau Kebumen saat ini sudah masuk penyusunan proyek investasi yang siap kami tawarkan atau IPRO (Investment Project Ready to Offer)," jelasnya.

Selama mencari kandidat daerah baru untuk kawasan industri, Sakina mengungkapkan, ada 13 kabupaten kota yang gagal.

Ia menilai, belasan daerah itu tak layak membentuk kawasan industri baru karena lahan yang tersedia terpisah tidak dalam bentuk hamparan.

"Ya misal daerah itu hanya punya 20 hektare padahal yang dibutuhkan 50 hektare, ya sudah itu masuk ke KPI (Kawasan Peruntukan Industri) bukan kawasan industri," tuturnya.

Ia menambahkan, terus menggenjot investasi di Jateng dengan menambah kawasan industri baru dengan harapan target investasi di Jateng terus merangkak naik.

Target investasi di Jateng pada 2026 mencapai Rp99,09 Triliun. Pada semester I tahun 2026, angka investasi yang masuk mencapai Rp48,53 Triliun atau 48,99 persen dari target. (Iwn)

Kawasan Industri Halal jadi Motor Ekonomi Jateng, Setya Arinugroho Tekankan Pemerataan UMKM

Sabtu, 1 Agustus 2026 11:48 WIB

Akhmad Taufik

<https://jatengpos.co.id/advetorial/2026/08/01/kawasan-industri-halal-jadi-motor-ekonomi-jateng-setya-arinugroho-tekanan-pemerataan-umkm/>

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di Jawa Tengah diproyeksikan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tema pembangunan 2027, yaitu pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan

meningkatkan daya saing produk UMKM halal asal Jawa Tengah di tingkat nasional maupun internasional.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyambut baik rencana pengembangan Kawasan Industri Halal tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan kawasan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan mampu menjangkau kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi besar pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“umkm jawa tengah tidak hanya menjamur di kota-kota besar justru umkm kecil yang berada di daerah juga perlu di support penuh dengan adanya kawasan industri halal nantinya” ungkap Ari, saat di wawancara Senin, 13/7/2026.

Menurut Ari, pemerataan menjadi prinsip utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, keberadaan Kawasan Industri Halal harus mampu melibatkan pelaku UMKM dari berbagai daerah agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam rantai pasok industri halal.

“Jawa Tengah memiliki potensi UMKM yang tersebar hampir di seluruh kabupaten. Jangan sampai Kawasan Industri Halal hanya berkembang di wilayah tertentu. Pemerintah perlu memastikan aksesnya terbuka bagi pelaku usaha di berbagai daerah sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan secara merata,” tambah Ari.

Proses Sertifikasi Halal Untuk UMKM

Selain pemerataan kawasan, Ari juga menyoroti pentingnya penyederhanaan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala administratif sehingga belum dapat memperoleh sertifikat halal secara optimal.

Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana tanpa mengurangi standar dan kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi persyaratan sekaligus meningkatkan daya saing produknya.

“Sistem sertifikasi halal harus memberikan kemudahan bagi UMKM, tetapi tetap menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Jangan sampai prosedurnya terlalu rumit sehingga justru menghambat untuk berkembang,” katanya.

Fungsi Legislasi DPRD Untuk Mengawal Kawasan Industri Halal

Lebih lanjut, Ari menegaskan DPRD Jawa Tengah siap menjalankan fungsi legislasi untuk memperkuat pengembangan Kawasan Industri Halal di Jawa Tengah. Menurutnya, regulasi yang disusun harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus memperluas akses bagi pelaku UMKM agar dapat menjadi bagian dari ekosistem industri halal.

“DPRD akan menjalankan fungsi legislasi dengan mendorong regulasi yang mampu memperkuat pengembangan Kawasan Industri Halal di Jawa Tengah. Aturan yang dibentuk harus memberikan kepastian bagi dunia usaha, mempermudah pelaku UMKM untuk berkembang, dan memastikan kawasan ini tidak hanya menjadi pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Ari.

Meski demikian, Ari mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi syariah melalui Kawasan Industri Halal harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor ketahanan pangan yang telah menjadi fokus pembangunan daerah sejak 2026. Menurutnya, kedua sektor tersebut saling melengkapi dalam membangun fondasi ekonomi Jawa Tengah yang tangguh dan berkelanjutan.

“Pengembangan Kawasan Industri Halal bukan berarti kita mengesampingkan sektor lain. Ketahanan pangan tetap menjadi fondasi pembangunan daerah. Karena itu, kedua sektor ini harus saling

mendukung sehingga Jawa Tengah memiliki ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV)

Malaysia Yakin Pertumbuhan Ekonomi Stabil hingga Akhir Tahun

Minggu, 2 Agustus 2026 13:30 WIB

Joy Lee

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116985/malaysia-yakin-pertumbuhan-ekonomi-stabil-hingga-akhir-tahun/2>

Bloomberg, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan perekonomian negara itu diperkirakan tetap kuat pada paruh kedua tahun ini seiring pemerintah menjaga stabilitas pasokan minyak, demikian dilaporkan kantor berita Bernama.

Momentum pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk upaya memastikan ketahanan energi hingga akhir tahun, kata Akmal dalam sebuah acara pada Sabtu, seperti dikutip Bernama.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Malaysia harus tetap waspada terhadap perkembangan geopolitik di Timur Tengah yang masih akan memberikan tekanan terhadap pasokan minyak global.

Akmal juga mengatakan penyelenggaraan balapan Formula One di Malaysia tahun ini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata.

Malaysia sebelumnya melaporkan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang melampaui perkiraan pada kuartal II, didukung oleh kuatnya sektor jasa dan ekspor produk elektronik. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,8% pada periode April–Juni dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan estimasi awal yang dirilis Departemen Statistik Malaysia.

Jepang & AS akan Koordinasi Kendalikan Pelemahan Yen

Minggu, 2 Agustus 2026 20:00 WIB

Takashi Umekawa, Kanoko Matsuyama dan Erica Yokoyama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116996/jepang-as-akan-koordinasi-kendalikan-pelemahan-yen/2>

Bloomberg, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama akan mengumumkan paling cepat Senin bahwa Tokyo dan Washington berkoordinasi dalam langkah-langkah di pasar valuta asing untuk mengendalikan pelemahan yen, kata seseorang yang mengetahui situasi tersebut.

Isi pengumuman masih sedang dikerjakan tetapi bisa terjadi paling cepat Senin pagi, kata orang tersebut, yang menolak untuk disebutkan namanya karena informasi tersebut belum dipublikasikan. Reuters sebelumnya melaporkan Katayama akan mengkonfirmasi tindakan bersama tersebut, dan memperkuat komitmen kedua belah pihak untuk memerangi apa yang mereka anggap sebagai penurunan yen yang berlebihan.

Otoritas Jepang membeli yen dan menjual dolar selama perdagangan New York pada hari Jumat, Bloomberg melaporkan sebelumnya, mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Pada

penutupan perdagangan New York hari Jumat, yen dikutip pada 157,40 terhadap dolar, terkuat sejak awal Mei. Hanya dua hari sebelumnya, yen berada di sekitar level terlemah sejak 1986.

Kenaikan tajam ini didorong oleh kombinasi pembelian langsung yen, seruan para pejabat kepada bank-bank yang memperdagangkan mata uang tersebut, dan pernyataan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Katayama.

Komitmen Bessent untuk memperkuat yen juga ditunjukkan ketika Reuters menerbitkan foto sebuah buku catatan di depannya pada rapat kabinet di Camp David pada hari Jumat. Di bawah judul "Yang Harus Dilakukan", tertulis "Beli Yen Jepang (JPY) \$5-10 miliar."

Rencana awal Jepang tampaknya adalah untuk tetap pada sikap "tidak berkomentar" selama operasi berlangsung, dan hanya memberikan petunjuk halus tentang dukungan AS. Pendekatan ini dipertahankan hingga Kamis dan Jumat. Tetapi dengan munculnya berbagai laporan media dan daftar tugas Bessent yang ditampilkan, pihak berwenang mungkin telah memutuskan untuk mengubah arah dan membuat pengumuman publik yang jelas.

Operasi aksi bersama "masih berlangsung," kata Reuters, mengutip seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Yen menguat lebih dari 1% terhadap dolar dan euro pada hari Jumat. Yen mencatatkan kenaikan intraday lebih dari 3% terhadap dolar AS pada hari Kamis, ketika Jepang membelanjakan sekitar ¥8,45 triliun (\$52,8 miliar), menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg dan berdasarkan perbandingan akun BOJ dan perkiraan pialang uang. Itu kemungkinan akan menjadi intervensi terbesar yang pernah dilakukan Tokyo dalam satu hari.

Nikkei melaporkan bahwa pemerintah Jepang dan Bank Sentral Jepang melakukan intervensi untuk membeli yen untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumat, sementara Financial Times secara terpisah mengatakan bahwa Federal Reserve Bank of New York menjual euro untuk membeli yen atas nama Departemen Keuangan AS.

Setidaknya dua bank besar AS diminta oleh New York Fed untuk memeriksa nilai tukar yen terhadap euro sepanjang hari, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg.

Secara terpisah, Menteri Strategi Pertumbuhan Jepang, Minoru Kiuchi, mengatakan pada hari Minggu bahwa Jepang akan meningkatkan dialog dua arah dengan pasar bulan ini untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap strategi pertumbuhannya.

"Mulai bulan ini, kami bermaksud untuk memperkuat komunikasi dua arah dengan pasar," kata Kiuchi dalam sebuah program di stasiun televisi nasional NHK, menambahkan bahwa hilangnya kepercayaan akan mendorong kenaikan suku bunga. Pemerintah akan menjelaskan kebijakannya "secara konsisten dan transparan" untuk mengatasi kekhawatiran pasar, sambil menanggapi perubahan kondisi dengan tepat, kata Kiuchi.

Lapangan Kerja AS Diramal Tumbuh usai Juni Lesu

Minggu, 2 Augustus 2026 18:30 WIB

Vince Golle

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116997/lapangan-kerja-as-diramal-tumbuh-usai-juni-lesu>

(Bloomberg) -- Para pemberi kerja di Amerika Serikat (AS) kemungkinan besar meningkatkan laju perekrutan mereka pada Juli 2026, menunjukkan minat yang stabil terhadap pekerja meskipun ada kekhawatiran geopolitik dan inflasi yang tinggi.

Para ekonom memperkirakan laporan pekerjaan bulanan pada hari Jumat akan menunjukkan peningkatan 85.000 dalam jumlah pekerjaan setelah kenaikan 57.000 yang lebih rendah dari perkiraan pada bulan Juni, menurut median survei Bloomberg.

Tingkat pengangguran, yang didasarkan pada survei rumah tangga dan bukan perusahaan, diperkirakan akan tetap stabil di 4,2%.

Pertumbuhan lapangan kerja telah meningkat tahun ini dibandingkan dengan tahun 2025, mendukung pengeluaran konsumen. Pada kuartal kedua, salah satu ukuran permintaan mendasar dalam perekonomian AS melonjak dengan laju terkuat sejak awal tahun 2023, didorong oleh rumah tangga dan bisnis.

Dengan pasar tenaga kerja dan ekonomi yang menunjukkan ketahanan, beberapa pejabat Federal Reserve mendorong untuk menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Meskipun bank sentral AS mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu lalu, tiga pembuat kebijakan memilih untuk menaikkannya.

Investor akan memiliki sejumlah data pasar tenaga kerja lainnya untuk dianalisis, termasuk lowongan pekerjaan pada hari Selasa, perkiraan ADP Research tentang pertumbuhan penggajian sektor swasta pada hari Rabu, dan permohonan asuransi pengangguran pada hari Kamis.

Apa Kata Bloomberg Economics:

“Pasar tenaga kerja tampaknya kurang stabil daripada yang ditunjukkan oleh angka pengangguran utama. Perekrutan sementara yang terkait dengan Piala Dunia FIFA kemungkinan akan berbalik, menyebabkan penurunan pekerjaan di sektor rekreasi dan perhotelan, bersamaan dengan kelemahan di sektor konstruksi. Menjelang musim gugur, perekrutan akan semakin bergantung pada pemerintah negara bagian dan lokal — dan kami tidak melihat mereka sebagai sumber dukungan yang sangat kuat, mengingat anggaran yang lebih ketat dan pertumbuhan pendapatan pajak yang melambat.”

-Anna Wong, Stuart Paul dan Eliza Winger-

Sementara itu, survei Institute for Supply Management terhadap penyedia layanan dan produsen akan menawarkan gambaran terbaru tentang aktivitas ekonomi pada bulan Juli. Pejabat Fed yang berbicara selama pekan ini termasuk Jeff Schmid dari Kansas City, Gubernur Fed Lisa Cook, dan Alberto Musalem dari St. Louis.

Di tempat lain, laporan pekerjaan Kanada juga akan dirilis dengan para ekonom memperkirakan peningkatan lagi. Bank sentral di Brasil kemungkinan akan memangkas suku bunga, sementara bank sentral di Meksiko, India, dan Republik Ceko mungkin akan mempertahankan suku bunga.

Asia

Data ekonomi terbaru Asia akan menguji seberapa baik kawasan ini dapat menahan guncangan energi Timur Tengah lainnya, karena pertempuran yang kembali terjadi antara AS dan Iran membuat harga minyak mentah tetap tinggi dan memberikan tekanan pada sebagian besar mata uang di kawasan tersebut.

Keputusan suku bunga Bank Sentral India pada hari Rabu adalah inti dari pekan ini. Para pejabat kemungkinan akan mempertahankan suku bunga utama mereka tidak berubah, memilih untuk "menunggu dan mengamati" jika harga energi yang lebih tinggi memicu inflasi yang berkelanjutan di salah satu importir minyak mentah terbesar di Asia.

Sejumlah data indeks manajer pembelian di seluruh Asia akan dirilis pada hari Senin, menawarkan ukuran apakah konflik tersebut mulai berdampak pada rantai pasokan, rute pengiriman barang, dan kepercayaan bisnis.

Lonjakan investasi buatan yang berkelanjutan seharusnya meningkatkan PMI bagi mereka yang berada dalam rantai pasokan teknologi global, termasuk Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Rilis data perdagangan dari Australia dan Tiongkok dapat membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang penurunan aktivitas bisnis yang lebih luas.

Inflasi juga akan mendominasi kalender. Pertumbuhan harga yang lebih cepat akan mempersulit prospek kebijakan bagi bank sentral yang mungkin ingin mendukung perlambatan permintaan, sementara angka yang lebih rendah hanya akan memberikan bantuan sementara jika perang Iran berlanjut.

Bloomberg Economics memperkirakan inflasi Korea Selatan akan melambat ke kisaran 2% pada bulan Juli, kemudian naik di atas 3% pada bulan Agustus, sehingga tetap membuka peluang untuk kenaikan suku bunga berturut-turut. Negara-negara lain yang juga melaporkan data inflasi adalah Indonesia, Filipina, Pakistan, Vietnam, dan Thailand — yang semuanya sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah.

Sementara itu, angka pertumbuhan dari Indonesia pada hari Rabu dan Filipina pada hari Jumat akan menunjukkan bagaimana Asia Tenggara memasuki eskalasi terbaru. Data tersebut sebagian besar mendahului konflik yang diperbarui, tetapi konsumsi, investasi, atau ekspor yang lemah akan menunjukkan keterbatasan penyangga terhadap guncangan eksternal lainnya.

Eropa, Timur Tengah, Afrika

Pekan yang sangat tenang di Eropa menyusul angka output kuartal kedua yang lebih kuat dari perkiraan untuk zona euro. Rilis terjadwal termasuk indikator industri untuk Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol, serta angka PMI final di seluruh wilayah.

Di Swiss, angka Juli pada hari Senin diperkirakan akan menunjukkan perlambatan lagi, menjadi 0,4%, mendukung ekspektasi bank sentral bahwa mereka akan dapat mempertahankan suku bunga nol untuk beberapa waktu.

Pada hari yang sama, data Turki kemungkinan akan mengungkapkan bahwa inflasi tahunan terus melambat pada bulan Juli, setelah sebelumnya melambat untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang Iran. Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan rilis tersebut akan menunjukkan bahwa harga meningkat 31,9%, turun dari 32,1% pada bulan Juni.

Angka inflasi Swedia akan dirilis pada hari Kamis, dengan analis memperkirakan perlambatan lebih lanjut yang akan memberi Riksbank waktu tambahan untuk mempertahankan suku bunga utamanya.

Dalam hal kebijakan moneter, semua mata tertuju pada Praha, di mana bank sentral Ceko pada hari Kamis kemungkinan akan mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah setelah memberikan kenaikan pertama dalam empat tahun pada bulan Juni untuk meredam tekanan harga domestik yang terus-menerus.

Amerika Latin

Bank sentral dan inflasi adalah isu utama dari Amerika Latin, dengan Banco Central do Brasil sebagai daya tarik utama.

Angka inflasi yang mengejutkan rendah untuk bulan Juni di Brasil diikuti oleh angka pertengahan bulan yang jauh lebih rendah dari perkiraan — angka 4,52% tahun-ke-tahun berada di bawah semua 33 perkiraan — membuat sebagian besar pengamat Brasil mengharapkan penurunan suku bunga seperempat poin keempat berturut-turut, menjadi 14%.

Di Chili, data proksi PDB untuk bulan Juni mungkin menunjukkan sedikit peningkatan setelah lima angka negatif berturut-turut di tengah permintaan dan investasi domestik yang lesu. Ekonom lokal telah menurunkan perkiraan PDB 2026 mereka menjadi 1,3% dari perkiraan sebelumnya 1,6%.

Risalah rapat Banco Central de Chile bulan Juli — di mana para pembuat kebijakan mempertahankan suku bunga acuan di 4,5% untuk pertemuan kelima berturut-turut — kemungkinan akan selaras dengan komunikasi pasca-keputusan yang bernada hati-hati dan bergantung pada data, mengingat tingginya tingkat gejolak geoekonomi yang melanda negara-negara di seluruh dunia.

Beberapa penurunan harga energi di Chili bulan lalu kemungkinan besar memperlambat inflasi dari angka 4,3% pada Juni, yang naik dari angka 2,4% pada Februari sebelum perang Iran.

Menjelang pelantikan Presiden terpilih Kolombia Abelardo de la Espriella, bank sentral akan menerbitkan laporan kebijakan moneter triwulanan, memperbarui perkiraan ekonomi utama, serta risalah rapat suku bunga 31 Juli, di mana para pembuat kebijakan secara tak terduga mempertahankan suku bunga acuan mereka tidak berubah di 12%.

Di Meksiko, Banxico tampaknya memiliki jalan yang jelas untuk mempertahankan suku bunga acuannya di 6,5% untuk pertemuan kedua berturut-turut. Inflasi telah melambat hingga sedikit di atas target sementara ekonomi pada kuartal kedua mencatatkan pertumbuhan tercepat sejak pandemi. Analisis memperkirakan dewan direksi, yang dipimpin oleh Gubernur Victoria Rodríguez Ceja, akan memberikan suara bulat untuk mempertahankan biaya pinjaman tidak berubah.

Banxico Diperkirakan Tidak Akan Terpengaruh oleh Perlambatan Inflasi | Harga konsumen telah turun ke level terendah lima tahun, analisis memperkirakan tingkat inflasi 6,5% hingga tahun 2028

Menutup pekan ini, angka inflasi Meksiko untuk bulan Juli dan dua mingguan, yang kini berada di level terendah lima tahun, mungkin akan semakin mendekati target inflasi 3% bank sentral.

Jepang dan AS Diduga Intervensi Pasar Valas, Yen Menguat dari Titik Terlemah 40 Tahun

Minggu, 2 Agustus 2026 09:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-dan-as-diduga-intervensi-pasar-valas-yen-menguat-dari-titik-terlemah-40-tahun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat (AS) dikabarkan melakukan intervensi bersama di pasar valuta asing (valas) untuk menghentikan pelemahan mata uang yen yang sempat menyentuh level terendah dalam hampir 40 tahun terhadap dolar AS.

Mengutip laporan Reuters, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama dijadwalkan mengumumkan pada Senin (3/8) bahwa Tokyo dan Washington telah mengambil langkah bersama di pasar mata uang guna menahan laju depresiasi yen.

Dua pejabat pemerintah Jepang yang mengetahui rencana tersebut mengatakan, Katayama diperkirakan akan menegaskan komitmen kedua negara untuk mengatasi pelemahan yen yang dinilai sudah berlebihan.

Sumber tersebut meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengingat sensitivitas isu tersebut.

Salah satu sumber, ketika ditanya apakah Katayama akan mengumumkan adanya "aksi bersama", menjawab, "Ya. Operasi tersebut masih berlangsung."

Hingga Minggu (2/8/2026), Kementerian Keuangan Jepang belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan. Sementara itu, pejabat Departemen Keuangan AS juga belum merespons permintaan komentar dari Reuters.

Intervensi Bersama Pertama Sejak 2011

Pengumuman tersebut muncul setelah pelaku pasar melaporkan adanya serangkaian aksi pembelian yen di pasar oleh otoritas Jepang dan Amerika Serikat.

Jika dikonfirmasi, langkah ini akan menjadi intervensi bersama pertama kedua negara sejak 2011.

Aksi tersebut bertujuan mengangkat nilai tukar yen setelah mata uang Jepang itu jatuh ke level terendah terhadap dolar AS sejak 1986.

Seorang sumber pasar mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Jepang melakukan intervensi dengan membeli yen dan menjual dolar AS di pasar New York beberapa jam pada Kamis lalu.

Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam sebelum keputusan Bank of Japan (BOJ) pada Jumat untuk mempertahankan kebijakan moneter tetap stabil, namun sekaligus memberi sinyal adanya peluang kuat kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Sikap Pemerintah AS

Sinyal dukungan dari pemerintah AS juga terlihat dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Pekan lalu, Bessent mengatakan bahwa "menurut saya yen tampak sangat undervalued (terlalu murah)."

Dalam sebuah foto Reuters saat rapat kabinet pada Jumat, terlihat catatan yang dibawa Bessent bertuliskan "Daftar Tugas", diikuti poin "Beli Yen Jepang (JPY) senilai US\$ 5 miliar hingga US\$ 10 miliar."

Selain itu, pada Jumat, Departemen Keuangan AS juga menginformasikan kepada sejumlah bank bahwa pemerintah mungkin akan melakukan intervensi di pasar yen dan meminta mereka untuk "bersiap menghadapi kemungkinan tindakan lanjutan."

Langkah tersebut semakin memperkuat spekulasi pasar bahwa Washington dan Tokyo tengah berkoordinasi untuk menstabilkan nilai tukar yen di tengah tekanan kuat dari penguatan dolar AS dan perbedaan arah kebijakan moneter kedua negara.

Ekonomi China Melambat, PBOC Janji Jaga Likuiditas dan Sesuaikan Kebijakan

Minggu, 2 Agustus 2026 16:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-china-melambat-pboc-janji-jaga-likuiditas-dan-sesuaikan-kebijakan>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China atau People's Bank of China (PBOC) menegaskan akan menyesuaikan instrumen kebijakan moneter secara tepat waktu serta memfasilitasi penerbitan panda bond guna menopang perekonomian yang tengah melambat.

Dalam pernyataan yang dirilis Minggu (2/8/2026), PBOC menyatakan akan tetap menerapkan kebijakan moneter yang longgar (appropriately loose) serta menjaga likuiditas tetap memadai.

Pernyataan tersebut merupakan hasil rapat kerja yang dipimpin Gubernur PBOC Pan Gongsheng pada Sabtu (1/8) untuk menyusun arah kebijakan pada paruh kedua 2026.

PBOC juga berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan sektor keuangan.

Bank sentral China akan "secara bertahap mendorong pembukaan pasar keuangan yang lebih luas, memperkuat kerja sama infrastruktur keuangan domestik dan internasional, serta memperkaya instrumen pengelolaan likuiditas dan lindung nilai risiko," demikian isi pernyataan tersebut.

Selain itu, PBOC menyatakan akan terus mendukung penyelesaian risiko utang kendaraan pembiayaan pemerintah daerah (local government financing vehicles/LGFV) sekaligus mendorong transformasi model bisnisnya agar lebih berorientasi pasar.

Dorong panda bond dan peran Hong Kong

Sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan yuan di pasar internasional, PBOC juga akan mendukung lebih banyak lembaga asing menerbitkan obligasi berdenominasi yuan atau panda bond.

Bank sentral juga berkomitmen membantu Shanghai memperkuat layanan keuangan lintas negara dan jasa keuangan lepas pantai (offshore), sekaligus memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat utama transaksi yuan di luar daratan China.

Respons perlambatan ekonomi

Langkah PBOC diambil setelah Politbiro Partai Komunis China pada Kamis (31/7) menyerukan percepatan belanja fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur yang telah dianggarkan pada sisa tahun ini.

Seruan tersebut muncul setelah data ekonomi menunjukkan produk domestik bruto (PDB) China hanya tumbuh 4,3% pada kuartal II-2026, laju paling lambat dalam lebih dari tiga tahun.

Angka tersebut juga berada di bawah batas bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini yang dipatok di kisaran 4,5% hingga 5,0%.

Dalam pertemuan tersebut, Politbiro mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang membayangi perekonomian China.

Melalui ringkasan hasil rapat yang dikutip kantor berita Xinhua, pemerintah menegaskan perlunya mempercepat realisasi belanja fiskal sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan sifat antisipatif kebijakan moneter untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

Bank Dunia Ungkap Ironi Jakarta, Ekonomi Terbesar Tapi Persepsi Hindari Pajak Tinggi

Minggu, 2 Agustus 2026 17:02 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-ungkap-ironi-jakarta-ekonomi-terbesar-tapi-persepsi-hindari-pajak-tinggi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia mengungkap temuan yang mengejutkan terkait kepatuhan perpajakan pelaku usaha di Indonesia.

Meski menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta justru masuk dalam kelompok wilayah dengan persepsi tertinggi bahwa kewajiban pajak relatif mudah dihindari.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth edisi Juli 2026 yang menggunakan data World Bank Enterprise Survey (WBES) 2023 terhadap 2.995 perusahaan di 38 provinsi.

Laporan menyebutkan Jakarta, bersama Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara, merupakan wilayah dengan persepsi kemudahan menghindari kewajiban pajak paling tinggi, baik untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menariknya, tingginya persepsi tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai aturan perpajakan.

Berdasarkan World Bank Informal Sector Enterprise Survey (WBISES) 2024, Jakarta justru menjadi kota dengan proporsi terendah pelaku usaha informal yang keliru menganggap kewajiban registrasi pajak tidak berlaku bagi mereka.

Di Jakarta, 47% pelaku usaha informal masih mengira mereka tidak wajib mendaftarkan usahanya untuk keperluan perpajakan.

Persentase ini jauh lebih rendah dibandingkan Surabaya (81%) dan Denpasar (75%), yang menunjukkan pelaku usaha di Jakarta relatif lebih memahami kewajiban tersebut.

Temuan itu menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan pelaku usaha di Jakarta relatif lebih baik dibandingkan kota-kota besar lainnya. Namun, pemahaman yang lebih tinggi tidak otomatis mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Bank Dunia menilai kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan pada aspek kepercayaan terhadap sistem perpajakan maupun persepsi atas manfaat menjadi wajib pajak yang patuh.

"Temuan ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih terarah serta reformasi administrasi untuk memperjelas persyaratan usaha dan menekan biaya formalisasi, terutama di kota-kota yang masih memiliki tingkat informalitas usaha yang tinggi," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Minggu (2/8/2026).

Selain persepsi kemudahan menghindari pajak, laporan juga menyoroti rendahnya tax morale di Jakarta. Tax morale merupakan motivasi intrinsik seseorang atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban pajak karena alasan moral, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Jakarta, bersama Sumatra, tercatat memiliki tingkat tax morale yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa di luar Jakarta maupun kawasan Indonesia Timur.

Kondisi serupa juga terlihat pada indikator tax trust, yaitu tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap keadilan, transparansi, dan pelaksanaan sistem perpajakan.

Menurut Bank Dunia, Jakarta bersama Bali dan Nusa Tenggara mencatat tingkat kepercayaan terhadap sistem pajak yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. "

Bali dan Nusa Tenggara serta Jakarta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah, sehingga menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi kebijakan maupun penegakan aturan perpajakan," tulis laporan tersebut.

Laporan juga mengaitkan kondisi tersebut dengan persepsi pelaku usaha terhadap kompleksitas administrasi perpajakan.

Secara nasional, hampir 70% perusahaan pembayar Pajak Penghasilan Badan alias Corporate Income Tax (CIT) mengaku proses pemenuhan kewajiban perpajakan masih rumit.

Secara regional, Kalimantan dan wilayah Jawa di luar Jakarta justru melaporkan tingkat kompleksitas yang lebih rendah, masing-masing sebesar 48,4% dan 56,1%.

Sementara itu, wilayah lain, termasuk Jakarta, dilaporkan memiliki persepsi beban administrasi yang jauh lebih tinggi, yakni berada pada kisaran 75% hingga 90%, meski laporan tidak merinci angka khusus untuk Jakarta.

Dalam kajian yang sama, para peneliti Bank Dunia juga memperkirakan sekitar 26% perusahaan formal di Indonesia melakukan penggelapan pajak.

Estimasi tersebut diperoleh menggunakan metode double-list experiment, yakni teknik survei yang dirancang untuk mengungkap perilaku sensitif seperti penghindaran atau penggelapan pajak tanpa meminta responden mengaku secara langsung.

Bank Dunia menegaskan bahwa angka tersebut kemungkinan masih merupakan batas bawah (lower bound), karena seluruh temuan didasarkan pada jawaban yang disampaikan sendiri oleh responden sehingga potensi penggelapan pajak yang sebenarnya bisa lebih tinggi.

Bank Dunia: 48% Pelaku UMKM Batasi Penggunaan QRIS agar Tak Mudah Dipantau Pajak

Minggu, 2 Agustus 2026 14:17 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-48-pelaku-umkm-batasi-penggunaan-qr-is-agar-tak-mudah-dipantau-pajak>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laporan terbaru Bank Dunia mengungkap alasan di balik masih rendahnya penggunaan pembayaran digital di kalangan pelaku usaha mikro di Indonesia.

Bukan semata karena keterbatasan teknologi, hampir separuh responden justru mengaku sengaja membatasi penggunaan QRIS agar transaksi usahanya tidak mudah terpantau otoritas pajak.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth yang dirilis Bank Dunia pada Juli 2026.

Dalam survei terhadap pelaku usaha mikro, sebanyak 48% responden mengaku membatasi penggunaan QRIS untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Survei yang sama juga mengungkap persoalan lain yang tak kalah penting. Sebanyak 40% pelaku usaha mikro menyatakan pajak yang mereka bayarkan hanya akan terbuang untuk pemborosan dan korupsi, mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan penerimaan negara.

Bank Dunia mencatat, meski 62% pelaku usaha mikro telah memiliki rekening bank atas nama usaha, adopsi pembayaran non-tunai masih sangat rendah.

Hanya 14% yang bersedia menerima pembayaran melalui transfer bank, sedangkan yang menerima pembayaran menggunakan QR code atau dompet digital hanya 4%. Menurut Bank Dunia, rendahnya penggunaan instrumen pembayaran digital tidak sepenuhnya dipicu oleh rendahnya literasi keuangan maupun keterbatasan akses teknologi.

Sebaliknya, banyak pelaku usaha secara sadar memilih transaksi tunai karena dinilai lebih sulit dilacak.

"Perusahaan yang tidak menggunakan sistem pembayaran elektronik lebih cenderung menyatakan bahwa menghindari pajak merupakan hal yang mudah," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (2/8/2026).

Transaksi melalui QRIS maupun transfer bank meninggalkan rekam jejak digital yang dapat dimanfaatkan otoritas untuk mencocokkan omzet dan kewajiban perpajakan.

Sebaliknya, pembayaran tunai dinilai memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk tidak melaporkan seluruh pendapatannya.

Laporan tersebut juga menekankan bahwa persoalan kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bank Dunia menyebut tax trust dan tax morale menjadi faktor penentu kepatuhan yang bahkan lebih kuat dibanding tarif pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil analisis Bank Dunia sebelumnya yang menunjukkan hubungan erat antara pendalaman sektor keuangan dengan tingkat kepatuhan pajak.

Perusahaan yang aktif menggunakan sistem pembayaran elektronik dinilai lebih kecil kemungkinannya menganggap penghindaran pajak sebagai praktik yang mudah dilakukan dibanding perusahaan yang masih mengandalkan transaksi tunai.

Artinya, semakin terhubung suatu usaha dengan sistem keuangan formal, semakin sempit peluang untuk menyembunyikan transaksi maupun omzet usaha.

Sebaliknya, dominasi pembayaran tunai membuka ruang lebih besar bagi aktivitas ekonomi informal yang sulit diawasi.

KEK Raup Investasi Rp 32 Triliun Semester I-2026, PMA Masih Mendominasi

Minggu, 2 Agustus 2026 13:21 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/kek-raup-investasi-rp-32-triliun-semester-i-2026-pma-masih-mendominasi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melaporkan investasi yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai Rp 32 triliun sepanjang semester I-2026.

Realisasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 24 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp 8 triliun.

Masuknya investasi tersebut turut menciptakan 34.162 lapangan kerja baru di berbagai kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia.

Capaian KEK itu menjadi bagian dari kinerja investasi nasional yang masih menunjukkan tren positif meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. Hingga triwulan II-2026, realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp 1.010,6 triliun atau meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY).

Kinerja tersebut didukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%, inflasi yang tetap terkendali, serta optimisme konsumen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susi Wijono Moegiarso, mengatakan daya tarik kawasan ekonomi khusus tidak hanya ditentukan oleh berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut dia, investor juga mempertimbangkan kepastian regulasi, kecepatan penyelesaian berbagai kendala di lapangan, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha.

"Kepercayaan investor tidak hanya dibangun melalui insentif, tetapi juga melalui kepastian regulasi, penyelesaian hambatan secara cepat, dan komunikasi yang konsisten antara pemerintah dengan dunia usaha," ujar Susi Wijono dalam keterangannya, Minggu (2/8).

Ia menjelaskan pemerintah terus memperkuat daya saing KEK melalui pengembangan sektor-sektor strategis, mulai dari hilirisasi industri, ekonomi digital, pariwisata, pendidikan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada sektor hilirisasi, pemerintah mengembangkan KEK Galang Batang yang ditargetkan mampu mengintegrasikan produksi hingga 12 juta ton bauksit, 4 juta ton smelter grade alumina (SGA), serta 2 juta ton aluminium ingot setiap tahun.

Sementara di sektor digital, pengembangan diarahkan pada pembangunan pusat data (data center), pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta penguatan konektivitas internasional melalui kabel bawah laut Nongsa–Changi Cable sepanjang 50 kilometer dengan kapasitas 1,6 petabit per detik.

Pengembangan kawasan juga menyasar sektor pendidikan dan pariwisata. Salah satunya melalui kolaborasi KEK Singhasari dengan King's College London, serta program pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan yang didukung anggaran Rp 6,26 triliun.

Berdasarkan data sementara hingga 28 Juli 2026, total investasi kumulatif yang telah masuk ke seluruh KEK mencapai Rp 368 triliun. Nilai tersebut berasal dari 444 badan usaha dan pelaku usaha dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 283.234 orang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, mengatakan kawasan ekonomi khusus kini menjadi salah satu motor transformasi ekonomi nasional.

Menurut dia, pengembangan KEK tidak lagi hanya berorientasi pada kawasan industri konvensional, tetapi juga mencakup hilirisasi, advanced manufacturing, layanan kesehatan internasional, hingga pengembangan ekosistem energi hijau.

Sejumlah proyek investasi strategis pun tengah berjalan di berbagai KEK. Di KEK Gresik, PT GEABH Joint Technology berencana menginvestasikan US\$ 600 juta untuk membangun pabrik melamin pertama dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 120.000 ton per tahun.

Di KEK Sei Mangkei, PT Evyap Sabun Indonesia telah merealisasikan investasi sebesar US\$ 130 juta untuk mendukung hilirisasi industri kelapa sawit.

Sementara itu, pembangunan pabrik PT Hoi Fu di KEK Kendal dengan nilai investasi Rp 1,12 triliun diproyeksikan mampu menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja. Adapun KEK Industropolis Batang memperkuat pengembangan energi hijau melalui penandatanganan dua nota kesepahaman dengan investor asal Hungaria.

Ke depan, pemerintah menyatakan evaluasi terhadap kinerja KEK akan lebih menitikberatkan pada dampak ekonomi yang dihasilkan, bukan sekadar nilai investasi yang berhasil dihimpun.

Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso, mengatakan ukuran keberhasilan kawasan akan mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan menerapkan evaluasi berbasis hasil (outcome) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan.

Untuk KEK industri, indikator utama meliputi nilai ekspor dan produktivitas. Sementara pada KEK pariwisata, penilaian akan mempertimbangkan jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan UMKM. Adapun KEK digital akan lebih difokuskan pada kemampuan menyerap tenaga kerja terampil.

Separuh Piutang Pajak Tak Tertagih? DJP Bentuk Cadangan Rp 47,42 Triliun

Minggu, 2 Agustus 2026 15:58 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/separuh-piutang-pajak-tak-tertagih-djp-bentuk-cadangan-rp-4742-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membentuk cadangan kerugian atas piutang pajak senilai Rp 47,42 triliun hingga akhir 2025. Nilai tersebut setara sekitar 56,7% dari total piutang pajak bruto yang mencapai Rp 83,61 triliun.

Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Audited Tahun 2025, pembentukan penyisihan tersebut membuat nilai piutang pajak yang masih dinilai berpotensi tertagih atau net realizable value tersisa sebesar Rp 36,20 triliun.

"Dari nilai piutang pajak sebesar Rp 83,61 triliun terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp 47,42 triliun sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (net realizable value) adalah sebesar Rp 36,20 triliun," tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip Minggu (2/8/2026).

Laporan tersebut menunjukkan bahwa penyisihan terbesar berasal dari piutang yang telah berusia lebih dari tiga tahun. Piutang dalam kelompok umur tersebut umumnya telah dikategorikan sebagai piutang macet sehingga sebagian besar nilainya dicadangkan.

Piutang pajak dengan umur lebih dari lima tahun menjadi kelompok terbesar. Nilainya mencapai Rp 22,29 triliun, sementara penyisihan yang dibentuk mencapai Rp 22,09 triliun atau sekitar 99,1% dari total piutang. Dengan demikian, piutang bersih yang masih tersisa hanya sekitar Rp 201,10 miliar.

Kondisi serupa juga terjadi pada piutang yang berusia lebih dari empat hingga lima tahun. Dari total piutang bruto sebesar Rp 5,89 triliun, DJP membentuk penyisihan Rp 5,84 triliun sehingga nilai bersihnya tinggal Rp 49,16 miliar.

Sementara itu, piutang dengan umur lebih dari tiga hingga empat tahun tercatat sebesar Rp 7,20 triliun. DJP menyisihkan Rp 7,09 triliun atau hampir seluruh nilainya, sehingga piutang bersih pada kelompok ini tersisa sekitar Rp 117,15 miliar.

Berbeda dengan piutang berumur panjang, kualitas piutang yang masih berusia relatif muda dinilai lebih baik. Piutang berumur hingga satu tahun tercatat sebesar Rp 25,69 triliun dengan penyisihan Rp 1,21 triliun.

Adapun piutang berumur satu hingga dua tahun mencapai Rp 11,93 triliun dengan penyisihan Rp 5,92 triliun. Sementara piutang berumur dua hingga tiga tahun sebesar Rp 10,61 triliun telah dicadangkan sebesar Rp 5,28 triliun.

DJP menjelaskan bahwa piutang yang berumur kurang dari tiga tahun pada umumnya masih dikategorikan sebagai piutang lancar, kurang lancar, atau diragukan.

Meski demikian, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan piutang dengan umur tersebut langsung diklasifikasikan sebagai piutang macet, misalnya Surat Tagihan Pajak (STP) yang mengikuti status ketetapan pajak induknya.

Dalam laporan keuangan itu, DJP juga menjelaskan bahwa penghapusan piutang pajak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.

Penghapusbukuan baru dapat dilakukan setelah diterbitkannya Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (DUPP) terhadap piutang yang hak tagihnya telah daluwarsa.

Hingga 31 Desember 2025, DUPP yang telah disusun merupakan usulan penghapusan atas ketetapan pajak yang hak tagihnya telah daluwarsa per 30 Juni 2025 dan diajukan oleh masing-masing kantor wilayah DJP.

Daya Beli Belum Pulih, Kredit Konsumsi Perbankan Tumbuh Melambat

Minggu, 2 Agustus 2026 16:44 WIB

Reporter: Aura Putri, Editor: Avanty Nurdiana

<https://keuangan.kontan.co.id/news/daya-beli-belum-pulih-kredit-konsumsi-perbankan-tumbuh-melambat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan kredit konsumsi perbankan mulai kehilangan momentum di tengah pemulihan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat. Meski masih tumbuh positif, laju kredit konsumsi pada Juni 2026 tercatat melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan Analisis Perkembangan Uang Beredar Bank Indonesia (BI), kredit konsumsi pada Juni 2026 tumbuh 5,7% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan 5,8% secara year on year (yoy) pada Mei 2026.

Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan kredit konsumsi masih ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) dan kredit multiguna. Pada Juni 2026, KPR/KPA tumbuh 4,4% yoy dan kredit multiguna 8,3% yoy. Sebaliknya, kredit kendaraan bermotor masih terkontraksi 9,9% yoy.

Dalam paparan publik kuartal II-2026, PT Bank Mandiri Tbk membukukan portofolio kredit konsumsi sebesar Rp 125 triliun atau tumbuh 1,39% yoy. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang naik 4,34% yoy dan kartu kredit sebesar 7,62% yoy. Sebaliknya, kredit kendaraan bermotor masih turun 19,2% yoy.

Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro mengatakan, perseroan memastikan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan kualitas aset yang tetap terjaga.

"Kami memastikan pertumbuhan kredit selalu berjalan beriringan dengan kualitas aset yang terjaga. Prinsip kehati-hatian inilah yang menjaga akselerasi bisnis tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang," ujar Danis.

Sementara itu, dalam paparan kinerja semester I 2026, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatat kredit perumahan tumbuh 4,8% yoy menjadi Rp 332,88 triliun per Juni 2026. Pertumbuhan itu terutama ditopang oleh KPR subsidi yang naik 8,1% yoy menjadi Rp 196,96 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, strategi beyond mortgage tidak berarti perseroan meninggalkan bisnis inti pembiayaan perumahan.

"Strategi beyond mortgage tidak berarti meninggalkan bisnis inti pembiayaan perumahan, tetapi melengkapinya sehingga nasabah BTN bisa mengakses kredit dari masa produktif hingga masa pensiun," ujar Nixon.

Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, pertumbuhan kredit konsumsi masih tertahan karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

"Daya beli masyarakat masih belum pulih sehingga berdampak pada kredit ritel pada umumnya. Segmen kredit yang akan menopang adalah investasi, terutama yang berhubungan dengan realisasi proyek-proyek pemerintah," ujar Trioksa kepada Kontan, Jumat (31/7/2026).

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih lambat dibandingkan kredit investasi mencerminkan pergeseran penyaluran kredit ke segmen investasi dan korporasi.

"Faktor paling kuat adalah pergeseran penyaluran menuju kredit investasi dan kredit korporasi besar yang umumnya memiliki imbal hasil lebih rendah karena nilai pinjamannya besar, risikonya relatif terukur, dan debeturnya mempunyai daya tawar tinggi," kata Josua kepada Kontan, Kamis (30/7/2026).

Menurut Josua, hingga akhir tahun perbankan perlu memastikan pertumbuhan kredit tetap menghasilkan pendapatan yang memadai dengan memperhitungkan biaya dana dan risiko.

Bantuan Pangan Disalurkan Serentak 17 Agustus, Anggaran Rp17 T

Minggu, 2 Agustus 2026 10:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/116979/bantuan-pangan-disalurkan-serentak-17-agustus-anggaran-rp17-t/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menugaskan Perum Bulog untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua akan serentak dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Alokasi total anggaran bantuan pangan tahap kedua bagi 33,24 juta keluarga berpenghasilan rendah itu telah disiapkan pemerintah sebesar Rp17,52 triliun.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk 3 bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali," kata Amran dalam siaran pers, Minggu (2/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengungkapkan alasan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua dilakukan pada momen kemerdekaan di seluruh wilayah, yakni untuk menguatkan kehadiran pemerintah bagi masyarakat.

"Masyarakat agar bisa merasakan, khususnya yang desil 1 sampai 4, bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk bantuan pangan di saat-saat masyarakat merayakan 17 Agustus, sehingga bantuan pangan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 17 Agustus," ujar Rachmi.

Rachmi menyebut penyaluran bantuan pangan beras dapat pula dilaksanakan menggunakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur pemerintah. Ini menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

"KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," tambah Rachmi.

Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini juga dipastikan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembaruan terkini. Bapanas sebagai pengguna DTSEN telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang diupdate tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah diupdate oleh BPS," terang Rachmi.

Untuk itu, Bapanas meminta pemerintah daerah agar segera saling berkoordinasi dengan Perum Bulog di daerah masing-masing sebagai persiapan pelaksanaan. Pengecekan kualitas beras menjadi hal yang cukup penting sebelum proses distribusi ke titik bagi.

"Catatan untuk Bulog wilayah Papua dengan keterbatasan transportasi, angkutan, gudang, mohon segera digerakkan, sehingga menjadi prioritas untuk daerah-daerah yang remote [terpencil] dulu. Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%," tutur Rachmi.

Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026 telah berhasil menysasar 33,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 99,7%. Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.

Sementara bantuan pangan beras tahap kedua ini dialokasikan dengan total beras sebanyak 997,2 ribu ton dan akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM masing-masing 10 kg dengan alokasi 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp17,52 triliun.

Bapanas melaporkan alokasi program bantuan pangan beras pada 2026 akan lebih banyak dibandingkan dengan 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan pada 2026 setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.

Inflasi

BPS mencatat, beras mengalami inflasi sepanjang paruh pertama 2026. Tingkat inflasi tahunan beras pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2026, masing-masing sebesar 3,44%, 3,61%, 3,71%, 4,36%, 4,55%, dan 3,98%.

Pada Juli 2026, beras berpotensi kembali mengalami inflasi. Ini mengingat per pekan keempat Juli 2026, harga rerata nasional beras medium dan premium sama-sama naik sebesar 0,47% dibandingkan dengan Juni 2026.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, per 2 Agustus 2026, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen senilai Rp13.861/kg. Harga tersebut telah naik 1,66% sejak awal Januari 2026 dan masih di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang dipatok Rp13.500/kg.

Dalam periode perbandingan yang sama, harga rerata nasional beras premium juga naik 1,59% menjadi Rp15.544/kg. Harga tersebut masih di atas rerata nasional HET beras premium yang ditetapkan Rp14.900/kg.

Neraca Perdagangan Juni Belum Surplus, Defisit Diproyeksi Tinggal US\$ 210 Juta

Minggu, 2 Agustus 2026 18:42 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/neraca-perdagangan-juni-belum-surplus-defisit-diproyeksi-tinggal-us-210-juta>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan Indonesia diperkirakan masih mencatatkan defisit pada Juni 2026. Namun, besarnya defisit diproyeksikan jauh lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya, seiring mulai meredanya tekanan dari impor migas akibat penurunan harga minyak dunia.

Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada Juni mengalami defisit sebesar US\$ 210 juta, lebih rendah dibandingkan Mei yang defisit US\$ 1,61 miliar.

"Proyeksi perdagangan untuk bulan Juni masih defisit, tetapi defisitnya turun menjadi sekitar US\$ 210 juta," ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (2/8/2026).

Menurut Myrdal, meskipun harga minyak dunia mulai menurun pada Juni, level harganya masih relatif tinggi sehingga nilai impor migas tetap memberikan tekanan terhadap neraca perdagangan.

Selain itu, impor bahan baku (raw material) juga diperkirakan masih tumbuh kuat. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang dinilai masih cukup solid, meskipun aktivitas manufaktur menunjukkan perlambatan yang tercermin dari penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.

Myrdal menyebut, kebutuhan impor tidak hanya berasal dari sektor manufaktur, tetapi juga didukung oleh konsumsi rumah tangga.

"Permintaan untuk impor bahan baku manufaktur maupun kebutuhan konsumsi masih cukup kuat, terutama impor pangan dan peralatan otomotif," jelasnya.

Di sisi lain, kinerja ekspor masih memperoleh dukungan dari sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Myrdal menilai ekspor batu bara, minyak sawit mentah (CPO), nikel, dan emas masih menjadi penopang utama sehingga membantu menahan pelebaran defisit perdagangan.

Lebih lanjut, Myrdal memperkirakan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) pada kuartal II 2026 akan mencapai sekitar 1,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, neraca pembayaran Indonesia alias balance of payments (BOP) juga diperkirakan masih mengalami defisit sekitar US\$ 2,3 miliar pada kuartal II 2026.

Meski demikian, ia menilai kondisi sektor eksternal masih relatif terjaga. Salah satu penopangnya adalah derasnya aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik, terutama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

"Arus masuk ke SRBI dan obligasi pemerintah masih cukup besar sehingga menjadi penopang sektor eksternal," katanya.

Myrdal juga mengingatkan bahwa ketahanan eksternal Indonesia masih tercermin dari posisi cadangan devisa yang meningkat menjadi US\$ 145,6 miliar pada Juni 2026, dibandingkan US\$ 144,9 miliar pada Mei 2026.

Kenaikan tersebut dinilai memberikan bantalan bagi stabilitas eksternal meskipun neraca pembayaran masih diperkirakan mengalami defisit.

Neraca Dagang Indonesia Diprediksi Defisit US\$ 1,46 Miliar pada Juni 2026

Minggu, 2 Agustus 2026 18:20 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/neraca-dagang-indonesia-diprediksi-defisit-us-146-miliar-pada-juni-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Neraca perdagangan Indonesia diperkirakan masih mencatatkan defisit pada Juni 2026. Meski harga minyak dunia turun dan berpotensi menekan impor migas, lonjakan impor nonmigas, terutama dari China, dinilai masih menjadi penghambat kembalinya neraca perdagangan ke zona surplus.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2026 akan mengalami defisit sebesar US\$ 1,463 miliar, meski lebih rendah dibandingkan defisit Mei sebesar US\$ 1,61 miliar.

Dalam proyeksinya, ekspor Indonesia diperkirakan tumbuh 3,30% secara tahunan dan naik 4,33% secara bulanan. Sementara itu, impor diprediksi melonjak 32,79% yoy dan meningkat 3,46% secara month on month (mom).

David menjelaskan, meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan sepanjang Juni sehingga berpotensi menekan nilai impor migas, hal tersebut belum cukup untuk mengembalikan neraca perdagangan ke zona surplus.

Menurutnya, defisit neraca perdagangan masih terjadi karena kenaikan impor yang tetap tinggi.

"Walau harga minyak turun di Juni, trade balance (neraca dagang) diproyeksikan masih defisit disebabkan oleh kenaikan impor yang cukup tinggi," ujar David kepada Kontan, Minggu (2/8).

Lebih lanjut David mengatakan, peningkatan impor terutama berasal dari Tiongkok, khususnya untuk kebutuhan mesin, produk elektronik, dan furnitur. Tingginya impor barang-barang tersebut menjadi salah satu faktor yang menahan perbaikan neraca perdagangan Indonesia pada Juni.

Dengan kondisi tersebut, David memperkirakan kinerja perdagangan Indonesia masih menghadapi tantangan meskipun tekanan dari impor migas mulai berkurang seiring pelemahan harga minyak dunia.

Kawasan Transmigrasi Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Minggu, 2 Agustus 2026 18:14 WIB

Reporter: Dina Mirayanti Hutaaruk, Editor: Dina Hutaaruk

<https://nasional.kontan.co.id/news/kawasan-transmigrasi-didorong-jadi-pusat-pertumbuhan-baru>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Transmigrasi mulai mengarahkan program transmigrasi sebagai strategi pembangunan kawasan berbasis potensi daerah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia Timur.

Hal itu diwujudkan lewat Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026. Sebanyak 1.476 akademisi menjadi peserta program tersebut dan diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kawasan.

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih produktif, mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa program transmigrasi kini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk, melainkan menjadi strategi pembangunan kawasan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah menjadi pihak utama dalam merancang pengembangan kawasan. “Sementara pemerintah pusat berperan sebagai penghubung yang memperkuat kolaborasi dengan investor, perguruan tinggi, dunia usaha, serta mitra internasional untuk membuka peluang ekonomi,” kata Iftitah dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).

Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong investasi di berbagai sektor potensial di Indonesia Timur, seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan kawasan yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai pendekatan baru transmigrasi dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui kepastian hukum lahan, penyediaan hunian, serta kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut pembangunan kawasan yang terpadu mampu mengurangi konflik sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Iftitah bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong meninjau sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur untuk mendorong peluang investasi di luar sektor pertambangan.

Wang mendukung transformasi transmigrasi Indonesia yang dinilai dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan, transfer teknologi, dan penciptaan peluang ekonomi. “Tiongkok juga menjajaki kerja sama di bidang pertanian modern, pelatihan vokasi, pariwisata, dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur.” tandasnya.

Hadapi El Nino, Bapanas Jalankan Tiga Strategi Jaga Harga Beras Tetap Stabil

Minggu, 2 Agustus 2026 18:02 WIB

Reporter: Hervin Jumar, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-el-nino-bapanas-jalankan-tiga-strategi-jaga-harga-beras-tetap-stabil>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas harga beras di tengah ancaman El Nino 2026 yang diperkirakan mencapai kategori sangat kuat.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi dan gejolak harga pangan selama musim kemarau.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua mulai Agustus 2026.

"Beras memang ada beberapa yang agak naik sedikit, tetapi secara umum masih cukup stabil. Namun demikian, pertama Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan pemerintah. Kedua, SPHP beras medium digencarkan ke pasar-pasar. Lalu program bantuan pangan beras tahap kedua untuk bulan Agustus akan diberikan," ujar Ketut dalam keterangan resmi, Minggu (2/8/2026).

Menurut Ketut, intervensi tersebut diperlukan di tengah kenaikan harga gabah di tingkat petani yang ikut mendorong harga beras di tingkat penggilingan.

Data Bapanas menunjukkan, harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini berada di kisaran Rp 6.500 hingga Rp 7.700 per kilogram, level yang dinilai masih menguntungkan petani.

Sementara itu, per 30 Juli 2026, rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan tercatat Rp 13.251 per kilogram dan beras premium Rp 14.673 per kilogram.

Meski demikian, Bapanas menyebut harga beras medium di tingkat konsumen masih terkendali, sedangkan harga beras premium hanya sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah telah menggelar 6.589 kali Gerakan Pangan Murah di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Selain itu, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 1,43 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas penyaluran SPHP pada Januari-Februari sebanyak 221.050 ton, SPHP periode Maret-Juli sebesar 552.380 ton, serta bantuan pangan tahap pertama sebanyak 662.880 ton.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997.200 ton kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.

Dengan penyaluran tersebut, total distribusi Cadangan Beras Pemerintah diperkirakan melampaui 2 juta ton. Adapun stok beras pemerintah saat ini masih mencapai sekitar 5,25 juta ton.

Ketut menilai besarnya stok tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus meredam potensi kenaikan harga apabila dampak El Nino mulai memengaruhi produksi pangan.

Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan El Nino 2026 telah memasuki fase aktif setelah anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik melampaui ambang batas 0,5 derajat Celsius.

BMKG memperkirakan, puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Peluang El Nino berkembang menjadi kategori sangat kuat mencapai 75% dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Kondisi tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko terhadap produksi pertanian dan pasokan pangan.

Rupiah Menguat Ditopang Inflow Asing dan Dolar Melemah, Simak Prospek Awal Pekan

Minggu, 2 Agustus 2026 12:41 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Avanty Nurdiana

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-menguat-ditopang-inflow-asing-dan-dolar-melemah-simak-prospek-awal-pekan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rupiah berhasil mengakhiri perdagangan pekan ini di zona hijau. Meski demikian, penguatan tersebut belum mampu menghapus pelemahan secara mingguan.

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,49% secara harian ke level Rp 18.022 per dolar AS pada Jumat (31/7/2026). Namun secara mingguan, rupiah masih melemah 0,32% dibandingkan posisi Rp 17.963 per dolar AS pada Jumat (24/7/2026).

Ekonom Makro Bank Tabungan Negara (BTN), Myrdal Gunarto, mengatakan penguatan rupiah sejalan dengan apresiasi mayoritas mata uang Asia terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat.

Menurut dia, pelemahan dolar AS pasca keputusan Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan menjadi salah satu faktor utama yang menopang penguatan mata uang kawasan, termasuk rupiah. Suku bunga acuan The Fed saat ini ditahan di kisaran 3,50% hingga 3,75%.

"Tren pelemahan US\$ secara global, terutama pasca keputusan The Fed yang tidak melakukan perubahan bunga moneter di rapat moneter terakhir," ungkap Myrdal kepada Kontan, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, ia menilai derasnya aliran dana asing (hot money inflow) ke pasar keuangan domestik turut memberikan dukungan terhadap rupiah. Hal ini terjadi karena investor global kembali melirik pasar negara berkembang yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, termasuk Indonesia.

Myrdal mencatat investor asing membukukan net buy di pasar saham sebesar US\$ 511 juta sepanjang 29-30 Juli 2026. Sementara itu, kepemilikan investor asing di pasar Surat Utang Negara (SUN) meningkat dari Rp 891,47 triliun pada 28 Juli menjadi Rp 892,04 triliun pada 29 Juli 2026.

Meski pada sisi lain, Myrdal melihat pergerakan rupiah akan menguat terbatas terhadap dolar AS. Iaa memperkirakan rupiah masih rentan melemah jika terdapat gejolak geopolitik global dengan disertai harga minyak yang kembali meningkat.

Namun, ia juga melihat pasokan valas dari konversi devisa hasil ekspor (DHE), aliran dana ke pasar keuangan dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta masuknya investasi asing langsung alias foreign direct investment (FDI) berpotensi menopang stabilitas rupiah.

Untuk perdagangan Senin (3/8), pelaku pasar diperkirakan akan mencermati serangkaian rilis data ekonomi global, terutama indeks PMI manufaktur negara-negara maju. Dari dalam negeri, perhatian pasar akan tertuju pada data inflasi, neraca perdagangan, serta PMI manufaktur Indonesia.

Selain itu, perkembangan geopolitik global juga dinilai tetap menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi ekspektasi inflasi melalui pergerakan harga minyak dunia.

Myrdal memperkirakan inflasi Indonesia pada Juli 2026 sedikit melambat menjadi 0,39% secara bulanan, dibandingkan 0,44% pada Juni 2026. Secara tahunan, inflasi diproyeksikan berada di level 3,43%.

Ia menjelaskan tekanan inflasi masih berasal dari kenaikan harga pangan seperti cabai merah, telur ayam, dan daging ayam, serta meningkatnya biaya pendidikan pada periode tahun ajaran baru. Namun,

penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex membantu meredam tekanan inflasi.

Myrdal memproyeksikan pergerakan rupiah pada Senin (3/8) berada di kisaran level Rp 18.029 per dolar AS hingga Rp 18.111 per dolar AS.

Akses Kawasan Wisata Strategis Jadi Prioritas Pengembangan Pariwisata Jateng

Minggu, 2 Agustus 2026 21:50 WIB

Penulis: Rezanda Akbar D, Editor: Vito

<https://jateng.tribunnews.com/bisnis/1261812/akses-kawasan-wisata-strategis-jadi-prioritas-pengembangan-pariwisata-jateng>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jateng menitikberatkan pembangunan di 2027 pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jateng, Endro Wicaksa mengatakan, sepanjang 2026 pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah, mulai dari promosi, peningkatan kapasitas SDM, hingga penyediaan infrastruktur pendukung.

"Kegiatan seperti ini menjadi penting, karena membantu mempublikasikan pariwisata Jateng, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, agar siap menyongsong target pembangunan 2027," katanya, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pengembangan sektor pariwisata membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk investasi untuk pembangunan hotel, destinasi wisata baru, maupun penguatan destinasi yang sudah ada.

Dari sisi konektivitas, Endro menuturkan, Pemprov Jateng memprioritaskan pengembangan akses menuju kawasan wisata strategis, terutama kawasan Borobudur.

Ia menyebut, peningkatan akses dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuju Borobudur, Magelang, hingga Purworejo diharapkan dapat memperluas sebaran wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara.

Selain itu, dia menambahkan, pengembangan juga diarahkan menuju kawasan Dieng hingga koridor utara melalui konsep pengembangan kawasan wisata baru.

"Kami ingin wisata Borobudur berkembang ke wilayah utara. Infrastruktur, destinasi, dan SDM semuanya akan didorong agar kawasan tersebut berkembang," ujarnya.

Endro menyatakan, target pemprov pada 2027 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng menjadi sekitar 3,85 persen.

"Peningkatan aktivitas pariwisata akan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah di tingkat kabupaten/kota melalui bertambahnya pajak hotel, restoran, serta sektor pendukung lain," jelasnya.

Adapun, Bank Indonesia (BI) Jateng mendukung komitmen Pemprov Jateng dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

"Di tahun 2026 ini kami mulai mengumpulkan berbagai informasi dan hal-hal yang memang perlu dipersiapkan dalam rangka pengembangan pariwisata Jateng pada 2027," ucapnya.

Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak bisa hanya berorientasi pada destinasi wisata. Aspek keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi perhatian, agar sektor itu mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Menarik investasi

Ia menyebut, sektor pariwisata memiliki peluang besar menarik investasi baru di Jateng. Selama ini, investasi masih didominasi sektor industri pengolahan, sedangkan investasi ke sektor pariwisata dinilai belum optimal.

"Ketika kita mengembangkan pariwisata, maka transportasi, akomodasi, dan berbagai fasilitas pendukung juga harus dibangun. Semua itu membutuhkan investasi," ucapnya.

Andi berharap, pemerintah dapat menghadirkan berbagai kemudahan bagi investor yang ingin mengembangkan sektor pariwisata, tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Dia menambahkan, sejumlah regulasi berkait dengan pembangunan hotel maupun destinasi wisata perlu disiapkan agar proses investasi lebih mudah, namun tetap memperhatikan ketentuan lingkungan.

"Harapannya, kebijakan atau kemudahan-kemudahan untuk sektor pariwisata bisa dibuka, sehingga mendorong investasi masuk ke sektor ini," ujarnya.

Selain itu, Andi menyatakan, pengembangan transportasi massal yang terintegrasi menjadi satu kebutuhan penting untuk memperkuat konektivitas destinasi wisata di Jateng. (Rezanda Akbar D)

Rembang Expo 2026 libatkan puluhan UMKM

Minggu, 2 Agustus 2026 18:13 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640531/rembang-expo-2026-libatkan-puluhan-umkm>

Rembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menggandeng 50-an pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah setempat untuk ikut meramaikan "Rembang Expo 2026" sebagai ajang promosi produk unggulan di Rembang.

"Selain UMKM lokal Rembang, kami juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), serta puluhan gerai peserta umum dari berbagai daerah melalui mekanisme subsidi silang," kata Bupati Rembang Harno dalam keterangan tertulis yang diterima di Rembang, Minggu.

Pada 2026, kata Bupati, terdapat 160 gerai yang terdiri atas lebih dari 20 gerai OPD, sekitar 50 gerai UMKM Kabupaten Rembang, serta puluhan gerai peserta umum dari berbagai daerah melalui mekanisme subsidi silang.

Pelaksanaan pameran berlangsung di Gedung Balai Kartini Rembang selama 10 hari, yang dibuka sejak Jumat (31/7) malam, hingga 9 Agustus 2026.

Menurut dia, kehadiran peserta dari luar daerah menjadi warna tersendiri sekaligus memperluas jejaring promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha di Kabupaten Rembang.

Bupati Harno mengatakan Rembang Expo bukan sekadar agenda pameran, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih dikenal luas.

"Sangat positif, paling tidak masyarakat mengetahui UMKM yang ada di Rembang itu apa saja. Dari luar daerah juga ternyata minatnya sangat luar biasa," ujar Harno.

Ia menyampaikan salah satu tantangan terbesar UMKM bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga memperluas akses pasar. Karena itu, keberadaan expo ini menjadi media promosi yang efektif agar masyarakat mengenal produk-produk lokal secara langsung.

"Ketika masyarakat sudah mengetahui kualitas sebuah produk, peluang untuk melakukan pembelian ulang akan semakin besar. Dampaknya tidak hanya meningkatkan omzet pelaku usaha, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah," ujar dia.

Untuk itu, dia berharap seluruh peserta memanfaatkan momentum tersebut dengan menampilkan produk terbaik, memperbaiki kualitas pelayanan, serta aktif membangun komunikasi dengan para pengunjung.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Rembang Kreatif Edi Siswanto mengungkapkan Rembang Expo 2026 tampil berbeda dibandingkan dengan pameran sebelumnya. Selain menyiapkan 160 gerai jualan dengan melibatkan puluhan UMKM, penyelenggara juga menghadirkan wahana dinosaurus sebagai daya tarik baru bagi masyarakat.

Konsep tersebut, kata dia, sengaja dihadirkan agar Rembang Expo 2026 tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga menjadi ruang hiburan dan apresiasi terhadap kreativitas masyarakat.

Sementara itu, kehadiran peserta dari luar daerah, menurut dia, bukan untuk menjadi pesaing semata, tetapi menjadi motivasi agar UMKM Rembang semakin kreatif, terus berinovasi, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ekonomi Sleman Tumbuh 6,53 Persen, Bupati Dorong Kepatuhan Pajak

Minggu, 2 Agustus 2026 19:17 WIB

Andreas Yuda Pramono

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1265798/ekonomi-sleman-tumbuh-653-persen-bupati-dorong-kepatuhan-pajak>

Harianjogja.com, SLEMAN—Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman yang mencapai 6,53 persen pada 2025 dinilai perlu diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan, peran konsultan pajak menjadi semakin penting untuk mendampingi masyarakat dan pelaku usaha agar pelaporan pajak dilakukan secara benar sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan Harda saat menghadiri Jalan Sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Kabupaten Sleman di Lapangan Pemda Sleman, Minggu (2/8/2026).

Pertumbuhan Ekonomi Sleman Lampau Tahun Sebelumnya

Harda mengatakan perekonomian Sleman tetap menunjukkan kinerja positif meski di tengah tantangan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat perlu dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman mencatat perekonomian Sleman pada 2025 tumbuh 6,53 persen, meningkat dibandingkan 5,19 persen pada 2024.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh berbagai lapangan usaha, terutama sektor konstruksi yang tumbuh 18,93 persen, disusul pertambangan dan penggalian sebesar 10,54 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 6,69 persen, jasa lainnya 6,68 persen, serta transportasi dan pergudangan 6,24 persen.

Di sisi lain, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata juga tetap mencatat pertumbuhan sebesar 5,62 persen.

Peran Konsultan Pajak Dinilai Semakin Penting

Menurut Harda, masih banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang memerlukan pendampingan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Karena itu, keberadaan konsultan pajak dinilai memiliki peran strategis untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada wajib pajak.

"Masyarakat terkait perpajakan ini banyak yang belum paham, sehingga betul-betul membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Hadirnya IKPI amat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Harda dalam keterangan tertulis.

Ia berharap peringatan HUT ke-61 IKPI menjadi momentum untuk memperluas sosialisasi mengenai profesi konsultan pajak sehingga semakin banyak masyarakat mengetahui layanan pendampingan yang tersedia.

Dengan demikian, pelaporan pajak tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga dilakukan secara benar sesuai aturan yang berlaku.

Bupati Ingatkan Pentingnya Integritas

Selain mendorong edukasi perpajakan, Harda juga mengingatkan para konsultan pajak agar terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pendampingan yang profesional menjadi salah satu faktor penting untuk membantu mengamankan penerimaan pajak sekaligus mencegah potensi kebocoran, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Integritas dan komitmen harus terus dijaga agar konsultan pajak benar-benar dapat membantu negara mengamankan pendapatan pajak tanpa ada kebocoran," katanya.

Peringatan HUT ke-61 IKPI Kabupaten Sleman turut diramaikan dengan berbagai kegiatan, di antaranya jalan sehat, senam sehat, donor darah, pemutaran profil IKPI Sleman, serta pembagian doorprize kepada para peserta.

Prancis Memperketat Regulasi Investasi Asing pada Sektor Kritis

Senin, 3 Agustus 2026 08:20 WIB

Jenny Che

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117016/prancis-memperketat-regulasi-investasi-asing-pada-sektor-kritis/2>

Bloomberg, Pemerintah Prancis memperketat aturan investasi asing di perusahaan-perusahaan kunci Prancis, termasuk yang terdaftar di bursa luar negeri, dengan alasan keamanan nasional di tengah ketegangan geopolitik.

Investor non-Eropa yang ingin memiliki saham sebesar 10% atau lebih di perusahaan Prancis, yang beroperasi di sektor kritis dan terdaftar di Prancis atau di pasar luar negeri, harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Prancis, menurut pernyataan pada hari Minggu dari kantor Perdana Menteri Sebastien Lecornu.

Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan dan teknologi dari investasi “oportunis” “dalam konteks geopolitik yang ditandai oleh ketegangan tinggi,” menurut pernyataan tersebut.

Pihak otoritas tidak merinci sumber ketegangan tersebut. Ambang batas ini diperketat dari 25% hak suara di sebuah perusahaan Prancis.

Proses penyaringan akan dipercepat, dengan kementerian memutuskan dalam waktu 10 hari setelah menerima permohonan apakah kasus tersebut memerlukan tinjauan menyeluruh.

Investasi asing sudah tunduk pada proses penyaringan di Prancis, termasuk yang melibatkan melampaui ambang batas 10% hak suara di perusahaan yang terdaftar di pasar yang diatur bagi investor non-Eropa.

Jepang Pastikan Amerika Serikat Bantu Intervensi Yen

Senin, 3 Agustus 2026 07:50 WIB

Erica Yokoyama dan Kanoko Matsuyama

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117013/jepang-pastikan-amerika-serikat-bantu-intervensi-yen/2>

Bloomberg, Jepang mengonfirmasi intervensi bersama pertamanya dengan Amerika Serikat di pasar valuta asing dalam 15 tahun dan memperingatkan bahwa pihaknya siap melakukan tindakan lanjutan, setelah yen pekan lalu merosot ke level terendah dalam empat dekade.

Kementerian Keuangan Jepang melakukan intervensi di pasar pada hari Jumat secara terkoordinasi dengan Departemen Keuangan AS, menurut pernyataan Menteri Keuangan Satsuki Katayama yang dirilis pada hari Senin oleh kementerian tersebut.

“Kementerian Keuangan Jepang tetap waspada dan menjalin komunikasi yang erat dengan rekan-rekan kami di Departemen Keuangan AS. Kami tidak akan ragu untuk melakukan intervensi bersama lebih lanjut,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa negaranya ikut serta dalam intervensi pasar valuta asing sebagai tanda persahabatan dengan Jepang, sambil menyatakan bahwa ia mengharapkan Washington memperoleh manfaat finansial dari membantu sekutunya tersebut.

Secara terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa AS turun tangan untuk membantu mengatasi pergerakan “semerawut” pada yen dan siap untuk terus membantu Jepang.

The Trump Administration delivers for America's trusted partners. Economic security is national security. And the U.S.-Japan alliance is built on both.

Friday's coordinated foreign exchange actions countered disorderly yen movements.

Treasury remains attentive and in close...

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 2, 2026

Konfirmasi ini muncul usai spekulasi sehari-hari menyusul rebound tajam yen dan semakin banyaknya bukti bahwa Washington telah mendukung upaya Tokyo. Mata uang tersebut menguat berkat kombinasi intervensi langsung, seruan dari para pejabat kepada bank-bank yang memperdagangkan yen, serta pesan terkoordinasi dari Katayama dan Menteri Keuangan AS.

Spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan AS mulai menguat setelah Bessent menjadi sorotan pada Kamis ketika ia mengatakan kepada Fox Business bahwa yen “sangat terdepresiasi.”

Sehari kemudian, Reuters mempublikasikan gambar sebuah buku catatan di kursi Menteri Keuangan selama rapat kabinet, yang bertuliskan “Beli Yen Jepang (JPY) US\$5-US\$10 miliar” di bawah judul “To Do.”

Financial Times lantas melaporkan bahwa Federal Reserve Bank of New York menjual euro untuk membeli yen atas nama Departemen Keuangan AS. Sekurang-kurangnya dua bank besar AS diminta oleh Fed New York untuk memantau nilai tukar yen terhadap euro sepanjang hari itu, demikian disampaikan dua orang yang mengetahui masalah ini kepada Bloomberg.

Pada penutupan perdagangan di New York pada hari Jumat, yen diperdagangkan pada level 157,40/US\$, level terkuat sejak awal Mei. Hanya dua hari sebelumnya, yen sempat mendekati level terlemah sejak 1986, yaitu mendekati 164.

“Mereka membutuhkan sedikit bantuan, dan kami selalu siap membantu Jepang,” kata Trump kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, sambil mengutip “hubungan baik” antara kedua negara. “Jepang selalu sangat baik kepada kami — kecuali soal insiden Pearl Harbor,” tambahnya.

Pertanyaan Trump terbaru adalah apakah upaya bersama ini akan memberikan dampak yang bertahan lama. Para ekonom berpendapat bahwa rencana pengeluaran ambisius Perdana Menteri Sanae Takaichi terus memberikan tekanan pada yen, dengan keputusannya pekan lalu untuk memangkas pajak penjualan yang tidak populer menjadi 1% mulai April semakin memicu kekhawatiran.

Pernyataan Katayama pada hari Senin menandai adanya perubahan dalam strategi Jepang dalam berkomunikasi dengan pasar. Pihak berwenang awalnya menahan diri untuk tidak memberikan komentar selama operasi tersebut berlangsung, dan hanya memberikan isyarat samar mengenai dukungan AS. Pendekatan tersebut tetap diterapkan sepanjang hari Jumat, hingga langkah terbaru untuk secara terbuka mengakui adanya intervensi tersebut.

Bloomberg News sebelumnya melaporkan bahwa Katayama akan mengonfirmasi tindakan bersama tersebut, menyusul laporan Reuters sebelumnya.

Jepang kemungkinan melakukan intervensi dalam satu hari terbesar sepanjang sejarah pada hari Kamis, dengan menghabiskan sekitar ¥8,45 triliun atau sekitar US\$53,7 miliar, menurut data Bank of Japan yang dianalisis oleh Bloomberg. Nikkei melaporkan bahwa pemerintah Jepang kembali melakukan intervensi pada hari Jumat untuk membeli yen untuk hari kedua berturut-turut.

Menteri Strategi Pertumbuhan Jepang, Minoru Kiuchi, berjanji pada hari Minggu bahwa para pejabat akan meningkatkan dialog dua arah dengan pasar untuk memperkuat kepercayaan investor.

“Mulai bulan ini, kami bermaksud memperkuat komunikasi dua arah dengan pasar,” kata Kiuchi dalam sebuah program di stasiun televisi nasional NHK, sambil menambahkan bahwa hilangnya kepercayaan akan mendorong kenaikan suku bunga.

Trump Sebut Intervensi Yen Jadi Sinyal Persahabatan AS-Jepang

Senin, 3 Agustus 2026 06:20 WIB

Jennifer A. Dlouhy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117004/trump-sebut-intervensi-yen-jadi-sinyal-persahabatan-as-jepang>

Bloomberg, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat ikut serta dalam intervensi pasar valuta asing yang mengangkat nilai tukar yen pekan lalu sebagai bentuk persahabatan dengan Jepang sekaligus untuk mendukung perekonomian global.

"Mereka membutuhkan sedikit bantuan, dan kami selalu ada untuk Jepang," kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One pada Minggu.

Selain itu, Trump menyinggung "hubungan yang baik" dengan sekutu AS tersebut. "Jepang selalu sangat baik kepada kami — kecuali tentu saja Pearl Harbor," tambahnya.

"Lebih dari apa pun, itu adalah sinyal persahabatan," ujarnya.

Sebelum komentar Trump, yen menguat tipis dalam perdagangan yang sepi, di tengah kewaspadaan pasar terhadap kemungkinan intervensi bersama lanjutan oleh Jepang dan Amerika Serikat pada Senin, setelah operasi terkoordinasi di Tokyo dan New York pekan lalu memicu penguatan tajam mata uang Jepang tersebut.

Setelah pernyataan Trump, yen mempertahankan pelemahan tipis terhadap dolar AS.

Kementerian Keuangan Jepang dan Departemen Keuangan AS kini bekerja sama pada tingkat yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade untuk menopang nilai tukar yen, sehingga meningkatkan risiko bagi pelaku pasar yang bertaruh terhadap mata uang tersebut.

Gandeng AS, Jepang Bakal Lakukan Intervensi Gabungan terhadap Pelemahan Yen

Senin, 3 Agustus 2026 06:07 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/gandeng-as-jepang-bakal-lakukan-intervensi-gabungan-terhadap-pelemahan-yen>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang dikabarkan akan menggandeng Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan penurunan yen ke level terendah dalam 40 tahun dan menyatakan komitmennya terhadap koordinasi bilateral yang jarang terjadi, yang diharapkan dapat menandai titik balik bagi mata uang tersebut.

Sebelum pengumuman tersebut, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Minggu (2/8/2026) bahwa Amerika Serikat membantu Jepang untuk menopang yen sebagai tanda persahabatan dan untuk membantu perekonomian dunia.

"Jepang memiliki yen yang melemah, dan mereka menginginkan sedikit bantuan. Dan kami selalu ada untuk Jepang," kata Trump ketika dia ditanya oleh seorang reporter mengapa AS membantu mendukung yen.

“Jepang sangat baik terhadap kita, kecuali, tentu saja, Pearl Harbor... Hal ini juga baik bagi perekonomian dunia.”

Setelah pernyataan Trump ini, dolar AS melemah 0,2% terhadap yen menjadi 157,07.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama akan mengumumkan pada Senin (3/8/2026) pagi bahwa Tokyo dan Washington bertindak bersama di pasar mata uang minggu lalu untuk menahan apa yang mereka anggap sebagai penurunan yen yang berlebihan, dua pejabat pemerintah Jepang mengatakan kepada Reuters pada akhir pekan, dan salah satu pejabat mengatakan operasi tersebut "masih berlangsung."

Pernyataannya yang diharapkan olehnya kepada wartawan mengikuti apa yang dikatakan sumber pasar adalah serangkaian pembelian yen oleh otoritas Jepang dan AS, yang merupakan intervensi bersama pertama dalam 15 tahun, dalam upaya untuk mendukung mata uang yang terpuruk.

Jepang telah berjuang untuk menahan penurunan yen yang terus-menerus sehingga mendorong kenaikan harga impor dan memicu inflasi yang lebih luas, sehingga berdampak buruk pada keuangan rumah tangga dan peringkat dukungan publik terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Jepang mungkin telah menjual sebanyak US\$ 58,97 miliar untuk membeli yen ketika melakukan intervensi di pasar New York pada hari Kamis, data Bank of Japan menunjukkan, diikuti oleh dugaan serangan lain ke pasar pada hari Jumat.

Pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS mengatakan kepada sejumlah bank bahwa mereka mungkin juga melakukan intervensi di pasar yen, kata sebuah sumber kepada Reuters, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent yang mengatakan yen "tampaknya sangat undervalued" memiliki daftar "Yang Harus Dilakukan" yang ditulis tangan pada rapat kabinet yang berbunyi, "Beli Yen Jepang (JPY) US\$ 5-US\$ 10 miliar", sebuah foto Reuters menunjukkan.

Sejalan dengan seruan Bessent yang berulang kali agar suku bunga Jepang lebih tinggi, Bank of Japan pada hari Jumat menawarkan sinyal paling eksplisit mengenai kenaikan suku bunga lebih awal, bahkan ketika bank tersebut mempertahankan kebijakan moneternya tetap stabil.

Sebagai tanda koordinasi kebijakan yang lebih luas, Korea Selatan mengambil tindakan untuk membeli mata uang won pada hari Kamis.

Dolar mengakhiri perdagangan pada hari Jumat di sekitar 157,60 yen, setelah turun dari dekat 164 yen, tertinggi sejak 1986, yang dicapai pada awal minggu.

Jepang melakukan intervensi pada bulan April dan Mei, membeli yen, hanya menyebabkan rebound singkat. Kenaikan suku bunga BOJ pada bulan Juni ke level tertinggi dalam 31 tahun sebesar 1% juga $\text{\textcircled{A}}$ memberikan sedikit dorongan yang bertahan lama pada mata uang yang sedang mengalami kesulitan tersebut.

Bank of Korea Koleksi Emas Lagi Setelah 13 Tahun, Kurangi Ketergantungan Aset Asing

Senin, 3 Agustus 2026 19:44 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Avanty Nurdiana

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-of-korea-koleksi-emas-lagi-setelah-13-tahun-kurangi-ketergantungan-aset-asing>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Bank Sentral Korea Selatan alias Bank of Korea (BOK) akan membeli emas dari produsen dalam negeri sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pasokan sekaligus meningkatkan kepemilikan logam mulia tersebut.

Dalam pernyataannya pada Senin (3/8/2026), Bank of Korea menyebut telah membentuk kerangka kerja pembelian emas domestik bersama sejumlah institusi terkait, termasuk Korea Exchange (KRX) dan Korea Securities Depository (KSD).

Melalui mekanisme tersebut, bank sentral akan membeli emas dari produsen lokal dengan menggunakan harga pasar internasional. Proses transaksi, pembayaran, hingga penyimpanan emas akan dilakukan melalui sistem yang tersedia di KRX dan KSD.

Bank of Korea memastikan langkah pembelian tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap harga perdagangan emas di pasar domestik. Pasalnya, emas yang dibeli merupakan emas yang sebelumnya memang ditujukan untuk kebutuhan ekspor dan akan dilakukan berdasarkan harga kontrak.

Menurut bank sentral, pembelian emas domestik ini bertujuan mendukung pengelolaan cadangan devisa Korea Selatan. Kebijakan tersebut menjadi langkah pertama Bank of Korea dalam membeli emas dari pasar domestik dalam 13 tahun terakhir, berdasarkan laporan media lokal.

Langkah ini dilakukan ketika sejumlah bank sentral global meningkatkan perhatian terhadap emas sebagai salah satu aset strategis untuk memperkuat cadangan dan mengurangi ketergantungan terhadap aset berbasis mata uang asing tertentu.

Thailand Minta Impor Pupuk Urea dari Indonesia Ditingkatkan hingga Ratusan Ribu Ton

Senin, 3 Agustus 2026 21:23 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/thailand-minta-impor-pupuk-urea-dari-indonesia-ditingkatkan-hingga-ratusan-ribu-ton>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Thailand mengusulkan peningkatan impor pupuk urea dari Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama ketahanan pangan kedua negara. Thailand berharap volume impor pupuk urea dari Indonesia dapat meningkat dari sekitar 60.000 ton per tahun menjadi beberapa ratus ribu ton per tahun.

Usulan tersebut disampaikan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dalam pernyataan pembuka sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Anutin mengatakan Thailand siap memperluas kerja sama dengan Indonesia di sektor ketahanan pangan. Menurutnya, kedua negara memiliki peluang besar untuk saling melengkapi kebutuhan komoditas strategis.

“Di bidang ketahanan pangan, negara kami siap menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Indonesia. Saya mengusulkan agar kita mengeksplorasi kerja sama lebih lanjut di beberapa bidang,” ujar Anutin.

Selain menawarkan Thailand sebagai pemasok beras berkualitas tinggi bagi Indonesia, Anutin juga meminta dukungan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor pupuk urea ke negaranya.

“Sebagai timbal balik, kami ingin mengimpor lebih banyak pupuk urea dari Indonesia. Kami berharap impor dapat meningkat dari sekitar 60.000 ton per tahun saat ini menjadi beberapa ratus ribu ton setiap tahunnya,” kata Anutin.

Ia menilai peningkatan perdagangan pupuk akan memperkuat hubungan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan kedua negara di tengah meningkatnya kebutuhan sektor pertanian.

Di sisi lain, Thailand juga berharap Indonesia dapat meningkatkan impor berbagai produk asal Negeri Gajah Putih, mulai dari komoditas pertanian, daging, produk susu, hingga mesin pertanian.

Menurut Anutin, penguatan perdagangan komoditas pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas hubungan dagang Indonesia dan Thailand yang saat ini bernilai sekitar US\$ 20 miliar.

Ia menambahkan, kedua negara masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan volume perdagangan mengingat ukuran ekonomi Indonesia dan Thailand yang sama-sama besar di kawasan ASEAN.

Karena itu, Thailand mengusulkan pembentukan Thailand–Indonesia Joint Trade Committee (JTC) sebagai forum untuk membahas target perdagangan yang lebih ambisius sekaligus memfasilitasi peningkatan perdagangan dan investasi bilateral.

Anutin berharap penguatan kerja sama di sektor pupuk, pangan, dan perdagangan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia dan Thailand yang telah disepakati kedua negara sejak tahun lalu.

Purbaya Beber Sejumlah Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 3 Agustus 2026 20:20 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117131/purbaya-beber-sejumlah-strategi-dorong-pertumbuhan-ekonomi>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pemerintah tengah mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang masih membayangi.

Purbaya meyakini bahwa di Semester II-2026, pertumbuhan akan menjadi lebih baik dengan koneksi ketat dengan Bank Sentral untuk memastikan mesin-mesin pertumbuhan tetap bisa berjalan.

“Kita juga memberikan beberapa stimulus kepada perekonomian, dalam waktu dekat, kalau tidak salah, kami mengumumkan stimulus untuk mobil dan motor listrik,” kata Purbaya. Purbaya menyebut bahwa soal stimulus ini nantinya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Sementara itu, Purbaya menyebut bahwa KSSK juga melakukan sejumlah langkah-langkah demi mendorong perekonomian, termasuk memastikan liquiditas di sistem finansial cukup dan dikondisi dengan Bank Sentral.

Selain itu, KSSK juga memastikan iklim investasi menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kami juga akan memastikan belanja pemerintah di semester kedua lebih lancar dibandingkan dengan semester pertama, terutama triwulan triwulan kedua tahun ini,” kata Purbaya.

Purbaya juga memprediksi pertumbuhan ekonomi di semester dua bisa tumbuh hingga sekitar 5,6% sampai 6%.

Potensi Perlambatan Kuartal II-2026

Meski begitu, Purbayapun tak menampik bahwa di kuartal II-2026, pertumbuhan ekonomi berpotensi tak akan secepat di kuartal I-2026

“Kalau kita lihat prediksi semua 4 lembaga, kelihatannya di bawah 5,6% untuk pertumbuhan [kuartal] kedua,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Senin (3/8/2026).

“Tapi mungkin tidak jauh dari 5,4% juga, Jadi melambat tapi tidak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian.”

Purbaya mencontohkan berbagai hal yang mendasari ketidakpastian tersebut seperti tingginya harga minyak dan juga perang yang masih penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, dari sisi domestik tantangan tercermin dari pengaturan anggaran pemerintah dan juga capital outflow yang tinggi.

Purbaya: Tambahan Dana Daerah Segera Diputuskan Presiden

Senin, 3 Agustus 2026 18:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117128/purbaya-tambahan-dana-daerah-segera-diputuskan-presiden/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan segera mengumumkan tambahan dana ke daerah usai mayoritas kas pemerintah daerah (pemda) menghadapi tekanan fiskal khususnya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bendahara Negara menyebut paling cepat pada hari ini, Senin (3/8/2026) malam atau besok, Presiden Prabowo Subianto akan memutuskan tambahan anggaran tersebut.

“Mungkin nanti malam atau besok akan dapat keputusan dari Presiden. Bantuannya [tambahan anggaran] seperti apa,” kata Purbaya ditemui usai konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin.

Akan tetapi, Purbaya belum bisa membeberkan tambahan anggaran pemda tersebut lantaran masih menunggu pandangan Prabowo. Akan tetapi, dia memastikan Kementerian Keuangan sudah menghitung alokasi anggaran itu.

“Nanti kalau bocor kan berarti saya mendahului Presiden. Gua enggak mungkin [umumin sekarang] Presiden [yang umumkan], kita tunggu seperti apa,” tutur Purbaya.

“Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi] yang akan melaporkan. Jadi, kami sudah hitung, kemukakan kami sudah siap dana sekian. Boleh apa enggak [disalurkan]. Bagaimana pandangan Bapak Presiden, gitu,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menjelaskan tambahan dana bagi kas pemda akan dilakukan sesuai kondisi fiskal daerah. Berdasarkan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya daerah yang betul-betul mengalami kesulitan dana yang akan mendapat tambahan anggaran.

“Jadi gini, DBH [dana bagi hasil] kan aturannya tergantung dengan kondisi fiskal daerah. Cuma untuk daerah-daerah tadi yang, kita udah pernah diskusi sama Kemendagri, yang mengalami kesulitan betul, kami akan melapor ke Presiden,” terangnya.

Pemerintah Kurang Bayar DBH Rp70 T di 2024

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan total kurang bayar DBH hingga tahun anggaran 2024 yang belum dibayarkan pemerintah mencapai Rp70,2 triliun.

Jika anggaran tersebut bisa segera dibayarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, maka persoalan kekurangan dana untuk membayar gaji PPPK akan terselesaikan.

Hal itu mengemuka dalam rapat Kementerian Dalam Negeri bersama, jajaran asosiasi pemerintah daerah, serta para gubernur dari seluruh Indonesia bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/7/2026).

“Nah ini kalau DBH dibayarkan maka PPPK ini sebagian besar daerah-daerah ini beres kecuali daerah-daerah itu tidak memiliki DBH kurang bayar,” kata Tito.

Mantan Kapolri itu memerinci, DBH kurang bayar hingga tahun anggaran 2024 mencapai Rp83,5 triliun terdiri dari kurang bayar DBH pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp40,2 triliun.

Total lebih bayar DBH tahun anggaran 2024 mencapai Rp13,3 triliun dengan perincian lebih bayar DBH pajak Rp1,2 triliun; lebih bayar DBH SDA Rp9,6 triliun; dan lebih bayar DBH sawit Rp2,3 triliun.

Sehingga total kurang bayar DBH setelah dikurangi total lebih bayar DBH mencapai Rp70,2 triliun untuk sebanyak 431 pemerintah daerah (pemda) dengan perincian 31 provinsi; 317 kabupaten, dan 83 kota.

“Tapi ada daerah-daerah yang DBHnya enggak ada, dilakukan efisiensi juga sudah, kita tahu itu tidak ada lagi caranya yaitu dengan cara top up dan ini sudah disiapkan skema itu oleh Bapak Menteri Keuangan sehingga mudah-mudahan masalah PPPK bisa diatasi,” jelas Tito.

Sebagai informasi, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu dalam APBN dan dibagikan kepada daerah penghasil maupun daerah nonpenghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dalam pagu TKD 2026, alokasi DBH tercatat sebesar Rp58,5 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Nilai tersebut turun hampir 70% dibandingkan dengan pagu DBH dalam APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

4 Otoritas Keuangan Kompak Proyeksi Ekonomi Q2-2026 Tumbuh 5,4%

Senin, 3 Agustus 2026 18:14 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117113/4-otoritas-keuangan-kompak-proyeksi-ekonomi-q2-2026-tumbuh-5-4/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Empat lembaga otoritas keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kompak memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 akan tumbuh di kisaran 5,4%, atau lebih rendah dari target pemerintah yang berada di kisaran 5,6%-6% sepanjang tahun ini.

Keempat regulator keuangan yang dimaksud yakni, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam hasil rapat KSSK dipaparkan, ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat, di tengah tantangan ekonomi global.

"Kami lihat prediksi semua empat lembaga KSSK kelihatannya di bawah 5,6% untuk kuartal II-2026, tapi kemungkinan tidak jauh dari 5,4%. Jadi melambat tapi tidak parah-parah amat," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers hasil rapat koordinasi KSSK, Senin (3/8/2026).

Bendahara Negara memaparkan pertumbuhan ekonomi kuartal II agak melambat karena momentumnya merupakan periode puncak ketidakpastian ekonomi, diiringi kenaikan harga minyak yang tinggi, dan situasi konflik geopolitik yang tidak jelas.

"Kita juga masih mengatur bagaimana agar anggaran aman, modal asing keluar, dan lainnya. Tapi saya yakin untuk semester II pertumbuhan akan lebih baik," sebut Purbaya.

Kendati demikian, dia mengaku akan terus bekerja sama dengan bank sentral untuk memastikan semua mesin pertumbuhan bisa berjalan. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menggelontorkan stimulus ekonomi pada paruh kedua tahun ini, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi kuartal II tumbuh di tengah gejolak ekonomi global. Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung oleh peran peredam gejolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah.

"Investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers KSSK, Senin (3/8/2026).

Selanjutnya, dia memproyeksi konsumsi pemerintah tumbuh positif sejalan dengan percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, dan penyaluran bantuan sosial.

"Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan," tegas Purbaya.

Menurut dia, hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang kuartal II-2026, dan berlanjut tumbuh 15,4% pada Juli 2026, dengan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik.

Kemudian, dia menilai aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan II, namun kembali melanjutkan ekspansi pada Juli 2026 dengan PMI manufaktur di level 50,2 yang menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha.

BI Sebut Cadev Aman, Inflow Berpotensi Perkuat Posisi Devisa

Senin, 3 Agustus 2026 17:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117118/bi-sebut-cadev-aman-inflow-berpotensi-perkuat-posisi-devisa/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa cadangan devisa (cadev) Indonesia saat ini masih terjaga dengan posisi pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar US\$145,6 miliar.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti membeberkan nilai cadev Indonesia pada 2026 mencapai ke level tertinggi yakni sebesar US\$156 miliar, sehingga jika dihitung-hitung, penggunaan cadev untuk stabilisasi dan pembayaran utang pemerintah mencapai US\$10,4 miliar.

“Angka US\$145 miliar itu masih relatif aman karena masih sekitar 5,4 bulan kali import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” kata Destry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Senin (3/8/2026).

Destry menyebut bahwa cadev Indonesia juga masih melebihi ambang batas aman alias threshold internasional yakni setara dengan tiga bulan impor dan pembayaran utang pemerintah.

Destry menyebut bahwa pemerintah telah meningkatkan arus dana asing baik melalui SBN dan SRBI di kuartal II-2026. Ia mengatakan bahwa saat ini kenaikan arus dana asing tersebut sudah mencapai US\$8,5 miliar hingga US\$9 miliar yang berpotensi menambah cadev.

Selain itu, Ia menyebut bahwa pemerintah juga sudah berhasil mengendalikan laju inflasi, terutama untuk inflasi volatile food yang tercatat sebesar 2,5% di Bulan Juli dari sebelumnya sebesar 5%.

Sementara itu, Destry membeberkan bahwa inflasi inti sudah menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.

Sehingga, pergerakan ekonomi yang terjadi tidak mendorong adanya overheating. Bahkan, Destry membeberkan jika inflasi total atau Indeks harga Konsumen (IHK) sudah mencapai 2,88% turun dibandingkan dari posisi 3% di bulan lalu.

“Jadi itu dampak kita bisa lihat stabilitas bisa terjaga sehingga kalau kita lihat juga pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir ini cukup terkendali,” kata Destry.

Sebelumnya, BI mencatat peningkatan cadev di bulan Juli 2026 dibandingkan bulan sebelumnya, ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa.

Pada Selasa (7/7/2026), BI mengumumkan cadangan devisa Indonesia untuk posisi akhir Juni berada di US\$ 145,6 miliar. Bertambah US\$ 0,7 miliar dari bulan sebelumnya.

Ini menjadi kenaikan cadangan devisa bulanan perdana sepanjang 2026. Sebelumnya, cadangan devisa selalu turun selama lima bulan berturut-turut.

"Perkembangan posisi cadangan devisa Juni 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah

oleh Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," sebut laporan BI.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni, lanjut laporan BI, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Capaian tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Neraca Dagang Januari-Juni: Surplus dengan AS, Tekor oleh China

Senin, 3 Agustus 2026 16:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117096/neraca-dagang-januari-juni-surplus-dengan-as-tekor-oleh-china>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia secara kumulatif pada Januari-Juni 2026 tercatat surplus US\$3,58 miliar. Surplus ini terutama ditopang komoditas nonmigas 19,35 miliar, sementara migas defisit 15,77 miliar.

Berdasarkan data BPS, Amerika Serikat (AS) menjadi negara penyumbang surplus terbesar untuk perdagangan migas dan nonmigas Indonesia. Sementara itu, China masih menjadi penyumbang defisit terbesar neraca perdagangan Indonesia.

Neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif periode Januari hingga Juni 2026 mencapai US\$3,58 miliar. Nilai tersebut lebih rendah bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai US\$19,60 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan, negara penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga Juni 2026 paling besar adalah dari China dengan defisit US\$14,26 miliar.

"Komoditas penyumbang defisit terbesar sepanjang Januari hingga Juni 2026 adalah China," ungkap Ateng dalam konferensi pers, Senin (3/8/2026).

Komoditas penyumbang utamanya yakni mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84), mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85), serta plastik dan barang dari plastik (HS 39).

Lalu, dengan Australia mencatatkan defisit US\$3,97 miliar, dengan komoditas penyumbang defisit utama adalah Sereal (HS 10), logam mulia dan perhiasan atau permata (HS 71), dan bahan bakar mineral (HS 27).

Terakhir dengan Prancis mencatatkan defisit US\$1,49 miliar, dengan komoditas penyumbang defisit adalah kendaraan udara dan bagiannya (HS 88), mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84), dan instrument optic, fotografi sinematografi, serta medis (HS 90).

Sementara itu, Indonesia masih mencatatkan surplus neraca dagang dengan beberapa negara, tertinggi yakni Amerika Serikat (AS) sebesar US\$10,44 miliar. Penyumbang surplus terbesar adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85), pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61), dan alas kaki (HS 64).

Selanjutnya, penyumbang surplus terbesar kedua adalah dengan India mencapai US\$6,73 miliar. Komoditas penyumbang terbesar adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Kemudian dengan Filipina surplus dagang Indonesia mencapai US\$4,02 miliar. Komoditas penyumbang surplus terbesar dengan negara tersebut adalah kendaraan dan bagiannya (HS 87), bahan bakar mineral (HS 27), serta lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15).

KSSK: Fiskal-Moneter RI Q2-2026 Terjaga di Tengah Konflik Global

Senin, 3 Agustus 2026 16:05 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117101/kssk-fiskal-moneter-ri-q2-2026-terjaga-di-tengah-konflik-global>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa kondisi fiskal dan moneter Indonesia masih terjaga. Meski demikian, pemerintah masih mewaspadaai gejala perekonomian global yang terjadi pada triwulan II-2026.

"Tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi tinggi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Namun demikian, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, dan ketahanan sektor keuangan yang terjaga," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Senin (3/8/2026).

Purbaya menyebut bahwa kondisi tersebut mendorong terjadinya inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter, terutama di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat.

Selain itu, ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate juga memberi andil terkait dengan risiko kenaikan inflasi ditambah dengan ketidakpastian arah kebijakan perdagangan dan fiskal yang turut menahan sentimen bagi para pelaku pasar.

Sementara itu, Purbaya menyebut bahwa di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan hasil obligasi, serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang.

Purbaya juga mengatakan bahwa ancaman global kembali mengintip seiring dengan berlanjutnya konflik Amerika Serikat melawan Iran. Meski arus lalu lintas di Selat Hormuz sempat membaik setelah interim deal di pertengahan bulan Juni, konflik kembali memanasi di akhir Juni.

Purbaya juga mengutip publikasi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% year on year pada tahun 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi April 2026 sekitar 3,1% year-on-year di tengah inflasi global yang kembali meningkat.

"Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global," kata Purbaya.

Ekonomi Domestik Terjaga

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang oleh daya beli masyarakat dan juga konsumsi masyarakat. Hal ini didukung pula oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki peran sebagai shock absorber.

Langkah ini terutama dilakukan melalui dorongan efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja serta stimulus pada periode libur sekolah.

“Investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi menilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah,” kata Purbaya.

Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan kecepatan belanja program prioritas pembayar gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial.

Purbaya juga menyebut koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan.

“Ini tercemin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang triwulan II dan berlanjut tumbuh 15,4% pada Juli minggu ke III-2026 dan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik,” katanya

Purbaya memaparkan, aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan II-2026, namun kembali melanjutkan ekspansi pada bulan Juli 2026 dengan PMI manufaktur di level 50,2 menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha.

“Kedepan sinergi kebijakan antara lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan. Dengan sinergi kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 5,6-6% year-on-year,” katanya.

Rupiah Bertahan di Rp17.900-an/US\$, Inflasi Jinak Angkat Sentimen

Senin, 3 Agustus 2026 15:42 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117098/rupee-bertahan-di-rp17-900-an-us-inflasi-jinak-angkat-sentimen/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Senin (3/8/2026) dengan penguatan, 0,06%. Meski relatif terbatas, toh rupiah berhasil mempertahankan posisinya di Rp17.990/US\$, di bawah angka psikologis Rp18.000/US\$.

Penguatan rupiah bersamaan dengan meredanya harga minyak mentah dunia ke US\$83,82/barel, dan indeks dolar Amerika Serikat (AS) yang relatif terpancung ke 99,77.

Pernyataan bahwa AS dan Iran berencana kembali menggelar dialog untuk mencapai kesepakatan membuat sebagian besar mata uang Asia menguat.

Won Korea Selatan memimpin penguatan di zona hijau, disusul peso Filipina, yen Jepang, baht Thailand. Lalu, penguatan yang lebih terbatas diikuti oleh rupee India, rupiah, dan dolar Singapura.

Selain tekanan eksternal yang mereda, sejumlah data ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tampaknya ikut memperkuat optimisme pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik.

Inflasi Juli yang melambat jadi 2,88% secara tahunan, lebih rendah dari konsensus pasar, memberi sinyal bahwa tekanan harga setidaknya masih berada dalam koridor target Bank Indonesia (BI).

Bahkan, secara bulanan Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,14%, didorong oleh normalisasi harga sejumlah komoditas pangan, setelah sempat meningkat pada bulan-bulan sebelumnya. Normalisasi ini tertopang oleh musim panen pada sejumlah komoditas.

“Informasi yang dapat kami himpun bahwa di bulan ini, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit sedang mengalami panen di beberapa sentra, sehingga stoknya melimpah,” kata Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS dalam rilis BPS, Senin (3/8/2026).

Meski begitu, Ekonom Bloomberg Economics, Tamara Henderson, memperkirakan inflasi akan kembali meningkat hingga melampaui target BI 1,5%-3,5% sebelum akhir kuartal III.

“Kenaikan harga minyak masih terus merambat di sepanjang rantai pasok, sementara fenomena El Nino diperkirakan akan kembali mendorong inflasi pangan,” kata Henderson, dalam catatannya.

3 Negara Tujuan Ekspor RI Januari-Juni 2026: China, AS, India

Senin, 3 Agustus 2026 14:58 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117088/3-negara-tujuan-ekspor-ri-januari-juni-2026-china-as-india/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada periode Januari hingga Juni 2026, China, Amerika Serikat (AS), dan India menjadi negara tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia.

“Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share (pangsa) sekitar 44,31% dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Senin (3/8/2026).

Ekspor Indonesia ke China tercatat mencapai US\$34,56 miliar. Angka tersebut memiliki kontribusi sebesar 25,68% keseluruhan total ekspor Indonesia di sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Ekspor non-migas ke China didominasi oleh ekspor besi dan baja dengan nilai mencapai US\$8.803 juta atau mencapai 25,47% dari keseluruhan ekspor Indonesia ke China.

Sementara ekspor nikel dan barang daripadanya ke Negeri Tirai Bambu sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar US\$5,6 miliar atau berkontribusi terhadap 16,36% terhadap keseluruhan ekspor dan ekspor bahan bakar mineral sebesar US\$4,8 miliar atau 14,17% terhadap total keseluruhan ekspor.

“Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar US\$15,82 miliar terutama didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85 dengan share sebesar 7,24% dan turun 10,67% secara cumulative-to cumulative,” tutur dia.

Sementara itu ekspor alas kaki ke Negeri Paman Sam sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar US\$ 1.424 juta dengan kontribusi sebesar 4,12% terhadap total ekspor.

Ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) ke Amerika Serikat tercatat sebesar US\$1,3 miliar atau memberikan kontribusi 3,98% terhadap total ekspor tanah air ke negara tersebut.

“Nilai ekspor non-migas ke India tercatat US\$9,25 miliar terutama didominasi oleh bahan bakar mineral atau HS27 dengan sharenya 32,87% dan naik 2,48% secara C to C-nya,” ujar Ateng.

Sementara itu, ekspor lemak dan minyak hewani/nabati ke India tercatat sebesar US\$1,60 miliar, atau sebesar 17,34% dari total ekspor non-migas RI ke India. Sementara itu ekspor mesin, perlengkapan elektrik dan bagiannya tercatat sebesar US\$959 miliar, atau berkontribusi sebesar 10,37% terhadap total ekspor RI ke India.

Secara keseluruhan, BPS mencatat kinerja ekspor pada Juni 2026 sebesar US\$25,46 miliar. Kinerja ekspor tersebut tercatat meningkat 8,84% year on year (yoy) bila dibandingkan periode sama tahun lalu.

Nilai Impor Semester I-2026 Naik 18,69%, Jadi US\$137,24 Miliar

Senin, 3 Agustus 2026 11:55 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117052/nilai-impor-semester-i-2026-naik-18-69-jadi-us-137-24-miliar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026, total nilai impor Indonesia tercatat sebesar US\$137,24 miliar atau mencatatkan kenaikan sebesar 18,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, nilai impor migas pada semester pertama tahun 2026 tercatat sebesar US\$22 miliar naik 38,71% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai impor non migas tercatat sebesar US\$115,23 miliar atau naik sebesar 15,50%.

Ateng Hartono, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS menyebut, jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaannya.

“Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor bahan baku penolong mencapai US\$97,95 miliar atau naik untuk bahan baku penolong sebesar 18,38% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu dan memberikan andil terhadap peningkatan ekspor sebesar 13,15%,” kata Ateng dalam rilis BPS, Senin (3/8/2026)

Ateng menyebut, impor bahan baku penolong mencatatkan kenaikan cukup besar terutama untuk HS27 atau bahan bakar mineral, dan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta garam, belerang, batu dan juga semen atau HS25.

Apabila dilihat menurut negara dan kawasan impor, peningkatan nilai impor terjadi pada Chiba, Australia, kawasan ASEAN dan juga kawasan Uni Eropa. Sementara itu Ateng menyebut bahwa impor dari Jepang mengalami penurunan.

Impor Juni 2026

Sementara itu, pada Juni tahun 2026, total nilai impor mencapai US\$25,91 miliar atau meningkat sebesar 34,27% dibandingkan dengan Juni tahun 2025.

“Nilai impor migas sebesar 4,56 miliar USD atau meningkat 105,15% secara tahunannya. Sedangkan untuk impor non-migas senilai 21,35 miliar USD mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 25,05%,” kata Ateng.

Menurut Ateng, peningkatan nilai impor secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan impor non-migas dengan andil peningkatan impor non-migas tersebut sebesar 22,17%.

Menurut penggunaan, pada Juni tahun 2026, seluruh impor menurut golongan penggunaan mengalami peningkatan secara tahunannya.

Ia menyebut, nilai impor barang konsumsi pada bulan Juni tahun 2026 naik sebesar 17,46% dibandingkan dengan Juni tahun 2025.

Sedangkan untuk nilai impor bahan baku penolong sebagai pendorong utama kenaikan impor naik secara tahunan cukup tinggi yaitu sebesar 38,94% dengan andil terhadap peningkatan impor sebesar 26,94%.

Selain itu, Ateng menyebut nilai impor barang modal juga naik yaitu sebesar 26,53%.

Nilai Ekspor Juni 2026 US\$25,4 Miliar, Naik 8,84% YoY

Senin, 3 Agustus 2026 11:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/117042/nilai-ekspor-juni-2026-us-25-4-miliar-naik-8-84-yoy/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja nilai ekspor Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar US\$25,46 miliar atau naik 8,84% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Data ini lebih tinggi dibanding proyeksi konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026) terhadap sejumlah ekonom dan analis. Mereka memperkirakan nilai ekspor Indonesia masih berkontraksi 0,4% secara tahunan (year-on-year/yoy),

Kinerja nilai ekspor Juni ini juga lebih baik dibanding nilai ekspor pada Mei 2026 yang tercatat hanya US\$23,2 miliar atau turun 5,73% (yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebutkan kontribusi dari ekspor migas tercatat senilai US\$1,07 miliar atau turun 3,78%. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas tercatat meningkat sebesar 9,46% dengan nilai US\$24,39 miliar.

“Kenaikan nilai ekspor Juni 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas, yaitu pada beberapa komoditas. Ini terutama komoditas bahan bakar mineral yang naik nilainya 49,67%, dan volumenya 15,34%,” ujar Ateng, Senin (3/8/2026).

Kemudian, nikel dan barang daripadanya mengalami kenaikan nilai ekspor 69,30%, meski volumenya turun 12,14%. Terakhir, lemak dan minyak hewani/nabati mengalami kenaikan nilai 10,45%, meski volume ekspor turun 7,09%.

Sebelumnya, konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026), memperkirakan nilai ekspor Indonesia masih berkontraksi 0,4% secara tahunan (year-on-year/yoy), meski membaik dibanding kontraksi Mei yang sebesar 5,73%.

Sebaliknya, impor Indonesia pada Juni 2026 diproyeksi tumbuh 22,3%, nyaris tidak berubah dari realisasi Mei sebesar 22,16%.

Jika terealisasi, perbaikan yang terjadi pada impor bisa dibaca sebagai tanda bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergairah. Namun, data ekspor yang masih berkontraksi menggambarkan bahwa mesin penghasil devisa sepertinya belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan domestik yang tergambar dari impor.

Kinerja Ekspor Kumulatif Januari-Mei 2026

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, total nilai ekspor mencapai US\$140,81 miliar atau naik 4,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Kenaikan ini didorong oleh nilai ekspor nonmigas yang naik 4,90% dengan nilai US\$134,58 miliar. Di sisi lain, nilai ekspor migas tercatat senilai US\$6,23 miliar atau turun 10,19%.

“Peningkatan nilai ekspor nonmigas secara kumulatif terjadi pada nikel dan barang daripadanya, lemak dan minyak hewani/nabati, dan bahan bakar mineral,” ujar Ateng.

Berdasarkan sektornya, sektor industri pengolahan ini menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor nonmigas sepanjang Januari hingga Juni 2026 dengan andil sebesar 6,18% terhadap kenaikan total ekspor,” kata Ateng.

Secara detail, dia menyebut bahwa ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar yaitu produk olahan nikel, minyak kelapa sawit, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kimia dasar anorganik lainnya serta semi-alumunium.

Inflasi Juli 2026 'Cuma' 2,88%, Melandai dari Proyeksi Konsensus

Senin, 3 Augustus 2026 11:17 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117039/inflasi-juli-2026-cuma-2-88-melandai-dari-proyeksi-konsensus/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan (year-on-year/yoy). Artinya, Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 111,73 pada Juli 2026.

Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi konsensus yang memperkirakan inflasi Juli 2026 akan mencapai 3,16% (yoy). Angka itu juga lebih rendah ketimbang realisasi inflasi pada Juni yang sebesar 3,34%.

Berdasarkan data BPS, IHK pada Juli mengalami deflasi secara bulanan terhadap Juni 2026, yakni -0,14%. Sementara itu, inflasi dalam perhitungan tahun kalender (year-to-date/yttd) tercatat sebesar 1,65%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebutkan, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh tiga kelompok, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,97% dan memberi andil inflasi 0,87%.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, cabai merah, daging sapi, dan sigaret kretek tangan," kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (3/8/2026).

Kelompok pengeluaran lain yang memberi inflasi adalah kelompok pengeluaran transportasi, inflasi 5,12% dengan andil terhadap inflasi 0,62%.

inflasi pada kelompok ini terutama didorong bensin, tarif angkutan udara, mobil, pelumas atau oli mesin, dan sepeda motor.

Ketiga, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yakni mengalami inflasi mencapai 9,04% dan memberi andil 0,61%.

"Inflasi pada kelompok ini terutama terjadi pada komoditas emas dan perhiasan," tutur Ateng.

Sebelumnya, ekonom memperkirakan laju inflasi Indonesia pada Juli melambat secara tahunan. Namun ke depan, laju inflasi bisa saja kembali terakselerasi. Konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga

Jumat (31/7/2026) pagi menghasilkan median proyeksi inflasi tahunan pada Juli sebesar 3,16% yoy. Jika terjadi, maka lebih rendah ketimbang Juni yang sebesar 3,34% yoy.

Proyeksi inflasi inti untuk Juli ada di 2,79% yoy. Tidak seperti inflasi umum, inflasi inti semula diproyeksi sedikit terakselerasi dibandingkan Juni, yakni 2,76% yoy. Namun secara umum masih stabil, tidak ada perubahan signifikan.

Tamara Henderson, Ekonom Bloomberg Economics, menilai laju inflasi Indonesia pada Juli memang rasanya akan tertahan. Inflasi diperkirakan stabil, tidak ada lonjakan.

“Ada base effect dari harga pangan, yang kemudian meredakan tekanan harga energi,” sebut Henderson dalam risetnya.

Akan tetapi, Henderson berpesan bahwa masa tenang ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ada risiko tekanan harga akan kembali terjadi pada bulan-bulan mendatang.

Defisit Neraca Dagang RI Berlanjut, Juni 2026 -US\$450 Juta

Senin, 3 Agustus 2026 11:55 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117053/defisit-neraca-dagang-ri-berlanjut-juni-2026-us-450-juta/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US\$450 juta pada Juni 2026. Angka ini sesuai dengan proyeksi konsensus para ekonom dan analis yang memperkirakan neraca dagang akan berlanjut defisit, setelah mengalami perjalanan panjang surplus pada neraca dagang nasional.

Konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026) menghasilkan median proyeksi neraca perdagangan Indonesia defisit US\$756 juta. Masih minus, tetapi ada perbaikan ketimbang bulan sebelumnya.

Pada Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US\$1,61 miliar, menjadi yang pertama kalinya setelah surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak 6 tahun terakhir, tepatnya Mei 2020. Terakhir, neraca dagang Indonesia mengalami surplus US\$89,1 juta pada April 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan defisit neraca perdagangan Juni 2026 terutama disebabkan oleh komoditas migas yang defisit US\$3,49 miliar, dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas yaitu hasil minyak dan minyak mentah.

"Pada saat yang sama, neraca perdagangan nonmigas surplus US\$3,04 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama dari lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja," kata Ateng dalam konferensi pers BPS, Senin (3/8/2026).

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif pada periode Januari-Juni 2026 tercatat masih surplus US\$3,58 miliar. Angka ini ditopang surplus komoditas nonmigas sebesar US\$19,35 miliar, sementara komoditas migas masih defisit US\$15,77 miliar.

Sebelumnya, konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026) menghasilkan median proyeksi neraca perdagangan Indonesia defisit US\$756 juta. Masih minus, tetapi ada perbaikan ketimbang bulan sebelumnya.

Konsensus memperkirakan impor Indonesia pada Juni 2026 tumbuh 22,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), nyaris tidak berubah dari realisasi Mei sebesar 22,16%. Sebaliknya, ekspor diperkirakan masih berkontraksi 0,4%, meski membaik dibanding kontraksi Mei sebesar 5,73%.

Jika terealisasi, perbaikan yang terjadi pada impor bisa dibaca sebagai tanda bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergairah. Namun, data ekspor yang masih berkontraksi menggambarkan bahwa mesin penghasil devisa sepertinya belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan domestik yang tergambar dari impor.

RI Catat Deflasi 0,14% di Juli 2026: Dipicu Mamin dan Tembakau

Senin, 3 Agustus 2026 11:14 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117048/ri-catat-deflasi-0-14-di-juli-2026-dipicu-mamin-dan-tembakau/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada bulan Juli 2026 Indonesia mencatatkan deflasi sebesar 0,14% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut juga terdapat penurunan Indeks Harga Konsumen IHK dari 111,89 pada bulan Juni tahun 2026 menjadi 111,73 pada Juli tahun 2026.

"Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%," kata Ateng dalam rilis BPS, Senin (3/8/2026).

Ateng menyebut, komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabe merah dan cabe rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Deflasi juga disumbang oleh komoditas jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%.

Selain makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan deflasi sebesar 0,89% atau memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,06%.

"Nah deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama didorong oleh deflasi pada emas perhiasan sebesar 3,58% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,08%," kata Ateng

BPS juga mencatat bahwa pada bulan Juli tahun 2026, kelompok transportasi dan pendidikan menyumbang andil deflasi yang cukup signifikan. Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,06%.

Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi terutama bensin dengan andil inflasi 0,08%.

Sebagai informasi, deflasi tersebut berlawanan dengan konsensus analis yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026) pagi menghasilkan median proyeksi inflasi Juli di 3,16% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Konsensus Bloomberg meramal, tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan lebih jinak. Sebab, harga BBM jenis Pertamina tidak mengalami kenaikan seperti bulan sebelumnya,

Inflasi Juli 2026 'Cuma' 2,88%, Melandai dari Proyeksi Konsensus

Senin, 3 Augustus 2026 11:17 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117039/inflasi-juli-2026-cuma-2-88-melandai-dari-proyeksi-konsensus/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan (year-on-year/yoy). Artinya, Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 111,73 pada Juli 2026.

Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi konsensus yang memperkirakan inflasi Juli 2026 akan mencapai 3,16% (yoy). Angka itu juga lebih rendah ketimbang realisasi inflasi pada Juni yang sebesar 3,34%.

Berdasarkan data BPS, IHK pada Juli mengalami deflasi secara bulanan terhadap Juni 2026, yakni -0,14%. Sementara itu, inflasi dalam perhitungan tahun kalender (year-to-date/ytd) tercatat sebesar 1,65%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebutkan, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh tiga kelompok, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 2,97% dan memberi andil inflasi 0,87%.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, cabai merah, daging sapi, dan sigaret kretek tangan," kata Ateng dalam konferensi pers, Senin (3/8/2026).

Kelompok pengeluaran lain yang memberi inflasi adalah kelompok pengeluaran transportasi, inflasi 5,12% dengan andil terhadap inflasi 0,62%.

inflasi pada kelompok ini terutama didorong bensin, tarif angkutan udara, mobil, pelumas atau oli mesin, dan sepeda motor.

Ketiga, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yakni mengalami inflasi mencapai 9,04% dan memberi andil 0,61%.

"Inflasi pada kelompok ini terutama terjadi pada komoditas emas dan perhiasan," tutur Ateng.

Sebelumnya, ekonom memperkirakan laju inflasi Indonesia pada Juli melambat secara tahunan. Namun ke depan, laju inflasi bisa saja kembali terakselerasi. Konsensus yang dihimpun Bloomberg hingga Jumat (31/7/2026) pagi menghasilkan median proyeksi inflasi tahunan pada Juli sebesar 3,16% yoy. Jika terjadi, maka lebih rendah ketimbang Juni yang sebesar 3,34% yoy.

Proyeksi inflasi inti untuk Juli ada di 2,79% yoy. Tidak seperti inflasi umum, inflasi inti semula diproyeksi sedikit terakselerasi dibandingkan Juni, yakni 2,76% yoy. Namun secara umum masih stabil, tidak ada perubahan signifikan.

Tamara Henderson, Ekonom Bloomberg Economics, menilai laju inflasi Indonesia pada Juli memang rasanya akan tertahan. Inflasi diperkirakan stabil, tidak ada lonjakan.

"Ada base effect dari harga pangan, yang kemudian meredakan tekanan harga energi," sebut Henderson dalam risetnya.

Akan tetapi, Henderson berpesan bahwa masa tenang ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ada risiko tekanan harga akan kembali terjadi pada bulan-bulan mendatang.

Ahmad Luthfi Dorong BUMD Punya Daya Dobrak Tingkatkan Pendapatan Daerah

Senin, 3 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/ahmad-luthfi-dorong-bumd-punya-daya-dobrak-tingkatkan-pendapatan-daerah/>

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberi ultimatum kepada seluruh direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar meningkatkan kinerja dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD yang masih mencatatkan kinerja yang belum optimal, diminta segera melakukan pembenahan di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penegasan itu disampaikan Luthfi, saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/8/2026).

Menurut Luthfi, PAD merupakan salah satu instrumen untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya, di bawah kendali Pak Sekda,” kata Luthfi.

Berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat satu BUMD yang berada dalam kategori berkinerja kurang baik, yakni PT PRPP Jawa Tengah.

Karenanya, Luthfi meminta agar perusahaan tersebut meningkatkan kinerja. Apalagi, perusahaan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah, terutama sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata.

Bahkan, PRPP diproyeksikan menjadi salah satu ikon Jawa Tengah. Di antaranya ke depan akan dibangun venue MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Saat ini sedang diupayakan untuk mencari investor guna pengembangan PRPP.

“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencari investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” katanya.

Menurut Luthfi, BUMD harus memiliki tata kelola yang profesional, karena merupakan sarana untuk meningkatkan PAD dan berkontribusi pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Apalagi di tengah keterbatasan fiskal, tekanan fiskal, dan kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu. (Humas Jateng)*ul

Jateng Masih Magnet Investasi, Perusahaan Australia Tanamkan 350 Juta Dolar AS di Batang

Senin, 3 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-masih-magnet-investasi-perusahaan-australia-tanamkan-350-juta-dolar-as-di-batang/>

SEMARANG — Jawa Tengah membuktikan diri masih menjadi magnet investasi asing setelah perusahaan asal Australia, Pure Battery Technologies (PBT), berkomitmen menanamkan modal sekitar 350 juta dolar AS, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Investasi yang bergerak di sektor fasilitas produksi bahan prekursor katoda aktif atau precursor cathode active material (PCAM) ini, diproyeksikan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja pada masa konstruksinya. Pabrik tersebut rencananya akan dibangun mulai 2027.

Chairman PBT, Stephen Wilmot mengatakan, perusahaannya saat ini tengah mengerjakan tahap rekayasa atau engineering, sebagai persiapan pembangunan pabrik.

“Kami berharap dapat mulai melakukan pembangunan tahun depan,” katanya, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di kantor gubernur, Senin (3/8/2026).

Setelah beroperasi, pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 200 pekerja tetap. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja pada sektor pendukung, seperti logistik, angkutan, dan pengiriman.

Wilmot menegaskan, PBT akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan, agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri baterai.

“Kami tidak ingin mendatangkan tenaga kerja dari negara lain. Kami ingin melatih masyarakat lokal, agar dapat bekerja di pabrik kami,” katanya.

Menurut Wilmot, proyek di Jawa Tengah menjadi investasi terbesar yang pernah dilakukan PBT. Skala pabrik tersebut diperkirakan lebih dari empat kali lipat, dibandingkan fasilitas pemurnian milik perusahaan di Jerman.

Pabrik itu diproyeksikan menghasilkan pendapatan sekitar 900 juta dolar AS per tahun. Namun, realisasinya akan bergantung pada perkembangan harga nikel.

Ditambahkan, PBT berencana menggunakan bahan baku nikel dari Indonesia, untuk membangun rantai nilai industri baterai secara menyeluruh. Material yang dihasilkan dapat digunakan untuk baterai bus, mobil, maupun sistem penyimpanan energi pada jaringan listrik.

“Kami ingin membangun seluruh rantai nilai kendaraan listrik, termasuk pengelolaan baterai yang telah mencapai akhir masa pakainya. Kami ingin melakukan daur ulang untuk memastikan tidak muncul persoalan lingkungan,” jelas Wilmot.

Dia mengatakan, PBT sebenarnya dapat membangun pabrik di wilayah yang berdekatan dengan tambang nikel. Namun, perusahaan memilih Jawa Tengah karena letaknya strategis, didukung populasi besar, serta dinilai mempunyai masa depan kuat sebagai pusat industri manufaktur.

“Kami telah menghabiskan banyak waktu untuk mengambil keputusan datang ke Jawa Tengah. Ini merupakan investasi yang sangat penting bagi perusahaan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, investasi tersebut sejalan dengan arah pengembangan energi terbarukan di Jawa Tengah. Dia berharap, hasil produksi pabrik tidak hanya ditujukan untuk ekspor, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Kalau bisa, energi terbarukan seperti solar panel, pemanfaatannya tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga digunakan di dalam negeri, khususnya di Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Menurut Luthfi, pasar energi terbarukan dan kendaraan listrik di Jawa Tengah sangat potensial. Provinsi ini memiliki sekitar 38 juta penduduk, yang tersebar di 35 kabupaten/ kota.

Pemprov Jawa Tengah juga terus mendorong pemanfaatan panel surya pada gedung pemerintahan, serta menjajaki penggunaannya di kawasan waduk dan danau. Ke depan, moda transportasi umum juga diarahkan beralih menggunakan kendaraan listrik.

“Kalau bisa, kebutuhan itu tidak hanya ditarik keluar, tetapi industri-industri kita juga mendapatkan pasokannya dari sana, sehingga dapat menggerakkan industri di dalam negeri,” tandasnya. (Humas Jateng)*ul

Ekspor Jateng Januari-Juni 2026 Naik 23,53 Persen

Senin, 3 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/ekspor-jateng-januari-juni-2026-naik-2353-persen/>

SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Jawa Tengah selama Januari-Juni 2026 mencapai 7.207,69 juta dolar AS, atau naik 23,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiga negara tujuan utama ekspor Jawa Tengah masih didominasi Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok.

Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan, secara kumulatif peningkatan ekspor pada Januari-Juni 2026 didorong oleh ekspor komoditas nonmigas, yang mencapai 6.701,28 juta dolar AS, atau naik 17,98 persen dibandingkan periode yang sama 2025. Sementara itu, ekspor komoditas migas mencapai 506,42 juta dolar AS, atau meningkat 227,43 persen.

Adapun, nilai ekspor pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.342,37 juta dolar AS, atau naik 28,78 persen dibandingkan Juni 2025.

“Secara kumulatif, peningkatan nilai ekspor nonmigas didorong oleh sektor industri pengolahan, yang tumbuh sebesar 18,29 persen. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan lainnya, mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,78 persen dan 13,19 persen,” jelasnya, dalam rilis pers daring, Senin (3/8/2026).

Ali menjelaskan, pangsa ekspor nonmigas ke Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok mencapai 61,97 persen dari total ekspor nonmigas. Nilai ekspor nonmigas ke Amerika Serikat mencapai 3.297,62 juta dolar AS, disusul Jepang sebesar 546,64 juta dolar AS, dan Tiongkok sebesar 308,49 juta dolar AS.

Sementara itu, komoditas unggulan yang diekspor ke tiga negara tersebut didominasi pakaian dan aksesori bukan rajut, pakaian rajut, perlengkapan elektrik, serta ikan, krustasea, dan moluska.

Pada kesempatan itu, Ali juga mengungkapkan neraca perdagangan kumulatif Jawa Tengah pada Januari-Juni 2026 mengalami defisit. Hal itu terjadi karena nilai impor pada periode yang sama mencapai 8.505,88 juta dolar AS.

Dia menjelaskan, peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor bahan baku atau barang penolong sebesar 27,12 persen. Selain itu, impor barang konsumsi dan barang modal juga mengalami peningkatan.

“Secara kumulatif pada Januari-Juni 2026, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.298,19 juta dolar AS atau setara 1,29 miliar dolar AS. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit komoditas migas sebesar 2.827,98 juta dolar AS. Namun, jika dilihat dari komoditas nonmigas, neraca perdagangan Jawa Tengah masih mencatat surplus sebesar 1.529,80 juta dolar AS,” pungkas Ali. (Pd/UI, Diskomdigi Jateng)

Jawa Tengah Kembali Dilirik Investor Amerika, Siap Garap Sampah Soloraya

Senin, 3 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jawa-tengah-kembali-dilirik-investor-amerika-siap-garap-sampah-soloraya>

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali membuka peluang investasi asing, untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di wilayahnya. Kali ini, sebuah perusahaan pengolahan limbah asal Amerika Serikat, Energy Three International (E3i), berencana investasi di wilayah aglomerasi Soloraya.

Luthfi menjelaskan, pengolahan sampah di wilayah Soloraya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sejauh ini sudah ada kesepakatan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, masih menyisakan permasalahan untuk mengolah timbunan sampah lama, yang volumenya sangat besar.

“Saya senang sekali ada investor dari Amerika Serikat yang akan masuk. Ini kalau bisa harus terealisasi dan bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Soloraya,” katanya, saat menerima kunjungan dari perwakilan E3i, Medhat Omran, di kantornya, Senin (3/8/2026).

Sebagai informasi, di Kawasan Solo Raya menghasilkan sekitar 2.944,55 ton sampah per hari, namun jumlah itu belum mampu tertangani semua. Karena itu, Jateng sedang mendorong pengembangan fasilitas Waste to Fuel di Kawasan Solo Raya, dengan kapasitas sekitar 1.000 ton per hari. Kapasitas itu dapat melayani Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

“Sudah ada beberapa daerah aglomerasi yang MoU pengolahan sampah, seperti Kota Semarang dan Kendal, yang sudah dengan Danantara. Lalu Soloraya juga, tapi itu untuk sampah baru, sampah lama masih dicarikan investor,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, menjelaskan, kebijakan dari Gubernur Ahmad Luthfi adalah Jawa Tengah zero sampah pada 2028. Investor dari Amerika Serikat yang akan masuk tersebut kemudian diarahkan ke wilayah Soloraya, meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar.

“Soloraya itu sampahnya di atas 1.000 ton per hari. Investor ini masuk untuk waste to fuel. Nanti tempatnya di Boyolali, sudah ada lahan 20 hektare dari kebutuhan 25 hektare,” jelasnya.

Perwakilan E3i ASEAN, Medhat Omran mengatakan, Energy Three International merupakan perusahaan investasi pengolahan limbah menjadi biofuel dan energi. Rencananya akan membawa proyek ke Soloraya untuk mengurangi limbah atau sampah di wilayah tersebut.

“Semoga proyek ini dapat terwujud di sini, yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Kita menggunakan teknologi baru dengan zero emission. Jadi, ini ramah lingkungan,” katanya.

Melalui proyek dan investasi perusahaan pengolahan limbah yang akan didirikan di Soloraya, ke depan akan menempatkan Indonesia dan wilayah Jawa Tengah di peta dunia untuk energi hijau. Proyek tersebut diperkirakan akan mempekerjakan hampir 300 orang.

“Kita juga berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar fasilitas yang akan kita bangun, sehingga proyek ini akan bermanfaat bagi semua orang dalam banyak hal,” ucap Medhat Omran. (Humas Jateng) *ul

Yen Masih Perkasa Pascaintervensi Jepang-AS Selasa (4/8), Dolar Sulit Bangkit

Selasa, 4 Agustus 2026 08:24 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-masih-perkasa-pascaintervensi-jepang-as-selasa-48-dolar-sulit-bangkit>

KONTAN.CO.ID - Mata uang yen Jepang masih mempertahankan sebagian besar penguatannya pada perdagangan Selasa (4/8/2026), setelah intervensi bersama pemerintah Jepang dan Amerika Serikat (AS) pekan lalu membuat pelaku pasar berhati-hati untuk kembali mengambil posisi yang bertaruh pada pelemahan yen.

Mengutip Reuters, yen melemah tipis 0,1% ke level 157,35 per dolar AS pada awal perdagangan Asia.

Meski demikian, posisi tersebut masih jauh lebih kuat dibandingkan level terendah dalam 40 tahun yang sempat dicapai sebelumnya.

Pada sesi sebelumnya, yen sempat menyentuh level 155,20 per dolar AS, yang merupakan posisi terkuat dalam tiga bulan terakhir.

Dalam tiga hari perdagangan terakhir, mata uang Jepang itu melonjak hingga 5%, setelah pemerintah Jepang mengonfirmasi telah melakukan intervensi pembelian yen secara terkoordinasi dengan Amerika Serikat pada Jumat (1/8). Langkah tersebut tergolong langka dalam kebijakan pasar valuta asing kedua negara.

Global Market Strategist Invesco Jepang Tomo Kinoshita mengatakan, peluang adanya intervensi lanjutan masih akan membatasi tekanan terhadap yen dalam waktu dekat.

"Saya memperkirakan kekhawatiran atas kemungkinan intervensi lanjutan oleh otoritas Jepang dan AS akan membatasi tekanan pelemahan yen dalam jangka pendek," ujarnya.

Menurut Kinoshita, yen masih berpotensi menguat terhadap dolar AS hingga akhir tahun.

Ia menilai agenda stimulus ekonomi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memang sempat menekan yen, tetapi sebagian besar dampak kebijakan tersebut kini telah diperhitungkan oleh pasar.

Terhadap euro, yen bertahan di dekat level tertinggi dalam lebih dari delapan bulan di kisaran 181,19 per euro, sementara terhadap poundsterling berada di 211,60 yen.

Pasar berspekulasi ada intervensi baru

Lonjakan tajam yen pada Senin memicu spekulasi bahwa otoritas Jepang kembali melakukan intervensi di pasar valuta asing. Namun hingga kini pemerintah Jepang belum memberikan konfirmasi.

Analisis Citi mencatat volume transaksi pasangan dolar AS/yen pada Senin pagi mencapai sekitar US\$ 27 miliar, jauh di atas rata-rata transaksi harian belakangan yang hanya sekitar US\$ 1,9 miliar.

Dolar masih tertekan

Di sisi lain, dolar AS masih berada di bawah tekanan setelah melemah akibat intervensi pembelian yen dan penurunan harga minyak dunia.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung sebagai upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lima bulan. Namun, Iran membantah adanya negosiasi tersebut.

Terhadap dolar AS, euro relatif stabil di US\$ 1,1511, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam satu setengah bulan di US\$ 1,1559.

Sementara itu, poundsterling melemah tipis 0,06% menjadi US\$ 1,3427.

Adapun US Dollar Index (DXY) menguat tipis ke 99,98, setelah sebelumnya menyentuh level terendah dalam satu setengah bulan.

Pelaku pasar sebelumnya melepas dolar setelah Federal Reserve (The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada pekan lalu. Pelemahan dolar semakin dalam setelah intervensi yen oleh Jepang dan AS.

Strategist Commonwealth Bank of Australia Joseph Capurso menilai, pasar bereaksi berlebihan terhadap keputusan The Fed tersebut.

"Kami menilai pelaku pasar bereaksi berlebihan dengan menjual dolar AS setelah The Fed mempertahankan suku bunga. Suku bunga AS masih berpotensi naik, hanya saja bukan dalam jangka waktu secepat yang diperkirakan pasar," katanya.

Menurut Capurso, perhatian investor kini tertuju pada laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat atau nonfarm payrolls yang akan dirilis Jumat (8/8).

Data tersebut dinilai menjadi indikator penting untuk menentukan waktu kenaikan suku bunga berikutnya oleh The Fed.

Saat ini, pasar memperkirakan total kenaikan suku bunga The Fed hingga akhir tahun mencapai sekitar 35 basis poin.

Di mata uang lainnya, dolar Australia naik tipis 0,04% menjadi US\$ 0,7003, sedangkan dolar Selandia Baru melemah 0,1% ke level US\$ 0,5867.

Inflasi Korea Selatan Turun ke 2,8% pada Juli 2026, di Bawah Ekspektasi Pasar

Selasa, 4 Agustus 2026 07:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-korea-selatan-turun-ke-28-pada-juli-2026-di-bawah-ekspektasi-pasar>

KONTAN.CO.ID - Laju inflasi Korea Selatan melambat ke level terendah dalam tiga bulan pada Juli 2026.

Penurunan harga minyak menjadi faktor utama yang meredakan tekanan inflasi, meski pemerintah dan bank sentral masih mewaspadai berbagai risiko yang berpotensi mendorong kenaikan harga dalam beberapa bulan mendatang.

Mengutip Reuters, Selasa (4/8), data Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan menunjukkan indeks harga konsumen (Consumer Price Index/CPI) naik 2,8% secara tahunan (year on year/YoY) pada Juli.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan 3,2% pada Juni dan juga berada di bawah ekspektasi ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan inflasi sebesar 3,0%.

Secara bulanan (month to month/mtm), CPI turun 0,2%, menjadi penurunan pertama dalam delapan bulan terakhir.

Sebelumnya, para ekonom memperkirakan inflasi bulanan naik 0,1%, sama seperti capaian pada Juni.

Penurunan indeks harga terutama dipicu oleh anjloknya harga produk minyak bumi sebesar 5,5% sepanjang Juli.

Wakil Menteri Keuangan Korea Selatan Lee Hyoung-il mengatakan, tekanan inflasi masih belum sepenuhnya hilang.

"Tekanan kenaikan harga, termasuk ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah, masih tetap ada," ujarnya.

Kementerian Keuangan memperkirakan kebijakan pembatasan harga bahan bakar secara nasional berhasil menekan laju inflasi sekitar 0,3 poin persentase pada Juli.

Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa pada Agustus inflasi diperkirakan akan meningkat sekitar 0,8 poin persentase akibat base effect, menyusul berakhirnya program diskon sementara tarif telepon seluler yang diterapkan pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, harga minyak dunia turun ke level terendah dalam tiga pekan pada Senin (3/8), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana serangan baru terhadap Iran dengan harapan tercapainya kesepakatan yang dapat meningkatkan pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Sementara itu, Bank of Korea (BoK) bulan lalu menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kalinya dalam tiga setengah tahun.

Bank sentral juga mengisyaratkan masih ada peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut, seiring kuatnya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang dinilai dapat memicu tekanan inflasi.

Adapun inflasi inti (core CPI), yang tidak memasukkan komponen harga pangan dan energi yang bergejolak, naik 2,6% secara tahunan pada Juli, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 2,5% pada Juni.

Angka tersebut menjadi laju kenaikan tertinggi sejak Desember 2023, menandakan tekanan harga domestik masih relatif kuat meskipun inflasi utama mulai melandai.

Lowongan Kerja Australia Meningkat 0,8% pada Juli, Sinyal Pasar Kerja Masih Sehat

Selasa, 4 Agustus 2026 09:04 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/lowongan-kerja-australia-meningkat-08-pada-juli-sinyal-pasar-kerja-masih-sehat>

KONTAN.CO.ID - Jumlah iklan lowongan kerja di Australia kembali meningkat pada Juli 2026, mengindikasikan permintaan tenaga kerja tetap kuat meski suku bunga berada di level tinggi.

Mengutip Reuters, data Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) dan situs pencarian kerja Indeed yang dirilis Selasa (4/8/2026) menunjukkan jumlah iklan lowongan kerja naik 0,8% secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli.

Kenaikan tersebut membalikkan penurunan tipis 0,1% yang terjadi pada Juni.

Secara tahunan (year on year/YoY), jumlah lowongan kerja meningkat 2,1% dibandingkan Juli tahun lalu. Bahkan, angkanya masih 16,2% lebih tinggi dibandingkan rata-rata dalam satu dekade terakhir.

Peningkatan lowongan kerja terjadi di berbagai sektor, terutama pada posisi manajemen serta dokter dan ahli bedah.

Kedua profesi tersebut, bersama tenaga keperawatan, menjadi kelompok pekerjaan dengan pertumbuhan permintaan tercepat selama setahun terakhir.

Data tersebut memperkuat indikasi bahwa pasar tenaga kerja Australia masih cukup tangguh meski biaya pinjaman terus meningkat.

Sebelumnya, data ketenagakerjaan yang dirilis bulan lalu menunjukkan ekonomi Australia menciptakan 76.300 lapangan kerja bersih pada Juni.

Sementara itu, tingkat pengangguran tetap bertahan di 4,4%.

Sepanjang tahun ini, Reserve Bank of Australia (RBA) telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali hingga mencapai 4,35% sebagai upaya menekan inflasi.

Meski kebijakan moneter semakin ketat, pasar tenaga kerja Australia sejauh ini masih menunjukkan ketahanan dengan permintaan tenaga kerja yang tetap solid.

Won Korea Selatan Jadi Mata Uang Asia Terkuat, Rupiah Melemah ke Rp 18.000 per Dolar

Selasa, 4 Agustus 2026 09:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-jadi-mata-uang-asia-terkuat-rupiah-melemah-ke-rp-18000-per-dolar>

KONTAN.CO.ID - Mata uang Korea Selatan (won) mencatat penguatan terbesar di kawasan Asia pada perdagangan Selasa (4/8/2026).

Sementara rupiah kembali melemah dan diperdagangkan di atas level psikologis Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data Reuters pada pukul 02.11 GMT, won Korea Selatan menguat 0,34% menjadi 1.424,60 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di 1.429,50.

Sebaliknya, rupiah melemah 0,22% ke level Rp 18.020 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp 17.980 per dolar AS.

Pergerakan mata uang Asia lainnya cenderung terbatas. Yen Jepang melemah 0,32% menjadi 157,67 per dolar AS, dolar Singapura turun tipis 0,04%, dolar Taiwan melemah 0,02%, baht Thailand turun 0,13%, ringgit Malaysia melemah 0,07%, dan yuan China terkoreksi 0,03%. Sementara itu, peso Filipina turun tipis 0,01% dan rupee India relatif tidak berubah.

Secara kumulatif sejak awal 2026, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia dengan pelemahan terdalam terhadap dolar AS.

Data Reuters menunjukkan rupiah telah terdepresiasi sekitar 7,49% dibandingkan posisi akhir 2025 di level Rp 16.670 per dolar AS.

Di sisi lain, won Korea Selatan justru menguat sekitar 1,05% sepanjang tahun berjalan. Yuan China juga menguat sekitar 3,40%, sementara dolar Singapura terapresiasi 0,24% terhadap dolar AS.

Defisit Perdagangan AS Menyempit di Bulan Juni 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 20:08 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-perdagangan-as-menyempit-di-bulan-juni-2026>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit perdagangan Amerika Serikat (AS) menyempit pada bulan Juni 2026. Namun, tren ini diperkirakan tidak akan bertahan lama di tengah kuatnya permintaan domestik yang dipenuhi dengan impor.

Defisit perdagangan AS menyusut 5,6% menjadi US\$ 73,3 miliar pada bulan Juni 2026, demikian data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan AS yang dikutip Reuters, Selasa (4/8/2026). Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan defisit perdagangan AS sebesar US\$ 73,0 miliar di periode tersebut.

Pemerintah AS pada pekan lalu melaporkan bahwa defisit perdagangan semakin melebar pada kuartal kedua 2026 dan diperkirakan mengurangi satu poin persentase penuh dari produk domestik bruto.

Perekonomian AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 1,5% pada kuartal terakhir, meskipun permintaan dalam negeri, didorong oleh peningkatan belanja konsumen dan bisnis untuk infrastruktur kecerdasan buatan, meningkat pada laju tercepat sejak kuartal pertama tahun 2023.

Impor turun 1,8% menjadi US\$ 388,0 miliar pada bulan Juni. Impor barang turun 2,5% menjadi US\$ 309,0 miliar. Ekspor turun 0,9% menjadi US\$ 314,7 miliar. Ekspor barang turun 1,9% menjadi US\$ 206,9 miliar.

Tingkat Pengangguran Spanyol Capai Rekor Terendah Sejak 2007 untuk Periode Juli

Selasa, 4 Agustus 2026 15:23 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/tingkat-pengangguran-spanyol-capai-rekor-terendah-sejak-2007-untuk-periode-juli>

KONTAN.CO.ID - MADRID. Tingkat pengangguran Spanyol di Juli 2026 membaik. Kementerian Tenaga Kerja dan Ekonomi Sosial Spanyol mengumumkan, tingkat pengangguran di Juli hanya bertambah 19.517 orang.

Realisasi tersebut di bawah tingkat pengangguran yang dicatatkan negeri matador ini di bulan-bulan sebelumnya sejak April 2026. Di Juni, tingkat pengangguran mencapai sekitar 28.700 orang. Di Mei 2026, pengangguran bahkan pernah bertambah sekitar 62.700 orang.

Kendati begitu, realisasi di Juli tersebut masih lebih tinggi dibandingkan konsensus proyeksi analis. Para analis memprediksi pengangguran Spanyol hanya akan bertambah 18.400 orang di Juli 2026.

Toh, realisasi tersebut cukup baik. Pemerintah Spanyol mencatat tingkat pengangguran mencapai 2.311.499 orang di Juli. Ini merupakan tingkat pengangguran terendah yang pernah tercatat di bulan Juli sejak 2007.

Secara tahunan, tingkat pengangguran tercatat turun 93.107 orang, atau sekitar 3,87%. “Ini tanda penguatan pasar tenaga kerja,” tulis Kementerian Tenaga Kerja dan Ekonomi Sosial Spanyol, dalam rilis resmi, Selasa (4/8/2026).

Dibandingkan dengan Juni, pengangguran terdaftar meningkat di sektor Jasa sebesar 8.221 orang, naik 0,50%. Di sektor konstruksi pengangguran bertambah 2.433 orang, atau naik 1,53%. Di antara para pengangguran tersebut, yang memang tidak memiliki pekerjaan sebelumnya sebanyak 8.268 orang.

“Peningkatan jumlah orang yang sebelumnya menganggur pada dasarnya terkait dengan proses regularisasi luar biasa yang sedang berlangsung, yang memberikan kesempatan kepada para pekerja yang sudah berada di negara kita tetapi tidak memiliki hak, untuk mengakses layanan kantor ketenagakerjaan publik, kesempatan yang sebelumnya tidak mungkin didapatkan,” terang Kementerian Tenaga Kerja.

Sementara pengangguran di sektor industri dan pertanian hanya bertambah sedikit. Di sektor industri pengangguran bertambah 473 orang dan di sektor pertanian bertambah 122 orang.

Total kontrak baru yang terdaftar selama Juli mencapai 1.587.141 kontrak kerja. Dari jumlah tersebut, 617.211 kontrak kerja bersifat permanen, atau setara 38,89% dari seluruh kontrak.

Impor Minyak Sawit India Melonjak 50% pada Juli, Persediaan Mulai Dipulihkan

Selasa, 4 Agustus 2026 10:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/impor-minyak-sawit-india-melonjak-50-pada-juli-persediaan-mulai-dipulihkan>

KONTAN.CO.ID - Impor minyak nabati India melonjak ke level tertinggi dalam 10 bulan pada Juli 2026.

Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya pembelian minyak sawit dan minyak kedelai (soyoil) oleh perusahaan penyulingan (refiner) untuk mengisi kembali persediaan menjelang musim festival.

Mengutip Reuters, Selasa (4/8/2026), lima pelaku perdagangan memperkirakan impor minyak nabati India mencapai 1,49 juta metrik ton pada Juli, naik 34% dibandingkan Juni.

Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan impor tiga jenis minyak nabati utama, yakni minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari.

India merupakan importir minyak nabati terbesar di dunia. Meningkatnya permintaan dari negara tersebut diperkirakan membantu produsen utama seperti Indonesia, Malaysia, dan Argentina mengurangi stok sekaligus menopang harga kontrak berjangka minyak sawit dan minyak kedelai.

Impor minyak sawit pada Juli diperkirakan melonjak 50% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 733.000 ton, tertinggi dalam lima bulan terakhir.

Sementara itu, impor minyak kedelai meningkat 32% secara bulanan menjadi 501.000 ton, level tertinggi dalam tujuh bulan. Adapun impor minyak bunga matahari naik 4% menjadi 253.000 ton.

Data tersebut belum memasukkan pengiriman bebas bea yang masuk melalui jalur darat dari Nepal.

Asosiasi Solvent Extractors' Association of India (SEA) dijadwalkan merilis data resmi impor minyak nabati Juli pada pertengahan Agustus.

Chief Executive Sunvin Group, Sandeep Bajoria, mengatakan stok minyak nabati di India sempat menyusut akibat rendahnya impor dalam beberapa bulan terakhir. Kini, perusahaan penyulingan kembali meningkatkan pembelian untuk memenuhi lonjakan permintaan selama musim festival.

India akan merayakan sejumlah festival besar pada periode Agustus hingga November, ketika konsumsi minyak nabati biasanya mencapai puncaknya.

Managing Partner GGN Research Rajesh Patel memperkirakan, impor minyak kedelai akan tetap berada di atas 500.000 ton pada Agustus dan September karena harganya masih sangat kompetitif.

Menurut Patel, rendahnya aktivitas pengolahan (crushing) biji kedelai dan biji kanola di dalam negeri turut meningkatkan kebutuhan impor minyak nabati.

Sebagian besar kebutuhan minyak sawit India dipasok dari Indonesia dan Malaysia, sedangkan minyak kedelai dan minyak bunga matahari terutama berasal dari Argentina, Brasil, Rusia, dan Ukraina.

Bank Sentral Vietnam Siapkan Paket Pinjaman 220 Triliun Dong Buat UKM

Selasa, 4 Agustus 2026 10:52 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-vietnam-siapkan-paket-pinjaman-220-triliun-dong-buat-ukm>

KONTAN.CO.ID - HANOI. State Bank of Vietnam mengatakan sedang menyiapkan paket pinjaman lunak sebesar 220 triliun dong, sekitar Rp 150,97 triliun. Bank sentral Vietnam ini akan mengalokasikan dana tersebut bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta proyek-proyek prioritas, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penyaluran pinjaman dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Reuters melaporkan, mengutip pernyataan resmi bank sentral, Selasa (4/8/2026), Wakil Gubernur State Bank of Vietnam (SBV) Pham Thanh Ha mengungkapkan rencana tersebut dalam rapat pemerintah pada Senin (3/8/2026). Ha menambahkan mereka telah mengerjakan paket tersebut bersama bank-bank komersial milik negara.

Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% tahun ini. Ha mengatakan, pertumbuhan 8,18% yang tercatat pada semester pertama tahun 2026 berada di bawah ekspektasi.

Ha menyebut bank sentral telah mempertahankan suku bunga kebijakan utama tidak berubah tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bank memiliki akses ke pendanaan berbiaya rendah.

Strategi ini juga diharap mendorong bank dan lembaga keuangan untuk memangkas biaya, menyederhanakan prosedur, dan menurunkan suku bunga pinjaman untuk mendukung bisnis dan rumah tangga.

SBV telah menetapkan target pertumbuhan kredit sekitar 16% untuk tahun ini, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikannya sesuai dengan kondisi ekonomi. Ha menyebut pinjaman yang beredar di sistem perbankan meningkat sebesar 8,38% selama tujuh bulan pertama tahun ini, setara dengan pertumbuhan tahunan sekitar 16,5%.

Ha menegaskan, SBV akan terus memantau risiko inflasi dan menjaga stabilitas sistem perbankan. "Prospek ekonomi global diperkirakan akan tetap sangat tidak pasti dan bergejolak, yang menimbulkan tantangan bagi pengelolaan kebijakan moneter di negara-negara berkembang dan negara-negara dengan tingkat keterbukaan perdagangan yang tinggi seperti Vietnam," kata Ha.

Target Perdagangan RI-Thailand US\$ 20 Miliar, Ekonom: Realistis, Asal Defisit Ditekan

Selasa, 4 Agustus 2026 17:22 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/target-perdagangan-ri-thailand-us-20-miliar-ekonom-realistis-asal-defisit-ditekan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target perdagangan bilateral Indonesia dan Thailand sebesar US\$ 20 miliar pada 2030 dinilai realistis untuk dicapai. Namun, peningkatan nilai perdagangan tersebut perlu diikuti dengan perbaikan kualitas hubungan dagang, termasuk upaya mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Thailand.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, target tersebut tidak terlalu agresif jika melihat capaian perdagangan kedua negara saat ini.

Berdasarkan data 2024, total perdagangan Indonesia dan Thailand telah mencapai sekitar US\$ 17,3 miliar, terdiri dari ekspor Indonesia sebesar US\$ 7,7 miliar dan impor mencapai US\$ 9,6 miliar.

"Artinya, untuk mencapai US\$ 20 miliar pada 2030, kedua negara hanya perlu menambah nilai perdagangan sekitar US\$ 2,7 miliar dalam lima tahun atau sekitar 3% per tahun. Dari sisi pertumbuhan, angka ini relatif konservatif," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (4/8/2026).

Meski demikian, Yusuf mengingatkan keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari tercapainya target nilai perdagangan. Menurutnya, perhatian juga harus diarahkan pada struktur perdagangan yang selama ini masih menunjukkan defisit di pihak Indonesia.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya besarnya perdagangan, melainkan kualitasnya. Indonesia masih mencatat defisit perdagangan dengan Thailand dan kondisi itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi keberhasilan tidak cukup diukur dari tercapainya angka US\$ 20 miliar, tetapi juga dari apakah struktur perdagangan menjadi lebih seimbang," jelasnya.

Ia melihat terdapat sejumlah sektor yang berpotensi menjadi motor peningkatan perdagangan kedua negara, yakni pangan dan agroindustri, energi, ekonomi digital, serta industri halal.

Menurut Yusuf, sektor pangan memiliki peluang meningkatkan volume perdagangan dalam waktu relatif cepat karena Indonesia dan Thailand memiliki rantai pasok yang saling melengkapi. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat hilirisasi agar peningkatan perdagangan tidak hanya mendorong kenaikan impor.

Sementara pada sektor energi dan ekonomi digital, pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) dinilai dapat meningkatkan efisiensi perdagangan karena menekan biaya transaksi sekaligus mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.

Adapun di sektor industri halal, kerja sama dinilai memiliki potensi menciptakan nilai tambah yang tinggi. Meski demikian, implementasinya membutuhkan harmonisasi standar dan sertifikasi antara kedua negara.

Yusuf juga menilai pembentukan Joint Trade Commission menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat implementasi kerja sama.

"Faktor yang tidak kalah penting adalah efektivitas Joint Trade Commission yang dibentuk untuk mengatasi hambatan perdagangan dan mempercepat implementasi kerja sama di tingkat bisnis," katanya.

Meski berpotensi menjadi bantalan di tengah perlambatan ekonomi global, Yusuf menilai dampak kerja sama tersebut terhadap perekonomian nasional tetap perlu dilihat secara proporsional.

Menurut dia, nilai perdagangan Indonesia dengan Thailand masih relatif kecil dibandingkan total perdagangan Indonesia dengan dunia. Oleh sebab itu, manfaat yang lebih besar justru akan diperoleh apabila kerja sama tersebut mampu meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat rantai pasok kawasan ASEAN, serta menarik investasi.

"Mengingat Indonesia juga sedang menghadapi tekanan pada sektor eksternal, kerja sama ini akan benar-benar bernilai jika mampu meningkatkan ekspor bernilai tambah dan secara bertahap mengurangi defisit perdagangan dengan Thailand," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyepakati target peningkatan nilai perdagangan bilateral menjadi US\$ 20 miliar pada 2030 dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

Target tersebut akan diwujudkan melalui implementasi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 yang mencakup perluasan investasi, peningkatan akses pasar, penguatan kemitraan antarpelaku usaha, serta pembentukan Joint Trade Commission untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan kedua negara.

Selain itu, kedua negara menyepakati penguatan kerja sama di sektor ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, dan rantai pasok. Di sektor energi, kedua negara akan membentuk Indonesia–Thailand Energy Forum guna memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi energi.

Indonesia dan Thailand juga akan memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital melalui pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi, serta mengembangkan rantai nilai industri halal regional.

Di bidang konektivitas, kedua negara menyambut pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket guna mempererat hubungan bisnis maupun masyarakat.

Ruang Fiskal Menipis, Ini Sektor yang Perlu Diprioritaskan dalam Anggaran 2027

Selasa, 4 Agustus 2026 19:04 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/ruang-fiskal-menipis-ini-sektor-yang-perlu-diprioritaskan-dalam-anggaran-2027>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keterbatasan ruang fiskal pada APBN 2027 mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam mengakomodasi usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L), dengan prioritas sebaiknya diberikan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan, ruang fiskal APBN 2027 sangat terbatas sehingga usulan tambahan anggaran Rp 984 triliun dari lebih dari 30 K/L tidak mungkin dipenuhi seluruhnya tanpa mengganggu target defisit APBN yang dibatasi maksimal 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Rizal, apabila pemerintah tetap ingin menambah belanja, alokasinya harus difokuskan pada program-program prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, prioritas belanja harus tetap diberikan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, ketahanan pangan, serta infrastruktur produktif," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (4/8).

Rizal menilai sektor-sektor tersebut memiliki dampak yang lebih besar terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat dibandingkan belanja yang bersifat administratif.

Sebaliknya, belanja untuk perjalanan dinas, pengadaan yang tidak mendesak, serta program dengan output rendah sebaiknya ditahan atau direalokasi guna menjaga kesehatan fiskal negara.

Rizal mengingatkan, jika tambahan belanja tidak diimbangi peningkatan penerimaan negara maupun realokasi anggaran, pemerintah berisiko menghadapi pelebaran defisit, meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang, serta bertambahnya beban bunga utang.

"Fokus pemerintah seharusnya bukan memperbesar anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal," katanya.

Purbaya: Likuiditas Bank Akan Ditambah untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Selasa, 4 Agustus 2026 18:40 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-likuiditas-bank-akan-ditambah-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menambah penempatan dana di perbankan guna menjaga likuiditas dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp400 triliun ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap pemulihan permintaan masyarakat, termasuk pada sektor otomotif melalui peningkatan pembelian kendaraan bermotor.

"Harusnya sekarang ini, dua minggu lalu saya injek lagi uang yang Rp 400 triliun itu. Harusnya sekarang sih demand untuk mobil dan motor sudah mulai recover," ujar Purbaya dalam acara GAIKINDO International Automotive Conference, Selasa (4/8/2026).

Tak berhenti di situ, Purbaya memastikan pemerintah siap kembali menambah penempatan dana di perbankan apabila likuiditas dinilai masih belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi.

"Kalau masih kurang, hari ini saya tambah lagi sampai jumlahnya cukup di perekonomian," katanya.

Purbaya menjelaskan, tambahan penempatan dana tersebut bertujuan memastikan sistem keuangan memiliki likuiditas yang cukup sehingga perbankan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat.

Dengan meningkatnya penyaluran kredit, diharapkan aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kondisi likuiditas di dalam negeri agar permintaan domestik tetap terpelihara dan sektor riil memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.

"Selama saya Menteri Keuangan, saya jaga terus kondisi di perekonomian untuk memastikan demand kita terjaga dengan baik dan ada cukup uang untuk mendorong perekonomian," pungkas Purbaya.

Defisit Neraca Transaksi Berjalan Diproyeksi Melebar ke 1,3% pada 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 17:28 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-neraca-transaksi-berjalan-diproyeksi-melebar-ke-13-pada-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia diperkirakan akan melebar hingga akhir 2026.

Peningkatan impor, terutama akibat tingginya harga minyak dunia dan belanja pemerintah yang masih kuat, diperkirakan menjadi faktor utama pelebaran tersebut.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) David Sumual memproyeksikan, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia akan mencapai sekitar 1,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2026.

Proyeksi tersebut meningkat dibandingkan realisasi CAD pada 2025 yang tercatat sebesar 0,11% dari PDB. "Sampai akhir 2026 defisit neraca berjalan diperkirakan melebar ke kisaran 1,3% PDB," ujar David kepada Kontan, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, pelebaran tersebut didorong oleh kenaikan impor seiring harga minyak yang masih relatif tinggi.

Selain itu, belanja pemerintah yang tetap kuat turut meningkatkan permintaan impor, sementara pertumbuhan ekspor diperkirakan masih terbatas dari sisi volume.

Meski demikian, David menilai kondisi transaksi eksternal Indonesia masih mendapat penopang dari neraca finansial. Ia memperkirakan neraca finansial hingga akhir tahun masih akan mencatatkan surplus, sehingga dapat membantu membiayai defisit transaksi berjalan.

"Sementara itu, kinerja neraca finansial diperkirakan akan sedikit surplus," katanya.

Namun, David mengingatkan bahwa pelebaran CAD tetap membawa konsekuensi terhadap stabilitas eksternal.

Defisit yang semakin besar berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun cadangan devisa apabila aliran modal masuk tidak cukup kuat untuk menutup kebutuhan pembiayaan eksternal.

"Tentunya dengan defisit yang lebih tinggi ada risiko tekanan terhadap rupiah dan cadangan devisa," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mampu meningkatkan ekspor agar ketergantungan terhadap impor tidak semakin memperlebar defisit transaksi berjalan.

"Diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong ekspor, terutama di luar sektor sumber daya alam (SDA)," pungkas David.

Menakar Insentif Likuiditas BI pada Era Bunga Tinggi

Selasa, 4 Augustus 2026 10:48 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117181/menakar-insentif-likuiditas-bi-pada-era-bunga-tinggi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Era suku bunga tinggi sepertinya masih akan berlangsung lama. Di tengah pelemahan rupiah yang kian persisten, dan langkah hawkish yang ditempuh sebagian besar bank sentral dunia akibat tekanan inflasi global membuat Bank Indonesia (BI) tak punya banyak pilihan.

Meski pada Juli BI tak mengerek suku bunga, tetapi posisi (stance) kebijakan moneter ketat telah dijalankan dengan kenaikan suku bunga acuan 100 basis poin (bps) sejak Mei. Hal ini diupayakan demi mengendalikan tekanan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Akan tetapi, ibarat obat, upaya ini bukan tanpa efek samping. Bunga tinggi dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan, yang pada akhirnya mendorong kenaikan suku bunga kredit dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Dengan tuntutan untuk juga mendukung pertumbuhan ekonomi, BI mencoba meredam dampak pengetatan itu dengan menjalankan instrumen Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti mengatakan, BI terus menyempurnakan KLM dengan meningkatkan total besaran insentif menjadi paling tinggi 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya hanya 5,5%.

Kebijakan ini bukan sekadar penambahan angka. Sebab, sebanyak 4% diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas, sementara 2% lainnya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan likuiditas antarbank sekaligus memperdalam pasar uang domestik.

Dengan begitu, bank yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pengurangan kewajiban giro wajib di BI, sehingga memiliki ruang likuiditas tambahan tanpa harus berebut menghimpun dana masyarakat lewat penawaran suku bunga deposito yang semakin tinggi.

"Hingga awal Juli 2026, insentif KLM yang diperoleh bank sudah mencapai Rp432 triliun, di mana berdasarkan kelompok bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, bank umum swasta nasional Rp172,5 triliun. BPD Rp31,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,1 triliun," kata Destry, dalam paparannya usai Rapat Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), kemarin (3/8/2026).

Angka ini memang mencerminkan bahwa perbankan memanfaatkan fasilitas insentif KLM secara aktif untuk menopang fungsi intermediasi. Dampaknya juga terlihat pada sektor prioritas yang jadi sasaran utama kebijakan.

Sementara, dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sektor prioritas juga tetap terjaga di bawah ambang 5%. Artinya bahwa ekspansi kredit masih berlangsung secara sehat.

Namun demikian, menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata (BNLI) Josua Pardede, efektivitas KLM tetap punya batas. Ia menyebut, insentif ini bukan pengganti dari penurunan suku bunga kebijakan.

"Insentif likuiditas makroprudensial dapat mengompensasi sebagian, tetapi tidak seluruh dampak suku bunga tinggi, KLM tidak dapat menghilangkan seluruh tekanan apabila biaya simpanan terus meningkat, permintaan kredit melemah, atau bank menjadi lebih berhati-hati karena risiko usaha," kata Josua.

Josua menyebut, pada Juni, rata-rata suku bunga kredit rupiah telah naik dari 8,72% menjadi 8,81%, dan bunga kredit baru naik dari 9,31% menjadi 9,49%.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter masih terus berjalan, meski sudah disertai berbagai insentif likuiditas sebagai peredamnya.

Namun, langkah BI memperbesar insentif KLM ini menunjukkan upayanya dalam menyeimbangkan dua tujuan yang sebenarnya saling bertolak belakang: menjaga stabilitas, sekaligus mendukung pertumbuhan.

Josua menilai, kebijakan tersebut cukup untuk meredam perlambatan kredit, tetapi belum cukup sendirian untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menstabilkan rupiah.

"Efektivitasnya bergantung pada kesatuan antara kebijakan makroprudensial, intervensi valuta asing, suku bunga pasar uang, pengelolaan arus modal, kebijakan fiskal, dan perbaikan neraca perdagangan," ujar Josua.

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%. Sementara, BI memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 4,9% hingga 5,7%. Bahkan, tahun 2027 pertumbuhan ekonomi dipatok lebih tinggi lagi, di rentang 5,8% hingga 6,5%.

Namun, ambisi tersebut tak bisa dicapai dengan mengorbankan stabilitas makroekonomi. Josua mengingatkan bahwa target pertumbuhan tinggi tak seharusnya ditempuh dengan menekan BI agar menurunkan suku bunga secara agresif atau membiarkan rupiah terdepresiasi berlebihan.

"Pertumbuhan tinggi yang hanya ditopang oleh uang murah berisiko meningkatkan impor, tekanan inflasi, kebutuhan valuta asing, dan defisit transaksi berjalan," kata Josua.

Strategi yang mengandalkan likuiditas murah berpotensi menciptakan ilusi pertumbuhan dalam jangka pendek, namun menyimpan risiko yang jauh lebih besar bagi perekonomian.

Insentif ini berpotensi mendorong konsumsi dan kredit dalam waktu singkat. Namun, tanpa diiringi kapasitas produksi, produktivitas, dan daya saing industri, lonjakan permintaan justru akan memperbesar impor, meningkatkan tekanan inflasi, memperlebar kebutuhan valuta asing, serta memperburuk defisit transaksi berjalan.

Hal-hal tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan pelemahan rupiah, premi risiko naik, suku bunga pasar meningkat, dan dunia usaha justru menghadapi biaya pembiayaan yang lebih mahal.

Josua berpendapat, tantangan pertumbuhan Indonesia saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya likuiditas di pasar. Ia menyebut, pada Mei 2026, uang beredar luas dan kredit tumbuh 10,8% secara tahunan.

Begitu juga kegiatan dunia usaha masih meningkat, kapasitas produksi terpakai mencapai 73,8%, serta kondisi likuiditas dan akses kredit dianggap tetap baik.

"Dengan kredit sudah tumbuh dua digit tetapi pertumbuhan ekonomi masih jauh dari 8%, hambatan utamanya juga berada pada produktivitas, kepastian usaha, mutu tenaga kerja, efisiensi logistik, daya beli, investasi swasta, dan kemampuan ekspor," kata Josua.

Ia menilai, kontribusi utama BI terhadap target pertumbuhan tinggi seharusnya berbentuk inflasi rendah, rupiah stabil, sistem pembayaran efisien, dan sistem keuangan sehat.

"Tugas mendorong pertumbuhan dari sekitar 5% menuju 8% harus lebih banyak ditanggung oleh reformasi sektor riil dan kebijakan fiskal produktif, bukan dengan mengorbankan kestabilan moneter," tandas Josua.

Catatan Inflasi Juli: Mau Pintar itu Mahal

Selasa, 4 Agustus 2026 06:52 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117086/catatan-inflasi-juli-mau-pintar-itu-mahal/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi tahunan melandai jadi 2,88% pada Juli dari 3,34% pada Juni. Sementara secara bulanan, Indonesia justru tercatat mengalami deflasi 0,14%.

Perlambatan inflasi ini hampir sepenuhnya ditopang oleh normalisasi harga pangan. Seperti, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, hingga ikan segar. Kesemua komoditas ini turun harga setelah sempat melonjak pada bulan-bulan sebelumnya.

Penurunan harga ini kemudian menghasilkan deflasi bulanan dan mampu menekan inflasi tahunan, dan membuatnya tetap berada di kisaran target Bank Indonesia (BI).

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, struktur inflasi Juli menunjukkan tekanan ekonomi belum benar-benar surut, hanya bergeser sumbernya saja.

Sebab, jika melihat inflasi inti, tetap berada di 2,76%, sama seperti bulan sebelumnya. Inflasi inti mengecualikan pengaruh harga pangan yang bergejolak (volatile food), dan harga yang diatur pemerintah (administered price), sehingga cenderung mencerminkan kondisi permintaan domestik.

Namun demikian, setidaknya stabilnya inflasi inti menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga belum mengalami pelemahan yang signifikan. Daya beli masyarakat masih cukup terjaga, bahkan di tengah kenaikan suku bunga Bank Indonesia selama beberapa bulan terakhir.

Dari Pangan ke Transportasi

Tekanan inflasi pada Juli terlihat berpindah dari komoditas pangan ke sektor yang bisa jadi akan lebih sulit dikendalikan. Kelompok transportasi mencatat inflasi tahunan 5,12%, dan menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi nasional.

Kelompok transportasi menyumbang 0,62 poin persentase terhadap inflasi tahunan nasional, menjadikannya salah satu kontributor terbesar setelah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Penyumbang utama inflasi berasal dari kenaikan harga bensin dengan andil 0,31 poin persentase, diikuti tarif angkutan udara sebesar 0,15 poin persentase. Sementara itu, kenaikan harga pelumas atau oli mesin, sepeda motor, dan mobil masing-masing turut memberikan kontribusi sebesar 0,03 poin persentase.

Kenaikan harga pada kelompok ini juga menunjukkan bahwa biaya energi dan logistik telah dan masih diteruskan kepada konsumen, meski harga bensin merupakan komponen yang harganya diatur pemerintah.

Akibat pergeseran tekanan harga ini, Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson memperkirakan inflasi akan kembali meningkat hingga melampaui target BI 1,5-3,5% sebelum akhir kuartal III.

“Kenaikan harga minyak masih terus merambat di sepanjang rantai pasok, sementara fenomena El Nino diperkirakan akan kembali mendorong inflasi pangan,” kata Henderson, dalam catatannya.

Ongkos Pendidikan Naik

Di sisi lain, data inflasi Juli juga memperlihatkan tekanan nyata pada kelas menengah. Sebab, tekanan inflasi inti tetap naik sebesar 0,14% secara bulanan, dan salah satu penyumbang inflasi inti adalah kelompok pendidikan.

BPS mencatat, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,55%, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. "Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pendidikan, terutama biaya sekolah SD, Taman Kanak-kanak, dan juga biaya bimbingan belajar, dengan andil inflasi masing-masing 0,01%," ujar Ateng Hartono, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.

Dia menambahkan, di masa awal tahun ajaran baru, komoditas lainnya di kelompok pendidikan yang juga mengalami inflasi tetapi tidak memberikan andil inflasi yang signifikan, terutama biaya sekolah SMP.

Kemudian, biaya kuliah, akademi atau perguruan tinggi, biaya sekolah SMA, Taman Pendidikan Al-Quran, kelompok bermain dan PAUD, kursus bahasa asing, serta biaya kursus matematika.

Meskipun sebagian besar komponen tersebut belum memberikan andil yang besar terhadap inflasi nasional dan dianggap faktor musiman karena adanya musim tahun ajaran baru, namun kenaikannya bisa menjadi sinyal bahwa biaya investasi rumah tangga untuk pendidikan terus meningkat.

Berbeda dengan konsumsi barang sekunder atau kebutuhan tersier, yang dapat ditunda ketika kondisi ekonomi melemah, pengeluaran pendidikan cenderung harus tetap dipenuhi.

Dalam konteks ini, kenaikan biaya sekolah berpotensi menggerus ruang konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelas menengah.

Konsensus Bloomberg: Kuartal II, Ekonomi RI Diramal Tumbuh 5,1%

Selasa, 4 Agustus 2026 12:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117189/konsensus-bloomberg-kuartal-ii-ekonomi-ri-diramal-tumbuh-5-1/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan kembali merilis data penting lainnya pada Rabu (5/7/2026). BPS akan merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) yang akan menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk periode kuartal II-2026 yang besok diumumkan, konsensus Bloomberg memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Melambat dari 5,61% pada kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, secara kuartalan (quarter-to-quarter/qoq), ekonomi diproyeksikan bangkit 3,51% setelah sempat berkontraksi 0,77% pada kuartal I.

Proyeksi Bloomberg Economics lebih optimistis, yakni 5,42% yoy. Namun, angka ini tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61% yang tercatat pada kuartal sebelumnya.

Jika terealisasi, capaian tersebut mengindikasikan dua hal. Pertama, fondasi ekonomi domestik masih cukup kuat sehingga masih mampu mempertahankan pertumbuhan, di atas angka psikologis 5%. Kedua, mesin pertumbuhan juga terlihat mulai kehilangan tenaga, sebab ruang akselerasi sepeertinya kian terbatas.

Ramalan perlambatan oleh ekonom dan analis ini bukan tanpa sebab. Pertumbuhan yang kuat pada kuartal pertama tahun ini sebenarnya ditopang oleh belanja pemerintah pada awal tahun, serta mendapat dorongan dari adanya faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri.

Namun, masuk kuartal kedua, sebagian faktor musiman itu selesai. Akibatnya, laju pertumbuhan kembali mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, masih jadi penyangga utama.

Tapi, sejumlah indikator justru menunjukkan daya dorong konsumsi rumah tangga mulai melemah, salah satunya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

IKK periode Juni turun dan berada di 117,8, lebih rendah dari posisi Mei yang sebesar 120,9. IKK Juni juga menjadi yang terendah sejak September tahun lalu atau sembilan bulan terakhir.

Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson berpendapat, perlambatan ekonomi Tanah Air pada kuartal kedua ini terjadi lantaran melemahnya investasi dan melandainya belanja pemerintah. Belanja pemerintah diperkirakan tak lagi tumbuh sekuat kuartal pertama yang sempat melonjak 21,8% secara tahunan.

Henderson menyebut, sejumlah indikator aktivitas ekonomi mengindikasikan bahwa belanja modal mulai melemah. “Kepercayaan pelaku usaha juga diperkirakan tertekan akibat kebijakan pemerintah yang memusatkan ekspor sejumlah komoditas strategis,” kata Henderson.

Tumbuh 5% Hingga 2028

Sementara berdasarkan Bloomberg Economic Survey edisi Juli 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal tetap berada di kisaran 5% hingga 2028.

Survei Bloomberg itu sempat merevisi tipis rata-rata pertumbuhan 2026 menjadi 5,1%. Dengan perkiraan ekonomi akan melambat pada akhir tahun, sebab pertumbuhan kuartal IV-2026 hanya sekitar 4,58%, sebelum menyentuh 4,5% pada kuartal I-2027.

Perlambatan itu sejalan dengan proyeksi inflasi yang lebih tinggi dari hasil survei sebelumnya. Inflasi rata-rata 2026 kini diperkirakan mencapai 3,4%, mencerminkan tekanan harga yang masih bertahan, baik akibat kenaikan harga energi maupun pelemahan nilai tukar.

Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 5,6-6% yoy.

Dalam paparannya usai Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang oleh daya beli masyarakat dan juga konsumsi masyarakat, yang didukung pula oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki peran sebagai shock absorber.

Purbaya menyebut belanja, pada akhir kuartal kedua tahun 2026, naik 17,8% yoy menjadi Rp1.655 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp1.298,6 triliun, naik 29,4%.

Purbaya akan Sambangi K/L yang Lambat Serap Anggaran

Selasa, 4 Agustus 2026 12:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117193/purbaya-akan-sambangi-k-l-yang-lambat-serap-anggaran/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pihaknya akan mendatangi langsung kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai belum optimal merealisasikan belanja negara pada semester II-2026 guna mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi.

Langkah tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga belanja pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Atas izin Presiden kami akan datang ke K/L untuk memastikan mereka bisa belanja. Kalau ada halangan, halangan apa yang bisa kita hilangkan secepatnya,” kata Purbaya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK, Senin (3/8/2026).

Purbaya menegaskan pemerintah juga telah memperoleh dukungan DPR untuk memastikan seluruh K/L menjalankan anggaran sesuai rencana.

“Kata DPR saya boleh datang untuk memastikan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan. Kita akan pastikan mereka belanja tepat sasaran,” tutur Purbaya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara pada semester I-2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari target Rp3.842,7 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut tumbuh 17,8% secara tahunan.

Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp357,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat utamanya dipengaruhi belanja K/L sebesar Rp658,9 triliun, yang realisasinya dalam enam bulan tumbuh tinggi 43,6% year on year (yoy).

Belanja ditopang oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.

Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5% Kuartal II-2026

Selasa, 4 Agustus 2026 14:33 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117238/ekonomi-indonesia-diproyeksi-tumbuh-5-kuartal-ii-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah ekonom memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 hanya tumbuh di sekitar 5%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal I-2026 yang sebesar 5,61%.

Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Myrdal Gunarto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 memang diproyeksikan mengalami pelambatan.

“Jika pada kuartal I-2026 tercatat tumbuh 5,61%, untuk kuartal II-2026 ini angka proyeksinya berada di kisaran 5,06% yoy [year on year],” kata Myrdal ketika dihubungi, Selasa (4/8/2026).

Myrdal mengatakan pendorong ekonomi kuartal II-2026 karena perlambatan konsumsi rumah tangga seiring tekanan global hingga surplus net ekspor yang semakin tergerus.

“Kena hit sama kondisi globalnya yang kurang kondusif dan tekanan global memang sedang tinggi-tingginya itu,” ujarnya.

Akan tetapi, menurut dia, belanja pemerintah tetap menjadi salah satu faktor yang menopang aktivitas ekonomi selama periode tersebut. Dukungan fiskal tercermin dari penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan, yang turut meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif, termasuk potongan tarif transportasi selama masa liburan sekolah, untuk mendorong mobilitas dan konsumsi masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) juga tetap berlanjut guna menjaga daya beli kelompok rentan.

Di samping itu, pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), turut menjadi penopang permintaan domestik dan mendukung aktivitas ekonomi pada kuartal II-2026.

Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memproyeksikan ekonomi kuartal II-2026 hanya tumbuh sebesar 5.12%, melambat dari kuartal sebelumnya.

Hal ini terutama disebabkan oleh net ekspor yang lebih lemah, seiring neraca barang Indonesia yang mulai defisit. Di sisi lain, komponen investasi diperkirakan menjadi pendorong utama, didorong oleh beberapa program pemerintah

Kebijakan yang bisa mendorong investasi swasta menjadi salah satu hal paling mendesak untuk menjaga momentum pertumbuhan di semester II-2026.

“Investasi diharapkan nantinya akan berdampak ke daya beli (via rekrutmen tenaga kerja), sehingga bisa mendorong belanja masyarakat di tengah ruang fiskal yang terbatas,” terang David.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,4% pada kuartal II-2026. Namun demikian, pemerintah optimistis laju pertumbuhan akan meningkat pada semester II, ditopang terjaganya likuiditas dan penerapan kebijakan fiskal yang prudent.

“Kemarin [kuartal I-2026] 5,6%, mungkin kuartal II 5,4% sampai 5 point sekian,” kata Purbaya, Kamis (23/7/2026).

Purbaya belum memerinci proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk semester II-2026. Namun, dia optimistis kinerja ekonomi pada kuartal III dan IV akan lebih baik dibandingkan semester pertama.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi RI, pemerintah akan memastikan likuiditas di dalam sistem perekonomian tetap memadai. Dia menegaskan kecukupan likuiditas menjadi faktor penting untuk menopang aktivitas dunia usaha, investasi, dan konsumsi masyarakat.

“Karena kita pastikan cukup uang di sistem perekonomian untuk mendorong ekonomi,” ujar Purbaya.

Rupiah Menutup Perdagangan di Rp18.023/US\$

Selasa, 4 Agustus 2026 15:41 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117261/rupiah-menutup-perdagangan-di-rp18-023-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup sesi perdagangan Selasa (4/8/2026) dengan pelemahan 0,18% ke posisi Rp18.023/US\$, memangkas penguatan yang sempat terjadi kemarin.

Pelemahan rupiah sore ini sekurang-kurangnya dipicu oleh tiga hal. Pertama, data perdagangan luar negeri masih defisit. Meski membaik dengan defisit menjadi US\$450 juta dari posisi sebelumnya US\$1,61 miliar, defisit neraca migas tercatat melebar hingga mencapai US\$15,77 miliar, menggerus hampir seluruh surplus non-migas sebesar US\$19,35 miliar. Akhirnya membuat surplus perdagangan nasional menyusut menjadi hanya US\$3,58 miliar.

Dengan kata lain, kekuatan sektor manufaktur, pertanian, dan komoditas nonmigas nyaris habis digunakan untuk menutup tingginya tagihan impor energi. Ketika surplus perdagangan terus tergerus, pasokan devisa dari ekspor semakin menipis, sementara kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor justru terus meningkat. Kombinasi tersebut membuat fundamental nilai tukar rupiah semakin rentan.

Kedua, harga minyak mentah brent kembali naik 1,38% menjadi US\$85/barel. Kenaikan harga di tengah kabar bahwa dunia sebenarnya sedang berpotensi mengalami kelangkaan bahan bakar minyak, menimbulkan kekhawatiran bertambah melebarnya defisit neraca migas. Ketiga, indeks dolar Amerika Serikat (AS) bertahan tinggi di 100, dan menyebabkan sebagian besar mata uang Asia juga ikut melemah.

Dari kawasan, peso Filipina memimpin pelemahan disusul yen Jepang, rupiah, juga baht Thailand. Sementara dolar Singapura, dan rupee India bersama dolar Hong Kong relatif lebih terbatas. Sebaliknya, hanya yuan China dan offshore menguat terbatas siang ini. Bahkan, won Korea Selatan yang tadi pagi sempat melesat, hanya menyisakan penguatan 0,01% saja.

Tekanan eksternal dari luar kawasan juga datang dari adanya sentimen bahwa volatilitas suku bunga yang lebih tinggi akan menjadi normal baru di era kepemimpinan Ketua The Fed baru, Kevin Warsh.

Tidak adanya panduan kebijakan (forward guidance) dari The Fed, disebut-sebut berisiko menciptakan lingkungan yang secara struktural lebih bergejolak. Ketidakjelasan mengenai bagaimana bank sentral akan merespons ekonomi global yang semakin rentan terhadap inflasi, akan mendorong pasar obligasi kian agresif.

Pada rapat Juli, pelaku pasar menyoroti persoalan kredibilitas The Fed, yang mempertahankan suku bunga tanpa adanya penjelasan yang memadai, disusul dengan adanya aksi jual obligasi US Treasury tenor panjang dan membuat yield melonjak naik.

Di Indonesia, tekanan tersebut mulai terlihat pada perdagangan Surat Utang Negara (SUN) hari ini. Meski investor masih memburu obligasi tenor pendek, tapi kenaikan yield pada tenor 5-10 tahun mengindikasikan pasar masih meminta premi risiko yang lebih tinggi.

Di samping, aksi pelaku pasar ini juga mencerminkan kehati-hatian mereka terhadap prospek pertumbuhan domestik yang diramal melambat jadi 5,1% pada kuartal II-2026, dari 5,61% pada kuartal sebelumnya.

Dengan adanya berbagai sentimen dan tekanan eksternal ini, pergerakan rupiah diproyeksikan akan kembali tertekan. Permata Institute for Economic Research (PIER) memperkirakan pelemahan rupiah akan mencapai puncaknya pada kuartal III-2026 di rentang Rp18.000 hingga Rp18.150/US\$. Sebab,

pada kuartal ketiga tahun ini, tekanan eksternal dan kerentanan domestik diproyeksikan bertemu dalam satu waktu.

Neraca Dagang Defisit Beruntun, Ekonom Soroti Soal Impor Energi

Selasa, 4 Agustus 2026 16:28 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117268/neraca-dagang-defisit-beruntun-ekonom-soroti-soal-import-energi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom berpandangan kinerja neraca perdagangan barang Indonesia yang mengalami defisit dua bulan berturut-turut merupakan sinyal peringatan lantaran Indonesia masih mengalami persoalan struktural yang sudah lama dihadapi, yakni ketergantungan terhadap impor energi.

Diketahui, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami defisit sebesar US\$450 juta pada Juni 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, neraca perdagangan RI juga mengalami defisit US\$1,61 miliar, menjadi yang pertama kalinya setelah surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak 6 tahun terakhir, tepatnya Mei 2020. Terakhir, neraca dagang Indonesia mengalami surplus US\$89,1 juta pada April 2026.

Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan tekanan terhadap neraca dagang terjadi karena defisit migas yang membengkak hingga sekitar US\$3,49 miliar.

Dia menilai kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, ditambah meningkatnya kebutuhan impor minyak mentah dan hasil minyak di dalam negeri, membuat laju impor jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekspor.

Ketika impor meningkat lebih dari 34% sementara ekspor hanya tumbuh sekitar 9%, maka surplus nonmigas yang sebenarnya masih kuat tidak lagi cukup untuk mengompensasi defisit energi.

“Ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang sudah lama dihadapi Indonesia, yakni ketergantungan terhadap impor energi,” kata Yusuf ketika dihubungi, Selasa (4/8/2026).

Dia menjelaskan, sektor nonmigas saat ini masih menjadi penyangga utama dengan surplus sekitar US\$3,04 miliar pada Juni 2026. Kinerja tersebut didorong oleh ekspor crude palm oil (CPO), batu bara, besi dan baja, serta produk hilirisasi nikel yang masih menunjukkan permintaan cukup baik di pasar global.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia pada Juni 2026 tumbuh 8,84% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sekitar US\$25,45 miliar, berbalik dari kontraksi 5,73% yoy pada Mei. Secara bulanan (month to month/mtm), ekspor meningkat 9,72%, ditopang lonjakan ekspor CPO, batu bara, serta mesin dan peralatan listrik.

Di sisi lain, impor tumbuh lebih tinggi, yakni 34,27% yoy menjadi sekitar US\$25,90 miliar, terutama didorong kenaikan impor bahan baku sebesar 38,94% yoy dan barang modal sebesar 26,53% yoy. Secara kumulatif, pertumbuhan impor sepanjang Januari–Juni 2026 mencapai 18,69%, jauh melampaui pertumbuhan ekspor yang hanya 4,13%.

“Saya melihat defisit dua bulan berturut turut ini lebih tepat dipahami sebagai sinyal peringatan daripada krisis. Secara kumulatif, neraca dagang semester I-2026 masih mencatat surplus sehingga fondasi eksternal Indonesia belum berubah secara drastis,” tutur Yusuf.

Akan tetapi, peristiwa ini mengingatkan bahwa ketahanan perdagangan RI masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi global. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak dilakukan bukan hanya menjaga kinerja ekspor komoditas dan hilirisasi, tetapi juga mempercepat transisi energi.

“Kemudian, menekan ketergantungan pada impor BBM serta memperluas basis ekspor bernilai tambah agar surplus perdagangan tidak terus bergantung pada kemampuan sektor nonmigas menutup defisit energi yang bersifat kronis,” jelas dia.

Bukan Karena Ekspor Satu Pintu

Dalam kaitan itu, Yusuf menyebut defisit neraca dagang dua bulan terakhir juga tidak berkaitan dengan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Jika dilihat berdasarkan waktu, defisit neraca dagang pada Mei 2026 terjadi sebelum kebijakan memasuki masa transisi, sedangkan pada Juni surplus nonmigas justru masih meningkat.

“Artinya, sumber tekanan bukan berasal dari melemahnya ekspor komoditas, melainkan dari lonjakan impor migas. Memang pada tahap awal implementasi selalu ada potensi penyesuaian administratif bagi pelaku usaha, tetapi dampaknya terhadap neraca dagang sejauh ini belum terlihat signifikan,” terangnya.

Dalam jangka menengah, kata dia, apabila tata kelolanya berjalan transparan dan efisien, kebijakan tersebut justru berpotensi memperkuat penerimaan devisa, mengurangi praktik under invoicing, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar ekspor.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuannya menjaga kelancaran arus perdagangan tanpa menambah biaya transaksi yang tidak perlu bagi eksportir.

Purbaya Siap Tambah Suntikan SAL, Penempatan Hingga 2027

Selasa, 4 Augustus 2026 17:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117247/purbaya-siap-tambah-suntikan-sal-penempatan-hingga-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa dirinya akan kembali melakukan suntikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan tersebut untuk menjaga perekonomian termasuk ke sektor riil yang saat ini sudah menunjukkan perbaikan.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan tersebut dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menyebut bahwa pemerintah akan secara berkala menempatkan dana SAL kembali ke Bank Indonesia (BI)

“[SAL diberikan untuk]mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Harusnya sekarang nih, 2 minggu lalu saya inject lagi uang yang Rp400 triliun itu. Harusnya sekarang sih dimana untuk mobil, motor, sudah mulai recover,” kata Purbaya.

“Kalau masih kurang hari ini saya tambah lagi sampai jumlahnya cukup di perekonomian,” janjinya.

Menurut Purbaya, hal tersebut merupakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas fiskal. Bendahara Negara bilang, hal tersebut tak dilarang selama dapat memberikan dampak yang baik bagi negara.

Purbaya menyebut bahwa saat ini pemerintah telah menyuntikkan pendanaan sebesar Rp400 triliun ke perbankan

“Kan tadi saya bilang 200 tambah 100 tambah 100. Itu beberapa bank masih ragu apakah saya akan menjalankan itu atau enggak. Saya akan tekankan lagi ke mereka bahwa itu akan dijalankan,” kata Purbaya

Ia menyebut penempatan untuk sebagian dari pendanaan tersebut akan diperpanjang bahkan hingga akhir tahun, bahkan hingga 2027 mendatang.

“Kalau yang Rp200 juta kan sampai akhir tahun atau lebih, Rp 100 juta, 3 bulan sekali di review. Yang 100 lagi keluar masuk,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, hal ini sudah akan menambah likuidasi di sistem perbankan sehingga dapat dipakai untuk mengembangkan kredit yang lebih banyak.

Sebagai informasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sepakat bahwa penarikan dana SAL milik pemerintah dari kantong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk kembali ditempatkan ke Bank Indonesia (BI) akan dilakukan secara terukur dengan mengedepankan kondisi likuiditas perbankan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK Kuartal III-2026, di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (8/3/2026). Menurut Purbaya, keputusan tersebut mempertimbangkan masukan dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang mulai Juli 2026 kemarin telah terlibat dalam rapat koordinasi KSSK

Berdasarkan laporan terakhir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 29 Juni 2026, dana SAL yang mengendap di Himbara tercatat sebanyak Rp381 triliun. Kemenkeu juga memperpanjang jatuh tempo penempatan dana SAL sebesar Rp281 triliun hingga Desember 2026. Selebihnya, dana sebesar Rp100 triliun berstatus sebagai dana siaga alias bisa ditarik kapan saja.

”Dalam rapat KSSK kemarin itu, ada Danantara juga. Mereka menyampaikan kondisi likuiditas sistem perbankan yang harus kami pertimbangkan. Jadi, kami BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan, sepakat untuk memastikan tidak akan mengganggu kondisi likuiditas sistem perbankan,” kata Purbaya.

Sebagai konteks, selama ini KSSK hanya terdiri atas para regulator, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS. Arahkan Prabowo agar Danantara dilibatkan dalam KSSK muncul setelah mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Danantara dikonfirmasi hadir dalam rapat koordinasi KSSK pada Selasa (28/7/2026).

Peningkatan tata kelola BUMD, harus berdampak pada layanan publik

Selasa, 4 Agustus 2026 17:01 WIB

Pewarta: M. Hari Atmoko, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640711/peningkatan-tata-kelola-bumd-harus-berdampak-pada-layanan-publik>

Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan peningkatan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) harus berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas lembaga.

"Saya menyampaikan hal ini tidak hanya sebagai Wali Kota Magelang, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan Bank Magelang terus tumbuh menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat, profesional, dan terpercaya, " ujarnya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu di sela-sela kegiatan Semarak Undian Tabungan Berhadiah di Gedung Wanita Kota Magelang sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah sekaligus penanda babak baru perjalanan Bank Magelang.

Kegiatan ini juga dihadiri jajaran forkopimda serta ratusan nasabah, termasuk para pelajar pemegang tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) dan nasabah Tabungan Master (Maju dan Sejahtera).

Puncak acara ditandai dengan pengundian hadiah utama berupa satu mobil Daihatsu Sigras yang berhasil diraih nasabah atas nama Desy Eviana, warga Bonjitan, Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Ia berharap, nilai integritas dapat benar-benar tertanam sebagai budaya kerja di Bank Magelang, yang tercermin secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pemberian pelayanan, hingga pelaksanaan tanggung jawab organisasi.

Transformasi Perumda BPR Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) resmi berlaku sejak 31 Maret 2026 menjadi kesempatan penting bagi penguatan perusahaan dalam meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Utama PT BPR Bank Magelang (Perseroda) Taufik Hidayat menyampaikan laporan resmi terkait langkah transformasi dan komitmen efisiensi perusahaan.

Ia menjelaskan perubahan Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) tidak dimaknai sekadar sebagai perubahan nama atau bentuk badan hukum, tetapi menjadi awal untuk membangun Bank Magelang yang semakin profesional, terpercaya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memastikan bahwa perubahan bentuk badan hukum ini tidak mengurangi hak maupun kepentingan seluruh nasabah. Kepercayaan yang telah diberikan akan terus kami jaga melalui pelayanan yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada para pelajar pemegang tabungan SimPel atas kedisiplinan finansial yang dipupuk sejak dini.

Pemkab Magelang menerapkan Trisula PAD permudah mendata usaha dan pajak

Selasa, 4 Agustus 2026 16:57 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640705/pemkab-magelang-menerapkan-trisula-pad-permudah-mendata-usaha-dan-pajak>

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan sistem "Transformasi Integrasi dan Sinergi Data Usaha untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah" (Trisula PAD) sebagai inovasi digital dalam mendukung optimalisasi penggalan potensi pajak daerah melalui integrasi data lintas perangkat daerah.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang M. Taufiq Hidayat Yahya di Magelang, Selasa, menjelaskan, inovasi ini akan mengintegrasikan data lintas perangkat daerah.

Ia mengatakan, seperti data perizinan Online Single Submission (OSS), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan data perpajakan daerah dalam satu sistem yang terhubung untuk mendukung pendataan, pengawasan, serta penggalan potensi pajak daerah secara lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan.

"Melalui Trisula PAD sinergi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Magelang," katanya.

Ia menyampaikan, optimalisasi pendapatan daerah memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

"Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan cara pandang bahwa optimalisasi pendapatan daerah bukan hanya menjadi tugas perangkat daerah tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan, potensi, dan layanan yang dimiliki," katanya.

Melalui implementasi Trisula PAD, katanya, Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan potensi pajak.

Ia berharap, integrasi data OSS, PBG, dan data perpajakan daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas basis data perpajakan, mempercepat identifikasi wajib pajak dan objek pajak baru, mendukung pengawasan yang lebih efektif, serta menjadi fondasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

BPS: Ekspor Jateng di sepanjang semester I 2026 mencapai Rp129,6 triliun

Selasa, 4 Agustus 2026 09:05 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640660/bps-ekspor-jateng-di-sepanjang-semester-i-2026-mencapai-rp1296-triliun>

Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Jawa Tengah di sepanjang Semester I 2026 tercatat mencapai 7.207,69 juta dolar AS atau Rp129,6 triliun (nilai tukar Rp17.985 per dolar AS).

"Nilai ekspor Jawa Tengah selama Januari hingga Juni 2026 naik 23,53.persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said di Semarang, Senin.

Ia menuturkan dari 10 komoditas ekspor Jawa Tengah, ekspor produk kimia mengalami peningkatan terbesar yang mencapai 195,14 juta dolar AS.

Menurut dia, ekspor non-migas hasil industri pengolahan selama semester I 2026 mengalami kenaikan 18,29 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.

Ia menyebut Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama ekspor komoditas dari Jawa Tengah.

Ali Said mengatakan ekspor Jawa Tengah ke Amerika Serikat selama Januari hingga Juni tercatat sebesar 3.297,62 juta dolar.

Sementara untuk impor berbagai komoditas yang masuk ke Jawa Tengah selama semester I 2026 tercatat mencapai 8.505,88 juta dolar AS.

Dari nilai sebesar itu, kata dia, sebesar 5.171,48 huta dolar di antaranya merupakan nilai impor komoditas non-migas.

Ia menjelaskan impor komoditas bahan kimia anorganik mengalami peningkatan terbesar yang mencapai 143,74 juta dolar AS.

Ali Said menuturkan China menjadi negara utama asal komoditas tujuan Jawa Tengah dengan nilai impor mencapai 3.162,49 juta dolar AS.

Adapun neraca perdagangan Jawa Tengah selama semester I 2026, kata dia, mengalami defisit sebesar 1.298,19 juta AS

Ia menjelaskan kondisi tersebut disebabkan oleh defisit pada sektor migas sebesar US\$2.827,98 juta AS, sedangkan untuk sektor nonmigas mengalami surplus sebesar 1.529,80 juta dolar AS.

BPS catat NTP Jateng di Juli 2026 sebesar 118,03

Selasa, 4 Agustus 2026 08:04 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640647/bps-catat-ntp-jateng-di-juli-2026-sebesar-11803>

Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) Jawa Tengah pada Juli 2026 sebesar 118,03.

"NTP Juli 2026 turun 0,20.persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 118,27," kata Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said di Semarang, Senin.

Ia menjelaskan penurunan tersebut diakibatkan oleh penurunan Indeks harga yang diterima petani sebesar 0,60 persen lebih cepat dibanding penurunan indeks harga yang dibayar petani

Sementara subsektor yang mengalami penurunan NTP, kata dia, yakni hortikultura sebesar 6,35 persen dan peternakan sebesar 0,80 persen.

Adapun subsektor yang mengalami kenaikan NTP meliputi tanaman pangan sebesar 1,52 persen; perikanan sebesar 1,11 persen; dan tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,58 persen.

BPS juga mencatat, kata dia, pada Juli 2026 terdapat komoditas pertanian yang mengalami penurunan harga, antara lain bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, sawi putih, labu siam, petai, kol/kubis, tomat, tebu, semangka, ayam kampung, ayam pedaging, dan sawi hijau.

Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga, lanjut dia, antara lain gabah, wortel, kentang, jagung, kopi, bawang daun, kacang panjang, ketimun, kacang tanah, sapi perah, dan bandeng payau.

Ia menuturkan pada Juli 2026 tercatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,69 persen.

Ia menjelaskan hal tersebut diakibatkan oleh penurunan pada indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,32 persen serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10 persen.

Adapun pada kelompok pengeluaran, menurut dia, inflasi terjadi antara lain pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,01 persen serta kelompok pendidikan sebesar 0,69 persen.

Ia mengatakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Jawa Tengah pada Juli 2026 tercatat sebesar 122,09, turun sebesar 0,75 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 123,01.

BI Purwokerto: Inflasi Banyumas Raya Masih Terjaga, Deflasi Dipicu Harga Pangan Turun

Selasa, 4 Agustus 2026 15:17 WIB

Penulis: Permata Putra Sejati, Editor: Muh Radlis

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262013/bi-purwokerto-inflasi-banyumas-raya-masih-terjaga-deflasi-dipicu-harga-pangan-turun>

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Turunnya harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, menjadi faktor utama yang membuat Purwokerto dan Kabupaten Cilacap sama-sama mengalami deflasi pada Juli 2026.

Meski demikian, tingkat inflasi tahunan di kedua daerah tersebut tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional $2,5 \pm 1$ persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto, Purwokerto mencatat deflasi sebesar 0,05 persen secara bulanan (month to month/mtm) dengan inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 2,66 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang mencatat inflasi bulanan sebesar 0,12 persen dan inflasi tahunan sebesar 2,79 persen.

Sementara itu, Cilacap juga mengalami deflasi sebesar 0,06 persen (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 2,44 persen (yoy).

Sebelumnya, pada Juni 2026, Cilacap mencatat inflasi bulanan 0,10 persen dan inflasi tahunan 2,88 persen.

Meski mengalami deflasi, penurunan harga di Purwokerto dan Cilacap tidak sedalam kondisi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Secara nasional, Juli 2026 tercatat deflasi sebesar 0,14 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,88 persen (yoy), turun dari Juni 2026 yang mencapai inflasi 0,44 persen (mtm) dan 3,34 persen (yoy).

Adapun Provinsi Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,13 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 2,60 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang mencatat inflasi bulanan 0,31 persen dan inflasi tahunan 2,92 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Aswin Gantina menjelaskan, deflasi di Banyumas Raya terutama dipengaruhi turunnya harga komoditas hortikultura.

Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit mengalami penurunan harga seiring meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi yang memasuki masa panen.

Selain itu, harga emas perhiasan juga turun mengikuti pelemahan harga emas dunia.

Harga telur ayam ras pun masih melanjutkan tren penurunan karena pasokan yang tetap memadai di tengah permintaan masyarakat yang relatif stabil.

"Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga bensin yang masih memberikan dampak lanjutan terhadap tarif angkutan dan biaya distribusi.

Selain itu, harga telepon seluler juga meningkat di tengah masih kuatnya permintaan masyarakat terhadap perangkat komunikasi," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (4/8/2026).

Kelompok makanan menjadi penyumbang utama deflasi.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi di Banyumas Raya.

Di Purwokerto, kelompok tersebut mengalami deflasi sebesar 1,10 persen (mtm) dengan andil minus 0,33 persen.

Sementara kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami deflasi sebesar 0,34 persen (mtm) dengan andil minus 0,02 persen.

Di Cilacap, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 1,07 persen (mtm) dengan andil minus 0,35 persen.

Sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,56 persen (mtm) dengan andil minus 0,04 persen.

Di sisi lain, kelompok Transportasi masih menjadi penyumbang inflasi terbesar baik di Purwokerto maupun Cilacap.

BI dan TPID Perkuat Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia menilai stabilnya inflasi di Banyumas Raya tidak lepas dari sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Selama Juli 2026, berbagai program pengendalian inflasi terus dijalankan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Program tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pasar Murah Inflasi Banyumas (SARAHSIMAS), pasar murah dalam rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III, hingga pendampingan kepada petani guna meningkatkan produktivitas pangan.

Selain itu, TPID Kabupaten Banyumas juga menggelar High Level Meeting (HLM) untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan.

Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui rapat koordinasi mingguan bersama pedagang besar, asosiasi, dan kelompok tani, peningkatan komunikasi publik melalui forum bersama media, serta

pengembangan jaringan distribusi pangan melalui toko tani guna menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan.

Ke depan, TPID Banyumas Raya bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif agar inflasi tetap berada dalam sasaran target nasional. (jti)

Harga Sejumlah Komoditas Kebutuhan Pokok di Kudus Terus Melonjak

Selasa, 4 Agustus 2026 11:58 WIB

Penulis: Rifqi Gozali, Editor: Muslimah

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1261983/harga-sejumlah-komoditas-kebutuhan-pokok-di-kudus-terus-melonjak>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kudus beberapa hari terakhir mengalami kenaikan.

Di antara yang mengalami kenaikan harga cabai. Kenaikan ini terjadi sejak dua hari yang lalu.

Pantauan di Pasar Bitingan Kudus, Selasa (4/8/2026), kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas. Di antaranya yaitu cabai rawit dari yang semula harganya Rp 28 ribu per kilogram, saat ini sudah menginjak Rp 35 ribu per kilogram.

“Kemarin naik dari Rp 28 ribu menjadi Rp 30 ribu. Saat ini sudah sampai Rp 35 ribu. Kenaikan terjadi sejak 2 hari yang lalu,” ujar salah seorang pedagang Pasar Bitingan, Tutik Asiani.

Selain itu, kata Tutik, kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit setan.

Sejak dua hari terakhir, harga cabai rawit setan dari yang semula Rp 45 ribu per kilogram saat ini sudah menginjak Rp 48 ribu per kilogram.

Beberapa komoditas lainnya harganya fluktuatif.

Misalnya untuk bawang merah, kata Tutik, masih berada di angka Rp 35 ribu per kilogram. Harga ini dinilai stabil.

Sedangkan untuk bawang putih justru malah turun dari yang semula Rp 40 ribu per kilogram saat ini menjadi Rp 38 ribu per kilogram.

Kemudian untuk komoditas sayuran, kata dia, juga mengalami kenaikan

Kenaikan harga sayuran ini ditengarai karena adanya program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya dengan adanya program tersebut sayur banyak yang terserap ke sana. Sehingga stok di pasaran berkurang.

“Contohnya harga wortel dan kentang ini sekarang Rp 20 ribu per kilogram. Harga sebelumnya saat MBG libur itu Rp 15 ribu atau Rp 14 ribu,” katanya.

Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas tersebut memang belum dirasakan secara signifikan oleh konsumen.

Namun, hal ini ketika terus mengalami kenaikan secara konstan, tentu konsumen akan merasa keberatan.

Salah seorang warga Kudus yang sehari-hari belanja di Pasar Bitingan, Rudin Latif mengatakan, kalau memang kenaikannya masih dalam batas wajar menurutnya tidak ada masalah.

“Kalau naik tentu petani yang diuntungkan, tidak masalah, karena sayur dan kebutuhan yang dijual di sini kan dari petani. Kalau naiknya terus-terusan ya jangan,” kata Rudin. (Goz)

Rapor Ketenagakerjaan Jateng Semester I 2026: Sektor Garmen Catat PHK Tinggi Sekaligus Serap Pekerja

Selasa, 4 Agustus 2026 21:29 WIB

Penulis: Raf, Editor: Raka F Pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262073/rapor-ketenagakerjaan-jateng-semester-i-2026-sektor-garmen-catat-phk-tinggi-sekaligus-serap-pekerja>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Industri garmen dan tekstil di Jawa Tengah kembali diguncang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di mana sektor ini menyumbang porsi terbesar hingga 51,4 persen dari total 6.604 buruh yang kehilangan pekerjaan selama Semester I 2026.

"Iya, per Juli 2026, ada 6.604 buruh alami PHK," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Aziz saat dihubungi, Selasa (4/8/2026).

Data ribuan buruh itu, lanjut Aziz, sudah termasuk 1.000an buruh garmen yang mengalami PHK pada Juli lalu yakni PT Samwon Busana Indonesia Jepara dan PT Victory Apparel Semarang.

Menurut dia, sektor garmen tekstil menjadi sektor yang paling banyak terjadi PHK yakni di angka 51,4 persen, manufaktur dari sektor mainan anak 21,1 persen, industri kayu 12,5 persen dan industri bulu mata 9,4 persen.

"Untuk daerahnya terjadi di berbagai kabupaten/kota di Jateng, seperti Kota Semarang, Jepara, Sukoharjo, Temanggung, Purbalingga, dan lainnya," jelasnya.

Dibandingkan tahun lalu, angka PHK semester I ini lebih rendah.

Menurut Aziz, hal itu terjadi karena tahun 2025, ada gelombang PHK besar-besaran dari PT Sritex.

Merujuk data Kementerian Tenaga Kerja, ada sebanyak 18.101 buruh di Jawa Tengah ter-PHK sepanjang 2025, lebih dari separuhnya berasal dari Grup Sritex.

"Ya PHK tahun lalu lebih banyak, ada faktor dari PT Sritex," ungkapnya.

Aziz menilai, PHK yang terjadi pada tahun ini karena sejumlah perusahaan mengalami kerugian.

Kerugian itu disebabkan oleh beberapa hal di antaranya menurunnya order, efisiensi, dan pailit.

"Adapula yang alami force majeure berupa peristiwa kebakaran," imbuhnya.

Di sisi lain, Aziz menyebut, terdapat serapan tenaga kerja pada semester I tahun 2026 ini sebanyak 213.217 buruh dari berbagai sektor.

Serapan paling banyak dari sektor alas kaki, tekstil dan garmen.

Sementara, pencari kerja di angka 112.082 orang dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 108.459 orang.

"Daerah dengan serapan tenaga kerja paling banyak ada di Kota Semarang, Kendal, Brebes, Jepara, Batang dan lainnya," paparnya.

Daftar PHK Jateng :

1. PT Anugrah Karya Trisakti (Kabupaten Purworejo) sektor Pengolahan Kayu, jumlah buruh terdampak 142 orang.
2. PT Bamatex, Kabupaten Pekalongan, Industri Tekstil Sarung, 325 buruh terdampak
3. PT Cosmoprof Indokarya, Kabupaten Purbalingga, Industri Bulu Mata, 620 buruh terdampak.
4. PT Combine Will Industrial Indonesia, Kabupaten Sragen, Manufaktur Mainan Anak, 849 buruh terdampak.
5. PT Shoenary Javanesia Inc, Kabupaten Temanggung, Industri Tekstil Sepatu, 125 buruh terdampak.
6. CV Anugrah, Kabupaten Wonogiri, Industri Garmen, 479 buruh terdampak.
7. PT Mas Silueta, Kota Semarang, Tekstil dan Garmen, 123 buruh terdampak.
8. PT Samwon Busana Indonesia, Kabupaten Jepara, Industri Garmen, 122 buruh terdampak (Gelombang PHK I).
9. PT Djohartex, Kabupaten Magelang, Industri Tekstil, 140 buruh terdampak.
10. PT Combine Will industrial Indonesia, Kabupaten Sragen, Manufaktur Mainan Anak, 547 buruh terdampak.
11. PT Sas Kreasindo Utama, Kabupaten Tegal, Industri Kayu / Mebel, 681 buruh terdampak.
12. PT Citra Busana Semesta, Kabupaten Sukoharjo, Industri Pakaian, 920 buruh terdampak.
13. PT Victory Apparel, Kota Semarang, Industri Garmen, 846 buruh terdampak.
14. PT Samwon Busana Indonesia, Kabupaten Jepara, Industri Garmen, 685 buruh terdampak. (Gelombang PHK II).

Penuhi Hak Buruh 100 Persen

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal turun langsung ke Kabupaten Jepara meninjau kondisi PT Samwon Busana Indonesia di Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Senin (27/7/2026) sore.

Turunnya Iqbal memastikan apa yang terjadi pada PT Samwon hingga harus terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal ratusan karyawan akhir Juli ini.

Dalam keterangannya, Iqbal menegaskan, dia sudah memastikan penyebab PHK terjadi di PT Victory Apparel Semarang bukan karena daya beli di Indonesia menurun.

Namun lebih pada persoalan situasi global, di mana pasar dinilai tidak kompetitif lagi. Sehingga perusahaan tidak bisa bersaing.

Kata dia, kondisi serupa terjadi di PT Samwon Busana Indonesia Jepara. Situasi global membuat pasar tidak bisa menyerap produk-produk perusahaan.

Di mana market pasar produk yang dihasilkan PT Samwon Busana Indonesia skala ekspor, terutama ekspor ke Amerika Serikat.

"Saya turun ke bawah memastikan PHK di Jateng ini apa sih penyebabnya. Baik di Victory Apparel Semarang maupun di Samwon Busana Indonesia Jepara, jadi lebih pada prinsipal dan pasar internasional. Bukan karena daya beli di Indonesianya, karena kan produk ekspor," terangnya.

Iqbal menjelaskan bahwa dua opsi yang ditawarkan dan bisa dikerjakan pemerintah untuk membangkitkan kembali dunia usaha, khususnya dari PT Samwon Busana Indonesia.

Di mana PT Samwon di Jepara dinilai lebih besar pengembangannya dari pada pabrik di Semarang.

Misalnya dengan cara membuat regulasi atau kemudahan untuk memasukkan bahan baku.

Namun demikian, lanjut dia, faktor prinsipal pemilik perusahaan atau PMA sudah final dan memutuskan untuk menutup perusahaan.

"Oleh karena itu opsi kedua harus dipilih. Membayar hak pesangon, hak penghargaan masa kerja, hak uang penggantian hak yang harus sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024," tegasnya.

Iqbal menjelaskan bahwa putusan MK tersebut dijelaskan sekurang-kurangnya pemberian pesangon kepada karyawan satu kali.

Artinya, perusahaan tidak boleh membayarkan pesangon buruh sebesar 0,5 kali dari aturan, walaupun dengan alasan efisiensi.

Kata dia, keputusan MK sudah menganulir Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan pembayaran pesangon 0,5 kali sudah dianulir. Sehingga perusahaan mau tidak mau harus mematuhi peraturan yang ada dengan membayarkan pesangon full sebagaimana hak dari karyawan.

"Buktinya apa, PT Amos Indah Indonesia di Cilincing Jakarta Utara sudah berjalan. Ini kita minta untuk dibayarkan. Kami sudah selesaikan, dan akhirnya yang tadinya perusahaan bayar (pesangon) 0,5 kali, mau membayarkan 1 kali. Dengan demikian di Jateng sama dong. Masa aturan di Republik Indonesia berbeda penerapannya, enggak boleh," tutur dia.

Iqbal menyebut bahwa salah satu perwakilan direktur PT Samwon Busana Indonesia menyatakan akan mempelajari ketentuan dan regulasi dalam pemberian hak buruh berupa pesangon, bersama jajaran manajemen perusahaan.

Pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada-kepala dinas terkait di Kabupaten Jepara dan provinsi, termasuk Kementerian Tenaga Kerja desk ketenagakerjaan Provinsi Jateng untuk memastikan pembayaran pesangon di PT Samwon Busana Indonesia Jepara tidak boleh kurang 1 kali dari ketentuan.

Pihaknya tidak akan turun kembali jika hak karyawan tidak diberikan, dan siap memperjuangkan hak-hak buruh.

"Karena perintah Presiden jelas, lindungi yang lemah, hak-hak buruh harus diberikan. Kalau dunia usaha bisa diselamatkan, selamat dunia usaha. Nampaknya ini persoalan global, dan ada pasar menurun tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu lindungi yang lemah, bayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak satu kali, bukan 0,5 kali dari aturan," tegas dia.

Perwakilan dari manajemen PT Samwon Busana Indonesia, Tri Harti menyampaikan, berhentinya operasional perusahaan sudah menjadi keputusan final manajemen perusahaan.

Di mana ada 685 karyawan yang nantinya terimbas PHK lantaran perusahaan tutup per 1 Agustus 2026.

Terkait kepastian hak pesangon karyawan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan dinas terkait di Jepara, owner perusahaan dan manajemen.

"Kepastian hak pekerja, ini nanti diskusi dengan Kadis Jepara dan manajemen perusahaan. Kebetulan owner saat ini di Korea Selatan. Kami harus meeting dulu terkait hal itu," ujarnya.

Sebelumnya, HR Manager PT Samwon Busana Indonesia, Taufan Adi Susilo mengatakan bahwa hak karyawan akan dipenuhi oleh perusahaan mulai dari pesangon, apresiasi kinerja karyawan, hingga hak pengganti siswa cuti tahunan yang belum diambil.

Hanya saja, perusahaan pada mulanya menyebut hanya bisa membayarkan pesangon setengah atau 0,5 dari nilai ketentuan lantaran perusahaan merugi. (Iwn/Sam)

Inflasi Thailand Melandai ke 1,95%, Turun 3 Bulan Beruntun

Rabu, 5 Agustus 2026 15:00 WIB

Suttinee Yuvejwattana dan Anuchit Nguyen

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117379/inflasi-thailand-melandai-ke-1-95-turun-3-bulan-beruntun/2>

Bloomberg, Inflasi Thailand secara tak terduga melambat untuk bulan ketiga berturut-turut, memperkuat pandangan bank sentral bahwa suku bunga dapat dipertahankan untuk mendukung perekonomian.

Indeks harga konsumen (IHK) naik 1,95% pada Juli dibandingkan setahun sebelumnya, melambat dari 2,42% pada Juni, berdasarkan data Kementerian Perdagangan Thailand pada Rabu (5/8). Angka tersebut berada di bawah median proyeksi ekonom dalam survei Bloomberg yang sebelumnya memperkirakan inflasi akan meningkat.

Gubernur Bank Sentral Thailand (Bank of Thailand/BoT) Vitai Ratanakorn dan para pembuat kebijakan mempertahankan suku bunga acuan pada Juni, dengan memperkirakan inflasi akan melandai seiring meredanya tekanan dari sisi pasokan. Pada awal Juli, Vitai mengatakan inflasi tahun ini kemungkinan berada di bawah proyeksi bank sentral sebesar 2,8%. Keputusan suku bunga berikutnya akan diumumkan pada 26 Agustus.

Secara bulanan, indeks harga konsumen turun 0,73% pada Juli, lebih besar dibandingkan penurunan 0,34% pada Juni dan median proyeksi ekonom sebesar 0,2%. Sementara itu, inflasi inti sedikit meningkat menjadi 1,34% dari 1,23% pada Juni.

Direktur Jenderal Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan Kementerian Perdagangan Thailand Nantapong Chiralerspong mengatakan perlambatan inflasi terutama disebabkan oleh penurunan tajam harga bahan bakar domestik, sejalan dengan turunnya harga minyak global setelah ketegangan di Timur Tengah mereda bulan lalu.

“Situasinya tampaknya terkendali,” kata pejabat tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi di Timur Tengah, inflasi tahun ini kemungkinan berada di kisaran 1,5%-2%, ujarnya.

Inflasi diperkirakan rata-rata mencapai 2,09% pada kuartal III dan berpotensi meningkat menjadi 2,33% dalam tiga bulan terakhir tahun ini, dibandingkan 2,7% pada kuartal II, berdasarkan proyeksi Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan.

Inflasi Filipina Turun ke 6,2%, Tekanan Suku Bunga Mereda

Rabu, 5 Agustus 2026 13:50 WIB

Ditas B Lopez dan Neil Jerome Morales

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117366/inflasi-filipina-turun-ke-6-2-tekanan-suku-bunga-mereda/2>

Bloomberg, Laju inflasi Filipina melambat untuk bulan ketiga berturut-turut pada Juli, memberikan ruang bagi bank sentral untuk menilai data terbaru dan dampak pengetatan kebijakan yang telah dilakukan, sembari mempertimbangkan kemungkinan kembali menaikkan suku bunga.

Indeks harga konsumen (IHK) naik 6,2% secara tahunan pada Juli, menurut Badan Statistik Filipina pada Rabu (5/8). Ekonom sebelumnya memperkirakan inflasi tetap berada di level 6,4% seperti pada Juni, berdasarkan median proyeksi dalam survei Bloomberg News.

Peso Filipina menguat hingga 0,4% menjadi 60,95 per dolar AS, sejalan dengan penguatan sebagian besar mata uang Asia.

Perlambatan inflasi terjadi setelah Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin sepanjang tahun ini untuk menekan inflasi yang jauh di atas target 3% pada 2026. Bank sentral berkomitmen untuk tetap waspada dan menjadikan data terbaru sebagai panduan dalam mengambil keputusan, khususnya terkait inflasi dan prospek pertumbuhan.

Data produk domestik bruto (PDB) Filipina akan dirilis pada Jumat. Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit meningkat pada kuartal II, setelah merosot menjadi 2,8% pada tiga bulan pertama 2026. Kondisi tersebut membuat Filipina menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi paling lemah di kawasan.

Harga-harga di Filipina masih meningkat sekitar dua kali lebih cepat dibandingkan negara-negara besar lainnya di Asia Tenggara, akibat ketergantungan negara tersebut terhadap minyak dari Timur Tengah yang harganya melonjak karena perang Iran yang berkepanjangan. Pelemahan peso, yang bulan lalu mencapai rekor terendah 61,85 per dolar AS, juga meningkatkan biaya impor.

Inflasi inti turun 0,2% pada Juli setelah mencatat kenaikan selama enam bulan berturut-turut. Data juga menunjukkan inflasi harga konsumen utama hanya naik 0,1% pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya, lebih rendah dari perkiraan 0,3%. Sementara itu, harga konsumen inti naik 4,2% secara tahunan.

Namun, sejumlah komponen masih mengalami tekanan inflasi. Harga beras melonjak 17,1% pada Juli dibandingkan setahun sebelumnya, menegaskan tekanan biaya hidup yang dihadapi sekitar 113 juta penduduk Filipina.

Gubernur BSP Eli Remolona mengisyaratkan masih ada ruang untuk menaikkan biaya pinjaman sekali lagi, meski peluang pengetatan agresif dinilai kecil. Bank sentral sebelumnya memproyeksikan inflasi Juli berada di kisaran 5,6%-6,6%, dengan mempertimbangkan tingginya harga bahan bakar dan depresiasi peso.

Tekan Inflasi, Schmid The Fed Sebut Suku Bunga Perlu Lebih Tinggi

Rabu, 5 Agustus 2026 11:40 WIB

Jonnelle Marte

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117335/tekan-inflasi-schmid-the-fed-sebut-suku-bunga-perlu-lebih-tinggi/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of Kansas City Jeff Schmid mengisyaratkan bahwa suku bunga yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai target stabilitas harga Federal Reserve (The Fed). Dia juga menegaskan kembali bahwa inflasi menjadi perhatian utamanya.

“Mengingat kuatnya permintaan dan investasi, saya tidak melihat sikap kebijakan moneter saat ini sebagai sesuatu yang restriktif,” kata Schmid dalam pernyataan yang telah disiapkan untuk sebuah acara di Omaha pada Selasa (4/8). “Karena itu, saya menilai bahwa untuk menurunkan inflasi menuju target The Fed sebesar 2% diperlukan kebijakan yang lebih ketat.”

Para pejabat The Fed terpecah mengenai seberapa besar langkah yang perlu diambil untuk mengendalikan inflasi, yang telah berada di atas target bank sentral selama lebih dari lima tahun. Tekanan harga meningkat akibat perang di Iran dan besarnya investasi di bidang kecerdasan buatan (AI).

Para pembuat kebijakan pekan lalu sepakat mempertahankan suku bunga acuan. Namun, tiga pejabat The Fed berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Mereka mengkhawatirkan penundaan kenaikan suku bunga saat ini dapat meningkatkan kebutuhan untuk mengambil langkah yang lebih agresif di kemudian hari.

Schmid, yang tidak memiliki hak suara dalam keputusan suku bunga tahun ini, mengingatkan agar tekanan inflasi yang berasal dari guncangan pasokan tidak serta-merta dianggap hanya berlangsung sementara. Menurutnya, kondisi tersebut lebih mungkin memicu kenaikan inflasi yang besar ketika permintaan juga berada pada level yang kuat.

“Saya merasa tidak nyaman jika menganggap lonjakan inflasi akan bersifat sementara,” kata Schmid. “Seberapa persisten lonjakan inflasi pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana The Fed merespons atau diperkirakan akan merespons.”

Sebelumnya pada Selasa, Gubernur Federal Reserve Bank of Philadelphia Anna Paulson mengatakan akan tetap “berpikiran terbuka” mengenai arah suku bunga ke depan, bergantung pada perkembangan inflasi.

Sektor Jasa China Melambat pada Juli, Sinyal Pelemahan Ekonomi

Rabu, 5 Agustus 2026 11:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117338/sektor-jasa-china-melambat-pada-juli-sinyal-pelemahan-ekonomi/2>

Bloomberg, Aktivitas sektor jasa China tumbuh dengan laju yang lebih lambat pada Juli, menurut hasil survei swasta yang dirilis Rabu (5/8). Data tersebut mengindikasikan pelemahan ekonomi lebih lanjut.

Indeks pembelian manajer (PMI) jasa China RatingDog turun menjadi 50,4 pada Juli dari 54,1 pada Juni. Median proyeksi ekonom yang disurvei Bloomberg berada di level 53,7, masih di atas ambang 50 yang memisahkan area pertumbuhan dari kontraksi.

Hasil survei tersebut sejalan dengan survei PMI resmi pemerintah, yang menunjukkan sektor jasa kembali mengalami kontraksi pada bulan lalu untuk pertama kalinya sejak April. Kontraksi tersebut merupakan yang terdalam dalam sekitar dua setengah tahun. Aktivitas manufaktur pada Juli juga melambat akibat kondisi cuaca buruk dan lemahnya permintaan.

Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi terbesar kedua di dunia semakin meningkat sejak April seiring pertumbuhan yang melemah dan menjadi semakin tidak seimbang. Para pejabat tinggi berjanji akan menerapkan “kebijakan baru yang efektif secara tepat waktu” dalam rapat kebijakan penting pada pekan lalu, tetapi tidak sampai mengumumkan stimulus baru.

Investor kini menantikan langkah-langkah stimulus setelah Beijing menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% hingga 5% tahun ini.

Survei swasta dan survei resmi tersebut mencakup jumlah sampel, lokasi, dan jenis usaha yang berbeda. Laporan RatingDog berfokus pada perusahaan kecil dan menengah.

Menkeu AS Scott Bessent Bicara Penyelamatan Yen Jepang

Rabu, 5 Agustus 2026 08:30 WIB

Daniel Flatley

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117316/menkeu-as-scott-bessent-bicara-penyelamatan-yen-jepang/2>

Bloomberg, Scott Bessent ingin membantu Jepang menunjang mata uangnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan media melihat catatan di buku catatannya, yang berisi deratas tugas termasuk membeli yen senilai hingga US\$10 miliar.

Itu adalah strategi yang tak biasa, akan tetapi hal inilah yang menjadi ciri khas Bessent. Dalam kariernya sebelumnya di Wall Street, ia meraup US\$1 miliar dari spekulasi mata uang besar-besaran saat bekerja untuk George Soros.

Sebagai Menteri Keuangan di bawah Presiden Donald Trump, ia meluncurkan rencana penyelamatan berisiko tinggi untuk Argentina. Kini, Bessent datang membantu sekutu AS lainnya.

Upaya bersama antara Washington dan Tokyo untuk menopang nilai yen ini merupakan yang pertama dalam hampir tiga dekade. Selain manuver buku catatan tersebut, Bessent telah memanfaatkan berbagai alat yang mengejutkan beberapa pengamat Departemen Keuangan, seperti mengerahkan cadangan euro AS dan mempromosikan fasilitas Federal Reserve yang dapat digunakan Jepang.

“Saya merasa ia lebih berpikir seperti, ‘Yah, ini akan menjadi langkah yang bagus saat saya masih menjadi pedagang,’” kata Stephen Myrow, mitra pengelola di Beacon Policy Advisors dan mantan pejabat Departemen Keuangan pada masa pemerintahan George W. Bush. “Ia sangat nyaman beroperasi di luar bidangnya karena bidangnya bukanlah bidang Departemen Keuangan tradisional. Ini soal kredibilitas pasar.”

Hasil awal cukup menggembirakan, dengan intervensi tersebut membantu mata uang Jepang pulih dari level terendah dalam empat dekade. Namun, karena para pelaku pasar masih memantau seberapa lama kenaikan ini bisa bertahan, Bessent mengisyaratkan pada Selasa bahwa akan ada langkah-langkah lanjutan.

Bessent mengatakan bahwa pelemahan yen meningkatkan risiko depresiasi mata uang yang lebih luas di seluruh Asia.

Jika manuver-manuver ini mengindikasikan pendekatan yang lebih aktif terhadap diplomasi ekonomi, hal itu mungkin merupakan hasil dari pengalaman profesional Menteri Keuangan tersebut.

Sebagian besar pendahulunya yang terbaru, seperti mantan eksekutif Goldman Sachs Group Inc., Henry Paulson dan Robert Rubin, berasal dari apa yang disebut sebagai sell-side di dunia keuangan, di mana manajemen risiko menjadi perhatian utama.

Bessent, dengan karier puluhan tahun di bidang hedge fund, berbeda.

“Kami belum pernah memiliki sosok yang benar-benar berasal dari sisi ‘buy-side’, dia bertindak lebih seperti seorang trader makro daripada seorang Menteri Keuangan tradisional,” kata Myrow.

Bessent memaparkan filosofi diplomasi ekonominya dalam pidato pada bulan Juni di Economic Club of New York. Dalam praktiknya, sebagian dari filosofi tersebut melibatkan upaya memperkuat negara-negara yang bersedia bekerja sama dengan Washington.

Keuntungan bagi AS

Saat mengomentari intervensi yen pada hari Minggu, Trump mengatakan bahwa AS akan memperoleh “manfaat finansial,” tanpa merinci apa manfaat tersebut. Bessent telah mengisyaratkan kecemasannya soal dampak lanjutan dari pasar Jepang terhadap Treasury AS. Keduanya juga telah menekankan pentingnya aliansi AS-Jepang.

“Pemerintahan Trump memenuhi komitmennya bagi mitra-mitra terpercaya Amerika,” kata Bessent dalam postingan di X pada hari Minggu yang mengonfirmasi intervensi bersama untuk menopang yen.

Intervensi tersebut menyusul langkahnya yang secara efektif memperlihatkan buku catatannya kepada para wartawan dalam rapat kabinet hari Jumat, yang mencantumkan pembelian yen sebagai salah satu poin “yang harus dilakukan”.

“Saya hanya ingin memastikan bahwa semua awak media yang melihat dari balik bahu saya juga mengetahui simbol ‘JPY’ untuk yen Jepang,” kata Bessent di CNBC pada hari Selasa. Dia juga mengonfirmasi bahwa AS telah menggunakan euro, yang menurut para analis dilakukan untuk membatasi tekanan penurunan terhadap dolar.

JUST IN: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent’s “to-do” list reveals plans to buy \$5 billion to \$10 billion in Japanese yen. pic.twitter.com/2CdFzWbqZ7

— Polymarket (@Polymarket) August 1, 2026

Seorang trader hedge fund memiliki kemewahan untuk segera keluar dari taruhan yang berhasil, sesuatu yang tidak selalu bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan. Taruhan tahun lalu pada Argentina membuahkan hasil ketika Presiden Javier Milei, sekutu Trump, meraih kemenangan tak terduga dalam pemilihan legislatif.

Kini, Bessent telah mengaitkan sebagian kredibilitasnya dengan yen, yang rentan terhadap kekhawatiran investor mengenai kebijakan fiskal Jepang dan laju kenaikan suku bunga yang lambat di Bank of Japan.

“Secara keseluruhan, peristiwa di Argentina dan Jepang menunjukkan bahwa Departemen Keuangan AS semakin bersedia menggunakan Exchange Stabilization Fund untuk mendukung tujuan ekonomi dan geopolitik yang lebih luas,” kata Chris Turner, kepala pasar global di ING, merujuk pada ESF Departemen Keuangan yang telah digunakan oleh Bessent.

Arah Suku Bunga AS Masih Fleksibel, The Fed Fokus Tekan Inflasi

Rabu, 5 Agustus 2026 07:00 WIB

Maria Eloisa Capurro

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117306/arah-suku-bunga-as-masih-fleksibel-the-fed-fokus-tekan-inflasi/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of Philadelphia Anna Paulson mengatakan dirinya akan tetap berpikiran terbuka terkait arah suku bunga, dengan berfokus pada tren inflasi yang mendasarinya.

“Saya melihat ada dua skenario yang masuk akal mengenai bagaimana kebijakan saat ini memengaruhi inflasi, dan bukti-bukti yang masuk akan memperjelas jalur mana yang sedang kita tempuh serta penyesuaian apa, jika ada, yang mungkin diperlukan,” tulis Paulson dalam sebuah esai pada Selasa (4/8). “Saya tetap berpikiran terbuka mengenai ke mana arah kebijakan setelah ini.”

Dalam skenario pertama, bukti lebih lanjut mengenai perbaikan data inflasi dan ekspektasi harga di masa depan yang tetap stabil seharusnya menunjukkan bahwa suku bunga berada dalam kondisi “sedikit restriktif” dan membantu mengembalikan inflasi ke target The Fed sebesar 2% “dalam jangka waktu yang dapat diterima,” katanya.

Namun, fakta bahwa inflasi yang mendasari telah “sedikit menurun” selama setahun terakhir juga dapat menunjukkan bahwa suku bunga “belum cukup restriktif”, kata Paulson.

“Jika inflasi yang mendasari justru tetap tinggi dan sulit turun, berlalunya waktu tanpa adanya kemajuan dengan sendirinya akan menjadi sinyal bahwa kebijakan yang lebih restriktif diperlukan,” kata Gubernur The Fed Philadelphia tersebut, yang memiliki hak suara dalam kebijakan moneter tahun ini.

Para pejabat Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk kelima kalinya secara berturut-turut pekan lalu. Namun, tiga pejabat lainnya berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Mereka berpendapat bahwa pengetatan kebijakan moneter secara moderat dapat mengurangi risiko kenaikan suku bunga yang lebih agresif di kemudian hari.

Keputusan pekan lalu bukanlah keputusan yang sulit bagi Paulson, yang memilih mempertahankan suku bunga, katanya pada Selasa. “Bukti yang ada sejauh ini menunjukkan bahwa kita berada dalam posisi yang sedikit restriktif,” kata dia dalam wawancara dengan CNBC. Dia menambahkan bahwa kini dirinya perlu melihat kemajuan lebih lanjut dalam indikator inflasi yang mendasari.

“Jika kita tidak melihat kemajuan tersebut, maka kita harus terbuka untuk mengkalibrasi ulang kebijakan moneter. Kita harus mencapai target 2%,” tambahnya, merujuk pada target inflasi The Fed.

Data Inflasi

Data ekonomi terbaru terus memberikan sedikit kelegaan bagi para pejabat The Fed. Indikator inflasi yang menjadi pilihan utama bank sentral, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditures price index (PCE), turun 0,1% pada Juni. Sementara itu, indikator yang tidak memasukkan harga pangan dan energi naik lebih rendah dari perkiraan. Belanja konsumen yang telah disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,4%, menyamai laju terkuat sejak Juli tahun lalu.

“Perbaikan terbaru dalam sejumlah data inflasi merupakan hal yang menggembirakan. Ini merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi baru satu langkah,” kata Paulson dalam esainya. Dia memperkirakan inflasi yang mendasari berada di kisaran 2,4% hingga 2,8%.

“Inflasi yang mendasari telah berada di level tinggi dalam waktu lama, dan inilah yang paling saya fokuskan ketika mengevaluasi kemajuan kita menuju target 2%,” tambahnya.

Paulson mengatakan pasar tenaga kerja terlihat stabil. Dia juga mencatat bahwa konflik di Timur Tengah telah menciptakan ketidakpastian dan mendorong inflasi lebih tinggi. Pejabat The Fed tersebut mengatakan pembangunan infrastruktur terkait kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tekanan harga di sejumlah sektor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur The Fed Kevin Warsh menyerukan perlunya “perubahan rezim” di bank sentral AS tersebut dengan membentuk sejumlah gugus tugas yang membahas berbagai topik, termasuk komunikasi dan kebijakan neraca. Dalam pertemuan pekan lalu, dia juga mengemukakan gagasan untuk mengubah frekuensi pertemuan kebijakan rutin bank sentral. Salah satu opsi yang dibahas adalah menggelar enam pertemuan per tahun untuk memutuskan suku bunga dan dua pertemuan lainnya untuk membahas topik ekonomi, menurut laporan Bloomberg.

“Bagus untuk melihat kembali cara kita melakukan berbagai hal,” kata Paulson kepada CNBC. “Seperti halnya kebijakan moneter, saya juga berpikiran terbuka mengenai hal itu. Saya ingin memahami lebih baik perbandingan dampak antara enam dan delapan kali pertemuan, serta bagaimana semuanya berjalan.”

Pasar Tenaga Kerja AS Stabil: Lowongan Turun, PHK Tetap Rendah

Rabu, 5 Agustus 2026 06:30 WIB

Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117303/pasar-tenaga-kerja-as-stabil-lowongan-turun-phk-tetap-rendah/2>

Bloomberg, Lowongan pekerjaan di Amerika Serikat (AS) menurun pada Juni, tetapi aktivitas perekrutan sedikit meningkat. Kondisi ini menunjukkan permintaan tenaga kerja yang relatif stabil menjelang musim panas.

Jumlah posisi yang tersedia turun menjadi 7,36 juta dari 7,54 juta pada Mei, berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis Selasa. Sementara itu, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya berubah tipis.

Penurunan lowongan pekerjaan didorong oleh berkurangnya posisi di sektor kesehatan, rekreasi dan perhotelan, perdagangan grosir, serta jasa bisnis. Sebaliknya, lowongan di sektor transportasi dan perdagangan meningkat, sementara posisi di pemerintahan federal naik ke level tertinggi sejak akhir 2024.

Laporan yang dirilis Selasa (4/8) tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja yang stabil dengan tingkat PHK yang masih rendah. Belanja konsumen yang tetap tangguh terus mendukung rencana perekrutan perusahaan, meski sebagian pemberi kerja masih berhati-hati untuk menambah jumlah karyawan.

Perekrutan meningkat, didorong oleh sektor kesehatan dan konstruksi. Sementara itu, perekrutan di sektor rekreasi dan perhotelan turun untuk bulan ketiga berturut-turut ke level terendah sejak awal 2025. Kondisi ini berlawanan dengan ekspektasi bahwa Piala Dunia FIFA akan mendorong permintaan tenaga kerja.

“Laporan ini menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan masih cukup banyak di tengah kondisi kesempatan kerja yang penuh,” kata Carl Weinberg, Kepala Ekonom High Frequency Economics, dalam catatan. “Gambaran yang terlihat adalah pasar tenaga kerja yang stabil.”

Tingkat pengunduran diri atau quits rate, yang mengukur persentase pekerja yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya setiap bulan, tidak berubah di level 2%.

Laporan tersebut juga menunjukkan terdapat sekitar satu lowongan pekerjaan untuk setiap pekerja yang menganggur. Kondisi ini secara umum konsisten dengan pasar tenaga kerja yang seimbang. Pejabat Federal Reserve (The Fed) mencermati rasio tersebut sebagai indikator keseimbangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja. Pada puncaknya pada 2022, rasio tersebut mencapai dua lowongan untuk setiap satu pekerja menganggur.

Meski laporan menunjukkan jumlah PHK secara keseluruhan hanya berubah tipis pada Juni, sektor jasa profesional dan bisnis serta hiburan dan rekreasi mencatat peningkatan pemutusan hubungan kerja. Data klaim tunjangan pengangguran terbaru juga menunjukkan sedikit tanda-tanda PHK yang meluas, meskipun sejumlah perusahaan besar seperti Visa Inc dan Uber Technologies Inc mengumumkan rencana pemangkasan tenaga kerja.

Laporan ketenagakerjaan bulanan pemerintah yang akan dirilis Jumat akan memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi pasar tenaga kerja. Para ekonom memperkirakan AS menciptakan 80.000 lapangan kerja pada Juli. Sementara itu, indeks lowongan pekerjaan terpisah dari Indeed meningkat pada Juli ke level tertinggi dalam dua bulan.

Bank Sentral India (RBI) Tahan Suku Bunga di 5,25%, Tunggu Kejelasan Arah Inflasi

Rabu, 5 Agustus 2026 12:54 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-india-rbi-tahan-suku-bunga-di-525-tunggu-kejelasan-arrah-inflasi>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI) mempertahankan suku bunga acuan (repo rate) di level 5,25% dalam rapat kebijakan moneter pada Rabu (5/8/2026).

Keputusan tersebut diambil sambil menunggu kepastian apakah kenaikan harga minyak mulai mendorong tekanan inflasi di negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia itu.

Mengutip Reuters, keputusan RBI menjadikan India berbeda dari sejumlah bank sentral di kawasan Asia, seperti Indonesia dan Filipina, yang telah memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi dan volatilitas nilai tukar yang dipicu konflik geopolitik.

Pada pertemuan sebelumnya, RBI memilih mengambil langkah untuk mendorong arus masuk modal asing dan menopang nilai tukar rupee, alih-alih menaikkan suku bunga.

Keputusan mempertahankan suku bunga diambil secara bulat oleh enam anggota Komite Kebijakan Moneter (Monetary Policy Committee/MPC). Komite juga mempertahankan sikap kebijakan moneter pada posisi netral (neutral).

Hasil tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar. Sebanyak 68 dari 72 ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan RBI akan mempertahankan suku bunga acuannya.

Gubernur RBI Sanjay Malhotra mengatakan, inflasi utama memang telah bergerak di atas target bank sentral, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar. Namun, tekanan inflasi yang lebih luas masih relatif terkendali.

Malhotra menegaskan, RBI tidak akan terburu-buru mengubah arah kebijakan hingga terdapat gambaran yang lebih jelas mengenai prospek inflasi. Menurutnya, bank sentral tetap berkomitmen menjaga inflasi sesuai target.

Setelah pengumuman kebijakan, imbal hasil obligasi pemerintah India tenor 10 tahun relatif stabil di level 6,7765%, sementara nilai tukar rupee melemah tipis ke 95,03 per dolar AS. Indeks Nifty 50 bergerak mendatar, sedangkan BSE Sensex menguat 0,5%.

RBI juga merevisi turun proyeksi rata-rata inflasi pada tahun fiskal berjalan menjadi 5%, dari sebelumnya 5,1%. Sementara itu, proyeksi inflasi inti (core inflation), yang tidak memasukkan komponen pangan dan energi, dipangkas menjadi 4,3% dari 4,7%.

Inflasi ritel India pada Juni memang kembali melampaui target jangka menengah RBI sebesar 4% untuk pertama kalinya dalam 17 bulan.

Meski demikian, inflasi diperkirakan masih berada dalam kisaran toleransi bank sentral sebesar 2%–6% sepanjang tahun fiskal ini.

Di sisi lain, RBI menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi India menjadi 6,7% pada tahun fiskal berjalan, sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 6,6%.

Malhotra menilai permintaan domestik masih cukup kuat. Namun, ia mengingatkan bahwa lemahnya musim hujan, ketidakpastian perdagangan global, serta risiko geopolitik tetap menjadi tantangan bagi prospek pertumbuhan ekonomi India.

Mata Uang Asia Cenderung Stabil, Dolar Taiwan dan Won Korea Selatan Pimpin Penguatan

Rabu, 5 Agustus 2026 09:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/mata-uang-asia-cenderung-stabil-dolar-taiwan-dan-won-korea-selatan-pimpin-penguatan>

KONTAN.CO.ID - Pergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung stabil pada perdagangan Rabu (5/8/2026).

Di antara mata uang utama kawasan, dolar Taiwan dan won Korea Selatan mencatat penguatan terbesar terhadap greenback.

Mengutip data Reuters hingga pukul 02.04 GMT, dolar Taiwan menguat 0,37% menjadi 32,326 per dolar AS, menjadikannya mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan pada perdagangan hari itu.

Di posisi berikutnya, won Korea Selatan terapresiasi 0,27% ke level 1.425,20 per dolar AS, sementara rupiah Indonesia menguat 0,25% menjadi 17.970 per dolar AS.

Penguatan juga terjadi pada yen Jepang yang naik 0,05%, yuan China 0,05%, peso Filipina 0,05%, baht Thailand 0,06%, serta dolar Singapura 0,02% terhadap dolar AS.

Sebaliknya, ringgit Malaysia menjadi satu-satunya mata uang utama Asia yang melemah pada perdagangan pagi ini, turun 0,10% ke level 4,089 per dolar AS.

Secara year to date (YTD) hingga awal Agustus 2026, kinerja mata uang Asia masih beragam.

Yuan China menjadi mata uang dengan apresiasi terbesar terhadap dolar AS, menguat 3,56% dibandingkan posisi akhir 2025.

Won Korea Selatan juga masih mencatat kenaikan 1,00%, disusul dolar Singapura yang menguat 0,30%.

Di sisi lain, sejumlah mata uang masih mengalami pelemahan sejak awal tahun. Rupiah menjadi yang paling tertekan dengan depresiasi 7,23% dibandingkan posisi akhir 2025.

Selain rupiah, baht Thailand telah melemah 5,30%, rupee India 5,77%, peso Filipina 3,51%, dolar Taiwan 2,75%, ringgit Malaysia 0,81%, dan yen Jepang 0,63% terhadap dolar AS.

Relasi Memburuk, Brasil Turunkan Hubungan Bilateral dengan Argentina, Ada Apa?

Rabu, 5 Agustus 2026 08:04 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Khomarul Hidayat

<https://internasional.kontan.co.id/news/relasi-memburuk-brasil-turunkan-hubungan-bilateral-dengan-argentina-ada-apa>

KONTAN.CO.ID - SAO PAULO. Hubungan Brasil dengan Argentina memburuk. Ini setelah Presiden Argentina Javier Milei kembali menghina Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Brasil telah memberi tahu duta besar Argentina bahwa hubungan bilateral diturunkan tingkatnya menjadi setingkat chargé d'affaires (kuasa usaha). Demikian diungkap seorang sumber di pemerintah Brasil kepada Reuters pada Selasa (4/8/2026).

Duta Besar Brasil untuk Argentina tidak akan kembali ke Buenos Aires setelah Presiden Argentina Javier Milei kembali mengkritik mitranya, Luiz Inacio Lula da Silva, kata sumber tersebut, membenarkan laporan sebelumnya di media Brasil dan Argentina.

Kementerian Luar Negeri Argentina tidak segera menanggapi permintaan komentar soal ini.

“Brasil telah memberi tahu Argentina bahwa hubungannya akan ditangani di tingkat kuasa usaha setelah Presiden Argentina Javier Milei kembali menghina Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva,” kata sumber pemerintah Brasil pada hari Selasa.

Duta Besar Brasil untuk Argentina Julio Bitelli, tidak akan kembali ke Buenos Aires, setelah Milei menyebut Lula dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Argentina LN+ sebagai mantan narapidana, pencuri, dan korup.

Keputusan baru ini menegaskan memburuknya hubungan antara dua ekonomi terbesar di Amerika Latin, yang presidennya belum mengadakan pertemuan bilateral resmi sejak Milei menjabat.

Bitelli telah dipanggil kembali dari Buenos Aires akhir bulan lalu setelah Milei mengkritik Lula saat tampil bersama kandidat presiden oposisi Flavio Bolsonaro pada peluncuran resmi kampanyenya untuk menggulingkan petahana, yang telah memimpin jajak pendapat menjelang pemilihan Oktober.

Duta Besar Argentina di Brasilia, Daniel Raimondi, telah diberitahu tentang keputusan untuk menurunkan hubungan diplomatik, kata sumber tersebut.

Pengangguran Selandia Baru Naik ke Level Tertinggi dalam Satu Dekade

Rabu, 5 Agustus 2026 06:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pengangguran-selandia-baru-naik-ke-level-tertinggi-dalam-satu-dekade>

KONTAN.CO.ID - Tingkat pengangguran Selandia Baru naik ke level tertinggi dalam hampir satu dekade pada kuartal II-2026. Kondisi ini menunjukkan pasar tenaga kerja mulai melonggar sehingga berpotensi membatasi laju kenaikan suku bunga bank sentral di tengah inflasi yang masih tinggi.

Mengutip Reuters, Rabu (5/8/2026), data Statistics New Zealand menunjukkan tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,6% pada kuartal II-2026, dari 5,4% pada kuartal sebelumnya.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak akhir 2015 sekaligus melampaui perkiraan pasar sebesar 5,4%.

Kenaikan pengangguran terjadi karena lonjakan jumlah masyarakat yang mencari pekerjaan lebih besar dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja.

Meski demikian, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) sebelumnya telah mengisyaratkan masih diperlukan kenaikan suku bunga untuk mengurangi stimulus ekonomi dan menekan inflasi. Pasar pun masih memperkirakan kenaikan suku bunga pada pertemuan September mendatang.

Namun, besarnya kapasitas tenaga kerja yang belum terserap dinilai membuat tekanan kenaikan upah tetap terbatas sehingga mengurangi risiko inflasi yang berasal dari dalam negeri.

Senior APAC Economist Capital Economics Abhijit Surya menilai, data ketenagakerjaan terbaru mendukung pendekatan bertahap RBNZ dalam menormalisasi kebijakan moneter.

"Survei angkatan kerja kuartal Juni memperkuat pendekatan bertahap RBNZ dalam menarik stimulus kebijakan. Karena itu, kami tetap memperkirakan bank sentral baru akan kembali menaikkan suku bunga pada Oktober, meskipun pasar masih mengantisipasi kenaikan 25 basis poin pada September," ujarnya.

Pada Juli lalu, RBNZ menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 2,5% sebagai upaya meredam tekanan inflasi yang dipicu, antara lain, kenaikan harga minyak dunia.

Inflasi tahunan Selandia Baru tercatat mencapai 4,1% pada kuartal II-2026, tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir dan berada di atas target bank sentral sebesar 1%-3%.

Pejabat RBNZ juga telah menegaskan bahwa suku bunga masih berada di bawah level netral yang diperkirakan berada pada kisaran 3,0%-3,25%, sehingga ruang pengetatan kebijakan moneter masih terbuka.

Saat ini, pelaku pasar memperkirakan peluang sekitar 90% bagi RBNZ untuk menaikkan suku bunga menjadi 2,75% pada pertemuan 2 September, dengan suku bunga diproyeksikan mencapai puncak sekitar 3,5% pada pertengahan 2027.

Di pasar keuangan, dolar Selandia Baru (kiwi) melemah sekitar 0,2% menjadi US\$ 0,5879 setelah rilis data tersebut, sementara tingkat swap obligasi tenor dua tahun turun 6 basis poin menjadi 3,6351%.

Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja justru lebih baik dari perkiraan. Jumlah pekerja meningkat 0,5% pada kuartal II, tetapi kenaikan tersebut diimbangi oleh lonjakan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 70,7%, tertinggi dalam lebih dari satu tahun.

Data juga menunjukkan tingkat underutilisation yang mengukur jumlah penganggur dan pekerja yang ingin menambah jam kerja naik menjadi 13,8% dari 12,9% pada kuartal sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan upah tahunan tetap tertahan di level 2,0%, sedangkan di sektor swasta hanya naik tipis menjadi 2,1%. Kedua angka tersebut masih berada jauh di bawah laju inflasi, menandakan tekanan upah belum menjadi sumber utama kenaikan harga di Selandia Baru.

PMI Jasa Jepang Melambat pada Juli, Tekanan Biaya Kian Tinggi

Rabu, 05 Agustus 2026 07:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pmi-jasa-jepang-melambat-pada-juli-tekanan-biaya-kian-tinggi>

KONTAN.CO.ID - Aktivitas sektor jasa Jepang masih mencatatkan ekspansi pada Juli 2026, tetapi lajunya melambat seiring melemahnya permintaan dan tingginya tekanan biaya. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha menaikkan harga jual pada laju tercepat dalam lebih dari satu dekade.

Mengutip Reuters, Rabu (5/8/2026), survei S&P Global menunjukkan Japan Services Purchasing Managers' Index (PMI) final turun menjadi 51,2 pada Juli dari 52,2 pada Juni. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan estimasi awal (flash) sebesar 51,9.

Meski masih berada di atas level 50 yang menandakan ekspansi, capaian tersebut menjadi bulan kedua berturut-turut sektor jasa tumbuh dengan laju yang jauh lebih lambat dibandingkan awal 2026.

Pertumbuhan bisnis baru (new business) juga melambat ke level terendah dalam dua tahun. Sementara itu, permintaan dari luar negeri terhadap jasa Jepang turun untuk bulan keempat berturut-turut, meski laju penurunannya lebih ringan dibandingkan Mei dan Juni.

Di sisi lain, tekanan biaya tetap tinggi. Harga input meningkat pada laju yang hanya sedikit lebih rendah dibandingkan rekor tertinggi dalam empat tahun yang tercatat pada Juni. Pelaku usaha menyebut inflasi yang dipicu konflik di Timur Tengah, kenaikan biaya tenaga kerja, serta pelemahan nilai tukar yen menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan biaya operasional.

Untuk menjaga margin keuntungan, perusahaan jasa menaikkan harga jual dengan laju tercepat sejak April 2014, ketika kenaikan pajak konsumsi memicu lonjakan harga di berbagai sektor ritel.

Volume pekerjaan yang belum terselesaikan (backlog of work) juga masih meningkat, namun menjadi yang paling lambat dalam 17 bulan terakhir. Hal itu mengindikasikan tekanan kapasitas mulai mereda.

Selain itu, pertumbuhan lapangan kerja dan tingkat kepercayaan pelaku usaha turut melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, Composite PMI Jepang, yang menggabungkan sektor manufaktur dan jasa, relatif stabil di level 52,7 pada Juli, sedikit lebih rendah dari 52,8 pada Juni.

Stabilnya indeks komposit ditopang oleh lonjakan output manufaktur yang mencapai level tertinggi sejak awal 2014, sehingga mampu mengimbangi perlambatan di sektor jasa.

Associate Director Economics S&P Global Market Intelligence Annabel Fiddes mengatakan, tekanan inflasi biaya masih berlangsung di sektor manufaktur maupun jasa sehingga perusahaan terus terdorong menaikkan harga jual untuk melindungi margin keuntungan.

"Dengan laju inflasi biaya yang masih tinggi di sektor manufaktur maupun jasa, perusahaan menghadapi tekanan untuk terus menaikkan harga demi menjaga margin," ujar Fiddes.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi mendorong inflasi resmi Jepang kembali meningkat dan memperbesar tekanan terhadap Bank of Japan (BoJ) untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya dalam beberapa bulan mendatang.

Purbaya Tambah Likuiditas SAL ke Himbara Rp70 T Hingga Juli 2027

Rabu, 5 Agustus 2026 17:22

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117431/purbaya-tambah-likuiditas-sal-ke-himbara-rp70-t-hingga-juli-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan kembali menambah penempatan likuiditas yang bersumber dari dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sebanyak Rp70 triliun secara bertahap. SAL yang semula ditempatkan hingga Desember 2026 diperpanjang hingga Juli 2027.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan dana SAL yang mengendap di Himbara Per 29 Juni 2026 tercatat total sebanyak Rp381 triliun. Jatuh tempo penempatan dana SAL sebesar Rp281 triliun yang semula Desember 2026 menjadi Juli 2027.

Selebihnya, dana sebesar Rp100 triliun berstatus sebagai dana siaga alias bisa ditarik kapan saja. Dengan demikian, total SAL di perbankan akan sebanyak Rp451 triliun.

"Rp200 triliun sampai dengan Juli tahun depan. Supaya mereka leluasa menyalurkan kredit dan uang itu dan yang Rp100 triliun sampai akhir tahun. Saya juga bilang ke mereka, siang ini saya inject Rp40 triliun tambahan. Minggu depan saya tambah lagi Rp30 triliun. Jadi kira-kira total di sistem perbankan orang perintah hampir Rp400 triliun," jelas Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menjelaskan perbankan sempat ragu ihwal penarikan dana SAL pada Desember 2026. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit. Hal itu terungkap ketika Purbaya bertemu dengan para pimpinan Himbara hari ini, Rabu (5/8/2026) siang.

"Kayaknya bank itu ragu, uang saya yang SAL itu akan diambil atau nggak sampai akhir tahun. Sehingga mempengaruhi behavior mereka melakukan penyaluran kredit. Jadi saya bilang ke mereka, saya akan berpanjang," tuturnya.

Purbaya menyebut alasan pemerintah memperpanjang dana SAL di perbankan untuk menambah likuiditas di sistem perbankan hingga pertumbuhan ekonomi yang berjalan lebih cepat. Kala itu, Purbaya sempat enggan memperpanjang dana SAL di perbankan.

"Pada waktu itu kan sementara. Tapi kan kita lihat reaksi di sistem perekonomian seperti apa. Ketika kita lihat emang dampaknya serius ya kita bantu sedikit sistem perbankan," ujarnya.

Ihwal tambahan dana Rp70 triliun di perbankan, Purbaya menyebut Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mendapatkan Rp10 triliun. Sementara sisanya seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan mendapatkan porsi yang sama dengan total Rp50 triliun.

“Share-nya sama seperti sebelumnya. Jadi Rp70 dalam seminggu ini. BTN sama BSI [Rp10 triliun], yang tiga kayaknya, yang tiga besar sama share-nya. Nanti yang dua itu lebih kecil sedikit,” imbuhnya.

Ketimpangan Kemiskinan di Desa dan Kota Makin Melebar

Rabu, 5 Agustus 2026 16:54 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117349/ketimpangan-kemiskinan-di-desan-dan-kota-makin-melebar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ketimpangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan makin melebar pada Maret 2026. tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,67% dari total penduduk Indonesia, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 6,34%.

"Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan, namun meningkat di wilayah perdesaan," tercantum dalam dokumen laporan BPS, Rabu (5/8/2026).

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan justru menjauh.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat juga menurun di wilayah perkotaan, tetapi meningkat di perdesaan. Kondisi ini menunjukkan distribusi pengeluaran antar penduduk miskin yang semakin merata di perkotaan, tetapi semakin timpang di perdesaan.

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21%.

Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 12,02 juta orang atau 52,42% dari total penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 870 ribu orang atau sekitar 3,79% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

Secara umum, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07%, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25%. Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang atau menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.

BPS menyampaikan garis kemiskinan nasional yang tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Angka ini naik 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Namun demikian, BPS menegaskan bahwa garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab, pada umumnya pengeluaran dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras.

Pada Maret 2026, rata-rata 1 rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866. Angka ini berbeda

antar provinsi, bergantung pada tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di setiap provinsi.

BPS: Ketimpangan Ekonomi Warga di Kota dan Desa Kompak Naik

Rabu, 5 Agustus 2026 14:17 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117382/bps-ketimpangan-ekonomi-warga-di-kota-dan-desa-kompak-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan dan di perdesaan sama-sama meningkat pada periode Maret 2026. Dalam hal ini, ketimpangan ekonomi di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini (Gini Ratio) mengalami kenaikan pada Maret 2026. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud melaporkan rasio gini tercatat 0,368, naik dibandingkan 0,363 pada September 2025.

Kenaikan tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat melebar dalam enam bulan terakhir. "Pada bulan Maret 2026, ketimpangan di Indonesia tercatat 0,368 atau naik 0,005 poin dari September 2025," kata Edy dalam Konferensi Pers, Rabu (5/8/2026).

Berdasarkan wilayah, ketimpangan di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2026, rasio gini di perkotaan mencapai 0,387, naik dari 0,383 pada September 2025. Sementara di perdesaan, rasio gini meningkat tipis menjadi 0,296 dari 0,295 pada periode yang sama.

BPS menjelaskan, nilai rasio gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang semakin besar.

Edy memaparkan, rasio gini nasional sempat berada di level 0,384 pada Maret 2021, kemudian turun menjadi 0,381 pada September 2021. Angka tersebut kembali naik menjadi 0,384 pada Maret 2022 sebelum turun ke 0,381 pada September 2022.

Pada Maret 2023, rasio gini meningkat menjadi 0,388, yang merupakan level tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Setelah itu, ketimpangan kembali menurun menjadi 0,379 pada Maret 2024 dan sedikit naik menjadi 0,381 pada September 2024.

Selanjutnya, rasio gini terus membaik hingga mencapai 0,375 pada Maret 2025 dan 0,363 pada September 2025, sebelum kembali meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026.

Jumlah Penduduk Miskin RI 22,93 Juta Orang, Berkurang 430 Ribu

Rabu, 5 Agustus 2026 13:15 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117372/jumlah-penduduk-miskin-ri-22-93-juta-orang-berkurang-430-ribu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 22,93 juta orang pada Maret 2026. Angka tersebut turun 430 ribu orang apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2026.

Dengan penurunan ini, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,07% terhadap keseluruhan penduduk RI, turun sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan bulan September 2025.

M. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS menyebut bahwa disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2026 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,34% atau mengalami penurunan sebesar 0,26% jika dibandingkan dengan bulan September 2025.

“Sementara tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67% atau mengalami penurunan 0,05% poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025,” katanya dalam rilis BPS, Rabu (5/8/2026).

Edy juga menyebut bahwa indeks keparahan kemiskinan di bulan Maret 2026 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan September 2025 yakni di angka 0,291. Meski demikian, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan ke level 0,414 sementara indeks keparahan kemiskinan di perkotaan turun ke angka 0,209.

BPS juga mencatat, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu sebanyak 12,02 juta atau sekitar 52,42% dari keseluruhan penduduk miskin yang ada di Indonesia.

Sementara itu jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di pulau Kalimantan yaitu sekitar 870 ribu orang atau sebesar 3,79% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

“Jika dibandingkan dengan September 2025 penurunan tingkat kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia, penurunan paling dalam terjadi di pulau Jawa yaitu turun sebesar 0,21% poin,” kata Edy.

Pada bulan Maret 2026 ketimpangan di Indonesia tercatat sebesar 0,368 atau naik sebesar 0,005 poin dari September 2025. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Kemudian juga ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 0,387 lebih tinggi 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2025.

Sementara itu ketimpangan di perdesaan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,296 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025.

Sebagai informasi BPS mengklasifikasikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, sebuah garis yang membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin.

Dalam klasifikasi BPS, batas garis kemiskinan pada bulan Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dari September 2025.

Garis kemiskinan perkotaan ditetapkan sebesar Rp692.906 nilai ini juga lebih tinggi dari perdesaan yang sebesar Rp635.172. Garis kemiskinan perkotaan pada bulan Maret 2026 naik sebesar 4,50% dari September 2026, sementara garis kemiskinan perdesaan juga naik 4,08% pada periode yang sama.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan masih tertinggi, masih mencapai 74,70% lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan yang sebesar 25,30%.

Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun Jadi 7,2 Juta Orang

Rabu, 5 Agustus 2026 12:33 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117362/jumlah-pengangguran-di-indonesia-turun-jadi-7-2-juta-orang/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data ketenagakerjaan Indonesia edisi Mei 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan Februari 2026, pada Rabu (5/8/2026).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menyebut, pada Mei 2026 penduduk usia kerja mencapai 220,23 juta orang.

"Jumlah tersebut meningkat sebanyak 689 ribu orang jika dibandingkan Februari 2026," kata Edy.

Dari jumlah tersebut, Edy menambahkan bahwa sebanyak 155,41 juta orang masuk dalam angkatan kerja atau meningkat 497 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja tercatat 64,82 juta orang, naik 191 ribu orang.

Penyerapan tenaga kerja juga turut meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang atau bertambah 522 ribu orang dalam periode Februari–Mei 2026.

Sebaliknya, jumlah penganggur turun menjadi 7,22 juta orang, berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65% pada Mei 2026 dari 4,68% pada Februari 2026.

Dibandingkan beberapa tahun terakhir, tren TPT juga tercatat turun. Jika mengacu pada data BPS, pada Februari 2022, TPT masih berada di level 5,83%, kemudian turun menjadi 5,45% pada Februari 2023, 4,82% pada Februari 2024, 4,76% pada Februari 2025, hingga mencapai 4,65% pada Mei 2026.

Dari sisi jam kerja, mayoritas pekerja merupakan pekerja penuh sebanyak 98,98 juta orang, naik 391 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Jumlah pekerja paruh waktu mencapai 38,42 juta orang atau bertambah 72 ribu orang, sedangkan setengah penganggur meningkat 59 ribu orang menjadi 10,79 juta orang.

Partisipasi angkatan kerja juga mengalami sedikit peningkatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) nasional naik menjadi 70,57% pada Mei 2026 dari 70,56% pada Februari 2026, meski masih sedikit lebih rendah dibandingkan November 2025 yang sebesar 70,95%.

Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki tercatat naik dari 84,57% jadi 85,14%. Sebaliknya, TPAK perempuan justru turun dari 56,41% menjadi 55,84%.

Sementara dari sisi wilayah, tingkat pengangguran di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT di perkotaan tercatat sebesar 5,54%, sedangkan di perdesaan sebesar 3,15%. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mencapai 4,85% dan perempuan sedikit lebih rendah, 4,32%.

Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan pangsa 28,75% dari total penduduk bekerja.

Posisi berikutnya ditempati perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80%, industri pengolahan 13,53%, akomodasi dan makan minum 8%, serta konstruksi sebesar 6,09%.

Selama Februari hingga Mei 2026, penambahan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum yang bertambah sekitar 195 ribu orang.

Sektor transportasi dan penyimpanan bertambah sekitar 121 ribu orang, sedangkan aktivitas jasa lainnya meningkat sekitar 110 ribu orang. Di sisi lain, sektor perdagangan besar dan eceran mencatat penurunan tenaga kerja sekitar 128 ribu orang.

Dari sisi pendidikan, komposisi tenaga kerja juga ikut berubah. Sebanyak 52,46 juta pekerja atau 35,40% masih berpendidikan SD ke bawah.

Sementara, lulusan SMA mencapai 30,71 juta orang atau 20,72%, diikuti SMP sebanyak 26,05 juta orang atau 17,58%, SMK sebesar 19,44 juta orang atau 13,12%, Diploma IV hingga S3 sebanyak 15,93 juta orang atau 10,75%, serta Diploma I–III sebanyak 3,59 juta orang atau 2,42%.

Secara keseluruhan, sekitar 13,18% penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi atau Diploma ke atas. Selama Februari hingga Mei 2026, proporsi pekerja berpendidikan SMA, SMK, Diploma, dan perguruan tinggi juga ikut meningkat, sebaliknya proporsi pekerja berpendidikan SD ke bawah dan SMP mengalami penurunan.

Rupiah Menguat, Tutup Perdagangan di Rp17.930/US\$

Rabu, 5 Augustus 2026 16:04 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117413/rupee-menguat-tutup-perdagangan-di-rp17-930-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah berhasil mempertahankan posisi penguatannya sepanjang perdagangan Rabu (5/8/2026), dan ditutup terapresiasi 0,52% ke Rp17.930/US\$.

Penguatan rupiah hari ini tertopang oleh data pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari ekspektasi pelaku pasar, meski angkanya tetap lebih lambat dari pertumbuhan kuartal sebelumnya.

Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 tercatat sebesar 5,29%, melampaui ekspektasi ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg dengan hasil median di 5,1%. Namun, capaian ini juga tetap lebih rendah dari kuartal I-2026, yang sempat menyentuh 5,61%.

Di samping itu, rupiah juga terapresiasi dengan meredanya tekanan eksternal dengan melandainya harga minyak mentah ke US\$79,97/barel, seiring prospek kesepakatan pembukaan Selat Hormuz kembali mengemuka.

Mata uang Asia menyambut prospek ini dengan menguat dan bertahan di zona hijau. Peso Filipina paling tajam 0,7%, disusul baht dan rupiah. Sementara, ringgit dan dolar Singapura bersama yuan relatif lebih terbatas.

Meski yen Jepang disebut-sebut akan mendapat sokongan dari Washington, tetapi pergerakannya belum berubah banyak.

Sementara pergerakan di pasar obligasi turut didorong oleh sentimen pasar yang positif setelah tersiar kabar bahwa Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Scott Bessent berencana menopang mata uang yen Jepang dengan membeli obligasi Jepang.

Di pasar obligasi domestik, sebagian besar tenor menengah dan panjang mengalami penurunan yield. Yield tenor 10 tahun turun 3,7 bps jadi 7,29%, tenor 5 tahun juga turun 1,7 bps ke 7,31%.

Namun, menurut sebagian analis dan ekonom penguatan rupiah hari ini diproyeksikan tak berlangsung lama, dan perlu diuji keberlanjutannya.

Laju ekspansi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih di tengah konsumsi rumah tangga yang mulai kehilangan momentum dan sektor ketenagakerjaan yang masih menghadapi tantangan kualitas menjadi faktor penahan penguatan rupiah pada kuartal III-2026.

Dari sisi eksternal, perhatian investor masih akan tertuju pada perkembangan geopolitik di Timur Tengah, dan arah kesepakatan negosiasi antara AS dan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tak Merata, Didominasi Pulau Jawa

Rabu, 5 Agustus 2026 11:55 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117357/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-tak-merata-didominasi-pulau-jawa/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tercatat sebesar 5,29%. Namun pertumbuhan ekonomi ini masih belum merata karena didominasi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dan Sumatera.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 secara spasial positif di seluruh wilayah. Kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi masih paling tinggi mencapai 56,47%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,50%,” ungkap Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pertumbuhan ekonomi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,10%. Pulau Kalimantan sebesar 4,1%. Pulau Sulawesi 5,53% dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,36%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Pulau Sulawesi berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Edy Mahmud menjelaskan sumber utama pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera berasal dari sektor perdagangan, pengolahan pertanian. Pertumbuhan tertinggi berasal dari Sumatera Utara dengan andil 1,17%.

“Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa berasal dari industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Dengan Penyumbang terbesar adalah DKI Jakarta yang memiliki andil 1,55%,” terang Edy Mahmud.

Sekadar informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% lebih tinggi dibanding proyeksi konsensus Bloomberg yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% secara tahunan (yoy) pada kuartal II 2026. Melambat dari 5,61% pada kuartal sebelumnya.

Adapun proyeksi Bloomberg Economics lebih optimistis, yakni 5,42% yoy. Namun, angka ini tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61% yang tercatat pada kuartal sebelumnya.

Ekonomi Q2-2026 Tumbuh 5,29%, Masih Ditopang Konsumsi

Rabu, 5 Agustus 2026 11:54 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117358/ekonomi-q2-2026-tumbuh-5-29-masih-ditopang-konsumsi>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi langsung. Dalam laporan tersebut, komponen belanja pemerintah mengalami pertumbuhan kinerja tertinggi, namun kontribusinya terhadap ekonomi masih minim.

M. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding ekonomi kuartal II 2025.

Ia menyebut dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32%, tumbuh 5,06% secara yoy. Disusul kemudian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%. Kontribusi total kedua komponen ini sebesar 82,68%.

Edy menyebut, komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan II-2026. Menurut BPS, belanja pemerintah mencatatkan kenaikan sebesar 15,97%

“Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya pada triwulan II-2026 ini konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni sebesar 2,67%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,06% dan konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,07%,” katanya.

Sementara itu Edy juga menyebut bahwa net export mencatatkan penurunan sebesar 0,78%.

Didorong Momen Hari Libur

Menurut Edy, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terjadi di kuartal II-2026 tersebut terutama didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan.

“Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%,” kata Edy

Selanjutnya, kenaikan pertumbuhan PMTB tercermin pada beberapa indikator investasi seperti subkomponen kendaraan yang tumbuh sebesar 26,03%, peralatan lainnya tumbuh sebesar 16,18%, serta peningkatan realisasi investasi di BKPM yang juga tumbuh 7,14%.

Konsumsi pemerintah tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 15,97% seiring dengan peningkatan realisasi belanja. Konsumsi pemerintah terutama ditopang oleh realisasi belanja pegawai yang tumbuh menguat sejalan dengan pembayaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS.

“Selain itu konsumsi pemerintah juga tumbuh didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat juga salah satunya berupa program makan bergizi gratis,” kata Edy.

Stimulus Fiskal Masih Jadi Penolong Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga

Rabu, 5 Agustus 2026 16:04 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Khomarul Hidayat

<https://nasional.kontan.co.id/news/stimulus-fiskal-masih-jadi-penolong-pertumbuhan-konsumsi-rumah-tangga>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengandalkan stimulus fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan permintaan domestik di tengah tingginya ketidakpastian global.

Hal tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada kuartal II-2026, yakni 15,97% secara tahunan (year on year/yoy).

Sebaliknya, konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 5,06% yoy, lebih rendah dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar 5,52%.

BPS mencatat lonjakan konsumsi pemerintah didorong oleh pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS, serta peningkatan belanja barang dan jasa, terutama untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian, dukungan fiskal memang diperlukan untuk menjaga konsumsi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah yang paling rentan mengalami penurunan daya beli.

Menurut Faisal, strategi pertumbuhan yang ditopang belanja pemerintah atau fiscal driven masih efektif dalam jangka pendek karena mampu menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi ketika sektor rumah tangga maupun dunia usaha belum sepenuhnya pulih.

Namun, ia mengingatkan strategi tersebut memiliki keterbatasan. Ketergantungan terhadap belanja pemerintah tidak dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena ruang fiskal pemerintah kemungkinan akan semakin terbatas.

"Dalam jangka pendek strategi fiscal driven tersebut memang akan efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi dalam jangka panjang akan sangat terbatas jika tidak ada perubahan kondisi pasar tenaga kerja dan juga inflasi," tutur Faisal kepada Kontan, Rabu (5/8/2026).

Faisal bilang, agar konsumsi rumah tangga dapat menjadi mesin pertumbuhan yang lebih kuat, perbaikannya harus ditopang oleh fundamental ekonomi, terutama membaiknya kondisi pasar tenaga kerja.

Faisal mengatakan, peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh sektor swasta, kenaikan pendapatan riil masyarakat, serta inflasi yang tetap terkendali menjadi faktor utama untuk memperkuat daya beli masyarakat tanpa harus terus bergantung pada stimulus pemerintah.

"Ini menjadi kunci untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ke depannya terutama yang bersumber dari konsumsi," jelasnya.

Faisal menyebut, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan peran fiskal. Di satu sisi, APBN dibutuhkan sebagai motor penggerak pertumbuhan melalui berbagai stimulus. Namun di sisi

lain, pemerintah juga harus menjaga ruang fiskal agar tetap mampu menjadi shock absorber ketika terjadi gejolak ekonomi.

Ia memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi akan mulai melambat pada kuartal III dan IV 2026 seiring semakin terbatasnya ruang fiskal, sementara tekanan eksternal seperti perang dagang, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi China masih membayangi perekonomian.

Prediksi Faisal, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,26% pada 2026, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,4%. Pertumbuhan tersebut diperkirakan tetap didorong permintaan domestik yang mendapat dukungan dari kebijakan fiskal ekspansif, termasuk kebijakan mempertahankan subsidi energi untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Faisal menambahkan, apabila reformasi struktural mampu mendorong investasi swasta dan memperkuat pasar tenaga kerja, maka ketergantungan terhadap stimulus fiskal dapat berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

“Pertumbuhan dapat mendekati batas atas kisaran perkiraan kami jika hambatan eksternal mereda dan reformasi struktural mendapatkan daya tarik yang lebih kuat, memungkinkan pertumbuhan yang dipimpin fiskal untuk menarik investasi swasta,” jelasnya.

Sebaliknya, risiko penurunan tetap condong ke arah bawah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat turun di bawah batas bawah kisaran perkiraan jika pemerintah tidak mampu menyeimbangkan agenda pro-pertumbuhan dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas, yang berpotensi mendorong Bank Indonesia untuk mengadopsi sikap kebijakan yang lebih agresif melalui kenaikan suku bunga BI lebih lanjut.

Sebagai informasi, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29%, lebih rendah dari kuartal I 2026 sebesar 5,61%.

Defisit Neraca Perdagangan Diperkirakan Berlanjut, Ini Alasannya

Rabu, 5 Agustus 2026 15:28 WIB

Reporter: Vendy Yhulia Susanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-neraca-perdagangan-diperkirakan-berlanjut-ini-alasannya>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Defisit neraca perdagangan diperkirakan kembali berlanjut karena harga minyak mentah global yang sempat melonjak.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit perdagangan Indonesia menyempit menjadi US\$ 450 juta pada Juni 2026 (dibandingkan US\$ 1,6 miliar pada Mei 2026), seiring ekspor tumbuh 9,7% secara month on month (MoM) menjadi US\$ 25,5 miliar, melampaui kenaikan impor sebesar 4,4% MoM menjadi US\$ 25,9 miliar.

Analisis Mirae Asset Sekuritas, Novani Karina Saputri melihat penyempitan defisit neraca perdagangan mencerminkan pemulihan ekspor secara bulanan, bukan penguatan struktural neraca eksternal. Karena posisi perdagangan berbalik tajam dari surplus US\$ 4,1 miliar pada Juni 2025, dengan pertumbuhan impor sebesar 34,3% secara year on year (yoy) jauh melampaui pertumbuhan ekspor sebesar 9,0% yoy.

“Ke depan, risiko pelebaran defisit perdagangan kembali meningkat setelah harga minyak mentah Brent naik dari sekitar US\$ 72,0 per barel pada awal Juli dan sempat melampaui US\$ 90,0 per barel menjelang

akhir bulan, yang berpotensi meningkatkan tagihan impor energi Indonesia dengan jeda waktu,” ujar Novani dalam risetnya pada Rabu (5/8/2026).

Meskipun ekspor produk berbasis nikel, besi dan baja, serta batu bara diperkirakan tetap menjadi penopang, Novani menilai penerimaan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dapat tertahan oleh penurunan harga referensinya. Jika ekspor kembali turun ke bawah US\$ 25,0 miliar, defisit perdagangan kemungkinan akan melebar karena impor dapat meningkat pada Juli di tengah kenaikan harga minyak.

“Kondisi ini dapat menambah tekanan terhadap rupiah, transaksi berjalan, dan cadangan devisa,” ucap Novani.

Seperti diketahui pada Juni 2026 impor mencapai rekor bulanan tertinggi sebesar US\$ 25,9 miliar. Sementara impor nonmigas juga meningkat ke level tertinggi sepanjang sejarah sebesar US\$ 21,4 miliar, terutama didorong oleh bahan baku yang mencakup hampir 72,0% dari total impor. Peningkatan impor mesin mekanis, peralatan listrik, plastik, bahan kimia, dan produk mineral mencerminkan penguatan permintaan terhadap input untuk mendukung produksi, investasi, dan ekspansi industri.

“Meskipun hal ini dapat mengindikasikan aktivitas ekonomi yang lebih kuat, dampak positifnya akan bergantung pada kemampuan input impor tersebut dalam meningkatkan produksi domestik dan kapasitas ekspor,” jelas Novani.

Sementara, surplus nonmigas meningkat menjadi US\$ 3,0 miliar pada Juni 2026 (dibandingkan US\$ 2,2 miliar pada Mei 2026), ditopang oleh ekspor lemak dan minyak, bahan bakar mineral, produk nikel, serta besi dan baja. Namun, perbaikan tersebut masih belum cukup untuk mengimbangi defisit migas sebesar US\$ 3,5 miliar, meskipun menyempit 7,1% secara month on month. Karena impor minyak mentah meningkat signifikan dari sisi volume dan nilai, sementara impor produk hasil minyak tetap tinggi.

“Kondisi ini menunjukkan ketergantungan struktural Indonesia terhadap pasokan energi eksternal, sehingga neraca perdagangan sangat terekspos terhadap pergerakan harga minyak global,” sebut Novani.

BPS Mencatat Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2026 Capai 5,29%

Rabu, 05 Agustus 2026 11:46 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bps-mencatat-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2026-capai-529>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 mencapai 5,29% year on year (yoy).

Pertumbuhan ini tercatat lebih rendah bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,61% yoy.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada periode tersebut mencapai Rp 6.552,1 triliun meningkat dari kuartal II 2025 sebesar Rp 5.947,5 triliun.

Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 3.576,2 triliun atau naik dari kuartal II 2025 sebesar 3.396,6 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 5,29% yoy,” tutur Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/8/2026).

Adapun pertumbuhan ekonomi secara kuartalan tumbuh 3,73% quarter to quarter (qtq) pada kuartal II 2026, sedangkan secara kumulatif mencapai 5,45% pada semester I 2026 atau cumulative to cumulative (ctc).

Kemiskinan di Jateng Turun, Ekonomi Tumbuh 5,71 Persen

Rabu, 5 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/kemiskinan-di-jateng-turun-ekonomi-tumbuh-571-persen/>

SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah terus menurun. Pada Maret 2026, jumlahnya tercatat 3,29 juta orang atau 9,21 persen dari total penduduk. Angka tersebut berkurang 59.390 orang dibandingkan September 2025, dan turun 81.250 orang dibandingkan Maret 2025.

Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan, secara persentase tingkat kemiskinan di Jawa Tengah juga menurun. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun 0,18 persen dibanding September 2025 yang tercatat 9,39 persen, dan berkurang 0,27 persen dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen.

Dia menjelaskan, untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan metodologi pemenuhan kebutuhan dasar atau basic need approach.

Metodologi tersebut mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan individu atau rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dari penghitungan tersebut diperoleh garis kemiskinan sebesar Rp596.676 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan rata-rata per rumah tangga miskin tercatat sebesar Rp2.571.674 per bulan.

“Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, pada Maret 2026 terdapat sebanyak 3,29 juta penduduk miskin di Jawa Tengah. Dibandingkan September 2025 jumlah penduduk miskin turun 59.390 orang dan dibandingkan Maret 2025 turun 81.250 orang,” tutur Ali, dalam jumpa pers daring, Rabu (5/8/2026).

Diterangkan, komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, komoditas yang memberikan kontribusi terbesar antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, roti, kue basah, tempe, mi instan, bawang merah, dan gula pasir. Sementara itu, komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar adalah perumahan.

Adapun di perdesaan, selain beras dan rokok kretek filter, komoditas yang memberi kontribusi besar terhadap garis kemiskinan meliputi telur ayam ras, daging ayam ras, kopi bubuk dan kopi instan, bawang merah, tempe, roti, tahu, serta gula pasir.

Ali menambahkan, BPS juga mencatat persentase penduduk miskin di perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 8,59 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 9,96 persen.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Tengah tercatat sebesar 1,515. Di perkotaan, indeks tersebut turun dari 1,532 menjadi 1,312, sedangkan di perdesaan naik dari 1,478 menjadi 1,758. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat turun dari 0,338 pada September 2025 menjadi 0,333 pada Maret 2026. Di perkotaan, indeks ini turun dari 0,364 menjadi 0,275, sedangkan di perdesaan naik dari 0,306 menjadi 0,402.

Pada kesempatan yang sama, BPS Jawa Tengah juga memublikasikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2026, yang mencapai 5,71 persen secara tahunan (year on year). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29 persen.

Sementara itu, dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 1,72 persen (quarter to quarter). Adapun secara kumulatif semester I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen (cumulative to cumulative).

“Kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50 persen atau sebesar 8,19 persen terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian terbesar keempat secara nasional,” pungkask Ali. (Pd/Ui, Diskomdigi Jateng)

Jateng Siapkan Dana Cadangan Rp1,2 Triliun untuk Pilgub 2029, Disisihkan Bertahap Mulai 2027

Rabu, 5 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-siapkan-dana-cadangan-rp12-triliun-untuk-pilgub-2029-disisihkan-bertahap-mulai-2027/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana cadangan sekitar Rp1,2 triliun, untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2029.

Dana tersebut akan disisihkan secara bertahap mulai 2027, agar pelaksanaannya tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di sela Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, dengan agenda penyampaian pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029, di Gedung Berlian, Semarang, Rabu (5/8/2026).

Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini, pembentukan dana cadangan merupakan langkah antisipatif agar pembiayaan Pilgub 2029 dapat dipersiapkan sejak dini, tanpa mengganggu program pembangunan maupun pelayanan publik.

“Tidak bisa kita anggarkan dalam waktu satu tahun, sehingga dana cadangan ini kita anggarkan tiap tahun,” katanya.

Wagub menjelaskan, besaran dana yang akan dialokasikan diperkirakan sekitar Rp400 miliar setiap tahun selama tiga tahun. Dengan skema tersebut, total dana cadangan yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Gus Yasin berharap, pembahasan Raperda tersebut segera rampung, sehingga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mulai membentuk dana cadangan.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih mengatakan, pembentukan dana cadangan merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan penyelenggaraan Pilgub 2029 dapat dibiayai secara terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah bukan sekadar agenda politik lima tahunan, tetapi proses konstitusional yang membutuhkan dukungan pendanaan memadai.

Karena itu, mekanisme dana cadangan memungkinkan pemerintah daerah menyisihkan anggaran secara bertahap, sehingga beban pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu tahun anggaran.

“Dengan mekanisme tersebut, tekanan terhadap APBD dapat dikurangi sehingga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga,” kata Hafidz.

Dia menambahkan, dana cadangan merupakan bentuk kesiapsiagaan fiskal menghadapi kebutuhan yang sudah dapat diproyeksikan sejak jauh hari, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan pembiayaan Pilgub secara bertahap, transparan, dan akuntabel.

Hafidz juga mengingatkan, pengelolaan dana cadangan harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, dana tersebut hanya boleh digunakan sesuai tujuan pembentukannya, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. (Humas Jateng)*ul

Bidik Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah, Pemprov Jateng Perkuat Pengembangan Geopark

Rabu, 5 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/bidik-pariwisata-berkelanjutan-dan-ekonomi-syariah-pemprov-jateng-perkuat-pengembangan-geopark/>

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen dalam mengembangkan kawasan geopark, sebagai salah satu strategi memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju tema pembangunan Jawa Tengah 2027, yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

Komitmen itu ditandai dengan sosialisasi pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Jawa Tengah, yang menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) terbaru. Tim lintas sektor tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dalam mengembangkan kawasan geopark secara terpadu.

Ketua Kelompok Kerja ESDM Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Nanang Aribowo mengatakan, Jawa Tengah saat ini telah memiliki enam kawasan geopark. Dua di antaranya telah berstatus UNESCO Global Geopark, satu berstatus Geopark Nasional, satu sedang menuju status nasional, dan dua lainnya masih dalam tahap pengusulan. Yakni, Gunungsewu Unesco Global Geopark, Kebumen Unesco Global Geopark, Geopark Nasional Dieng, Geoheritage Klaten, dan dua usulan Geoheritage Blora serta Geoheritage Brebes.

“Pengembangan geopark tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja karena menyangkut berbagai sektor. Ada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan sarana dan prasarana. Karena itu dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar seluruh program berjalan selaras,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi Pengembangan Geopark Jawa Tengah, di Cadang Dinas Pendidikan Wilayah II Surakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurut Nanang, keberadaan geopark bukan hanya menjaga kekayaan geologi dan lingkungan. Tetapi juga mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata, membuka lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, memperkuat sektor transportasi dan akomodasi, hingga menarik kedatangan peneliti sebagai bagian dari fungsi edukasi.

Pada 2026, tim pengembangan geopark melibatkan 14 OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Seluruh perangkat daerah tersebut akan menyusun program sesuai tugas masing-masing, agar mendukung pengembangan geopark secara terintegrasi.

“Penguatan geopark selaras dengan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 yang mengusung tema pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Konsep geopark sangat relevan, karena menggabungkan tiga pilar utama, yakni konservasi lingkungan, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pokja SDA Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Jawa Tengah, Wisnu Adi Setyo menilai, pembentukan tim koordinasi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, dalam menjadikan geopark sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

“Bagi kami sebagai unsur perencana, geopark merupakan strategi yang sangat baik. Pilar utamanya adalah konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Muara akhirnya adalah manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wisnu.

Dia menambahkan, Bappeda akan mengawal penyusunan program lintas OPD, agar seluruh intervensi pembangunan mengarah pada penguatan geopark. Berbagai kegiatan yang selama ini tersebar di sejumlah perangkat daerah akan dipetakan dalam satu matriks, agar saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Menurut Wisnu, keberadaan tim koordinasi menjadi kunci memperkuat sinergi lintas sektor, karena pengembangan geopark tidak mungkin berjalan optimal apabila setiap OPD bekerja sendiri-sendiri.

“Dengan adanya tim ini, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah diharapkan semakin kuat, sehingga seluruh program yang mendukung geopark dapat berjalan efektif, dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Wk/UI, Diskomdigi Jateng)

Sekolah Rakyat di Jateng Tampung 2.692 Siswa, Taj Yasin: Langkah Strategis Putus Rantai Kemiskinan

Rabu, 5 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/sekolah-rakyat-di-jateng-tampung-2-692-siswa-taj-yasin-langkah-strategis-putus-rantai-kemiskinan/>

SEMARANG – Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah menampung 2.692 siswa, yang tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan, sekaligus menekan angka putus sekolah.

“Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi,” kata Taj Yasin, saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI, dalam diskusi perencanaan dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).

Ditambahkan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat, karena menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita, yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin. Sehingga, sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil,” ujarnya.

Lebih jauh, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, Jawa Tengah telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.

“Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir,” beber wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027, terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.

Mereka tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Semarang. Selain itu, enam Sekolah Rakyat rintisan juga telah berjalan di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.

Imam menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota. Sementara itu, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan, karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.

Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, lanjut Imam, Kementerian Sosial memberikan kebijakan, agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar di jenjang SMP dan SMA.

Imam mengatakan, pengembangan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah akan terus dilakukan seiring kesiapan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, selain 10 Sekolah Rakyat permanen yang telah beroperasi, pemerintah juga tengah memproses pembangunan di sejumlah kabupaten lain agar jangkauan layanan pendidikan semakin luas.

Menurutnya, apabila seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah nantinya memiliki Sekolah Rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35 ribu siswa. Namun, jumlah itu masih belum sepenuhnya mencakup seluruh anak dari keluarga miskin maupun anak putus sekolah, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara bertahap. (Humas Jateng)*ul

TKD Dipangkas, Pemprov Jateng Pastikan Tak Ada Kendala Pembayaran Gaji ASN

Rabu, 5 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/tkd-dipangkas-pemprov-jateng-pastikan-tak-ada-kendala-pembayaran-gaji-asn/>

SEMARANG – Meskipun ada kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), masih aman dan tidak mengalami kendala.

“Kondisi untuk Pemprov alhamdulillah masih sanggup, masih siap,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, seusai mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang, Rabu (5/8/2026).

Meski demikian, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tengah membahas sinkronisasi kebutuhan belanja pegawai, menyusul banyaknya kabupaten/ kota yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 30 persen.

Menurutnya, seluruh gubernur, termasuk Jateng, telah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, agar dilakukan kajian terhadap kebutuhan anggaran belanja pegawai di daerah.

Selain menyampaikan usulan tersebut, Pemprov Jateng juga terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengajak pemerintah kabupaten/kota mencari solusi bersama, agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

“Kita juga berupaya meningkatkan PAD. Kita cari solusinya bareng-bareng. Harus kita upayakan, sebagai kepala daerah kita harus bertanggung jawab,” kata tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho menegaskan, pembayaran gaji ASN di lingkungan Pemprov Jateng hingga saat ini berjalan sesuai jadwal.

Dia menjelaskan, sumber pembiayaan gaji PNS berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN. Sementara, belanja pegawai Pemprov Jateng masih berada di kisaran 26 persen dari total APBD atau di bawah batas 30 persen, sebagaimana diatur dalam regulasi.

“Sampai dengan saat ini kondisi yang ada masih sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kebutuhan,” kata Dwianto.

Dia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Meski mayoritas daerah memiliki rasio belanja pegawai di atas 30 persen, pembayaran gaji ASN dan PPPK tetap dapat dipenuhi melalui APBD masing-masing.

Menurut Dwianto, tingginya belanja pegawai bukan semata persoalan fiskal, melainkan karena kebutuhan pelayanan dasar yang meningkat, terutama untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

“Mayoritas kebutuhan PNS maupun PPPK adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jadi memang mayoritas yang ada di provinsi maupun kabupaten/ kota, adalah untuk dua tenaga tersebut terkait pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.

Dwianto menerangkan, usulan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bukan terkait kekurangan anggaran pembayaran gaji saat ini, melainkan agar dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai secara lebih riil di seluruh daerah.

Menurutnya, data mengenai jumlah ASN, persebarannya, serta kebutuhan anggaran pembayaran setiap bulan, perlu disinkronkan dengan pemerintah pusat agar kebutuhan tenaga kerja dan dukungan pembiayaannya berjalan selaras.

“Yang menjadi usulan kita kepada pemerintah pusat adalah agar betul-betul sinkron dan linier, antara kebutuhan tenaga dan pembayarannya. Ini yang kita harapkan ke depannya,” ujarnya.

Dwianto menegaskan, hingga saat ini pembayaran gaji PNS dan PPPK di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun seluruh pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah, tetap berjalan normal.

“Sampai dengan saat ini di 35 kabupaten/ kota dan provinsi, pembayaran ini sudah sesuai dengan jadwal dan kebutuhannya cukup untuk membiayai,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Kajen Career Expo Sediakan 2.300 Lowongan Kerja

Rabu, 5 Agustus 2026

Penulis: Siti Kholidah – Kontributor Kab. Pekalongan, Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kajen-career-expo-sediakan-2-300-lowongan-kerja/>

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyediakan sekitar 2.300 lowongan kerja melalui Kajen Career Expo 2026 di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pekalongan. Lowongan yang ditawarkan berasal dari berbagai sektor usaha dan mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja, baik lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan penyelenggaraan Kajen Career Expo merupakan bagian dari pengembangan Rumah Siap Kerja Kajen yang mengintegrasikan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan penempatan tenaga kerja.

“Rumah Siap Kerja Kajen disiapkan agar ketenagakerjaan, pelatihan, hingga penempatan kerja dapat saling terhubung. Ketika masyarakat sudah memiliki keterampilan dan mendapatkan pekerjaan, maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Sukirman berharap seluruh peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pekalongan.

“Ini merupakan salah satu upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kabupaten Pekalongan sudah mengalami penurunan dari 3,29 persen menjadi 3,24 persen. Ke depan akan terus kita dorong agar semakin turun,” katanya.

Selain membuka peluang kerja di dalam daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan memperkuat pelatihan kerja serta menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas kesempatan bekerja, termasuk melalui program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“Kita akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui dinas terkait. Di tingkat pusat juga ada program seperti SMK Go Global yang memberikan pelatihan bagi lulusan SMA/SMK sebelum bekerja ke luar negeri. Mudah-mudahan program seperti itu juga dapat menjangkau daerah,” ungkapnya.

Sukirman juga menegaskan komitmen pemerintah bersama perusahaan agar proses rekrutmen berlangsung secara transparan, bebas pungutan, dan tanpa perantara.

Sementara itu, salah seorang pencari kerja asal Kajen, Nadia Nurlaili Umi Latifah, mengaku kegiatan tersebut membantunya memperoleh informasi berbagai lowongan pekerjaan, meskipun sebagian besar posisi yang tersedia belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Nadia berharap perusahaan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pencari kerja dari berbagai kelompok usia karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja maupun perubahan karier.

“Banyak lowongan yang memberikan batas usia maksimal 24, 25, atau 26 tahun. Padahal ada juga pencari kerja yang terkena layoff, berhenti bekerja, atau membutuhkan pekerjaan di usia 30 tahun ke atas maupun 40 tahun ke atas. Hal itu mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan,” pungkasnya.

BPS: Tingkat pengangguran terbuka di Jateng capai 4,30 persen

Rabu, 5 Agustus 2026 19:00 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/640821/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-di-jateng-capai-430-persen>

Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah hingga Mei 2026 tercatat sebesar 4,30 persen.

"Hal ini dapat diartikan dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat orang penganggur," kata Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said di Semarang, Rabu.

Tingkat pengangguran per Mei 2026, kata dia, naik 0,06 poin dibanding Februari 2026.

Sementara jumlah angkatan kerja per Mei 2026 mencapai 22,36 juta orang, naik 31,90 ribu orang dibanding Februari.

Ia menjelaskan jumlah laki-laki pengangguran di Jawa Tengah mencapai 4,70 persen.

Jumlah itu, lanjut dia, lebih tinggi dibanding perempuan pengangguran yang jumlahnya 3,74 persen dari jumlah angkatan kerja.

Sementara jika dilihat dari tempat tinggalnya, kata dia, pengangguran di perkotaan sebesar 5,08 persen lebih tinggi jika dibanding perdesaan yang mencapai 3,16 persen.

Ia mengungkapkan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMK mendominasi angka pengangguran di Jawa Tengah.

"Sebanyak 7,74 persen pengangguran di Jawa Tengah berlatar belakang pendidikan SMK," katanya.

BPS: Pertumbuhan ekonomi Jateng capai 5,71 persen pada triwulan II 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 15:57 WIB

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640799/bps-pertumbuhan-ekonomi-jateng-capai-571-persen-pada-triwulan-ii-2026>

Semarang, Jateng (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2026 mencapai 5,71 persen secara tahunan (yoy).

Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 15,80 persen.

Sementara, dari sisi pengeluaran, lanjut dia, kenaikan paling tinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa, termasuk ekspor antardaerah sebesar 15,85 persen.

"Lapangan usaha industri pengolahan mendominasi secara umum mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah dengan kontribusi 33,18 persen," katanya.

Adapun dari sisi pengeluaran, kata dia, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi sebesar 59,73 persen.

Sementara, jika semester I 2026 dibanding semester yang sama tahun sebelumnya, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80 persen.

Ia menjelaskan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang berkontribusi sebesar 17,25 persen.

Menurut dia, besaran produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah pada triwulan II 2026 sebesar Rp531.004,54 miliar (atas dasar harga berlaku).

Jawa Tengah, lanjut dia, sebagai penyumbang terbesar keempat terhadap perekonomian Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 14,50 persen.

Dinas PUPR Blora catat realisasi PAD Rp693 juta pada semester I 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 10:24 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/640763/dinas-pupr-blora-catat-realisasi-pad-rp693-juta-pada-semester-i-2026>

Blora (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blora mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga semester I 2026 mencapai sekitar Rp693 juta atau 55 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,25 miliar.

"Capaian tersebut menunjukkan penerimaan PAD masih berada pada jalur yang sesuai karena baru memasuki pertengahan tahun anggaran. Hingga Juni 2026 realisasi PAD telah mencapai Rp693 juta dari target Rp1,25 miliar," Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blora Nidzamudin Al Hudda di Blora, Rabu.

Ia menjelaskan PAD Dinas PUPR bersumber dari empat jenis layanan dan pemanfaatan aset daerah. Realisasi terbesar berasal dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp294 juta, disusul penyewaan tanah Rp205 juta, layanan sedot kakus Rp102 juta, serta penyewaan alat berat Rp91 juta.

Adapun target PAD Dinas PUPR pada 2026 terdiri atas retribusi PBG sebesar Rp700 juta, penyewaan tanah Rp250 juta, layanan sedot kakus Rp150 juta, dan penyewaan alat berat Rp150 juta.

Menurut dia retribusi PBG masih menjadi kontributor terbesar PAD di lingkungan Dinas PUPR. Sementara penerimaan dari penyewaan tanah berasal dari pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, antara lain untuk pemasangan jaringan fiber optik, papan reklame atau baliho, serta pemanfaatan aset lainnya.

Nidzamudin mengungkapkan sepanjang 2025 Dinas PUPR Kabupaten Blora berhasil menghimpun PAD sebesar Rp1,025 miliar yang juga berasal dari empat sumber utama tersebut, yakni retribusi PBG, layanan sedot kakus, penyewaan tanah, dan penyewaan alat berat.

Untuk mencapai target PAD hingga akhir tahun, pihaknya akan terus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.

"Kami akan terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD, terutama dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemanfaatan aset daerah melalui penyewaan tanah, layanan sedot kakus, serta penyewaan alat berat. Kami juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengurusan PBG dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia optimistis target PAD sebesar Rp1,25 miliar dapat tercapai hingga akhir 2026 seiring masih berlangsungnya aktivitas pembangunan yang memerlukan penerbitan PBG serta meningkatnya pemanfaatan aset daerah dan layanan Dinas PUPR pada semester kedua tahun ini.

Parlemen Singapura Sahkan Mosi Ekonomi Inklusif Usai Debat 9 Jam

Kamis, 6 Agustus 2026 11:10 WIB

Rthvika Suvarna

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117482/parlemen-singapura-sahkan-mosi-ekonomi-inklusif-usai-debat-9-jam/2>

Bloomberg, Parlemen Singapura mengesahkan mosi yang telah diamandemen terkait masa depan ekonomi negara tersebut. Mosi ini mendukung seruan untuk mewujudkan perekonomian yang lebih setara dan inklusif, yang memberikan ruang tumbuh bagi perusahaan lokal maupun perusahaan global, sebagaimana dilaporkan oleh CNA.

Mosi awal yang diajukan partai oposisi The Workers' Party (WP) menyerukan ekonomi yang siap menghadapi masa depan dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh warga Singapura, menurut media penyiaran lokal tersebut. Seluruh 12 anggota parlemen dari WP menolak teks final setelah perdebatan selama sembilan jam pada Rabu (5/8).

Pihak oposisi menolak salah satu dari empat amendemen yang diajukan oleh People's Action Party (PAP) yang berkuasa. Amendemen tersebut menyelaraskan mosi dengan Economic Strategy Review (ESR) pemerintah, alih-alih menjadikannya sebagai dokumen yang berdiri sendiri, CNA melaporkan. Anggota parlemen dari WP, Kenneth Tiong, mengatakan mosi yang diajukan partainya meminta parlemen berkomitmen pada sejumlah prinsip, sementara amendemen meminta parlemen berkomitmen pada serangkaian rencana operasional.

Menteri Perhubungan Jeffrey Siow, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Kedua dan wakil ketua ESR, mengatakan dirinya menyetujui beberapa usulan oposisi untuk mendukung perusahaan-perusahaan kecil dan startup. Namun, dia menolak pandangan bahwa model ekonomi Singapura perlu diubah secara mendasar.

Siow mengatakan dirinya tidak setuju dengan "karakterisasi" WP yang menggambarkan Singapura sebagai tempat "di mana perusahaan multinasional menciptakan kekayaan, dan ada semacam kesepakatan Faustian di mana UKM ditekan, dan warga Singapura menerima manfaatnya melalui redistribusi".

Genjot Industri AS, Trump Bakal Kenakan Tarif Polisilikon

Kamis, 6 Agustus 2026 10:50 WIB

Jennifer A. Dlouhy, Mark Chediak dan Ari Natter

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117478/genjot-industri-as-trump-bakal-kenakan-tarif-polisilikon/2>

Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersiap mengenakan tarif dan menetapkan harga minimum untuk impor polisilikon, sebagai upaya meningkatkan produksi material tersebut di

dalam negeri sekaligus mendorong industri semikonduktor dan panel surya AS yang menggunakan bahan tersebut.

Kebijakan perdagangan tersebut dapat diberlakukan paling cepat pada Kamis (6/8), menurut sejumlah sumber yang mengetahui persoalan itu. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas detail kebijakan sebelum diumumkan.

Dalam beberapa hari terakhir, pejabat pemerintahan membahas tarif setidaknya 15% dan sejumlah harga minimum impor yang tidak hanya akan berlaku untuk polisilikon mentah, tetapi juga berbagai peralatan pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan bahan tersebut, termasuk wafer, sel fotovoltaik, dan modul surya, menurut sumber tersebut. Analisis Roth Capital Partners memperkirakan tarif yang akan dikenakan berada di kisaran 25% hingga 35%.

Kombinasi tarif dan batas bawah harga tersebut menjadi upaya terbaru Trump untuk menggunakan pungutan perdagangan guna mendorong manufaktur AS dan mendiversifikasi rantai pasok yang saat ini didominasi China, khususnya dalam industri tenaga surya.

Hingga Rabu sore, pejabat pemerintahan masih menyelesaikan rincian proklamasi tersebut dan kebijakan itu masih dapat berubah.

Produsen panel surya domestik AS merosot setelah kabar tersebut mencuat. First Solar Inc, produsen panel surya terbesar di AS, anjlok hingga 7,3%. Sementara T1 Energy Inc, yang memiliki pabrik panel surya di Texas, turun hingga 13%.

Upaya tersebut dilakukan ketika Trump kembali membangun tembok tarif global setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif sebelumnya yang dikenakan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act.

Langkah yang tengah dibahas itu berasal dari penyelidikan Departemen Perdagangan yang diluncurkan tahun lalu berdasarkan Section 232 Trade Expansion Act. Penyelidikan tersebut mengkaji ketergantungan AS terhadap pasokan asing untuk polisilikon mentah maupun produk turunannya. Departemen Perdagangan juga memimpin penyelidikan Section 232 terhadap impor drone dan mesin industri, serta sejumlah produk lainnya.

Pejabat juga berencana menerapkan program kompensasi sementara yang dirancang untuk melindungi produsen domestik yang saat ini bergantung pada material impor dari dampak tarif tersebut, menurut sumber.

Keringanan akan dikaitkan dengan investasi modal yang dilakukan produsen tersebut di AS. Pemerintahan Trump menerapkan pendekatan serupa pada tarif produk farmasi untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi di AS, sekaligus menghindari lonjakan harga atau gangguan pasokan secara langsung.

Kristal silikon yang telah dimurnikan banyak digunakan dalam teknologi yang menopang kehidupan modern. Polisilikon dengan tingkat kemurnian untuk kebutuhan elektronik merupakan bahan dasar penting bagi cip yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk ponsel pintar, peralatan medis, senjata berpemandu presisi, dan sistem kendali penerbangan.

Sementara itu, polisilikon untuk panel surya memiliki tingkat kemurnian lebih rendah tetapi lebih umum digunakan. Material tersebut menjadi bahan dasar pertama dalam panel surya berbasis silikon kristalin yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintahan Trump tengah mencermati kemampuan produksi domestik di sektor-sektor yang penting bagi keamanan nasional dan ekonomi, tetapi menolak mendahului pernyataan presiden terkait kebijakan tersebut.

Trump selama ini meremehkan energi surya dan pemerintahannya telah mengambil sejumlah langkah untuk memperlambat proyek-proyek tersebut. Namun, pendukung tarif berpendapat bahwa pembatasan kapasitas produksi polisilikon untuk kebutuhan panel surya di dalam negeri dapat berdampak pada produksi polisilikon untuk kebutuhan elektronik AS.

Kapasitas produksi polisilikon AS saat ini terbatas. Perusahaan yang berpotensi memperoleh manfaat antara lain Hemlock Semiconductor milik Corning Inc dan Wacker Chemie AG, yang memiliki fasilitas operasi di Michigan dan Tennessee.

Selama penyelidikan Departemen Perdagangan, para pendukung industri polisilikon domestik mendorong pemerintah untuk memusatkan kebijakan pada material yang berasal dari atau memiliki keterkaitan dengan China.

Mereka berpendapat bahwa produksi polisilikon untuk panel surya di AS tidak menguntungkan pada harga saat ini tanpa dukungan perdagangan tertentu. Menurut mereka, tarif harus dikalibrasi agar cukup tinggi untuk mengimbangi kelebihan kapasitas serta harga jual di bawah biaya yang dilakukan China.

Pemerintah juga didorong menciptakan insentif untuk mendorong pembelian polisilikon buatan AS serta melarang penggunaan pasokan China dalam infrastruktur penting dan peralatan pertahanan.

Tahun lalu, Kongres secara bertahap menghapus kredit pajak yang sebelumnya memberikan insentif kepada pengembang yang memasang panel surya yang sebagian besar dibuat di AS dalam proyek energi terbarukan di seluruh negeri. Kebijakan tersebut sebelumnya mendorong peningkatan manufaktur peralatan surya domestik.

Langkah perdagangan terbaru ini menyusul lebih dari satu dekade penerapan tarif dan insentif yang silih berganti untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok panel surya, mulai dari pemrosesan polisilikon hingga perakitan modul akhir. Meskipun AS menemukan sel fotovoltaik pertama untuk mengubah sinar matahari menjadi energi beberapa dekade lalu, perusahaan China kini menjadi pemasok dominan panel surya dan komponen utamanya.

Upaya sebelumnya untuk membangun rantai pasok panel surya domestik AS kesulitan berkembang secara berkelanjutan. Sejumlah pengkritik memperingatkan bahwa tarif baru atas polisilikon kemungkinan tidak akan mengubah dinamika tersebut, tetapi justru dapat merugikan konsumen AS

Consumer Technology Association (CTA) mendesak pemerintah menerapkan strategi non-tarif, seperti perjanjian pasokan dengan negara lain dan pembentukan cadangan strategis domestik, untuk mengatasi risiko keamanan nasional akibat ketergantungan pada polisilikon asing.

Mengingat rantai pasok semikonduktor dan elektronik global yang sangat terintegrasi dan bergantung pada polisilikon, kelompok tersebut memperingatkan bahwa tarif akan sulit diterapkan.

“Setiap tindakan perbaikan harus mempertimbangkan penerapan yang praktis serta dampak berantai di seluruh rantai pasok,” kata CTA kepada Departemen Perdagangan dalam pengajuan tahun lalu. “Setelah polisilikon diproses menjadi wafer, dibuat menjadi semikonduktor, dan ditanamkan ke dalam perangkat, sumber asalnya menjadi mustahil untuk dideteksi. Tarif yang diterapkan pada barang jadi yang mengandung polisilikon olahan akan mengharuskan perusahaan melakukan pelacakan yang membebani dan secara teknis maupun komersial tidak memungkinkan.”

Kashkari The Fed Sebut Suku Bunga Harus Mulai Dinaikkan Bertahap

Kamis, 6 Agustus 2026 08:30 WIB

Catarina Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117459/kashkari-the-fed-sebut-suku-bunga-harus-mulai-dinaikkan-bertahap/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bank sentral AS perlu mulai menaikkan suku bunga secara bertahap saat ini untuk menekan inflasi yang masih terlalu tinggi.

“Sekarang adalah waktunya untuk mulai menaikannya secara perlahan seiring masuknya data-data ekonomi baru,” kata Kashkari dalam wawancara dengan CNBC, Rabu (5/8).

Kashkari merupakan satu dari tiga pejabat The Fed yang berbeda pendapat dalam keputusan mempertahankan suku bunga pada pertemuan kebijakan pekan lalu. Dia memilih suku bunga dinaikkan sebesar 25 basis poin.

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat, Kashkari memperingatkan bahwa pembuat kebijakan mungkin harus menaikkan suku bunga secara lebih agresif jika mereka terlalu lama menunggu hingga inflasi tinggi mengakar.

Kashkari mengatakan pada Rabu bahwa dirinya masih belum yakin langkah kebijakan apa yang tepat untuk diambil The Fed pada pertemuan berikutnya pada September. Dia menambahkan bahwa dirinya ingin melihat data terbaru mengenai kondisi perekonomian.

Ketika ditanya apakah The Fed dapat menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali hingga akhir tahun, dia menjawab, “Itu bukan sesuatu yang mustahil.”

“Jika inflasi terus bergerak mendatar atau bahkan memburuk dari posisi saat ini, saya pikir kita harus mulai menyesuaikan suku bunga secara bertahap untukurunkannya kembali,” tambahnya.

Bos The Fed Minneapolis itu mengatakan Gubernur The Fed Kevin Warsh, yang memimpin bank sentral tersebut sejak Mei, melanjutkan tradisi menghubungi koleganya sebelum pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC). Kashkari mengatakan Warsh memintanya mengambil keputusan yang menurutnya paling baik bagi perekonomian.

Dalam pertemuan pekan lalu, Warsh juga mengemukakan kemungkinan untuk mengurangi jumlah pertemuan kebijakan, menurut sejumlah orang yang mengetahui masalah tersebut. Kashkari mengatakan dirinya tidak yakin ada “angka ajaib” mengenai jumlah pertemuan yang paling tepat.

Sektor Jasa AS Tumbuh Stabil di Juli, Pesanan Baru Melesat

Kamis, 6 Agustus 2026 06:20 WIB

Julia Fanzeres

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117450/sektor-jasa-as-tumbuh-stabil-di-juli-pesanan-baru-melesat/2>

Bloomberg, Sektor jasa Amerika Serikat (AS) tumbuh dengan laju yang stabil pada Juli, didorong oleh peningkatan pesanan baru dan aktivitas bisnis.

Indeks jasa Institute for Supply Management (ISM) naik 0,1 poin menjadi 54,1, berdasarkan data yang dirilis pada Rabu (5/8). Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi.

Pertumbuhan pesanan baru meningkat dan indikator aktivitas bisnis mencapai level tertinggi dalam lima bulan, menunjukkan permintaan konsumen yang tetap kuat. Meski demikian, kenaikan biaya jasa dan bahan baku masih membebani perusahaan.

Indeks harga yang dibayarkan ISM melonjak menjadi 70,3 pada Juli setelah runtuhnya kesepakatan sementara antara AS dan Iran mendorong harga minyak dan bensin naik.

Sejumlah perusahaan kemungkinan memilih menunda perekrutan karena biaya yang terus tinggi menekan laba dan konsumen. Indikator ketenagakerjaan ISM menunjukkan kontraksi jumlah tenaga kerja paling tajam sejak Maret.

“Dampak tarif dan konflik di Timur Tengah masih disebut oleh para responden, tetapi jauh lebih jarang dibandingkan laporan-laporan sebelumnya,” kata Ketua Komite Survei Bisnis Jasa ISM Steve Miller dalam sebuah pernyataan. “Piala Dunia kembali disebut dalam komentar terkait peningkatan aktivitas bisnis dan pesanan baru. Secara keseluruhan, ekonomi sektor jasa AS masih menunjukkan ketahanan.”

Sebanyak 13 industri jasa melaporkan pertumbuhan, termasuk perdagangan ritel, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Empat sektor mengalami kontraksi.

Komentar Sejumlah Industri

- “Penjualan terus menurun meskipun diskon ditingkatkan. Tekanan biaya meningkat dari segala sisi.” — Konstruksi
- “Bisnis mulai meningkat, terutama di perusahaan-perusahaan kecil. Semoga tren ini terus membaik.” — Manajemen Perusahaan & Jasa Pendukung
- “Kondisi sebagian besar tidak berubah dari bulan lalu. Pengecualiannya adalah harga, yang terus meningkat, terutama didorong oleh biaya bahan bakar dan tenaga kerja. Permintaan tetap stabil.” — Transportasi & Pergudangan
- “Kondisi ekonomi tetap stabil. Aktivitas perbankan terus didukung oleh permintaan yang sehat dari nasabah komersial, meski perusahaan masih berhati-hati di tengah ketidakpastian suku bunga dan inflasi.” — Keuangan & Asuransi
- “Ketidakpastian mengenai dampak konflik Iran terhadap harga minyak, serta efek lanjutan terhadap konstruksi dan material lainnya. Kota ini memiliki sejumlah proyek modal yang masih menunggu dan sedang berjalan, yang akan terdampak.” — Administrasi Publik
- “Bisnis lebih kuat dari yang diperkirakan, mengingat sejumlah hambatan ekonomi yang masih membebani industri. Pasokan kayu semakin ketat, sementara tarif dan ketersediaan angkutan barang menjadi tantangan. Banyak kontraktor kami menolak keras kenaikan harga. Namun, prospeknya tetap positif hingga akhir 2026.” — Perdagangan Grosir
- “Bagi Federal Reserve, laporan ini memberikan sinyal beragam menjelang pertemuan FOMC September,” kata Andrew Sacher dari Bloomberg Economics dalam sebuah catatan. “Kontraksi

lapangan kerja mendukung sikap menunggu, sementara tekanan harga yang kembali meningkat membuat kemungkinan kenaikan suku bunga lain tetap terbuka.”

Laporan ketenagakerjaan pemerintah untuk Juli yang akan dirilis pada Jumat diperkirakan menunjukkan perekrutan yang solid sepanjang bulan tersebut. Ekonom memperkirakan nonfarm payrolls, yang mencakup perusahaan manufaktur maupun penyedia jasa, bertambah 80.000 pekerja.

Data yang dirilis pada Rabu menunjukkan penumpukan pesanan hanya tumbuh tipis. Namun, indikator impor dan ekspor meningkat ke level tertinggi sejak April.

Daly The Fed Soroti Potensi Langkah Agresif Demi Redam Inflasi

Kamis, 6 Agustus 2026 15:20 WIB

Catarina Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117511/daly-the-fed-soroti-potensi-langkah-agresif-demi-redam-inflasi/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of San Francisco Mary Daly mengatakan dirinya mendukung keputusan bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga pada pekan lalu. Namun, dia memperingatkan kemungkinan bahwa inflasi tinggi telah menjadi persoalan yang lebih luas sehingga dapat memerlukan tindakan lebih agresif dari pembuat kebijakan.

“Saya sepenuhnya mendukung keputusan untuk mempertahankan suku bunga pada Juli,” kata Daly dalam sebuah acara di Tokyo, Rabu (5/8).

Bos The Fed San Francisco itu mengatakan dirinya melihat dua kemungkinan skenario inflasi. Skenario pertama adalah inflasi mulai mereda, sementara skenario kedua adalah tekanan harga yang bertahan lebih lama. Kedua kondisi tersebut akan membutuhkan langkah kebijakan yang berbeda.

“Jawabannya adalah tetap waspada dan mencermati informasi yang masuk, tetapi juga harus sangat siap untuk mengambil tindakan,” ujarnya.

Pejabat The Fed pada pekan lalu memilih mempertahankan suku bunga, meski tiga pembuat kebijakan berbeda pendapat karena menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Daly tidak memiliki hak suara dalam Federal Open Market Committee (FOMC), komite penentu suku bunga The Fed, tahun ini. Namun, dia tetap berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan moneter.

Para pejabat The Fed masih terpecah mengenai risiko yang ditimbulkan tekanan inflasi dan cara mengatasinya. Sejumlah pejabat, seperti Daly, masih menilai dampak tarif, lonjakan harga minyak, dan pesatnya investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) kemungkinan bersifat terbatas dan pada akhirnya akan mereda. Sementara pejabat lainnya melihat indikasi bahwa inflasi dari faktor-faktor tersebut telah meluas ke sektor ekonomi lainnya.

Dua Skenario

Dalam pernyataannya, Daly memaparkan dua kemungkinan arah inflasi. Pada skenario pertama, yang menurut Daly masih menjadi kemungkinan paling besar, inflasi hanya berlangsung sementara sehingga The Fed dapat terus mempertahankan suku bunga pada level saat ini.

Namun, ia memperingatkan kemungkinan skenario kedua, di mana kenaikan harga akibat tarif impor, melonjaknya biaya energi, serta investasi AI yang terus berlanjut berakumulasi secara bersamaan. Jika itu terjadi, inflasi akan menjadi lebih luas dan persisten, sehingga menuntut tindakan yang lebih agresif dari The Fed.

Daly mengatakan pembuat kebijakan perlu memantau secara cermat kemungkinan terjadinya skenario kedua serta memperhatikan data yang masuk dalam beberapa pekan mendatang.

“Jika kita mendapati bahwa skenario kedua mulai terjadi, saya pikir pertanyaannya adalah, ‘mengapa melakukannya secara bertahap?’” katanya, merujuk pada kemungkinan kenaikan suku bunga. Dia menambahkan bahwa dalam kondisi tersebut, akan lebih baik jika kebijakan disesuaikan secepat mungkin.

Daly juga memperingatkan bahwa meskipun ekspektasi inflasi jangka panjang saat ini masih terjaga dengan baik, kenaikan lain di area tersebut—menyusul lonjakan yang terjadi setelah inflasi 2022—dapat terbukti semakin menyulitkan para pembuat kebijakan untuk mengembalikannya ke batas normal.

Petinggi The Fed Sinyalkan Kerek Suku Bunga Jika Inflasi Tak Reda

Kamis, 6 Agustus 2026 05:35 WIB

Enda Curran

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117449/petinggi-the-fed-sinyalkan-kerek-suku-bunga-jika-inflasi-tak-reda/2>

Bloomberg, Deputy Gubernur Federal Reserve Lisa Cook menegaskan kembali kesiapannya untuk menaikkan suku bunga jika inflasi tidak melambat. Ia memperingatkan bahwa para pembuat kebijakan mungkin tidak memiliki keleluasaan waktu untuk menunggu hingga inflasi kembali ke target 2%.

Meskipun Cook mendukung keputusan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil pada pertemuan kebijakan Fed bulan Juli, ia mengingatkan bahwa semakin lama inflasi berada di atas target bank sentral, semakin sulit tugas untuk mengendalikannya.

"Jika saya tidak segera melihat tanda-tanda disinflasi yang berkelanjutan, saya siap untuk bertindak," ujar Cook pada hari Rabu dalam sebuah pidato di acara di Alaska.

"Dengan inflasi yang berada di atas target selama lima tahun, risiko meningkat bahwa inflasi yang lebih tinggi dapat mengakar dalam perilaku penetapan harga dan upah, sehingga menciptakan persistensi yang jauh lebih sulit untuk kita atasi."

Pernyataan Anggota Dewan Gubernur The Fed ini senada dengan pidato yang disampaikan pada 15 Juli, yang memperjelas pandangannya bahwa suku bunga yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk meredam tekanan harga.

Para pembuat kebijakan telah mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% hingga 3,75% sepanjang tahun ini, meskipun semakin banyak pejabat yang mengisyaratkan bahwa Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga untuk mengembalikan inflasi ke level 2%.

Cook mengatakan ada kemungkinan bahwa memudarnya dampak tarif, potensi penurunan harga minyak, dan sedikit meredanya tekanan terkait lonjakan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu menurunkan inflasi dan meniadakan kebutuhan akan kebijakan yang lebih ketat.

Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utamanya tetap mengembalikan inflasi ke target Fed.

"Jika ada satu hal yang bisa Anda ingat dari pembicaraan ini, saya harap itu adalah komitmen teguh saya untuk memulihkan stabilitas harga," kata Cook. "Mengembalikan inflasi ke target—yang merupakan hal pertama dan terpenting—sangatlah krusial untuk mencapai mandat ganda yang diberikan Kongres kepada Fed."

AS Kembalikan US\$100 Miliar Tarif Impor yang Dibatalkan Mahkamah Agung

Kamis, 6 Agustus 2026 16:49 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-kembalikan-us100-miliar-tarif-import-yang-dibatalkan-mahkamah-agung>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengembalikan sekitar US\$100 miliar dana tarif impor yang sebelumnya dipungut di bawah kebijakan Presiden Donald Trump. Pengembalian dana ini dilakukan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar tarif tersebut.

Melansir Reuters (6/8), berdasarkan dokumen yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Selasa (5/8), pengembalian dana tersebut mencakup bea masuk beserta bunga yang telah dibayarkan importir.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa sekitar US\$100 miliar pengembalian dana telah diproses melalui sistem administrasi bea cukai dan selanjutnya dikirim ke Departemen Keuangan AS untuk dicairkan.

Hingga akhir Juli, nilai pengembalian tersebut telah mencapai lebih dari separuh total US\$166 miliar tarif yang dibatalkan Mahkamah Agung pada Februari lalu.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk secara sepihak mengenakan tarif terhadap barang impor dari negara mitra dagang. Dengan demikian, sebagian besar tarif berskala luas yang diberlakukan Trump dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Selama masa pemerintahannya, Trump menjadikan tarif impor sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan perdagangan dan hubungan luar negeri. Namun, kebijakan tersebut kerap menuai kritik, baik dari kalangan pelaku usaha maupun pengamat hukum.

Meski demikian, pengembalian dana tarif tersebut juga memicu perdebatan. Para pengkritik menilai dana itu hanya mengalir kepada perusahaan importir yang sebelumnya membayar bea masuk, bukan kepada masyarakat yang pada akhirnya ikut menanggung kenaikan harga akibat tarif tersebut.

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Greg Casar mengatakan seluruh dana pengembalian seharusnya diberikan kepada konsumen Amerika.

"Trump mengirimkan dana pengembalian kepada perusahaan, bukan kepada para pekerja. Setiap sen dari dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada konsumen Amerika," ujarnya.

Setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif tersebut pada Februari, Trump tidak menghentikan kebijakan proteksionismenya. Sebaliknya, ia meningkatkan tekanan dagang dengan menerapkan tarif sementara sebesar 10% menggunakan dasar hukum lain yang belum pernah digunakan presiden AS sebelumnya untuk mengenakan tarif impor.

Trump juga meluncurkan putaran baru tarif global berdasarkan Section 301 dalam Trade Act 1974. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengenakan tarif terhadap negara yang dianggap menjalankan praktik perdagangan tidak adil atau diskriminatif.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa tarif tetap menjadi instrumen utama dalam strategi perdagangan Trump, meskipun menghadapi tantangan hukum dan kritik dari berbagai pihak.

Brasil Kembali Turunkan Suku Bunga 25 Bps, Inflasi Melandai Jadi Pertimbangan

Kamis, 6 Agustus 2026 07:01 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/brasil-kembali-turunkan-suku-bunga-25-bps-inflasi-melandai-jadi-pertimbangan>

KONTAN.CO.ID - Bank Sentral Brasil kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) pada rapat kebijakan moneter Rabu (5/8/2026).

Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan membuka peluang penurunan suku bunga lanjutan pada pertemuan September mendatang.

Mengutip Reuters, Komite Kebijakan Moneter (Copom) Bank Sentral Brasil secara bulat memutuskan menurunkan suku bunga acuan Selic menjadi 14,00%. Level tersebut merupakan yang terendah sejak Maret 2025.

Sebanyak 38 dari 42 ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya telah memperkirakan bank sentral akan memangkas suku bunga sebesar 25 bps.

Keputusan ini memperpanjang siklus pelonggaran moneter yang dimulai sejak Maret 2026. Langkah tersebut didukung oleh tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meredanya tekanan inflasi, sehingga memberikan keyakinan lebih besar kepada pembuat kebijakan bahwa inflasi mulai terkendali.

Meski demikian, Bank Sentral Brasil belum memberikan sinyal pasti mengenai langkah kebijakan berikutnya. Copom menegaskan keputusan pada pertemuan September akan bergantung pada perkembangan data ekonomi yang masuk.

"Dewan akan terus memantau perkembangan kondisi ekonomi untuk memastikan kebijakan moneter tetap cukup ketat guna menjamin inflasi kembali menuju target," tulis Copom dalam pernyataan resminya.

Ekonom Santander Brasil Marco Antonio Caruso menilai, pernyataan terbaru bank sentral menunjukkan fokus pembuat kebijakan mulai bergeser, bukan lagi pada seberapa jauh suku bunga akan dipangkas, melainkan kapan siklus pelonggaran tersebut akan dihentikan.

"Bank sentral masih membuka peluang untuk pemangkasan suku bunga berikutnya, tetapi tidak memberikan komitmen bahwa langkah tersebut pasti dilakukan," ujar Caruso.

Sementara itu, Kepala Ekonom Quantitas Ivo Chermont menilai, nada pernyataan bank sentral sedikit lebih hawkish.

Menurutnya, Copom masih menyoroti ketatnya pasar tenaga kerja dan ketahanan ekonomi meskipun aktivitas ekonomi mulai melambat.

"Pesan utamanya adalah kondisi memang membaik, tetapi masih terlalu dini untuk menyatakan kemenangan atas inflasi," kata Chermont.

Ia memperkirakan, Bank Sentral Brasil masih berpeluang memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada September.

Namun, pasar kemungkinan akan mengurangi ekspektasi terhadap peluang penurunan suku bunga pada pertemuan November.

Dalam pernyataannya, bank sentral juga kembali menegaskan bahwa risiko inflasi masih cenderung mengarah ke atas.

Selain itu, otoritas moneter menyatakan terus mencermati belum stabilnya ekspektasi inflasi jangka panjang yang dapat memengaruhi pembentukan harga dan membuat proses penurunan inflasi menjadi lebih mahal.

Sejak rapat kebijakan Juni lalu, prospek ekonomi Brasil dinilai semakin kondusif bagi pelonggaran moneter.

Inflasi bergerak lebih rendah dari perkiraan, sementara sejumlah indikator aktivitas ekonomi menunjukkan perlambatan yang lebih jelas sehingga memperkuat prospek inflasi yang lebih terkendali.

Bank Sentral Brasil memproyeksikan inflasi tahunan sebesar 3,2% untuk horizon kebijakan 18 bulan yang kini bergeser ke kuartal I-2028, sama dengan proyeksi pada Juni lalu. Adapun target inflasi Brasil ditetapkan sebesar 3%, dengan batas toleransi masing-masing 1,5 poin persentase di atas dan di bawah target tersebut.

Untuk tahun 2026, bank sentral menurunkan proyeksi inflasi menjadi 5,1% dari sebelumnya 5,2%. Sementara proyeksi inflasi 2027 direvisi menjadi 3,8% dari sebelumnya 3,7%.

Sepertiga Ekspor Singapura ke AS Terdampak Tarif 12,5%, Nilainya Capai US\$ 7,4 Miliar

Kamis, 6 Agustus 2026 09:29 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/sepertiga-ekspor-singapura-ke-as-terdampak-tarif-125-nilainya-capai-us-74-miliar>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Singapura memperkirakan sekitar sepertiga eksportnya ke Amerika Serikat (AS), senilai S\$ 9,5 miliar atau sekitar US\$ 7,4 miliar, akan terdampak tarif baru sebesar 12,5% yang diberlakukan pemerintah AS mulai 24 Juli 2026.

Mengutip Reuters, Menteri Perdagangan Singapura Gan Kim Yong mengatakan tarif tersebut diterapkan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 dan akan memengaruhi sekitar sepertiga ekspor Singapura ke AS, termasuk produk instrumen optik serta produk kimia.

Namun, sejumlah komoditas utama tetap dikecualikan dari kebijakan tarif tersebut. Produk yang tidak dikenakan tarif meliputi energi dan produk energi, sebagian produk elektronik dan kedirgantaraan, serta semikonduktor dan produk farmasi.

Gan menjelaskan, pemerintah AS menyatakan tarif dikenakan karena Singapura belum memiliki undang-undang yang melarang impor barang hasil kerja paksa (forced labour).

Selain itu, Singapura juga belum memiliki Agreement of Reciprocal Trade dengan AS yang memuat komitmen untuk menerapkan aturan tersebut.

Meski demikian, Gan menegaskan tidak ada satu pun dari sekitar 60 negara mitra dagang AS yang memperoleh pembebasan penuh dari kebijakan tarif tersebut, termasuk Uni Eropa dan China, meskipun sebagian di antaranya telah memiliki aturan pelarangan impor barang hasil kerja paksa.

"Yang penting, tidak satu pun dari sekitar 60 negara tersebut memperoleh pengecualian penuh dari tarif ini," ujar Gan di hadapan parlemen.

Pemerintah Singapura juga kembali menegaskan tidak terdapat bukti bahwa negara tersebut terlibat dalam perdagangan barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Gan mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan secara cermat berbagai konsekuensi apabila harus menjalin perjanjian perdagangan timbal balik dengan AS.

Menurutnya, kesepakatan semacam itu kemungkinan tidak hanya mencakup larangan impor barang hasil kerja paksa, tetapi juga komitmen lain seperti pengendalian ekspor atau pembatasan perdagangan terhadap negara ketiga.

Sebagai salah satu pusat perdagangan global, Singapura memiliki nilai perdagangan barang dan jasa sekitar S\$ 2,5 triliun setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar S\$ 1,4 triliun berasal dari perdagangan barang.

Gan menilai, penerapan larangan impor terhadap barang tertentu dapat membawa implikasi yang signifikan bagi aktivitas perdagangan Singapura.

Sementara itu, berdasarkan data United States Trade Representative (USTR), Amerika Serikat mencatat surplus perdagangan dengan Singapura sebesar US\$ 3,6 miliar pada 2025.

Dolar Kanada Diproyeksi Stabil dalam Jangka Pendek, Berpotensi Menguat pada 2027

Kamis, 6 Agustus 2026 17:30 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-kanada-diproyeksi-stabil-dalam-jangka-pendek-berpotensi-menguat-pada-2027>

KONTAN.CO.ID - TORONTO. Dolar Kanada diperkirakan akan bergerak stabil dalam beberapa bulan ke depan sebelum mencatat penguatan moderat dalam waktu satu tahun.

Prospek tersebut didukung oleh mulai pulihnya kondisi ekonomi domestik Kanada, menurut hasil jajak pendapat Reuters terhadap para analis pasar valuta asing.

Survei Reuters yang dilakukan pada 31 Juli hingga 5 Agustus terhadap 34 analis valuta asing menunjukkan, proyeksi median memperkirakan dolar Kanada akan berada di kisaran 1,40 dolar Kanada per dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 71,43 sen AS dalam tiga bulan mendatang.

Angka tersebut tidak berubah dibandingkan proyeksi dalam survei bulan sebelumnya.

Sementara itu, dalam jangka waktu 12 bulan, mata uang Kanada diperkirakan menguat sekitar 2,6% menjadi 1,366 dolar Kanada per dolar AS, sedikit lebih lemah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang memperkirakan penguatan hingga 1,36.

Sarah Ying, Kepala Strategi Valuta Asing di CIBC Capital Markets, mengatakan pergerakan pasangan mata uang dolar AS terhadap dolar Kanada (USD/CAD) kemungkinan masih akan terbatas dalam beberapa bulan mendatang.

"Kami memperkirakan USD/CAD akan tetap bergerak dalam kisaran yang sempit karena aktivitas perdagangan selama bulan-bulan musim panas biasanya cenderung melambat. Selain itu, banyak katalis utama yang sebelumnya mendorong pergerakan pasar mata uang kini telah mereda," ujar Ying.

Menurut Ying, sejumlah faktor yang sebelumnya menggerakkan pasar valuta asing mulai kehilangan pengaruh. Faktor-faktor tersebut meliputi antusiasme terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI), sensitivitas pasar terhadap perang di Timur Tengah, serta kebijakan tarif Amerika Serikat.

Di sisi lain, selisih kinerja ekonomi antara Kanada dan Amerika Serikat juga mulai menyempit sehingga turut menopang nilai tukar dolar Kanada.

Perekonomian Kanada tercatat tumbuh 3,4% pada kuartal II, menjadi pertumbuhan triwulanan terbaik dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Sentimen Pasar Masih Berhati-hati

Meski prospek ekonomi membaik, pelaku pasar masih menunjukkan sikap hati-hati terhadap dolar Kanada.

Data menunjukkan para spekulan meningkatkan posisi jual (short position) terhadap dolar Kanada hingga menjadi yang terbesar di antara mata uang utama dunia. Sebagian besar peningkatan posisi tersebut terjadi menjelang keputusan Amerika Serikat bulan lalu yang memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap berbagai produk asal Kanada.

Howard Du, ahli strategi mata uang di TD Securities, mengatakan perbedaan arah kebijakan suku bunga kini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan dolar Kanada.

"Saat ini pasar masih memperkirakan Federal Reserve akan segera menaikkan suku bunga, kemungkinan pada pertemuan September mendatang. Sementara itu, Bank of Canada masih memiliki ruang untuk bersikap lebih sabar," kata Du.

Pasar Perkiraan Bank Sentral Kanada Tetap Tahan Suku Bunga

Pelaku pasar memperkirakan Bank of Canada (BoC) akan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,25% dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, berdasarkan data pasar swap, investor telah memperhitungkan kemungkinan hampir tiga kali kenaikan suku bunga hingga akhir 2027, seiring ekspektasi bahwa inflasi dan aktivitas ekonomi akan terus membaik.

Dengan kombinasi pemulihan ekonomi domestik, stabilisasi berbagai faktor eksternal, serta prospek kebijakan moneter yang masih hati-hati, dolar Kanada diperkirakan tetap bergerak stabil dalam jangka pendek sebelum berpotensi menguat secara bertahap dalam satu tahun ke depan.

Purbaya Rilis Skema Baru Bebas Bea Masuk Impor dari Jepang

Kamis, 6 Agustus 2026 20:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117565/purbaya-rilis-skema-baru-bebas-bea-masuk-impor-dari-jepang/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru yang memperluas komitmen penurunan tarif bea masuk atas barang impor dari Jepang melalui pembaruan skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 Agustus 2026. PMK ini sekaligus mencabut aturan lama, yakni PMK Nomor 50/PMK.010/2022 yang mengatur soal hal serupa.

Kebijakan tersebut mengakomodasi tambahan akses pasar, pengaturan tariff rate quota, dan penyesuaian fasilitas user specific duty free scheme yang belum diatur dalam regulasi lama.

Aturan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas berlakunya Protokol Perubahan IJEPA yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 32/2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).

Pemerintah menilai, aturan lama sudah tidak relevan lagi karena belum mengakomodasi tambahan komitmen akses pasar Indonesia hasil renegotiasi tersebut, termasuk skema kuota tarif (tariff rate quota) dan penyesuaian skema bebas bea khusus bagi pengguna tertentu alias User Specific Duty Free Scheme (USDFS).

"Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Jepang dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi," tulis Pasal 1 PMK 60/2026 tersebut dikutip Kamis (6/8/2026).

Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan struktur tarif bea masuk baru atas ribuan pos tarif (HS Code) barang impor dari Jepang, yang tercantum dalam Lampiran huruf A PMK ini. Tarif tersebut berlaku bertahap dalam enam periode, yakni 1 Agustus 2026 hingga 2031 dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan.

Skema penurunan tarif bertahap ini merupakan pola umum dalam perjanjian perdagangan bebas, yakni tarif bea masuk terus diturunkan setiap tahun hingga mencapai level akhir yang disepakati kedua negara.

Salah satu poin krusial dalam aturan ini adalah pengenalan skema tariff rate quota (TRQ) yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Skema ini membagi tarif menjadi dua jenis. Skema pertama ialah tarif preferensi in-quota: dikenakan untuk impor yang masih berada dalam batas kuota tahunan, sebesar Rp450 per kilogram. Skema kedua adalah tarif preferensi out-quota: dikenakan jika volume impor melebihi kuota tahunan, dengan tarif sebesar tarif bea masuk yang berlaku umum (bukan tarif preferensi).

Kuota tahunan yang ditetapkan dalam skema ini sebesar 8.500 ton per tahun. Pemotongan kuota akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW), sehingga pelaku usaha perlu memantau sisa kuota secara berkala agar tidak salah hitung tarif saat proses impor.

PMK ini juga mengatur penyempurnaan fasilitas user specific duty free scheme. Pemerintah menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% untuk impor bahan baku tertentu asal Jepang yang digunakan oleh pengguna yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan.

Untuk barang sisa tertentu hasil proses produksi, dikenakan tarif bea masuk sebesar 5,25% dengan batas volume maksimal 65% dari produksi barang sisa pada tahun sebelumnya.

Dalam aturan anyar tersebut juga ditegaskan apabila tarif bea masuk umum lebih rendah dibandingkan tarif preferensi IJEPA, maka tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk umum.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29%, Cek Negara-negara Tetangga

Kamis, 6 Agustus 2026 12:09 WIB

Hidayat Setiaji

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117490/ekonomi-indonesia-tumbuh-5-29-cek-negara-negara-tetangga/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II-2026. Memang melambat ketimbang kuartal sebelumnya yang mencapai 5,61% yoy, tetapi sudah di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan di kisaran 5,1%.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan sumbangan 53,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga juga masih tumbuh solid di 5,06% yoy pada kuartal II-2026, menandakan pertumbuhan di atas 5% selama tiga triwulan beruntun.

Kontributor kedua terbesar adalah Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, dengan andil 29,36% terhadap PDB. PMTB tumbuh 6,87% yoy pada kuartal II-2026, tertinggi dalam setahun terakhir.

Namun yang menarik untuk dicermati adalah konsumsi pemerintah. Meski perannya terhadap PDB relatif terbatas, di bawah 10%, tetapi pertumbuhannya masih tinggi. Ini menandakan peran pemerintah yang begitu vital dalam menggerakkan roda perekonomian, sesuatu yang sering disebut sebagai government led growth.

Pada kuartal I-2026, konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi yaitu 21,81% yoy. Kuartal berikutnya, ada perlambatan tetapi masih eksepsional dengan pertumbuhan 15,97% yoy.

Dengan batas maksimal defisit anggaran di 3% PDB, berbagai kalangan menilai seperti ini peran pemerintah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi akan makin memudar. Misalnya Ekonom Bank of America Corp Kai Wei Ang, yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tanah Air bisa melambat ke sekitar 5,2% pada paruh kedua 2026 karena dukungan fiskal yang berkurang.

“Kami menilai ada kebutuhan belanja fiskal yang lebih moderat untuk menjaga target defisit,” imbuh Radhika Rao, Ekonom Senior DBS Bank Ltd, seperti dikutip dari Bloomberg News.

Negara-negara Tetangga

Lantas bagaimana performa ekonomi Nusantara dibandingkan negara-negara tetangga? Apakah pertumbuhan ekonomi 5,29% cukup untuk membawa Indonesia menjadi yang terbaik?

Ternyata belum. Singapura, misalnya, mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ketimbang Indonesia.

Pada kuartal II-2026, PDB Negeri Singa tumbuh 5,7% yoy. Ini pun sudah melambat ketimbang kuartal sebelumnya yang naik 6,3% yoy.

Sektor manufaktur masih menjadi pendorong ekonomi utama di Singapura. Pada kuartal II-2026, sektor ini tumbuh 12,2% yoy.

“Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan produksi elektronik dan mesin seiring dengan tingginya permintaan terkait pengembangan semikonduktor untuk kecerdasan buatan (AI). Namun di sisi lain, sektor kimia dan biomedis mengalami kontraksi karena gangguan rantai pasok akibat konflik di Timur Tengah,” sebut laporan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

Bagaimana dengan Malaysia? Lagi-lagi Indonesia tidak bisa unggul, karena ekonomi Negeri Harimau Malaya tumbuh 5,8% yoy pada kuartal II-2026, menurut estimasi awal. Angka final akan diumumkan pada 14 Agustus mendatang.

Mengutip keterangan resmi Department of Statistics Malaysia (DOSM), pertumbuhan ekonomi kuartal II -2026 didukung oleh ekspansi di sektor jasa, manufaktur, pertambangan, serta konstruksi. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh masing-masing 5,4% yoy, 7,5% yoy, 10,2% yoy, dan 6,6% yoy.

“Secara umum, ekonomi Malaysia tumbuh 5,5% pada semester I-2026, sedangkan periode yang sama tahun lalu tumbuh 4,5%,” sebut keterangan DOSM.

Dibandingkan dengan Vietnam, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tidak ada apa-apanya. Sebab ekonomi Negeri Paman Ho tumbuh 8,39% yoy pada kuartal II-2026. Lebih impresif ketimbang kuartal sebelumnya yang tumbuh 7,94% yoy.

Sepanjang semester I-2026, ekonomi Vietnam melesat 8,18% yoy. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 7,63% yoy.

Konsensus Bloomberg menghasilkan median proyeksi pertumbuhan ekonomi Vietnam sepanjang 2026 di angka 7,3% yoy.

Han Teng Chua, Ekonom Senior DBS Bank, memperkirakan ekonomi Vietnam bisa tumbuh 8% sepanjang tahun ini. “Kami melihat sejumlah faktor utama seperti industri manufaktur berbasis ekspor, investasi asing, dan permintaan domestik yang solid akan mendukung ekonomi dalam bulan-bulan mendatang,” tegasnya, sebagaimana diberitakan Bloomberg News.

Airlangga Gaet Investasi China Melalui Kawasan Industri Madura

Kamis, 6 Agustus 2026 14:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117491/airlangga-gaet-investasi-china-melalui-kawasan-industri-madura/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia dan China menandatangani sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura.

Prosesi penandatanganan kerja sama mencakup MoU antara PT Wiraraja Madura International dengan Guangzhou Zhanjiang Industrial Transfer Cooperation Park Management Committee. Selain itu, penandatanganan Agreement on Joining the Guangdong ASEAN Industrial Park International Cooperation Alliance dengan Wiraraja Madura Industrial Estate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kedua negara memiliki program Two Countries Twin Parks (TCTP), yakni inisiatif kerja sama ekonomi strategis antara Indonesia dan China untuk membangun kompleks kawasan industri terpadu yang saling terhubung.

"Melalui kerja sama tersebut, sejumlah klaster industri dari China akan dikembangkan di Kawasan Industri Wiraraja Madura. Di antaranya industri coklat, matras, tekstil, hingga benang, serta berbagai sektor manufaktur padat karya lain," ujar Airlangga yang hadir menyaksikan penandatanganan MoU tersebut, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Pengembangan kawasan tersebut juga didukung percepatan penyelesaian perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta instansi pelayanan perizinan.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas kerja sama investasi kedua negara, serta membuka jalan bagi pengembangan kawasan industri modern di Kabupaten Bangkalan, Madura. Pada akhirnya, diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

"Pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai negara mitra strategis guna mempercepat pengembangan kawasan industri, dan membuka lapangan kerja," ujar Airlangga.

"Kawasan di Madura ini merupakan kawasan heavy industry Indonesia, Petrokimia (Gresik). Jadi nanti dengan adanya Kawasan Industri Bangkalan ini akan menjadi seimbang," lanjutnya.

Menurut Airlangga, ini akan melengkapi kerja sama antara Indonesia dan China yang selama ini telah berkembang melalui peningkatan investasi maupun perdagangan bilateral. Saat ini, Indonesia dan China juga sudah punya bilateral swap arrangement (Bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA) yang mencapai US\$ 50 miliar.

"Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada currency yang lain," jelas Airlangga.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sekaligus President Director Wiraraja Madura Industrial Estate Akhmad Ma'ruf Maulana, menyampaikan kawasan industri tersebut dirancang menjadi pusat manufaktur terpadu yang mendukung sektor industri, logistik, dan energi ramah lingkungan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Zhanjiang dan Indonesia terus meningkat. Pada 2025, nilai perdagangan antara Zhanjiang dan Indonesia mencapai 2,461 miliar yuan atau meningkat sebesar 6,3% dibanding tahun sebelumnya.

Hingga saat ini, tercatat 8 perusahaan asal Zhanjiang yang telah merealisasikan investasi di Indonesia melalui 12 proyek dengan total nilai investasi mencapai US\$370 juta, sementara 6 perusahaan Indonesia juga telah menanamkan modal di Zhanjiang.

Pertumbuhan Ekonomi Butuh Orkestrasi Antarlembaga

Kamis, 6 Agustus 2026 16:08 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/117520/pertumbuhan-ekonomi-butuh-orkestrasi-antarlembaga/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, tetapi jadi tiket untuk bisa 'naik kelas' menjadi negara berpendapatan tinggi. Tak heran jika pemerintah begitu ambisius mengejar angka-angka, yang di atas kertas, bisa jadi sangat menjanjikan.

Namun, sebagai proses, upaya untuk bisa naik kelas bukan perkara mudah. Banyak hal yang njlimet. Bukan cuma perlu diurai, tapi juga perlu diorkestrasi.

Sebab, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian atas kemampuan negara memproduksi barang dan jasa, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur yang memadai, serta iklim investasi yang mampu mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Kemarin (5/8/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% secara tahunan (year-on-year/YoY). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II-2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.552,1 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp3.576,2 triliun.

Di atas kertas, capaian pertumbuhan PDB ini masih tergolong baik. Namun, angka yang lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,61%, menunjukkan adanya perlambatan momentum. Sementara, pertumbuhan semester I-2026 secara kumulatif mencapai 5,45%.

Artinya, ekonomi Indonesia belum masuk fase kontraksi, tetapi mulai bergerak dari fase ekspansi yang sangat kuat pada awal tahun, ke arah pertumbuhan yang lebih moderat.

Apa penyebabnya? Mari kita mulai dari fakta yang tidak nyaman untuk bisa melihat perlambatan ini secara jernih.

Pertama, mesin pertumbuhan mulai kehilangan sebagian tenaganya.

- Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%, tetapi melambat dari 5,52% pada kuartal sebelumnya.
- Konsumsi pemerintah juga, meski tetap tinggi di 15,97%, tapi lebih rendah dari lonjakan belanja kuartal pertama yang sebesar 21,81%.
- Memang, investasi menunjukkan perbaikan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87%, naik dari 5,96% pada kuartal pertama.

Namun, jika melihat kontribusi terhadap pertumbuhan, konsumsi rumah tangga masih jadi penyumbang terbesar (2,67 poin persentase), disusul investasi (2,06 poin), dan konsumsi pemerintah (1,07 poin).

Artinya, konsumsi masyarakat masih jadi tulang punggung ekonomi dengan porsi sebesar 53,3% dari PDB Indonesia. Sayangnya kecepatan konsumsi mulai berkurang pada kuartal kedua ini.

Suasana pengunjung pusat perbelanjaan di Mal Kuningan City, Jakarta, Senin (13/4/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Sehingga, ketika mesin terbesar ekonomi mulai kehilangan tenaga, kemampuan ekonom untuk tumbuh tinggi secara berkelanjutan juga ikut terbatas. Terlebih, pada kuartal kedua ini tak ada daya dorong musiman seperti yang terjadi pada kuartal pertama: Ramadan, dan Idul Fitri.

Kedua, adanya kebocoran pertumbuhan melalui impor. Ekspor hanya tumbuh 4,13%, sementara impor tumbuh 8,82%. Dengan begitu, permintaan domestik meningkat, tapi sebagian besar dipenuhi oleh barang impor. Akibatnya, manfaat pertumbuhan tak sepenuhnya dinikmati oleh industri dalam negeri.

Hal ini terlihat pada defisit neraca migas yang melebar hingga mencapai US\$15,77 miliar, menggerus hampir seluruh surplus non-migas sebesar US\$19,35 miliar. Akhirnya membuat surplus perdagangan nasional menyusut menjadi hanya US\$3,58 miliar.

Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Faisal Rahman memperkirakan kinerja ekspor Indonesia masih akan melemah, sementara impor tetap meningkat seiring kuatnya permintaan domestik. Kondisi ini akan membuat kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan PDB semakin menyempit.

"Hambatan eksternal diperkirakan berasal dari perang dagang yang berkepanjangan, ketidakpastian geopolitik, serta pemulihan ekonomi China yang masih lemah," sebut Faisal dalam catatannya.

Ketiga, industri manufaktur belum benar-benar pulih. Kontribusi sektor ini mencapai 18,5% terhadap PDB, tapi pertumbuhannya hanya 4,52%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yang sebesar 5,04%.

Meski begitu, sektor konstruksi masih tumbuh 6,68%, perdagangan juga tumbuh 6,39%, serta listrik dan gas 10,81%. Sektor lainnya yang ikut ekspansif adalah akomodasi dan makanan-minuman. Dengan adanya ketimpangan antar sektor ini, terlihat bahwa transformasi ekonomi belum berlangsung secara menyeluruh.

Di samping itu, sektor manufaktur Indonesia belum sejalan dengan tren manufaktur dan peta industri global yang mulai mengarah ke sektor berbasis teknologi. Kondisi ini membuat posisi Indonesia belum masuk ke dalam rantai pasok nilai global, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Tak heran jika belanja pemerintah mengambil peran yang lebih besar demi menopang pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini. Belanja pemerintah jugalah mendorong pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang melonjak 10,6%. Sebagai catatan, pada kuartal pertama, sektor ini juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 13,14% secara tahunan.

Agar Pertumbuhan Merdu

Jika mengibaratkan capaian pertumbuhan sebagai simfoni atau alunan musik, agar merdu, maka tentu membutuhkan orkestrasi indikator makroekonomi: inflasi yang terkendali, kondisi fiskal yang sehat, serta stabilitas rupiah terjaga

Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antarlembaga otoritas yang memiliki wewenang untuk menjaga agar indikator-indikator tersebut tidak 'bernada' sumbang, alias tetap harmonis.

Faisal berpendapat, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga keseimbangan yang cermat antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Jika tekanan eksternal yang berlanjut berpotensi memperlebar defisit kembar (twin deficits), baik melalui peningkatan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) maupun pelebaran defisit fiskal.

Kondisi tersebut dapat memicu kembali sentimen risk-off, mendorong arus keluar modal asing, serta memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Risiko-risiko ini berpotensi membatasi kemampuan ekonomi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang lebih kuat ke depan," kata Faisal.

Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Press Conference Hasil Rapat KSSK, Senin (3/8/2026) (Bloomberg Technoz/ Mis Fransiska)

Inflasi yang rendah dan terjaga bisa memberikan kepastian bagi rumah tangga dalam mengelola konsumsi sekaligus bagi para pelaku usaha dalam menyusun rencana investasi mereka. Sebab, ketika harga bergerak terlalu cepat dari kenaikan upah, daya beli masyarakat jadi tergerus.

Selain itu, kenaikan yang sempat terjadi pada harga energi, membuat biaya produksi meningkat dan membuat dunia usaha cenderung menunda ekspansi.

Di saat yang sama, kesehatan fiskal jadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Ruang fiskal yang memadai akan memungkinkan pemerintah membiaya pembangunan infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial, hingga memberikan stimulus ketika ekonomi sedang menghadapi tekanan.

Tak kalah penting, stabilitas rupiah juga perlu dijaga. Meskipun kurs bukan komponen yang dihitung langsung dalam PDB, tapi perannya menjalar hampir ke seluruh mesin pertumbuhan ekonomi.

Pelemahan rupiah yang terjadi sepanjang tahun ini ikut menggebu pelaku usaha, dengan naiknya harga bahan baku dan barang modal impor yang masih dibutuhkan industri nasional. Alhasil, biaya produksi ikut naik.

Hal ini membuat dunia usaha dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga jual yang berpotensi menekan permintaan, atau menanggung kenaikan biaya dengan mengorbankan margin keuntungan. Akibatnya, dalam kondisi seperti itu, investasi baru cenderung tertahan, ekspansi pun melambat, dan penciptaan lapangan kerja ikut terdampak.

Lapangan Kerja

Bicara soal lapangan kerja, tentu ini menjadi salah satu indikator penting lantaran penopang ekonomi RI adalah konsumsi rumah tangga yang tentu saja mengandalkan pendapatan masyarakat. Tanpa pekerjaan yang layak, daya beli akan sulit meningkat, dan akhirnya mesin utama pertumbuhan ikut kehilangan tenaganya.

BPS juga mengabarkan data struktur ketenagakerjaan Indonesia pada hari yang sama dengan rilisnya data pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja bertambah 689 ribu dibandingkan Februari 2026, menjadi 220,23 juta orang pada Mei 2026. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat naik menjadi 155,41 juta orang, bertambah sekitar 497 ribu orang.

Sayangnya, meski data ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan dari sisi jumlah, tetapi belum cukup kuat dari sisi mutu pekerjaan.

Dengan komposisi pekerja informal masih dominan sebesar 59,3% dibanding pekerja formal 40,7%, meski segmen pekerja ini tumbuh dari 40,58% pada Februari 2026.

Komposisi pekerja formal dan informal per Mei 2026. (BPS)

Lapangan usaha yang menyerap para tenaga kerja ini juga datang dari sektor-sektor tradisional, yang bisa dibilang memiliki nilai tambah rendah.

Tiga sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terdiri dari pertanian sebesar 28,75%, perdagangan 17,8%, dan industri pengolahan 13,53%. Hampir 60% pekerja Indonesia masih terkonsentrasi di tiga sektor tersebut menggambarkan bahwa transformasi struktural ke arah pertumbuhan ekonomi berbasis jasa modern dan bernilai tambah tinggi terlihat masih berjalan lambat.

Penambahan tenaga kerja terbesar terjadi pada akomodasi dan makan minum sekitar 195 ribu orang, transportasi dan penyimpanan 121 ribu orang, jasa lainnya 110 ribu orang, serta pertanian 106 ribu orang. Sebaliknya, perdagangan kehilangan sekitar 128 ribu pekerja dan industri hanya menambah sekitar 9 ribu pekerja.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede menilai sektor seperti akomodasi, makanan, transportasi, dan jasa memang penting, tetapi sebagian pekerjaannya mudah masuk dan keluar, mempunyai skala usaha kecil, serta sangat dipengaruhi musim liburan dan konsumsi.

“Data [ketenagakerjaan] ini lebih menunjukkan kemampuan ekonomi menyediakan pekerjaan penyangga daripada keberhasilan menciptakan pekerjaan formal berproduktivitas dan berupah tinggi,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz.

Dia menambahkan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65% juga perlu dibaca bersama indikator lain. Sekitar 33,20% penduduk bekerja masih termasuk pekerja tidak penuh, sedangkan tingkat setengah pengangguran mencapai 7,28%. Artinya, sebagian orang memang tercatat bekerja, tetapi jam kerjanya belum mencukupi dan masih mencari tambahan pekerjaan.

Josua berpendapat, tambahan 9 ribu pekerja manufaktur tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah pekerja industri yang mencapai 20 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan produksi belum diterjemahkan menjadi penambahan pekerja secara berarti.

Sehingga, menurutnya, industri padat karya seperti makanan dan minuman, tekstil, pakaian, alas kaki, furnitur, elektronik, komponen otomotif, farmasi, dan alat kesehatan perlu mendapatkan paket kebijakan khusus.

“Berupa kepastian energi, percepatan pengembalian pajak, pembiayaan modal kerja, perlindungan dari impor ilegal, serta kemudahan memperoleh bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri,” kata Josua.

Di samping, pendidikan juga harus disusun bersama perusahaan berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang nyata, tak cuma di jenjang vokasi, tapi juga jenjang perguruan tinggi. Agar pendidikan tidak tercerabut dari realitas ekonomi dan kebutuhan industri, demi menopang pertumbuhan ekonomi dan membawa Indonesia 'naik kelas'.

Rupiah Ditutup Menguat di Rp17.918/US\$

Kamis, 6 August 2026 16:11 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117536/rupee-ditutup-menguat-di-rp17-918-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan Kamis (6/8/2026) dengan menyisakan penguatan 0,07% di posisi Rp17.918/US\$. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya sejak 23 Juli di Rp17.900/US\$ pada 09:24 WIB.

Penguatan rupiah didukung oleh sejumlah sentimen domestik, serta meredanya ketegangan di Timur Tengah yang membuat tekanan eksternal berkurang.

Harga minyak mentah relatif stabil di US\$79/barel, sementara indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama relatif stabil dan berada di 99,76.

Pergerakan rupiah dalam tiga hari terakhir, hingga Kamis sore (6/8/2026). (Bloomberg)

Meski begitu, kombinasi ini membawa pengaruh berbeda pada mata uang Asia. Sebagian menguat, dan sebagian lainnya melemah.

Won Korea Selatan berbalik arah dan menjadi yang terlemah di Benua Kuning. Di atasnya ada dolar Singapura, peso Filipina, rupee India, yen Jepang, dan yuan offshore. Sementara, baht Thailand menguat bersama dolar Taiwan, rupiah, dan ringgit Malaysia.

Disamping meredanya tekanan eksternal, sejumlah data ekonomi turut menopang posisi rupiah bertahan di zona hijau.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,29% secara tahunan, meski melambat, angka ini lebih tinggi dari proyeksi dalam konsensus ekonom dan analisis di 5,1%. Sehingga pasar menilai ekonomi Indonesia relatif tangguh dari perkiraan.

Sementara, inflasi Juli juga tercatat melandai 2,88% berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI), dan membuat pasar berekspektasi bahwa BI tidak akan buru-buru kembali mengambil langkah hawkish yang bisa menekan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, di pasar obligasi domestik terjadi penurunan yield pada hampir semua tenor. Aksi beli yang dilakukan investor di pasar obligasi ini juga menopang rupiah hari ini.

Meski rupiah kembali menguat ke level terbaiknya dalam hampir dua pekan, pelaku pasar belum sepenuhnya mengubah sikap jadi lebih agresif.

Investor juga sepertinya masih menanti konfirmasi dari data-data domestik berikutnya seperti cadangan devisa, dan perkembangan global dari kesepakatan AS-Iran, untuk memastikan apakah penguatan rupiah punya berkelanjutan atau hanya sementara.

Ekonom Soal Pencairan Rp20,5 T ke Daerah: Solusi Jangka Pendek

Kamis, 6 Agustus 2026 19:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117559/ekonom-soal-pencairan-rp20-5-t-ke-daerah-solusi-jangka-pendek/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom berpendapat langkah pemerintah pusat menambah suntikan anggaran senilai Rp20,5 triliun untuk 490 daerah yang mengalami kekurangan anggaran merupakan solusi jangka pendek namun tidak menjawab akar permasalahan daerah.

Diketahui, pemerintah pusat menambah anggaran pemerintah daerah (pemda) lantaran banyak wilayah yang mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Alih-alih melunasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan komponen Transfer ke Daerah (TKD), Presiden Prabowo Subianto disebut memutuskan untuk memberikan bantuan ke pemda yang berasal dari pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

“Bantuan ini [Rp20,5 triliun] pada dasarnya hanya mengatasi tekanan jangka pendek, bukan memperbaiki akar masalah,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet ketika dihubungi, Kamis (6/8/2026).

Yusuf menilai bantuan sebesar Rp20,5 triliun bukan solusi struktural atau jangka panjang untuk persoalan keuangan daerah. Dana tersebut lebih tepat dipandang sebagai bantuan darurat yang bersifat temporer untuk menahan tekanan fiskal yang muncul di banyak pemerintah daerah akibat penyesuaian alokasi TKD tahun ini.

Dia menjelaskan bantuan ini memang penting karena dapat menjaga kemampuan daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK serta memastikan layanan publik dasar tetap berjalan. Namun, kebijakan ini belum menyentuh persoalan mendasar dalam desain desentralisasi fiskal Indonesia.

Dia menilai, masalah keuangan daerah sebenarnya berasal dari beberapa persoalan yang saling berkaitan. Formula transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), masih perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal daerah dan beban belanja pegawai yang terus meningkat.

Di sisi lain, banyak daerah masih memiliki struktur belanja yang kurang fleksibel karena porsi belanja rutin cukup besar, sementara ruang untuk pembangunan dan investasi relatif terbatas.

“Ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian transfer, tekanan tersebut langsung terasa karena sebagian daerah belum memiliki kapasitas pendapatan yang cukup kuat untuk menjadi penyangga,” ujarnya.

Perlu Diwaspadai

Dalam jangka panjang, kata Yusuf, kebijakan semacam ini juga perlu diwaspadai karena dapat menciptakan ketergantungan baru jika daerah menganggap selalu ada dukungan tambahan ketika terjadi tekanan fiskal.

Pada saat yang sama, ruang fiskal pemerintah pusat juga terbatas karena dana tersebut berasal dari pos belanja nonkementerian lembaga yang tetap harus bersaing dengan kebutuhan nasional lainnya.

Di sisi lain, Yusuf berpandangan, bantuan ini khusus diambil dari pos belanja nonkementerian yang ditujukan untuk menutup kekurangan anggaran, terutama untuk membayar gaji ASN dan PPPK di daerah yang terdampak penyesuaian TKD tahun ini.

“Yang perlu dicermati adalah skalanya. Ketika sekitar 490 dari lebih dari 500 pemerintah daerah memerlukan bantuan agar tetap mampu memenuhi belanja wajib dan menjaga layanan publik, persoalannya tidak lagi bisa dijelaskan sebagai lemahnya pengelolaan APBD di masing-masing daerah,” tuturnya.

“Ini mengindikasikan bahwa formula transfer yang ada belum cukup mampu mengakomodasi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi di tingkat pusat.”

Cair Minggu Depan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bantuan akan dicairkan pekan ini atau paling lambat pekan depan.

“Itu bukan transfer ke daerah [TKD] tetapi bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil. Sekarang sedang diproses, paling lambat minggu depan [disalurkan]. Jadi tinggal administrasi aja,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).

Diketahui, pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp357,4 triliun pada semester I-2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi sebesar 11,2%. Saat itu realisasi TKD mencapai Rp402,5 triliun, imbasnya banyak daerah mengalami kekurangan anggaran. Terutama daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Purbaya mengatakan pemerintah melakukan monitoring terhadap daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan anggaran. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan akan memberikan sokongan terhadap keberlangsungan fiskal daerah.

“Kita hitung berdasarkan anggarannya dia dan kekurangan dia seperti apa. Kan bisa dideteksi itu anggarannya seperti apa, kemudian kita hitung kekurangan seperti apa sehingga mencukupi. Jadi [dana di] daerah harusnya bisa cukup. Enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi,” jelas Purbaya.

Dalam kaitan itu, Purbaya menyebut pemerintah akan menggunakan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk kucuran dana ke pemda tersebut. Dia memastikan penyaluran dana ke pemda tidak akan mengganggu penyaluran dana ke kementerian/lembaga (K/L).

“Tentunya ada yang dikurangi sedikit. Tapi dampak ke program kementerian/lembaga pasti hampir insignificant karena ini bukan diambil dari pos kementerian/lembaga,” tuturnya.

Keputusan Bendahara Negara ini berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (30/7/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengungkapkan ihwal penggajian PPPK yang belakangan menjadi keprihatinan pemda dapat dilunasi dengan pembayaran kurang bayar DBH.

Menurut data yang dipaparkan Tito, pemerintah pusat masih menunggak kurang bayar DBH TA 2024 ke 413 provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, daerah yang tidak memiliki kurang bayar DBH bisa diberikan tambahan (top-up) Dana Alokasi Umum (DAU).

Namun, Purbaya menyebut pelunasan kurang bayar DBH sangat bergantung pada kondisi fiskal negara. Di sisi lain, opsi untuk menambah DAU tidak akan dilakukan tahun ini melainkan pada APBN 2027.

"Kalau dikasih Rp1.000 triliun ya aman semua. Tetapi enggak gitu approach kami. Kami lihat kondisi keuangan kami seperti apa, dan ini sudah kebijakan Bapak Presiden untuk memberi bantuan dari pusat agar memastikan daerah cukup membayar kekurangan tadi," jelasnya.

Saling Melengkapi, Jateng-Kaltim Kantongi Potensi Ekonomi Kerja Sama Capai Rp20,2 Triliun

Kamis, 6 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/saling-melengkapi-jateng-kaltim-kantongi-potensi-ekonomi-kerja-sama-capai-rp202-triliun/>

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menjalin kerja sama berbagai sektor. Kerja sama ini memiliki potensi ekonomi mencapai Rp20,2 triliun.

Potensi ekonomi itu mencakup perdagangan, pangan, industri, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga dukungan terhadap proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama, di Odah Etam, Kompleks Kantor Jabatan Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Kamis (6/8/2026).

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Kemudian naskah kerja sama teknis oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, asosiasi, dan bupati/wali kota.

Potensi ekonomi yang mencapai Rp20,2 triliun tersebut merupakan agregasi berbagai bentuk potensi kerja sama, sehingga tidak seluruhnya merupakan transaksi tunai atau investasi baru dalam satu waktu.

Di sektor pangan, kerja sama tersebut membuka potensi perdagangan komoditas dari Jawa Tengah ke Kalimantan Timur, antara lain telur sekitar 778 ton, daging ayam 873 ton, bawang merah 321,6 ton, dan beras 6.119 ton, dengan potensi transaksi sekitar Rp237,75 miliar. Kerja sama juga mencakup pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan, dengan potensi nilai sekitar Rp2,1 triliun per tahun.

Pada sektor perindustrian dan perdagangan, terdapat potensi kerja sama sekitar Rp36 miliar per tahun. Di sektor kelautan dan perikanan, kerja sama juga diarahkan untuk memperkuat perdagangan dan rantai pasok dengan nilai sekitar Rp2,238 miliar per tahun.

Kerja sama pariwisata dan ekonomi kreatif juga memiliki potensi yang baik, dengan estimasi transaksi langsung sekitar Rp21 miliar per tahun, kemudian multiplier effect sektor pariwisata sekitar Rp36 miliar per tahun.

Dari sisi BUMD, salah satu kerja sama yang memiliki potensi aktivitas bisnis terbesar adalah sinergi Bank Jateng dengan Bank Kaltimara, dengan potensi sekitar Rp15 triliun per tahun.

Ada juga kerja sama Jamkrida Jateng dengan Jamkrida Kaltim, melalui skema co-guarantee untuk proyek di IKN. Total proyeksi nilai proyek yang didukung mencapai sekitar Rp1,34 triliun, dengan proyeksi imbal jasa penjaminan sekitar Rp3,452 miliar per tahun.

Gubernur Ahmad Luthfi berharap, perjanjian kerja sama tersebut segera direalisasikan kegiatannya, sehingga dengan adanya keterbatasan fiskal dan geopolitik dunia, tetap bisa melakukan upaya-upaya pembangunan wilayah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan, kerja sama itu merupakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan saling melengkapi antara Jateng dan Kaltim, di mana Kaltim memiliki sumber daya alam, sedangkan Jateng memiliki industri pengolahan, UMKM, dan sebagainya.

“Ini terobosan luar biasa dan mudah-mudahan juga bisa dicontoh di provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Supaya kita tidak tergantung dengan APBN ataupun dana transfer pusat ke daerah,” katanya.

Salah satu contoh Jawa Tengah dan Kaltim itu saling melengkapi, misalnya, terkait kebutuhan beras. Di Kaltim setidaknya hampir 10 ribu ton beras dipasok dari Jawa Tengah. Sebaliknya, industri di Jawa Tengah memerlukan pasokan batubara sebesar 1,5 juta ton, di luar untuk keperluan PLTU. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit atau CPO yang juga dikirim ke Jawa Tengah.

“Penduduk Kaltim ini hanya sekitar 4,2 juta jiwa, Jawa Tengah sampai 38 juta jiwa. Produksi batubara dan CPO kami melimpah. Jadi kita sama-sama saling melengkapi. Intinya bahwa ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul

Transaksi Capai Rp203,7 Juta, Blonjo Warung Tonggo Putar Ekonomi Desa

Kamis, 6 Agustus 2026

Penulis: Kontributor Kab Mgl, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/transaksi-capai-rp2037-juta-blonjo-warung-tonggo-putar-ekonomi-des/>

MUNGKID – Program Blonjo Warung Tonggo yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Magelang mencatat nilai transaksi lebih dari Rp203,7 juta hanya dalam waktu sekitar dua bulan pelaksanaan di tiga desa percontohan. Capaian tersebut mendorong Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyiapkan perluasan program ke seluruh kecamatan setelah mekanismenya dinilai benar-benar siap.

Hal itu mengemuka dalam rapat evaluasi Program Blonjo Warung Tonggo di Ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang, Rabu (5/8/2026).

Bupati menegaskan, rapat evaluasi tidak hanya bertujuan meninjau capaian program, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala sebelum implementasi diperluas.

“Saya memang meminta jangan diperluas dulu. Pastikan tiga desa percontohan ini SOP-nya benar-benar berjalan. Semua kendala kita rumuskan, semua solusi kita siapkan. Kalau sudah terbukti berhasil, baru kita duplikasi ke wilayah lain,” ujar Grengseng.

Tiga desa percontohan tersebut yakni Kelurahan Sawitan, Desa Mendut, dan Desa Deyangan. Menurutnya, ketiga wilayah itu harus menjadi model pelaksanaan yang mampu menjawab berbagai persoalan teknis sebelum diterapkan di seluruh Kabupaten Magelang.

Grengseng juga mengapresiasi penyajian hasil evaluasi yang berbasis data. Menurutnya, keberhasilan program harus dapat diukur melalui capaian yang terukur, bukan sekadar narasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai transaksi terus meningkat. Pada tahap awal, transaksi tercatat sekitar Rp18 juta, kemudian naik menjadi sekitar Rp73 juta. Secara akumulatif, selama sekitar dua bulan 10 hari pelaksanaan tercatat 5.483 transaksi dengan nilai mencapai Rp203.706.948.

“Ini menurut saya luar biasa. Mengabaikan semua kendala yang masih ada, angkanya sudah menunjukkan hasil. Ini baru melibatkan sekitar 1.400 ASN. Artinya, potensinya masih sangat besar,” katanya.

Ia menilai, apabila seluruh ASN konsisten mengalihkan sebagian belanja rutinnya ke warung di sekitar tempat tinggal, dampak ekonomi yang tercipta akan semakin besar. Dengan rata-rata belanja sekitar Rp80 ribu per ASN setiap bulan, perputaran uang di tingkat desa berpotensi meningkat hingga ratusan juta rupiah.

“Kalau ini bisa dioptimalkan, perputaran uangnya bisa berkali-kali lipat. Dampaknya langsung dirasakan pelaku usaha kecil di desa,” ujarnya.

Menurut Grengseng, Blonjo Warung Tonggo bukan sekadar program belanja, melainkan strategi memperkuat ekonomi lokal melalui perubahan perilaku konsumsi aparatur sipil negara (ASN). Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kehadiran ASN dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui aktivitas belanja sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang Edi Wasono menjelaskan, Blonjo Warung Tonggo diluncurkan pada 20 Mei 2026 dan hingga kini masih diterapkan di tiga desa percontohan.

Menurutnya, evaluasi dilakukan atas arahan Bupati sebelum program diperluas ke 21 kecamatan.

“Tujuan evaluasi ini untuk memastikan pelaksanaan di tiga desa benar-benar siap. Kalau semua sudah baik, baru program diperluas sehingga implementasinya lebih efektif,” jelasnya.

Edi menambahkan, selama dua bulan 10 hari pelaksanaan efektif, sistem mencatat 5.483 transaksi dengan total nilai lebih dari Rp203,7 juta. Capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa masyarakat dan ASN mulai merespons program tersebut.

Ia optimistis, setelah implementasi di tiga desa disempurnakan dan diperluas ke seluruh kecamatan, Blonjo Warung Tonggo tidak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang menghidupkan warung-warung kecil, memperkuat UMKM, serta menjaga perputaran uang tetap berada di Kabupaten Magelang.

Ekonomi Jateng Tumbuh 5,71 Persen, Lampaui Nasional 5,29 Persen

Kamis, 6 Agustus 2026 18:16 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/ekonomi-jateng-tumbuh-571-persen-lampaui-nasional-529-persen>

Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,71 persen pada triwulan II 2026. Angka itu mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jateng secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan II 2026 mencapai 5,71 persen.

Capaian tersebut lebih tinggi 0,42 poin persentase dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen pada periode yang sama.

Tak hanya secara tahunan, ekonomi Jawa Tengah juga mencatat pertumbuhan 1,72 persen dibandingkan triwulan sebelumnya atau secara quarter to quarter (q-to-q).

Sementara secara kumulatif semester I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan, capaian tersebut turut memperlihatkan besarnya peran Jawa Tengah dalam perekonomian regional maupun nasional.

BPS mencatat kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50 persen. Sedangkan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 8,19 persen.

Dengan kontribusi tersebut, Jawa Tengah menempati posisi sebagai kontributor perekonomian terbesar keempat secara nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2026 sekaligus menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang berada di atas capaian nasional. Selisih 0,42 poin persentase menjadi salah satu angka penting dalam melihat perkembangan ekonomi Jateng pada periode tersebut.

Capaian semester I yang tumbuh 5,80 persen juga menjadi gambaran perkembangan ekonomi Jawa Tengah sepanjang paruh pertama 2026.

Data BPS tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan ekonomi Jawa Tengah, mengingat kontribusi provinsi ini mencapai 14,50 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 8,19 persen terhadap perekonomian nasional.

Pengangguran Jateng Bertambah 15.530 Orang, Ini Data Terbaru BPS

Kamis, 6 Agustus 2026 15:43 WIB

Penulis: Iwan Arifianto, Editor: Deni Setiawan

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262276/pengangguran-jateng-bertambah-15530-orang-ini-data-terbaru-bps>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala BPS Jateng, Ali Said mengungkapkan, ada peningkatan jumlah pengangguran di Jawa Tengah mencapai 15.530 orang pada Mei 2026.

Angka pengangguran ini muncul dari penghitungan dibandingkan Februari 2026, jumlah angkatan kerja bertambah 31.900 orang dan jumlah penduduk bekerja sebanyak 16.360 orang.

“Sementara itu jumlah pengangguran bertambah 15.530 orang,” beber Ali dalam Rilis Indikator Strategis Jawa Tengah secara virtual yang diakses Tribunjateng.com, Kamis (6/8/2026).

Angka itu, lanjut Ali, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026.

Hasil survei juga menunjukkan total pengangguran di Jawa Tengah pada Mei 2026 mencapai 960 ribu orang, sementara orang yang bekerja mencapai 21,4 juta orang.

"Dari 100 angkatan kerja, ada empat orang menganggur," terangnya.

Ali merinci, penduduk usia kerja di Jawa Tengah mencapai 30,3 juta orang atau bertambah 87.620 orang dibandingkan Februari 2026.

Dari total penduduk usia kerja tersebut, yang termasuk ke dalam angkatan kerja tercatat ada 22,36 juta orang. Artinya ada sekira 0,96 juta orang menganggur.

“Komposisi angkatan kerja pada Mei 2026 dari 21,4 juta orang penduduk pekerja ada sekira 960 ribu orang pengangguran,” tuturnya.

Dari 21,4 jumlah pekerja di Jawa Tengah, kata Ali, ada tiga sektor lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi meliputi pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 27,42 persen, industri 20,77 persen, serta perdagangan besar dan eceran 16,63 persen.

Kemudian, dari segi status pekerjaan, 35,80 persen dari penduduk bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan atau pegawai.

Sementara itu, hanya 3,20 persen penduduk pekerja berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

"Berdasarkan kategori, penduduk bekerja dibagi dua, yakni formal mencapai 39 persen dan informal 61 persen," katanya.

Selama Februari hingga Mei 2026, Ali melanjutkan, penduduk yang bekerja di sektor formal meningkat tipis sebanyak 5.960 orang.

"Utamanya didorong oleh meningkatnya status berusaha dibantu buruh tidak tetap tidak dibayar sebanyak 9.600 orang," katanya.

Ali mengungkapkan, dari segi tingkat pendidikan memiliki pola yang sama dengan periode survei sebelumnya.

Sebagian besar penduduk bekerja di Jawa Tengah lulusan SD ke bawah, yakni 8,83 juta orang atau 41,26 persen.

Pendidikan tinggi sekira 10,38 persen, yakni mereka yang tamat diploma 4, S1, S2, S3 dan diploma 1, 2, 3 yang masing-masing sebesar 8,11 persen dan 2,27 persen.

"Selama Februari-Mei 2026, proporsi penduduk bekerja alami peningkatan pada jenjang pendidikan SMA, Diploma 1, 2, serta diploma 4, S1 dan S3," ungkapnya. (*)